PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NO. 18 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(2) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Narasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII: PENUTUP.

b. Matrik RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan penjabaran Tahun II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka

(2) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi :
   a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Tahun 2019;
   b. Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019;
   c. Pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019;
   d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 untuk :

a. Bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbeda dari hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 hasil pembahasan dengan

Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dianggarkan setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR : 18

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Sesuai fungsinya, dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan.Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran RAPBD selanjutnya. Untuk itu, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Pangkalan Bun, 29 Juni 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar xi
Daftar Diagram xii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-8
1.4. Sistematika Dokumen RKPD I-11
1.5. Maksud dan Tujuan..... I-12
1.5.1. Maksud..... I-12
1.5.2. Tujuan..... I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Kondisi Umum daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografi II-1
2.1.2. Aspek Demografi II-14
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-19
2.1.4. Fokus Kesejahteraan Sosial II-29
2.1.5. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga II-35
2.2. Aspek Pelayanan Umum II-36
2.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar II-36
2.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.... II-36
2.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan..... II-66
2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-78
2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... II-80
2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-93
2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi II-99
2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-101
2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-104
2.4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-106
2.4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar..... II-218
2.4.3. Penunjang Urusan Pemerintahan II-332
2.4.4. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan II-469

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah II-317
2.5.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-317
2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-318

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Evaluasi Kinerja Ekonomi Daerah Tahun 2016 ..... III-1
3.1.2. Gambaran Kinerja Ekonomi Daerah Tahun 2019..... III-16
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-22
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-23
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-27
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-33

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Visi dan Misi Pembangunan IV-2
4.2. Tujuan dan Sasaran IV-5
4.2.1. Tujuan..... IV-5
4.2.2. Sasaran IV-5
4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 ..... IV-6
4.3.1. Tema dan Strategi IV-6
4.3.2. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah..... IV-12
4.3.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Tahun 2019 ..... IV-19

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama VI-1
6.2. Indikator Sasaran VI-3

BAB VII PENUTUP VII-1

LAMPIRAN RINCIAN, PROGRAM DAN RINCIAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan	II-1
Tabel 2.2	Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat	II-2
Tabel 2.3	Kondisi Geologi Kabupaten Kotawaringin Barat	II-3
Tabel 2.4	Formasi Geologi Kabupaten Kotawaringin Barat	II-4
Tabel 2.5	Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman	II-6
Tabel 2.6	Suhu Udara rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat	II-6
Tabel 2.7	Kecepatan Angin rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat	II-7
Tabel 2.8	Hari Hujan dan curah Hujan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2016	II-7
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2013-2016	II-14
Tabel 2.10	Banyaknya Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Menurut Kecamatan .	II-15
Tabel 2.11	Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin	II-15
Tabel 2.12	Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk Menurut Kecamatan.....	II-17
Tabel 2.13	Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama	II-17
Tabel 2.14	Angkatan Kerja	II-18
Tabel 2.15	Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2016.....	II-19
Tabel 2.16	PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2012-2016	II-22
Tabel 2.17	PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2012-2016	II-23
Tabel 2.18	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 – 2016.....	II-25
Tabel 2.19	PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	II-28
Tabel 2.20	Indikator Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016	II-29
Tabel 2.21	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	II-33
Tabel 2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016.....	II-34
Tabel 2.23	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, 2012-2016	II-34
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2012-2017	II-35
Tabel 2.25	Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2012-2016.....	II-39
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012-2016	II-44
Tabel 2.27	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya	II-45
Tabel 2.28	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Jenis Permukaannya.....	II-45
Tabel 2.29	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya	II-46
Tabel 2.30	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kelas Jalan.....	II-46

Tabel 2.31 Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya II-47
Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang..... II-47
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2013 – 2017 ..... II-48
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2012 – 2016..... II-49
Tabel 2.35 Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2017 ..... II-50
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Penaggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat..... II-50
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016..... II-51
Tabel 2.38 Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2013-2017..... II-51
Tabel 2.39 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera..... II-52
Tabel 2.40 Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan..... II-52
Tabel 2.41 Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersedian Pangan (Beras) II-53
Tabel 2.42 Perkembangan Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Dan Luas Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 II-53
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 – 2016 ..... II-54
Tabel 2.44 Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat..... II-55
Tabel 2.45 Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2012-2016 .... II-56
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-56
Tabel 2.47 Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 – 2016 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah..... II-57
Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012-2016 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016..... II-58
Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2012 – 2017..... II-59
Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika..... II-59
Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 – 2017 ..... II-61
Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 2012-2017 ..... II-61
Tabel 2.59 Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 ..... II-68
Tabel 2.60 Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan 2012-2016 II-69
Tabel 2.61 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan Tahun 2013-2017..... II-70
Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata II-71
Tabel 2.63 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral II-72
Tabel 2.64 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Volume dan Nilai Ekspor Pertambangan Tahun 2012 – 2016 ..... II-73
Tabel 2.65 Kontribusi sektor Ketenagalistrikan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat..... II-73
Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Barat..... II-74
Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat..... II-75

Tabel 2.68	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2012 – 2016	II-75
Tabel 2.69	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat	II-79
Tabel 2.70	Capaian kinerja Urusan Pertanian di Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2012 -2016	II-79
Tabel 2.71	Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2017	II-81
Tabel 2.72	Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Peternakan di Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2017	II-82
Tabel 2.73	Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-84
Tabel 2.74	Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Di Kabupaten	II-86
Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Target di RPJMD Tahun 2012 - 2016	II-87
Tabel 2.76	Indikator Kinerja Urusan Pariwisata berdasarkan RPJMD 2012-2016 .	II-91
Tabel 2.77	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2012-2016.....	II-92
Tabel 2.78	Angka Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2012-2016 (000)	II-93
Tabel 2.79	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya Tahun 2012 – 2016.....	II-93
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2012 - 2016	II-94
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2013 – 2017.....	II-96
Tabel 2.82	Rasio Ketersediaan Daya Listrik.....	II-98
Tabel 2.83	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Tahun 2012-2016	II-98
Tabel 2.84	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran dan Penginapan Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.85	Angka Kriminalitas Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-100
Tabel 2.86	Jumlah Dan Jenis Perda Yang Mendukung Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat	II-100
Tabel 2.87	Perkembangan Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 ..	II-101
Tabel 2.88	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa 2012-2016.....	II-101
Tabel 2.89	Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2015 berdasarkan Indikator RPJMD 2012-2016.....	II-101
Tabel 2.90	Rasio Ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-103
Tabel 2.91	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012-2016.....	II-104
Tabel 2.91	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan	II-107
Tabel 2.92	Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2017.....	II-111
Tabel 2.93	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2017	II-120
Tabel 2.94	Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2017	II-124
Tabel 2.93	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2017	II-165
Tabel 2.94	Jumlah TPS Di Kabupaten Kobar Tahun 2017	II-165
Tabel 2.95	Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2017..	II-166
Tabel 2.95	Jumlah Rekomendasi dan Izin Lingkungan dengan Dokumen UKL - UPL Tahun 2013 – 2017	II-173
Tabel 2.96	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017	II-173
Tabel 2.97	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Statusnya Tahun 2015 – 2017.....	II-177
Tabel 2.98	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2015 – 2017.....	II-177
Tabel 2.99	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2015 – 2017	II-178

Tabel 2.100 Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kelas Jalan Tahun 2015– 2017 ..... II-178
Tabel 2.101 Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2015 – 2017 ..... II-178
Tabel 2.102 Jumlah Infrastruktur Air Limbah Kabupaten Kotawaringin Barat II-181
Tabel 2.103 Capaian Pembangunan Drainase Tahun 2014 – 2017 ..... II-183
Tabel 2.104 Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2017 ... II-184
Tabel 2.105 Standar Pelayanan Minimal Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Kotawaringin Barat II-192
Tabel 2.106 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017 ..... II-197
Tabel 2.107 Capaian Sasaran Program Pengembangan Data Informasi II-198
Tabel 2.108 Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2017 ..... II-199
Tabel 2.109 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2016-2017 ..... II-211
Tabel 2.110 Data Perumahan Per Kecamatan II-212
Tabel 2.111 Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2017 ..... II-213
Tabel 2.112 Data Bencana Kebakaran Kab.Kobar Tahun 2017 ..... II-216
Tabel 2.113 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015 – 2017 ..... II-220
Tabel 2.114 Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2017 ..... II-221
Tabel 2.115 Jenis dan Realisasi Perizinan/ Non Perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 ... II-225
Tabel 2.116 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 ..... II-226
Tabel 2.117 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017 ..... II-226
Tabel 2.118 Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun Anggaran 2017 ..... II-227
Tabel 2.119 Jumlah Koperasi dan Statusnya Tahun 2016 – 2017 ..... II-233
Tabel 2.120 Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM Tahun 2016 – 2017 ..... II-233
Tabel 2.121 Penilaian Kondisi KSP/USP Tahun 2016 – 2017 ..... II-234
Tabel 2.121 Program/Kegiatan Urusan Koperasian Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2017 ..... II-234
Tabel 2.122 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil II-242
Tabel 2.123 Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2017 ..... II-243
Tabel 2.124 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2017 ..... II-249
Tabel 2.125 Kondisi Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2016 ..... II-250
Tabel 2.126 Data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ..... II-251
Tabel 2.127 Capaian Indikator Kinerja Ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ..... II-252
Tabel 2.128 Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2017 ... II-253
Tabel 2.129 Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017 II-265
Tabel 2.131 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2017 ..... II-272

Tabel 2.132 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2017 ..... II-273
Tabel 2.132 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016-2017 ..... II-284
Tabel 2.133 Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2016-2017 ..... II-285
Tabel 2.134 Program/Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2017 ..... II-285
Tabel 2.135 Jumlah Sistem Jaringan Transportasi Tahun 2016-2017 ..... II-289
Tabel 2.136 Jumlah Sarana Pendukung Keselamatan Lalu Lintas II-289
Tabel 2.137 Jumlah Kendaraan Yang di Uji II-289
Tabel 2.138 Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2017 ..... II-293
Tabel 2.139 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2017 ..... II-306
Tabel 2.140 Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017 ..... II-307
Tabel 2.141 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2017 ..... II-314
Tabel 2.142 Daftar Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Konflik / Sengketa Pertanahan II-315
Tabel 2.143 Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2017 ..... II-315
Tabel 2.144 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Yang Dilaksanakan Kesbangpol Tahun 2016 – 2017 .... II-317
Tabel 2.144 Capaian Indikator Kinerja UrusanKesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri Yang Dilaksanakan Satpol PP dan DAMKAR Tahun 2016 – 2017 ..... II-318
Tabel 2.145 Pelanggaran Perda di Kab.Kobar Tahun 2016 – 2017 ..... II-318
Tabel 2.147 Program/Kegiatan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2017 ..... II-319
Tabel 2.147 Capaian Sasaran AkuntabilitasKinerja Pemerintah Daerah II-333
Tabel 2.148 Capaian Sasaran Kualitas Layanan Publik II-333
Tabel 2.149 Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan Sekretariat Daerah II-334
Tabel 2.150 Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD II-346
Tabel 2.151 Capaian Indikator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 ..... II-353
Tabel 2.152 Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh BPKAD II-354
Tabel 2.153 Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah .. II-361
Tabel 2.154 Usulan dan Alokasi Formasi PNS Tahun 2010 – 2017 ..... II-367
Tabel 2.155 Komposisi Penerimaan PNS menurut Golongan Tahun 2010-2017 .... II-367
Tabel 2.156 Rincian Mutasi PNS Kotawaringin Barat Tahun 2017 ..... II-368
Tabel 2.157 Penyelengaraan Administrasi Kepangkatan PNS Tahun 2010-2017 ... II-368
Tabel 2.158 Penegakan Disiplin dan Pembinaan Aparatur Tahun 2016-2017 ..... II-368
Tabel 2.159 Penghargaan PNS berprestasi sampai dengan Tahun 2017 ..... II-369
Tabel 2.160 Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2017 II-369
Tabel 2.161 Data Base Kepegawaian Tahun 2016 – 2017 ..... II-370

Tabel 2.162 Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan II-370
Tabel 2.163 Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Inspektorat II-380
Tabel 2.164 Penjelasan Hambatan/Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat..... II-383
Tabel 2.165 Capaian Indikator Sasaran Desa Siaga Bencana..... II-386
Tabel 2.167 Capaian Indikator Sasaran Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi II-387
Tabel 2.168 Program / Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh BPBD II-388
Tabel 2.169 Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Selatan..... II-393
Tabel 2.170 Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kotawaringin Lama..... II-398
Tabel 2.171 Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kumai..... II-402
Tabel 2.171 Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Banteng..... II-405
Tabel 2.172 Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Lada.. II-411
Tabel 2.172 Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Utara II-415
Tabel 2.173 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2017..... II-421
Tabel 2.174 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2017..... II-422
Tabel 2.175 Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat..... II-434
Tabel 2.177 Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2017 ..... II-439
Tabel 2.179 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017 ..... II-448
Tabel 2.180 Capaian Sasaran Pelayanan Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan II-449
Tabel 2.181 Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2017 ..... II-450
Tabel 2.183 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016 – 2017 .... II-454
Tabel 2.182 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017 ..... II-457
Tabel 2.183 Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan Tahun 2017..... II-458
Tabel 2.184 Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2017..... II-459
Tabel 2.185 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017 ..... II-463
Tabel 2.186 Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan Tahun 2017..... II-464

Tabel 2.187 Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2017 ..... II-465
Tabel 2.188 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 ..... II-471
Tabel 2.189 Program/Kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2017 ..... II-474
Tabel 2.190 Realisasi Program dan Kegiatan DAK pada Dinas Perikanan Tahun 2017 ..... II-479
Tabel 2.191 Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultra dan Perkebunan II-483
Tabel 2.191 Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan II-490
Tabel 2.192 Program/Kegiatan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh DPKH II-490
Tabel 2.193 Potensi Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat..... II-498
Tabel 2.194 Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2017 . II-498
Tabel 2.195 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 – 2017 ..... II-499
Tabel 2.196 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman Sayur-Sayuran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 – 2017 ..... II-100
Tabel 2.197 Luas Areal Perkebunan Per Komoditi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017..... II-101
Tabel 2.198 Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Kategori Kepemilikan di Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2017 ..... II-101
Tabel 2.199 Produksi Perkebunan Per Komoditi di Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2017..... II-101
Tabel 2.200 Nama Perusahaan Perkebunan yang Beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 ..... II-101
Tabel 2.201 Pabrik CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017..... II-102
Tabel 2.202 Pabrik PKO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ..... II-102
Tabel 2.203 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat, Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit Tiap Kecamatan Tahun 2017..... II-103
Tabel 2.204 Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ..... II-103
Tabel 2.205 Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ..... II-103
Tabel 2.206 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Perkebunan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017..... II-104
Tabel 2.207 Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2017..... II-108
Tabel 2.208 Daftar Nama Desa yang Menggunakan Listrik II-124
Tabel 2.209 Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan..... II-131
Tabel 2.210 Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2017..... II-136
Tabel 2.211 Potensi Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat..... II-178
Tabel 2.212 Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2017..... II-189
Tabel 2.213 Capaian Indikator Untuk Jumlah Kunjungan Wisata (orang)..... II-224
Tabel 2.214 Jumlah Destinasi Wisata (Obyek)..... II-227
Tabel 2.215 Jumlah Event Tahunan Wisata Daerah (Kegiatan)..... II-235

Tabel 2.216	Nilai Investasi, Produksi, Bahan Baku dan Nilai Tambah Menurut Kelompok Industri Tahun 2016	II-250
Tabel 2.217	Nilai Investasi, Produksi, Bahan Baku dan Nilai Tambah Menurut Kelompok Industri Tahun 2017	II-254
Tabel 2.218	Perbandingan Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja IKM Menurut Jenis Industri Tahun 2016 dan Tahun 2017	II-260
Tabel 2.219	Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2017	II-260
Tabel 2.220	Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016- 2017	II-300
Tabel 2.221	Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013- 2017	II-302
Tabel 2.222	Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2017	II-313
Tabel 2.234	Data Transmigran dan Penempatannya	II-316
Tabel 2.235	Program/Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017	II-317
Tabel 2.236	Prioritas Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	II-318
Tabel 2.237	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	II-319
Tabel 2.238	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Dari Kebijakan Nasional/ Provinsi Dan Lingkungan Eksternal Lainnya	II-317
Tabel 3.1	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2019 Berdasarkan RPJMD Kab.Kotawaringin Barat 2017-2022	III-1
Tabel 3.2	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kotawaringin Barat 2015-2016 dan Proyeksi 2017-2019	III-2
Tabel 3.3	Kontribusi Terkecil Sektoral dalam PDRB Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016	III-5
Tabel 3.4	Pergeseran Tipologi Sektoral Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016	III-6
Tabel 3.5	Nilai Inflasi Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat	III-9
Tabel 3.6	Nilai dan Persentase Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Tahun 2014-2018 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat (juta)	III-10
Tabel 3.7	Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2014 - 2019 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat (juta)	III-11
Tabel 3.8	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 – 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Harga Konstan (AHK) Kabupaten Kotawaringin Barat	III-12
Tabel 3.9	Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (AHK) Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat	III-13
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2019	III-14
Tabel 3.11	Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2016	III-16
Tabel 3.12	Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Analisis SWOT	III-19
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2019	III-26
Tabel 3.14	Realisasi dan Proyeksi /Target Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 - 2020	III-32
Tabel 4.1	Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi dan Daerah Tahun 2019	IV-20

Tabel 5.1	Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung PD Tahun 2019	V-2
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022	VI-2
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kab./Kota	I-4
Gambar 2.1	Peta Geologi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	II-5
Gambar 2.2	Tingkat Kebakaran Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-5
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2017	II-16
Gambar 2.4	IPM Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2016	II-20
Gambar 2.5.	PDRB kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011-2016	II-24
Gambar 2.6.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016	II-26
Gambar 2.7.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2011-2016 (%).....	II-27
Gambar 2.8.	Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	II-28
Gambar 2.9.	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016.....	II-30
Gambar 2.10.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017 (%)	II-31
Gambar 2.11.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.....	II-32
Gambar 2.12.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	II-32
Gambar 2.13.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016.....	II-33
Gambar 2.14.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	II-34
Gambar 2.15.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Tahun 2012 – 2017.....	II-40
Gambar 2.16.	Cakupan Pertolongan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan Tahun 2012 – 2016	II-41
Gambar 2.17.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2012 – 2016.....	II-41
Gambar 2.18.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan Tahun 2012 – 2016.....	II-42
Gambar 2.19.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB Paru Tahun 2012 – 2016.....	II-42
Gambar 2.20	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Tahun 2012 – 2016.....	II-43
Gambar 2.21.	Cakupan Yankes Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2013-2017	II-43
Gambar 2.22	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2013-2017.....	II-44
Gambar 2.23	Kontribusi SubSektor Tanaman Pangan dan Peternakan terhadap PDRB Kab.Kotawaringin Barat (%)	II-67
Gambar 2.24	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	II-72
Gambar 2.25	Hasil Analisis Tipologi Klassen terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	II-77
Gambar 2.26	Pertumbuhan Ekonomi	II-78
Gambar 2.27	Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	II-80
Gambar 2.28	Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-83

Gambar 2.29	Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan	II-85
Gambar 2.30	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	II-86
Gambar 2.31	Realisasi Kontribusi Sektor Industri dan Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-87
Gambar 2.32	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat	II-91
Gambar 2.33	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%) kab.Kotawaringin Barat.....	II-92
Gambar 2.34	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-94
Gambar 2.35	Persentase Penumpang Penerbangan di Provinsi Kalimantan Tengah	II-95
Gambar 2.36	Persentase Penumpang Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Tengah	II-95
Gambar 2.37	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-97
Gambar 2.38	Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan	II-97
Gambar 2.39	Angkatan kerja dan Pengangguran.....	II-102
Gambar 2.40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja.....	II-102
Gambar 3.1.	Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2020.....	III-4

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Persentase Usia Wanita Kawin Pertama Kabupaten Kotawaringin Barat 2016	II-99
Diagram 2.2	Pencapaian Peserta KB Baru 2016	II-99
Diagram 2.3	Pencapaian Peserta KB Aktif 2016	II-100
Diagram 4.1	Persentase Usia Wanita Kawin Pertama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017	II-283
Diagram 4.2	Pencapaian Peserta KB Baru Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017	II-283
Diagram 4.3	Pencapaian Peserta KB Aktif Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017	II-284

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Adapun penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, hasil kesepakatan Musrenbang RKPDKabupaten Tahun 2019, Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2019 dan Musrenbang RKP NasionalTahun 2019.

RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan musrenbang;
e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah,
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Prosesperumusan RKPD KabupatenKotawaringin Barat Tahun 2019dapatdilihatsebagaimanagambarbagansebagaiberikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat

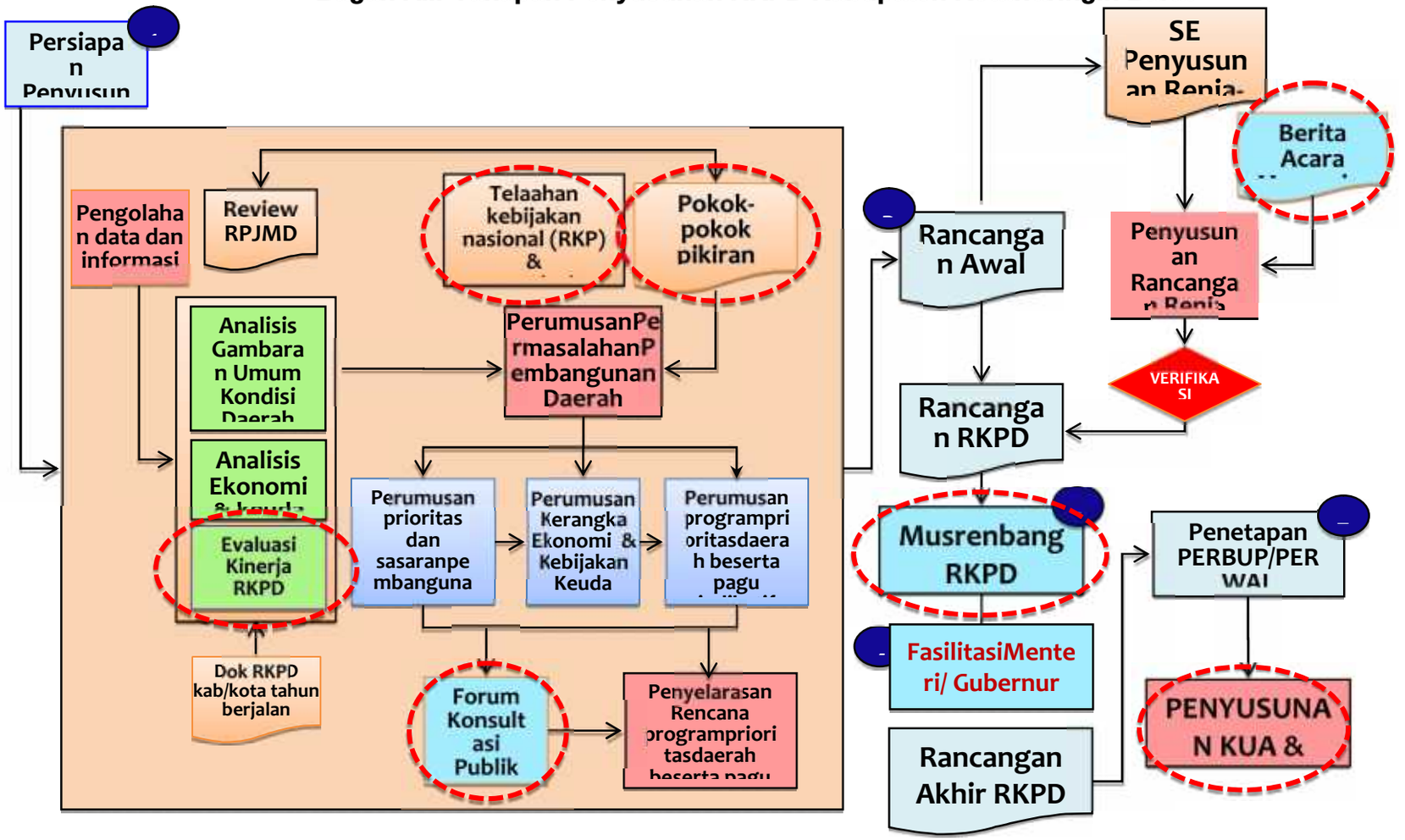

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
28. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor*;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115).
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2017 Nomor 1);
39. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor..... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

1.3. HubunganAntarDokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kabupatenyang berpedoman pada RPJMD Kabupaten tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional dan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebagai berikut:

A. RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: (i) Buku I dengan judul: ”Agenda Pembangunan Nasional”, (ii) Buku II dengan judul: ”Agenda Pembangunan Bidang”, dan (iii) Buku III dengan judul: ”Agenda Pembangunan Wilayah”.RPJMNasional tersebutmenjadiacuanpenyusunanRancanganRKPD Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional.

B. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

RPJMD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021. Tema RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah “Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah melalui Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas antar Wilayah”.
Program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 mengacu Visi dan Misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

1. PeningkatanKualitasPerencanaan Tata Ruang Wilayah,
2. PemerataanInfrastruktur Wilayah,
3. PeningkatanKualitasHidupMasyarakatPedesaan, Pesisirdan Pantai,
4. StabilitasEkonomi Daerah,
5. PeningkatanPendapatanMasyarakat,
6. PeningkatanKualitasReformasiBirokrasi,
7. PeningkatanPelayananPendidikandanKesehatanyangBerkualitas,
8. PengelolaanIndustriPariwisata,
9. Pengelolaan SDA SecaraBijaksanayangBerkelanjutan,
10. PeningkatanIntensifikasidanEkstensifikasiPAD.

C. RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat

Tema RKP Nasional pada Tahun 2019, yaitu “**Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, tema RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019adalah “**Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana**

Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah".

Adapun perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 merupakan penjabaran Visi: "Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas" dan Misi:

1. Memperkuattatapemerintahanyangbersih,efektif,demokratisdantransparan,
2. Meningkatkankualitashidupmanusiamelaluipendidikan,kesehatandanolahraga,
3. Mendorongpenguatankemandirianekonomiyangberbasispadapertaniandalamartiluas, kelautan,industrisertapengelolaanpotensidaerahdansumberenergidenganmemperhatikanlingkunganhidup,
4. Meningkatakankualitaskehidupanberagamadanbermasyarakat,
5. Mewujudkankondisimasyarakatyangaman,tentramdandinamis,
6. Melestarikansitusbudaya, kesenianlokaldanmasyarakatlainnyagunameningkatkunjunganwisata.

D. RENJA – PD

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2019 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2019, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2019, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2019,
2. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD 2019 yang disusun ke dalam rancangan Renja PD 2019,

3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya,
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD,
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan PD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD,
6. Memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. SistematikaDokumenRKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3 AspekPelayanan Umum
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasai RPJMD
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dana sasaran Pembangunan Daerah

2.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BABIII KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin BaratTahun 2019

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VIKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BABVII PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019disusun dengan maksud untuk :

a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019,
b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019.

1.5.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis.

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km^2 atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (KM^2)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2. Arut Selatan	2.400	22,31
3. Kumai	2.921	27,15
4. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah	**10.759**	**100,00**

Sumber:Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003, secara geografis Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1˚26’ - 3˚33’ Lintang Selatan, dan 111˚20’-112˚6’ Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1˚26’ - 3˚33’ Lintang Selatan, 111˚13’-112˚6’ Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

1. Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi;
2. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi;
3. Sebelah selatan adalah danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung air.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya petanian jika faktor lain mendukung.

Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan < 40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara.

Tabel 2.2 Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Luas (Ha)				
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	Jumlah
1	Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
2	Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
3	Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
4	Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
5	Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
6	Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
Jumlah		462.109,98	292.410,98	159.305,86	72.460,00	986.286,49
%		46,85	29,65	16,15	7,35	100

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

2.1.1.1. Keadaan Geologi

Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Kondisi Geologi

No.	Jenis Tanah	Tersebar di Daerah
1	Podsolik Merah Kuning	Tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai
2	Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol)	Di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama
3	Kompleks Regosol (Podsol)	Bagian timur Kecamatan Kumai
4	Aluvial	Aliran sunga Lamandau, Arut dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah Kecamatan Kumai
5	Organosol	Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan
6	Okisol (Lateritik)	Bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara

Rincian mengenaisusunan geologi Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Formasi Geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Formasi	Kecamatan						Jumlah	%
		Ktw. Lama	Arut Selatan	Kumai*	Arut Utara	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada		
1.	Batuan Terobosan Sintang	0	0	0	89,22	0	0	89,22	0,01
2.	Granit Mandahan	265,77	0	0	1.159,50	0	0	1.425,27	0,16
3.	Granit Sukadana	0	0	0	84.598,66	0	0	84.598,66	9,71
4.	Batuan GA Berapi	10.173,09	0	0	2.115,31	0	0	12.288,40	1,41
5.	Tonalit Sepauk	0	0	0	47.049,37	0	0	47.049,37	5,40
6.	Formasi Dahor	50.565,04	50.084,89	57.449,03	5.959,05	34.956,68	24.208,56	223.223,25	25,61
7.	Endapan Rawa	52.640,00	118.916,03	120.353,27	0	37.083,02	7.101,18	336.093,50	38,56
8.	Batuan Gunung api	0	48.533,61	0	108.479,87	792,87	0	157.806,35	18,11
9.	Alluvium	0	129,33	6.912,01	0	0	0	7.041,34	0,81
10.	Formasi Laut	0	0	1.997,15	0	0	0	1.997,15	0,23
JUMLAH		113.643,89	217.663,86	186.711,46	249.450,98	72.832,57	31.309,74	871.612,50	100,00

Sumber: Diolah dari Peta Geologi Kalimantan Tengah, Tahun 2004

** Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.*

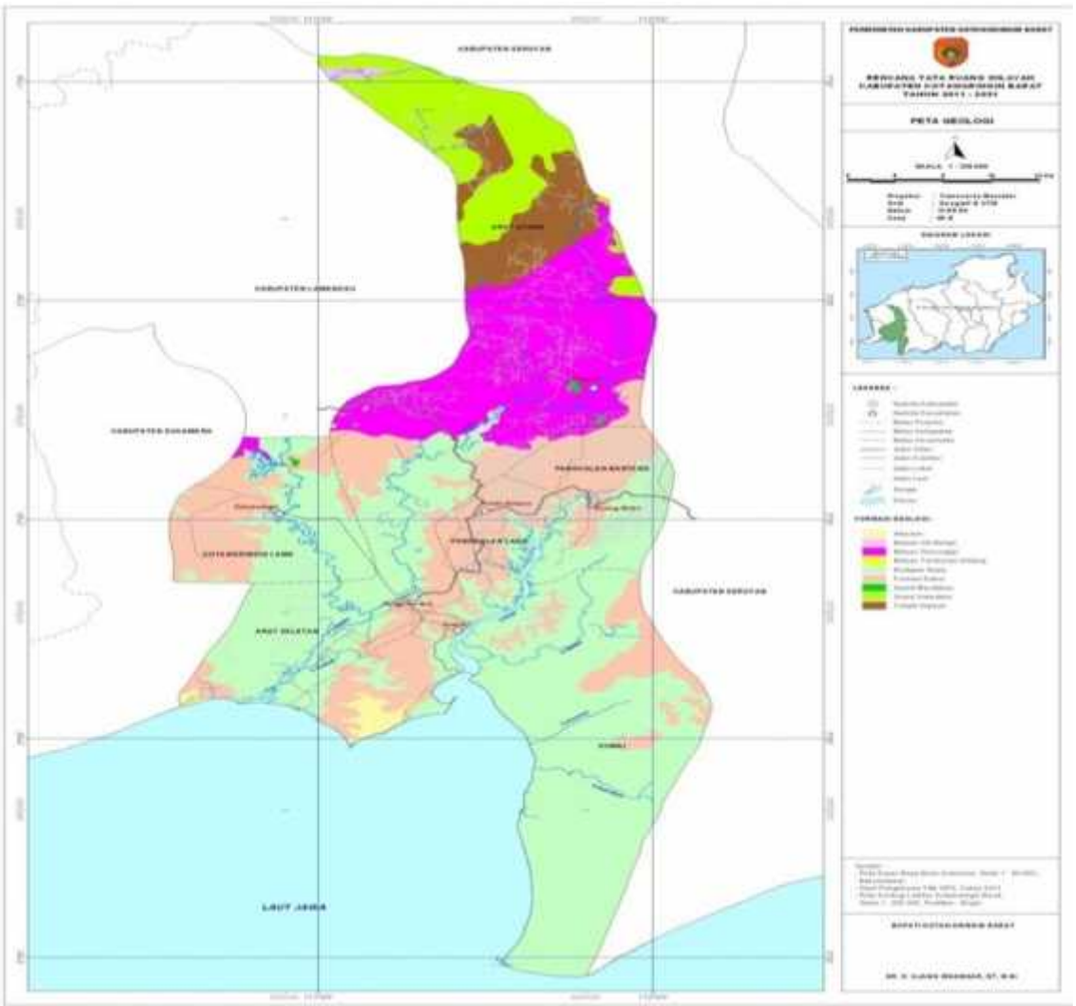

Gambar 2. 1: Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, terlihat bahwa formasi geologi terbanyak adalah formasi endapan rawa dan formasi dahor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha. Lebih lanjut mengenai persebaran susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

2.1.1.2 Hidrologi

Pada umumnya di Kalimantan sungai mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, selain tempat mencari nafkah berperan sebagai sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya.

Tabel 2.5 Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

2.1.1.4 Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan 202 hari. Rincian kondisi klimatologi Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6 Suhu Udara Rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2016

Bulan		Suhu Udara (°C)					
		2014		2015		2016	
		Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.
01.	32,9	34,4	22,2	32,6	23,2	23,7	32,8
02.	33,5	36,4	22,0	32,5	22,2	23,9	32,5
03.	32,7	34,8	22,0	32,2	23,2	23,9	32,8
04.	32,7	34,4	22,4	32,1	23,4	24,1	32,7
05.	33,6	35,8	20,0	32,4	23,6	24,2	33,3
06.	32,6	35,4	18,8	33,6	21,6	23,7	32,9
07.	32,5	33,4	21,0	33,8	20,2	23,5	33,0
08.	32,6	33,8	21,3	34,8	19,8	23,1	33,1
09.	31,4	35,5	21,0	35,2	20,2	23,6	33,1
10.	33,3	36,2	20,8	34,8	20,5	23,5	32,8
11.	32,5	35,4	22,0	35,2	22,0	23,8	32,3
12.	32,6	35,0	22,2	35,9	22,0	23,5	32,1

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2.7 Kecepatan Angin Rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2016

Bulan		Kecepatan Angin					
		2014		2015		2016	
		Maks.	Rata-rata	Maks.	Rata-rata	Maks	Rata-rata
01.	Januari	19	3,1	15	2,6	12	1,7
02.	Pebruari	11	2,5	15	2,8	13	1,7
03.	Maret	16	2,2	15	1,8	12	1,6
04.	April	12	1,6	12	1,6	12	1,6
05.	Mei	13	2,4	15	2,4	13	1,7
06.	Juni	18	2,4	13	2,8	16	1,9
07.	Juli	14	2,9	12	3,4	16	2,2
08.	Agustus	14	3,4	14	3,8	15	2,7
09.	September	22	3,6	14	4,0	18	2,4
10.	Oktober	16	3,3	14	2,7	15	2,1
11.	Nopember	12	2,4	20	1,7	12	1,6
12.	Desember	12	2,3	15	2,0	12	2,5

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2.8 Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2016

Bulan		Jumlah Hari Hujan			Curah Hujan (mm)		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
01.	Januari	12	29	23	139,2	219,8	331,6
02.	Pebruari	16	15	25	208,4	325,8	306,4
03.	Maret	24	24	23	423,8	263,6	347,4
04.	April	27	18	22	193,6	353,3	226,0
05.	Mei	23	17	21	321,7	239,8	472,0
06.	Juni	19	17	15	229,1	97,5	169,6
07.	Juli	10	11	18	38,6	56,4	199,6
08.	Agustus	15	5	11	132,1	12,6	64,0
09.	September	8	2	20	48,9	19,5	154,4
10.	Oktober	10	4	23	62,7	66,7	414,1
11.	Nopember	21	19	20	308,4	131,0	251,1
12.	Desember	25	20	23	200,4	511,0	375,8
Jumlah		**200**	**181**	**244**	**2 066,8**	**2 297,0**	**3 312,0**

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

2.1.1.3 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya (hutan lindung) mempunyai skor lereng, jenis tanah, curah hujan > 175 ; kemiringan > 40 % dan ketinggian > 500 m dpl. Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya, terdiri dari :

1) Hutan Lindung

Hutan lindung di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas hutan lindung persebarannya terletak disebagian Kecamatan Arut Utara dengan luas kurang lebih 8.754 hektar dan Pulau Kelapa, Pulau Samudera Kecil, Pulau Batimbul, Pulau Bengaris, Pulau Seluluk, dan Pulau Terusan Pulau Samudera di Desa Tanjung Putri.

2) Kawasan Bergambut dan Resapan Air

a) Kawasan Bergambut

Kawasan bergambut berada diantara Sungai Arut dan Sungai Lamandau Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas kurang lebih 132.927 hektar.

b) Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air di Kabupaten kotawaringin Barat seluas 28,991 hektar yang berada di Kecamatan Arut Selatan seluas 491 hektar, Kecamatan Kumai seluas 5000 hektar, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 6.000 hektar, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas 4.500 hektar, Kecamatan Arut Utara seluas 8.000 hektar dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 5000 hektar.

3) Kawasan Perlindungan Setempat.

a) Kawasan Sempadan Pantai.

Kawasan sempadan pantai ini membentang di bagian selatan wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat, mulai dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Kumai sampai wilayah pesisir selatan Kecamatan Arut Selatan. Panjang pantai ini kurang lebih 156 Km, sehingga luas lahan perlindungan sempadan pantai adalah 1.560 hektar.

b) Kawasan Sempadan Sungai.

Sungai-sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat yang perlu dilindungi adalah sungai-sungai besar seperti Sungai Kumai, Sungai Arut dan Sungai Lamandau. Perlindungannya sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri dan kanan sungai dan 50 meter bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak sungai tersebut melintasi lingkungan permukiman, maka areal perlindungannya adalah 10-50 meter di kiri-kanan sungai.

Sempadan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas kurang lebih 725 Km^2. Untuk DAS Arut luas sempadan sungai sekitar 250 Km^2,

sedangkan DAS Lamandau yang mengalir dariKabupaten Lamandau memiliki sempadan sungai yang harus dilindungi seluas 325 Km² dan DAS Kumai yang merupakan kumpulan anak - anak sungai memiliki luas 150 Km².

c) Kawasan Sempadan Danau/Rawa.

Danau-danau yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Danau Kenambui dan Sulung di Kecamatan Arut Selatan serta Danau Gatal dan Danau Masorayan di Kecamatan Kotawaringin Lama. Areal yang perlu dilindungi adalah selebar 50-100 meter dari bibir danau ke arah darat.

d) Kawasan air terjun.

Kawasan air terjun patih mambang desa keraya kecamatan kumai; dan

e) Kawasan kearifan lokal lainnya.

Kawasan kearifan lokal lainnya meliputi desa pasir panjang kecamatan arut selatan dan desa sekonyer Kecamatan Kumai.

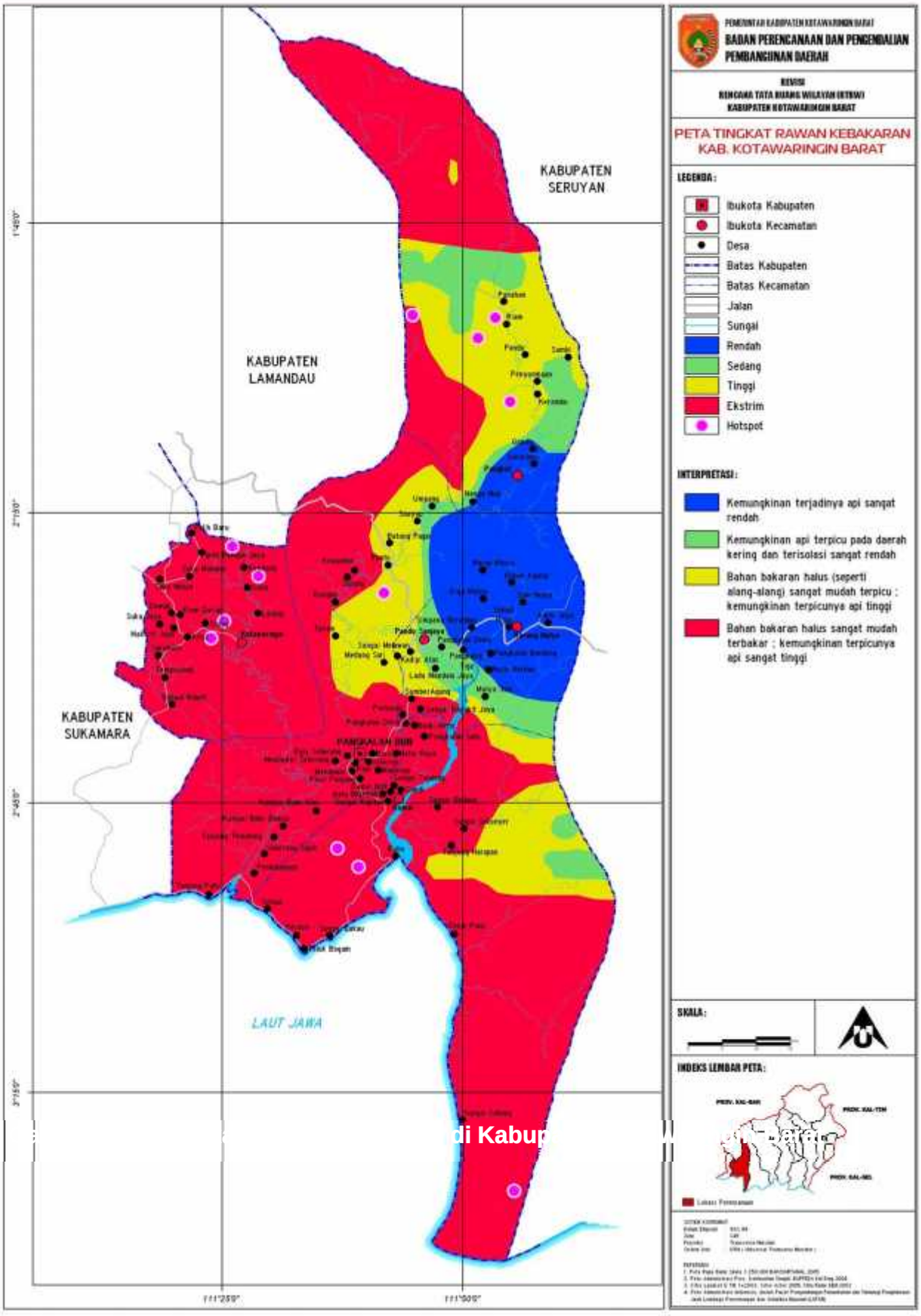

b. Kawasan Rawan Bencana.

a) Kawasan Rawan Kebakaran.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1.122 titik rawan atau seluas 205 km2 . Kawasan rawan kebakaran hutan berada di daerah pesisir dan muara sungai serta hutan disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama.

b) Kawasan Rawan Gelombang Pasang.

Kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai terutama Tanjung Pengujan Sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai Sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai;

c) Kawasan Rawan Banjir.

Kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Arut Selatan yaitu Desa Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang. di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu Desa Lalang, Rungun dan Kondang;

d) Jalur Evakuasi Bencana.

Jalur evakuasi bencana berada pda kawasan bandara baru di Kecamatan Kumai dan DesaKumpai Batu Atas di Kecamatan Arut Selatan; dan

c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.

a) Kawasan Suaka Alam.

Kawasan yang merupakan kawasan suaka alam di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. Taman Nasional Tanjung Puting secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Seruyan. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 266.546 hektar.
2. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 2.563 hektar.

b) Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan pelestarian alam yaitu Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau dan suaka alam laut (kawasan padang lamun yang berada di sepanjang garis pantai Desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas kurang lebih 35.822 hektar. Kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan sepagar. Daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang).

c) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

Kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Istana Kuning/Keraton Lawang Agung Bukit Indera Kencana, Astana Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan, Astana Al-Nursari, Makam dan Masjid Kyai Gede dan Makam Raja Kuta Tanah di Kecamatan Kotawaringin Lama. Di

Kecamatan Arut Utara yaitu Rumah Adat, Batu Patahan, Tiang Pantar, Balai Pinyang Laman, Batu Dahiang Burung, Sapundu, Rumah Betang Kuning, Batu Lancang, Tempayan Hermaung Yadana dan Monumen Iskandar Sambi.

d) Kawasan Lindung Geologi.

Sumber mata air terbesar berasal dari tiga sungai yang berada di Kabupaten kotawaringin barat yaitu, Sungai Kumai sepanjang 175 Km, Sungai Lamandau sepanjang 325 Km dan Sungai Arut sepanjang 250 Km. Untukkawasan mata air lainnya berada di kecamatan Arut Selatan meliputi tebing tinggi, Danau Sulung, Danau Seluluk, Danau Kenambui. Terdapat kawasan mata air yang berasal dari danau di Kecamatan Kotawaringin Lama (Danau Gatal, Masorayan, Terusan, Asam, Purun dan Batang Pagar) seluas 1,210 hektar.

e) Kawasan Lindung Lainnya.

1. Kawasan Perlindungan Plasma-Nutfah.
2. Kawasan lindung hutan plasma-nutfah merupakan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) seluas 266.546 hektar, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau seluas 35.822 hektar dan Tanjung Keluang seluas 2.563 hektar.
3. Kawasan Terumbu Karang dan Biota Laut yang di Lindungi.
4. Kawasan yang merupakan daerah Konservasi Laut Daerah (KKLD) terutama terumbu karang, ikan dan padang lamun yang dilindungi berada di Gosong Senggora dan Sepagar dan daerah perlindungan laut terutama ikan berada di Gosong Sebogor dan Tanjung Keluang.
5. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang di Lindungi.
6. kawasan koridor bagi jenis satwa dan biota laut yang di lindungi yaitu ikan, terumbu karang dan padang lamun di Gosong Senggora, Sepagar, Gosong Sebogor,dan Tanjung Keluang di Kecamatan Kumai;
7. Kawasan Cagar Biosfer.
8. Kawasan cagar biosfer yang terdiri dari zona inti/area inti, zona penyangga, dan zona transisi berada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
10. Kawasan pantai berhutan bakau yaitu di sungai mambang desa kubu hingga Desa Sungai Bakau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 6,973 hektar;
11. Kawasan Konservasi Perairan Sungai Atau Danau.
12. Kawasan konservasi perairan sungai atau danau, meliputi:

a) Kawasan konservasi perairan sungai Arut di sungai Desa Panahan seluas 1.500 hektar;
b) Kawasan konservasi perairan Danau Seluluk seluas 200 hektar;
c) Kawasan konservasi perairan Danau Gatal seluas 1.500 hektar;
d) Kawasan konservasi perairan Danau Masorayan seluas 250 hektar;
e) Kawasan Konservasi Gosong Senggora dan perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 13.032 hektar.
f) KawasanHutan Kota.

Kawasan hutan kota yang telah ditetapkan dengan Perda seluas 785,75 hektar, meliputi:

a) Kawasan Wisata Alam Kelurahan Sidorejo seluas 5 hektar;
b) Kawasan Pangkalan TNI AU seluas 713 hektar;
c) Hutan Kota Desa Purbasari seluas 55,75 hektar;
d) Kawasan Klinik Rehabilitasi Orang Utan seluas 12 hektar;
e) Hutan lindung dalam arti khusus Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan seluas 411 hektar;

g) Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai (penanaman turus jalan di Kecamatan Arut Selatan seluas 25 hektar); dan
h) Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan (penanaman turus jalan di Kota Pangkalan Bun seluas 10 hektar).
i) Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya.

Kawasan Padang Lamun yang berada di sepanjang garis pantai desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 210 hektar. Kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 200 hektar. Daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang.

j) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.

a) Kriteria Kawasan Budidaya.

Terdapat banyak kriteria untuk penentuan kawasan budidaya khususnya untuk budidaya pertanian dalam arti luas. Beberapa diantaranya adalah: Kepmentani No. 837/Kpts/UM/II/1980 dan No. 683/Kpts/UM/8/1981 dimana jumlah bobot nilai dari ketiga faktor fisik (lereng, jenis tanah dan curah hujan) haruslah berbobot < 124, dan juga kriteria *landsystem* yang berpedoman pada kesesuaian lahan dan berdasarkan kriteria fisik lahan.

b) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.

Kawasan hutan produksi diarahkan pemanfaatannya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan kayu serta keperluan industri, baik untuk tujuan lokal, nasional maupun ekspor. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari 3 kawasan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 286.485 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 53.582 hektar dan Hutan Produksi yang dapatdiKonversi (HPK) seluas 160.185 hektar.

c) Kawasan Hutan Rakyat (HTR).

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 668 hektar berada di Kecamatan Arut Utara yang meliputi Desa Nanga Mua, Desa Pangkut, Desa Sukarami, Desa Kerabu, dan Desa Gandis.

d) Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL).

Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain adalah kawasan dengan peruntukan kegiatan budidaya, kawasan pemukiman kota, desa, kawasan industri, pariwisata, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hutan rakyat, serta penggunaan lain selain diatas.

2.1.2 Aspek Demografi.

2.1.2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 286.714 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11,05 % dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.439.858 jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat menurut KecamatanTahun 2013- 2016

No	Kecamatan	Tahun				Laju Pertumb. 2013-2016
		2013	2014	2015	2016	
1	Kotawaringin Lama	18.232	18.695	19.157	19.615	7,59
2	Arut Selatan	108.378	111.658	114.952	118.256	9,11
3	Kumai	51.056	52.534	54.015	55.495	8,69
4	Pangkalan Banteng	35.525	37.231	38.993	40.806	14,87
5	Pangkalan Lada	30.686	31.589	32.494	33.400	8,84
6	Arut Utara	17.323	17.922	18.530	19.142	10,50
Kotawaringin Barat		244.900	261.200	278.141	286.714	9,93

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Pada pertengahan tahun 2016 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan 9,93 %, dari 278.141 jiwa pada tahun 2015 menjadi 286.714 jiwa pada tahun 2016. Rasio jenis kelamin dan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Banyaknya Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kotawaringin Lama	5.110	10.394	9.221	19.615	113,00
2	Arut Selatan	29.642	61.651	56.605	118.256	109,00
3	Kumai	11.991	29.040	26.455	55.495	110,00
4	Pangkalan Banteng	10.506	22.018	18.788	40.806	117,00
5	Pangkalan Lada	8.662	17.785	15.615	33.400	114,00
6	Arut Utara	4.954	11.004	8.138	19.142	135,00
Jumlah2016		**70.865**	**151.891**	**134.823**	**286.714**	**113,00**
2015		**68.600**	**147.292**	**130.849**	**278.141**	**113,00**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2016 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 113 penduduk laki-laki, dimana nilai perbandingan jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Arut Utara sebesar 135 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 135 penduduk laki-laki.

Tabel 2.11 Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Seks Rasio	% terhadap Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
0 – 4	14.369	13.675	28.044	105,00	9,78
5 – 9	13.040	12.536	25.576	104,00	8,92
10 – 14	12.465	11.866	24.331	105,00	8,49
15 – 19	12.000	10.862	22.862	110,00	7,97
20 – 24	12.349	11.044	23.393	112,00	8,16
25 – 29	14.339	12.949	27.288	111,00	9,52
30 – 34	14.740	13.276	28.016	111,00	9,77
35 – 39	14.434	12.718	27.152	113,00	9,47
40 – 44	12.921	10.831	23.752	191,00	8,28
45 – 49	10.174	8.282	18.456	123,00	6,44

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Seks Rasio	% terhadap Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
50 – 54	7.963	6.066	14.029	131,00	4,89
55 – 59	5.486	4.273	9.759	128,00	3,40
60 – 64	3.516	2.588	6.104	136,00	2,13
65 – 69	2.015	1.670	3.685	121,00	1,29
70 – 74	1.052	1.032	2.084	102,00	0,73
75 +	1.028	1.155	2.183	89,00	0,76
Jumlah	151.891	134.283	286.714	113,00	100,00

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Tabel di atas memperlihatkan penduduk kelompok umur 0 - 4 tahun lebih banyak dibanding penduduk kelompok umur 5 - 9 tahun. Hal ini mengindikasikan tingkat fertilitas pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2015.

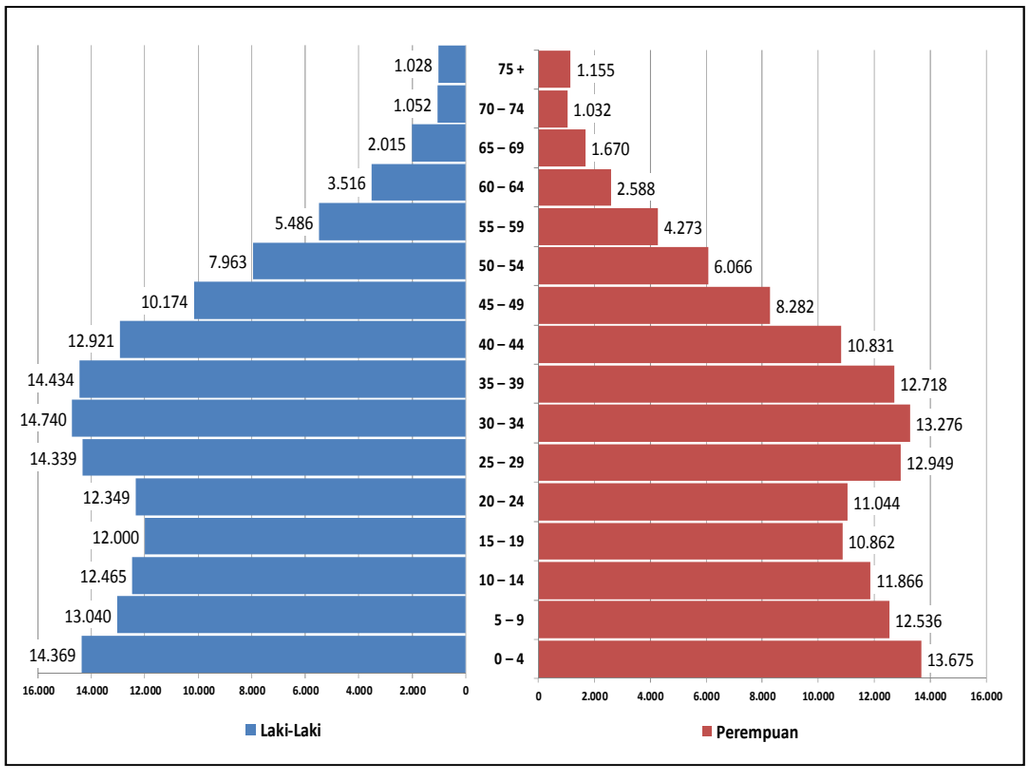

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2017

Dari piramida penduduk tersebut terlihat komposisi penduduk Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk muda/dewasa, kemudian kelompok penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja atau usia 15 tahun ke atas jumlahnya lebih besar dibanding penduduk perempuan di usia yang sama.

Tabel 2.12 Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)	Rata-rata Penduduk	
			Per Desa	Per Rumah Tangga
1	Kotawaringin Lama	16,00	1.153,82	3,63
2	Arut Selatan	49,00	5.912,80	3,78
3	Kumai	19,00	3.083,06	4,33
4	Pangkalan Banteng	31,00	2.400,35	3,62
5	Pangkalan Lada	146,00	3.036,36	3,66
6	Arut Utara	7,00	1.740,18	4,76
Rata-rata 2016		27,00	2.868,39	3,80
2015		26,00	2.778,72	3,81

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2016 sebesar 27,00 jiwa per km², Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pangkalan Lada yaitu 146,00 jiwa per km² dan disusul Kecamatan Arut Selatan 49,00 jiwa per km², Kecamatan Pangkalan Banteng 31,00 jiwa per km², Kecamatan Kumai 19,00 jiwa per km², Kecamatan Kotawaringin Lama 16,00 jiwa per km² dan terakhir Kecamatan Arut Utara 7,00 jiwa per km².

2.1.2.2 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebanyak 202.545 jiwa yang terbagi dalam 5 kegiatan utama seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jiwa	%	jiwa	%
I	***Angkatan Kerja***	**155.605**	74,21	**145.749**	**70,81**
1.	Bekerja	150.689	71,86	141.011	68,51
2.	Pengangguran	4.916	2,34	4.738	2,30
II	*Bukan Angkatan Kerja*	54.112	25,79	56.796	29,19
1.	Sekolah	18.981	9,05	18.135	8,81

2.	Mengurus Rumah Tangga	29.336	13,99	37.945	18,44
3.	Lainnya	5.765	2,75	3.992	1,94
Jumlah		**209.687**		**205.821**	

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Pada tahun 2015, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk dengan usia kerja sebanyak 209.687 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 74,21 % merupakan angkatan kerja, sedangkan 25,79 % bukan merupakan angkatan kerja. Dari 145.749 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan kerja, terdapat pengangguran sebanyak 4.738 orang atau 2,30 %. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut sudah berada dibawah target RPJMD 2017 yang sebesar 3,04 %.

Tabel 2.14 Angkatan Kerja

No.	Tahun	AK (Jiwa)	TPAK (%)	TKK (%)	TPT (%)
1.	2012	120.613	70,75	97,64	2,36
2.	2013	126.935	67,13	96,32	3,68
3.	2014	136.864	70,05	97,33	2,66
4.	2015	145.749	71,96	96,75	3,25
5.	2016	155.605	74,19	96,84	3,16
6	2017	145.749	70,81	96,75	2,30

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS) Tahun 2017
**LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 sebesar 286.714 jiwa terdapat Angkatan Kerja (AK) sebanyak 145.749 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,81 %, dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 96,75% serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,30 %. Progres Tingkat Pengangguran empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dari 2,36 % pada tahun 2012 menjadi 2,30 % pada tahun 2017. Proporsi jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2012 – 2014 berdasarkan perhitungan PDRB tahun dasar 2000 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15 Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2015

No.	Lapangan Pekerjaan	2013		2014		2015	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45.505	38,07	65.960	49,51	55.160	39,12
2	Pertambangan & Penggalian	13.662	11,43	3.724	2,80	2.595	1,84
3	Industri Pengolahan	9.848	8,24	6.049	4,54	8.891	6,31
4	Listrik, Gas & Air	513	0,43	240	0,18	0	0,00
5	Bangunan/ Konstruksi	8.628	7,22	8.801	6,61	9.824	6,97
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi	21.040	17,60	25.925	19,46	34.228	24,27
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	6.469	5,41	6.983	5,24	8.225	5,83
8	Keuangan, Perbankan& Jasa Perusahaan	1.132	0,95	1.352	1,01	2.761	1,96
9	Jasa-jasa	12.736	10,65	14.188	10,65	19.327	13,71
JUMLAH		119.533	100	133.222	100	141.011	100

Sumber: Data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Sektor Pertanian dalam arti luas masih mendominasi dalam penyediaan lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2015 yaitu sebesar 39,12 %, diikuti oleh sektor Perdagangan sebesar 24,27 % dan sektor Jasa-jasa sebesar 13,71 % yang menjadi tiga sektor utama sebagai penyedia lapangan usaha sebesar 77,10%.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggunakan metode baru ditunjukkan pada Gambar 2.4 berikut ini :

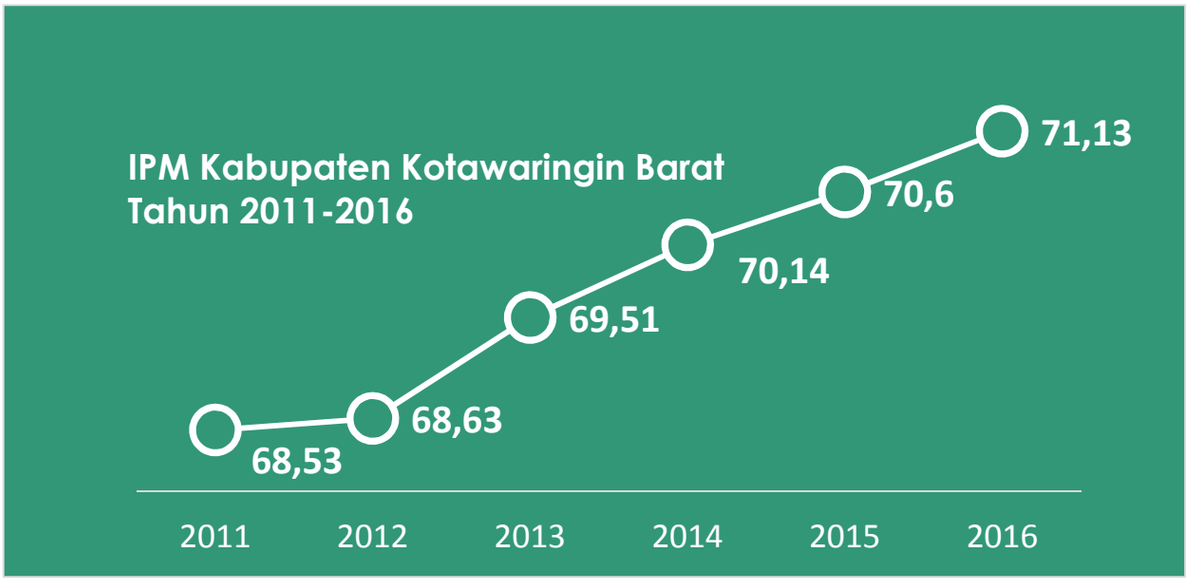

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Gambar 2.4 : IPM Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2016

b. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010 selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.16. Selanjutnya dalam Tabel 2.18. Dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan tren yang semakin meningkat. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2015 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi *leading sector* dalam pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan kontribusi sekitar 26,38 %. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesrar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 25,43 %, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 12,59 %.

Tabel 2.16 PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2012-2016

NO	LAPANGAN USAHA	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Juta Rp)	(%)		(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.732.704,7	29,80	2.918.476,2	28,32	3.261.355,0	27,70	3.449.449,6	26,38	3.775.183,9	26,06
B	Pertambangan dan Penggalian	165.002,9	1,80	180.262,9	1,75	169.228,7	1,44	179.041,2	1,37	199.976,1	1,38
C	Indsutri Pengolahan	2.223.038,1	24,25	2.557.543,4	24,81	3.028.657,3	25,72	3.324.772,6	25,43	3.674.222,6	25,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.453,0	0,04	3.545,1	0,03	4.204,9	0,04	6.322,9	0,05	6.854,6	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.574,3	0,08	8.350,2	0,08	10.009,4	0,09	11.492,4	0,09	12.468,1	0,09
F	Konstruksi	748.255,7	8,16	853.762,5	8,28	971.321,7	8,25	1.103.333,4	8,44	1.228.807,5	8,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.092.119,7	11,91	1.229.551,7	11,93	1.415.030,0	12,02	1.646.500,6	12,59	1.835.617,6	12,67
H	Transportasi dan Pergudangan	683.899,1	7,46	822.714,6	7,98	939.272,8	7,98	1.096.937,1	8,39	1.217.972,1	8,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115.987,7	1,27	132.236,8	1,28	145.588,9	1,24	171.901,2	1,31	200.246,8	1,38
J	Informasi dan Komunikasi	90.458,9	0,99	99.599,0	0,97	116.329,3	0,99	128.076,0	0,98	139.983,4	0,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	429.195,8	4,68	502.906,9	4,88	604.010,7	5,13	694.010,0	5,31	761.271,0	5,26
L	Real Estate	165.177,5	1,80	188.299,8	1,83	203.163,3	1,73	240.223,9	1,84	272.923,3	1,88
M,N	Jasa Perusahaan	4.115,3	0,04	4.877,2	0,05	5.732,5	0,05	6.432,2	0,05	6.939,1	0,05
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	283.222,5	3,09	331.890,5	3,22	375.914,0	3,19	419.649,9	3,21	470.965,6	3,25
P	Jasa Pendidikan	237.629,6	2,59	265.091,5	2,57	288.035,6	2,45	326.455,8	2,50	375.290,8	2,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.504,0	1,12	111.058,5	1,08	130.909,9	1,11	148.270,3	1,13	166.715,1	1,15
RSTU	Jasa Lainnya	84.621,5	0,92	96.714,7	0,94	106.819,2	0,91	122.369,4	0,94	140.483,2	0,97
	JUMLAH	**9.168.960,2**		**10.306.881,5**		**11.775.583,2**	**100**	**13.075.238,5**	**100**	**14.485.921,0**	**100**

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Tabel 2.17 PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2012-2016

NO	LAPANGAN USAHA	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.355.547,2	28,59	2.430.133,1	27,57	2.593.036,2	27,52	2.745.466,5	27,15	2.907.562,40	27,17
B	Pertambangan dan Penggalian	140.985,4	1,71	151.113,2	1,71	131.436,5	1,39	133.371,6	1,32	143.353,10	1,34
C	Indsutri pengolahan	2.061.316,3	25,02	2.217.996,9	25,16	2.391.937,9	25,38	2.558.264,8	25,30	2.690.480,40	25,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.894,1	0,05	4.239,3	0,05	4.673,0	0,05	5.447,9	0,05	5.750,20	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.152,4	0,09	7.505,5	0,09	8.221,6	0,09	8.896,2	0,09	9.343,10	0,09
F	Konstruksi	697.800,0	8,47	763.670,2	8,66	815.094,6	8,65	885.898,2	8,76	934.460,20	8,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.007.960,6	12,23	1.080.903,7	12,26	1.132.837,9	12,02	1.232.135,6	12,19	1.319.377,50	12,33
H	Transportasi dan Pergudangan	646.977,0	7,85	737.655,2	8,37	775.545,3	8,23	829.053,3	8,20	884.708,50	8,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.906,5	1,21	107.934,4	1,22	118.108,0	1,25	128.555,8	1,27	139.756,10	1,31
J	Informasi dan Komunikasi	88.771,0	1,08	94.447,0	1,07	102.192,5	1,08	110.037,5	1,09	118.590,00	1,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	367.448,7	4,46	404.316,9	4,59	468.437,7	4,97	515.071,9	5,09	536.083,90	5,01
L	Real Estate	143.252,0	1,74	156.668,6	1,78	170.990,5	1,81	186.011,3	1,84	198.148,90	1,85
M,N	Jasa Perusahaan	3.672,6	0,04	4.036,3	0,05	4.357,3	0,05	4.666,2	0,05	4.859,70	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	242.866,1	2,95	259.908,4	2,95	287.129,9	3,05	315.723,4	3,12	331.239,20	3,1
P	Jasa Pendidikan	205.619,4	2,50	219.004,2	2,48	234.213,2	2,49	252.615,9	2,50	263.906,90	2,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91.312,6	1,11	96.579,9	1,10	101.046,6	1,07	110.359,1	1,09	115.724,40	1,08
RSTU	Jasa Lainnya	74.812,1	0,91	78.971,2	0,90	84.579,1	0,90	90.308,9	0,89	96.593,30	0,9
	Jumlah	**8.239.294,0**		**8.815.084,0**		**9.423.837,8**		**10.111.884,1**		**10.699.937,90**	**100**

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

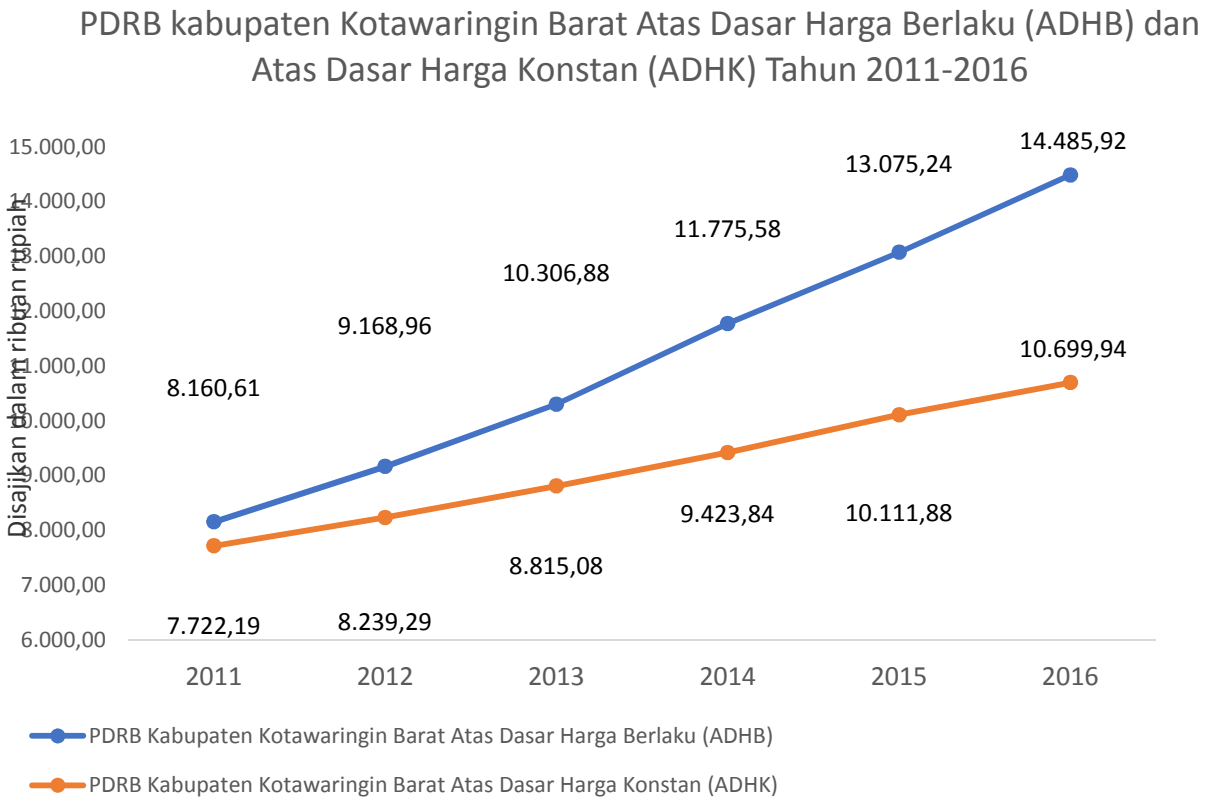

Gambar 2.5 : PDRB kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011-2016

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori industri pengolahan serta kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan luasnya perkebunan kelapa sawit yang diusahakan baik masyarakat maupun perkebuanan swasta besar. Adanya perkebunan swasta besar diikuti dengan berdirinya industri pengolahan kelapa sawit meskipun belum optimal dengan hasil yang utama adalah minyak CPO dan minyak goreng, selain itu juga adanya industri pengolahan hasil hutan yang sudah lama eksis di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

Kinerja perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha. Selama kurun waktu 5 tahun pertumbuhan kategori pembentuk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tumbuh cukup bervariasi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 – 2016

NO	LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,03	3,17	6,70	5,73	5,73
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	7,18	13,02	5,9	5,9
C	Indsutri pengolahan	6,22	7,60	7,84	5,23	5,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,66	8,87	10,23	3,65	3,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,56	4,94	9,54	5,03	5,03
F	Konstruksi	7,97	9,44	6,73	5,48	5,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,44	7,24	4,80	7,08	7,08
H	Transportasi dan Pergudangan	8,39	14,02	5,14	5,73	5,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,16	8,04	9,43	8,84	8,84
J	Informasi dan Komunikasi	10,09	6,39	8,20	7,77	7,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,19	10,03	15,86	6,23	6,23
L	Real Estate	9,74	9,37	9,14	6,53	6,53
M,N	Jasa Perusahaan	9,48	9,90	7,95	4,15	4,15
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,24	7,02	10,47	5,84	5,84
P	Jasa Pendidikan	2,32	6,51	6,94	4,06	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	5,77	4,62	4,39	4,39
RSTU	Jasa Lainnya	6,93	5,56	7,10	6,96	6,96
Jumlah		6,70	6,99	6,91	7,30	5,81

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

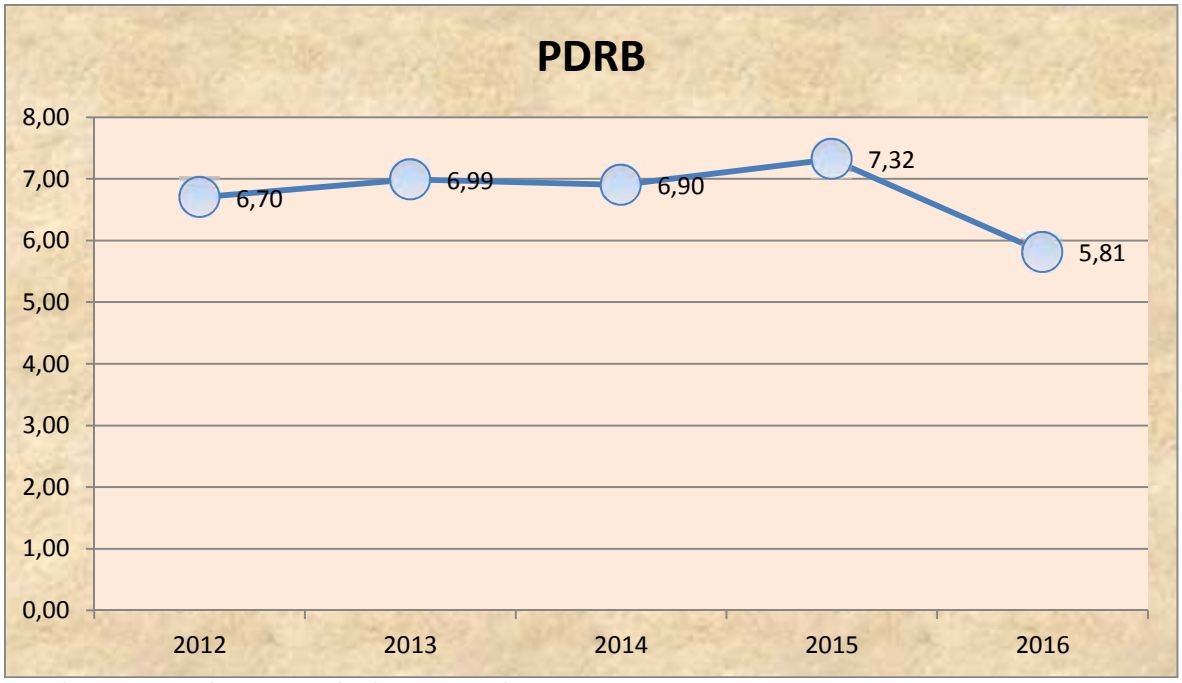

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Gambar 2.6 : Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan uraian diatas sektor – sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi dapat memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan yaitu dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Selama 4 (empat) tahun terakhir perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat mampu tumbuh stabil di kisaran 6 hingga 7%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dan Nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perlambatan pada tahun 2016 yang berada pada angka 5,8 %, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Kalimantan Tengah dan Nasional seperti nampak pada Gambar2.6 dibawah ini.

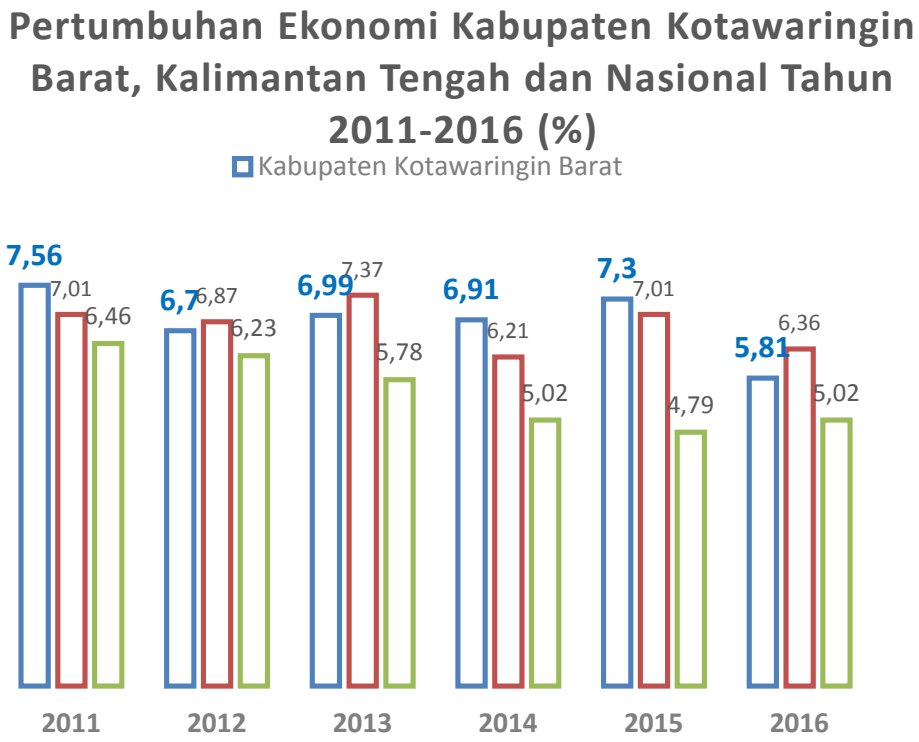

Gambar 2.7: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2011-2016 (%)

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

d. Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Perkembangan inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 5 tahun cukup fluktuatif dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 7,97 %. Angka tersebut masih tergolong dalam kategori inflasi ringan yang nilainya dibawah angka 10 %. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Angka Inflasi pada Tahun 2011-2017 sebagaimana Gambar 2.8 berikut ini:

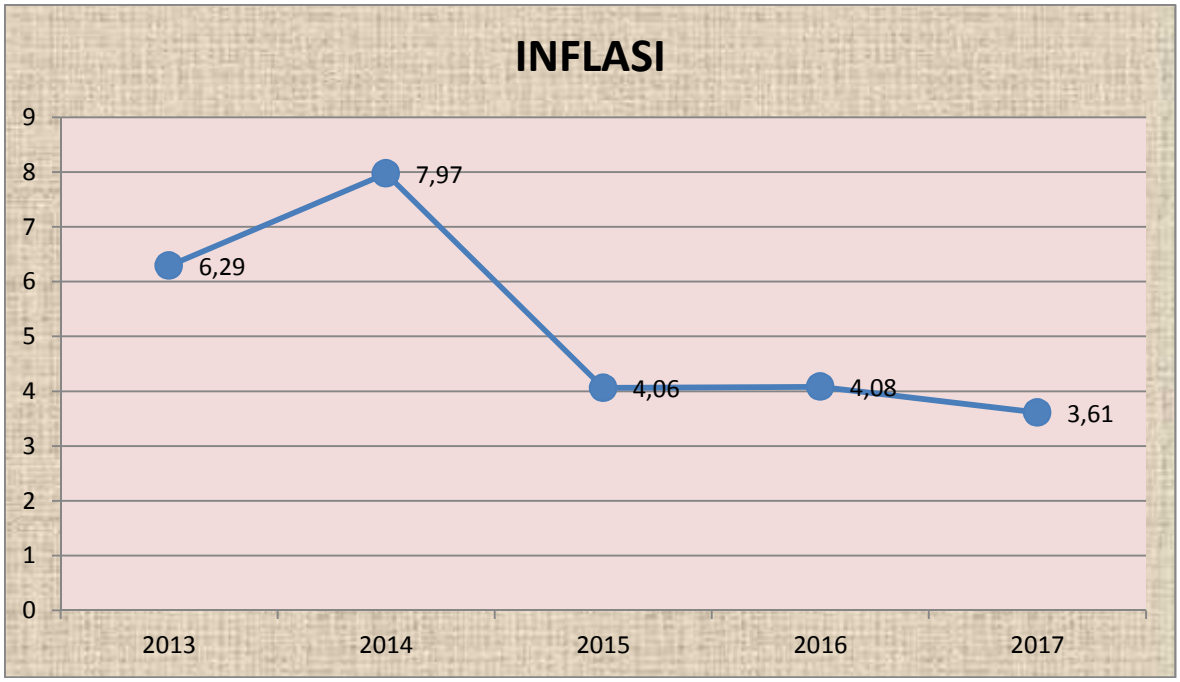

Gambar 2.8: Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat kebutuhan bahan pokok Kabupaten Kotawaringin Barat banyak yang didatangkan dari Pulau Jawa.

e. PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.19 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (Juta Rp)	9.168.960,2	10.306.881,45	11.775.583,11	13.075.238,45	14.485.921,00
PDRB Per Kapita (Rp)		40.738.661,86	45.082.630,57	48.493.442,64	50.523.940,23
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (Juta Rp)	8.239.294,0	8.815.083,85	9.423.837,66	10.111.883,82	10.699.938,00
PDRB Per Kapita (Rp)		34.842.228,65	36.079.010,96	37.502.953,37	37.319.203,11

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat, PDRB per kapita Kabupaten Kotawaringin Barat ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

f. Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 sebesar Rp 279.080,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah). Angka Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjukkan pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.20 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

Indikator Kemiskinan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Garis Kemiskinan (Rp)	238.987	263.840	273.467	279.080	293.436	319.064
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	16,5	14,37	14,30	14,33	14,01	14,11
Angka Kemiskinan (%)	6,19	5,63	5,44	5,27	5,07	4,96

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Memperhatikan data pada Tabel 2.20 tersebut di atas, bahwa angka kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada masih cukup banyak yaitu 143.300 jiwa.

2.1.4 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan angka melek huruf penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Gambar 2.9 berikut.

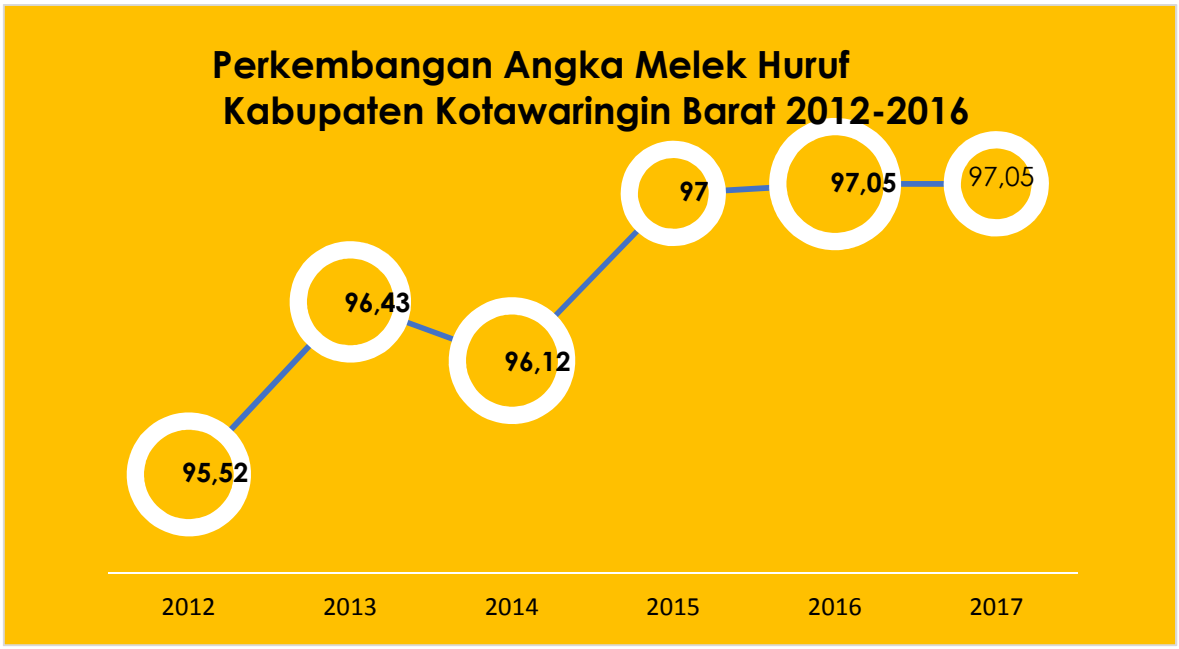

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Ktw. Barat Tahun 2018

Gambar 2.9: Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten KotawaringinBarat 2012-2016

Dari gambar tersebut, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat usia 15 tahun keatas belum seluruhnya mampu membaca dan menulis. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APM Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 2.10 sebagai berikut:

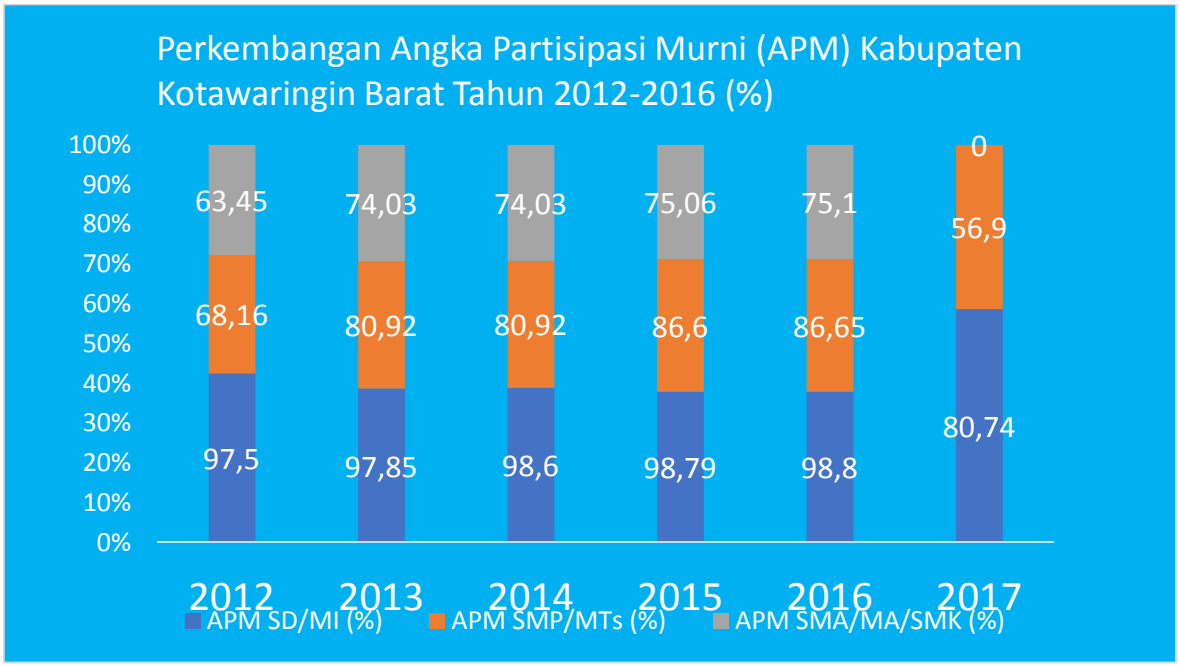

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Gambar 2.10: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017 (%)

Dari data pada Gambar 2.9 di atas menunjukkan bahwa seluruh APM baik jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA setiap tahun mengalami kenaikan. Sedangkan Gambar 2.10 di bawah ini menunjukkan bahwa APK jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA yang setiap tahun juga cenderung mengalami kenaikan.Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Rekap data perkembangan APK Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.10 sebagai berikut.

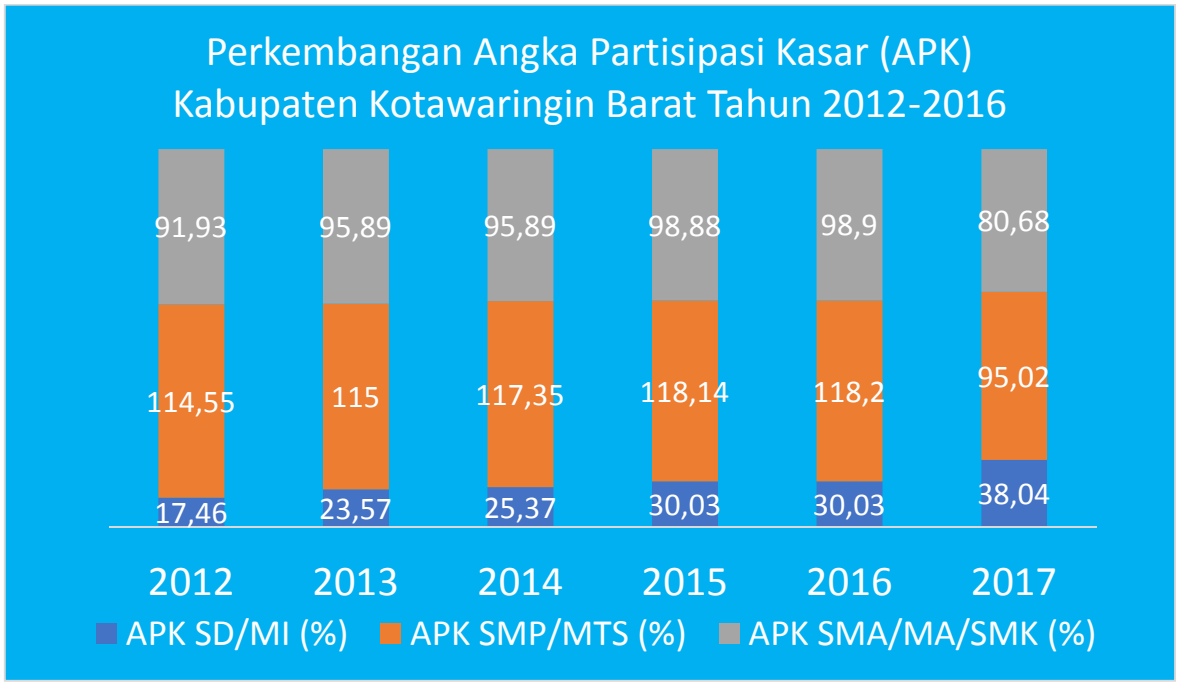

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Gambar 2. 11: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Dari data pada Gambar 2.11 di atas menunjukkan bahwa masih ada penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum mengenyam pendidikan sampai jenjang menengah atau SMA. Kondisi ini terjadi karena masih terbatasnya SMA/SMK/MA yang sebagian besar di ibukota kecamatan belum terjangkau semua lulusan SMP/MTs yang berada jauh dari ibukota kecamatan. Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011-2017 disajikan pada Gambar 2.12.

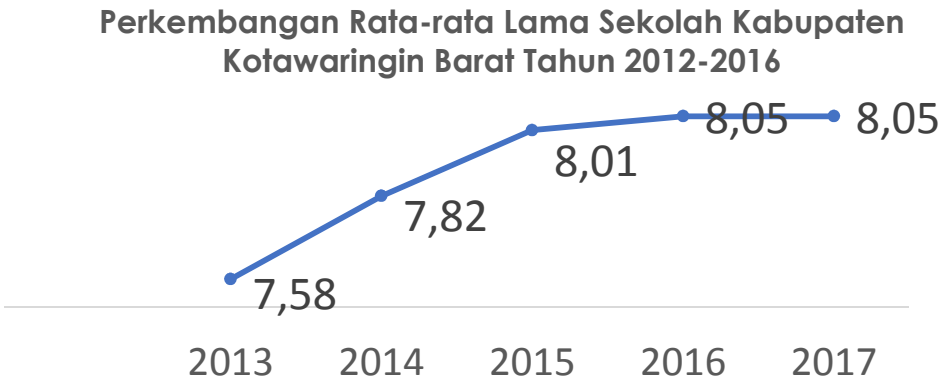

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2018

Gambar 2. 12: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011-2016 disajikan pada Gambar 2.13 berikut.

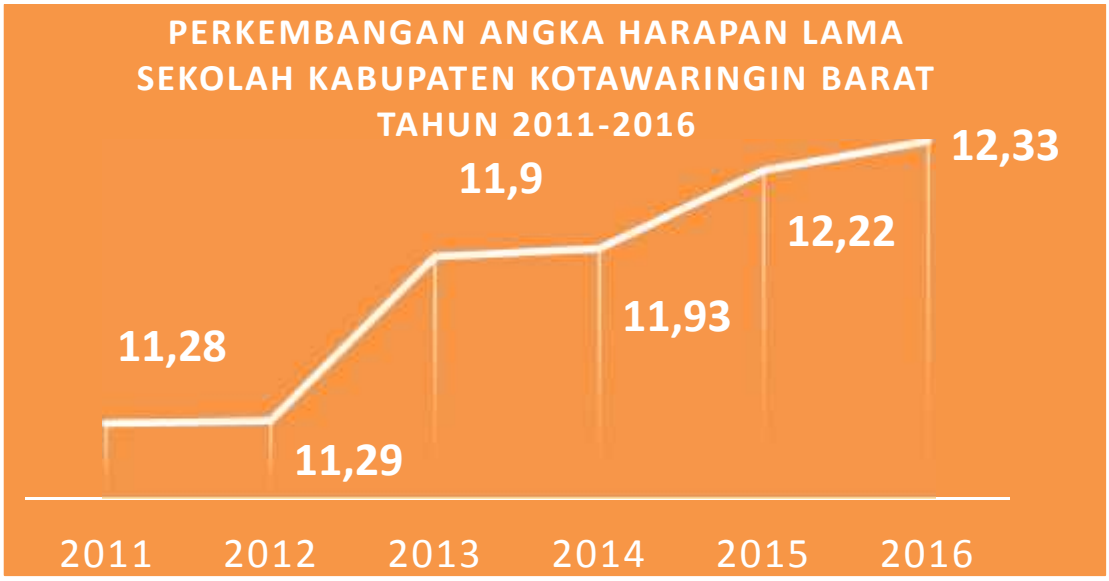

Sumber: Statistik Daerah Kab. Ktw. Barat (BPS) Tahun 2018

Gambar 2. 13: Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

b. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Gambar 2.14.

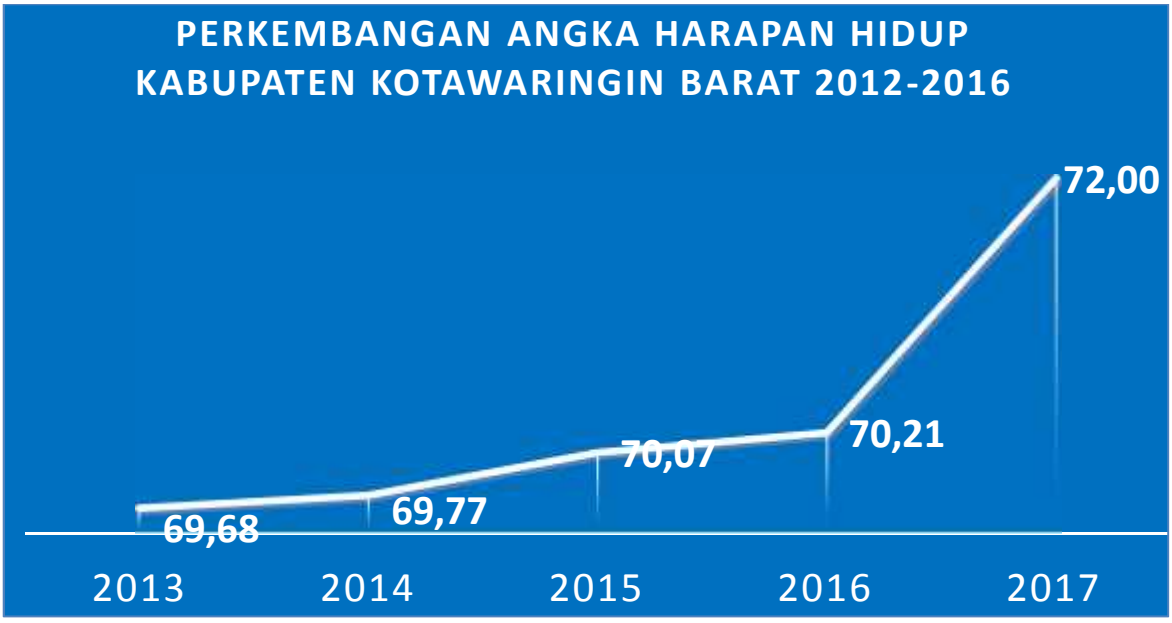

Sumber: Statistik Daerah Kab. Ktw. Barat (BPS) Tahun 2018

Gambar 2.14: Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

AHH penduduk Kabupaten Kotawaringin Baratyang setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti pada Gambar 2.14 di atas menunjukkan program dan kegiatan pada sektor lingkungan, kesehatan, sosial dan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian perlu ditingkatkan dan dikembangkan program-program inovasi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik/lebih tinggi. Status gizi masyarakat pada balita di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2012-2016.

Tabel 2.21 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Prevalensi Balita Gizi Buruk	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

c. Ketenagakerjaan

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2012-2017 cukup fluktuatif. Angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,68 %. Berikut adalah rekap data tentang tingkat

pengangguran terbuka Tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	184.860	195.373	202.545	209.717	202.545
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	124.101	136.864	145.749	155.605	145.749
3.	Bekerja (jiwa)	119.533	133.222	141.011	150.689	141.011
4.	Menganggur (jiwa)	4.568	3.642	4.738	4.916	4.738
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(%)	67,13	70,05	71,96	74,19	71.96
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,68	2,66	3,25	3,16	3,25
7.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	96,32	97,33	96,45	96,84	96,75
8.	Bukan Angkatan Kerja	60.759	58.509	56,796	54.112	56,76
9.	Sekolah	15.141	17.465	18.956	18.981	18,135
10.	Mengurus Rumah Tangga	39.732	35.598	36.698	29.336	37,949
11.	Lainnya	5.886	5.446	6.346	5.765	3.992

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ktw. Barat Tahun 2018

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2. 23.

Tabel 2.23 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, 2012-2016

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah grup kesenian	86	86	86	86	43
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	3
3	Jumlah Klub Olah raga	77	96	120	122	124
4	Jumlah gedung Olah raga	7	7	8	8	8

Sumber : Dikpora Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

2.2 Aspek Pelayanan Umum

2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

a. Pendidikan

Untuk mewujudkan Kotawaringin Barat sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui berbagai Indikator seperti yang tercantum dalam Tabel 2. 24

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2012-2017

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka melek huruf (%)	96,43	96,12	97,00	97,05	97,05
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,58	7,82	8,01	8,05	8,05
3.	Angka Partisipasi Kasar					
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	23,57	25,37	30,03	30,03	38,04
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	115,00	117,35	118,14	118,20	95,02
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	95,89	95,89	98,88	98,90	80,68
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK	78,92	87,59	87,59	87,60	-
4.	Angka Partisipasi Murni					
	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD		17,61	27,78	27	-
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,85	98,60	98,79	98,80	80,74
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80,92	80,92	86,60	86,65	56,90

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C	74,03	74,03	75,06	75,10	-
6.	Angka Putus Sekolah					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,20	0,20	0,20	0,14	0,26
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,19	1,19	0,40	0,70	0,37
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,60	1,60	1,10	0,70	-
7.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV					
	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,94	52,94	97,08	98,00	88,06
	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91,34	91,34	95,56	98,50	96,06
	Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77,16	77,16	95,56	99,00	-
8.	Angka Kelulusan					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,92	98,92	100,00	100,00	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,58	99,58	100,00	100,00	98,90
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,09	99,09	99,09	99,00	-
9.	Angka Melanjutkan					
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	89,67	89,67	99,75	99,75	99,75
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,64	99,64	99,66	99,66	98,65

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
10.	Fasilitas Pendidikan					
	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	80,26	89,00	33,05	33,10	33,10
	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	87,75	89,50	52,78	52,80	52,80
	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	82,00	88,00	88,00	88,10	-
11.	Rasio (perbandingan) jumlah guru/murid					
	a. SD/MI	1:18,07	1:32	1:21	1:21	1:26
	b. SLTP/MTs	1:13,32	1:28	1:19	1:14	1:19
	c. SMU/MA/SMK	1:14,50	1:28	1:14	1:14	-
12.	Angka Partisipasi Sekolah					
	a. SD/MI	97,87	99,82	99,53	94,81	
	b. SLTP/MTs	97,73	100	95,42	99,25	
	c. SMU/MA/SMK	68,28	73,05	73,83	95,37	
13.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah					
	a. SD/MI	179,99	185,00	162,09	162,15	162,15
	b. SLTP/MTs	310,12	310,12	123,00	332,19	332,19
	c. SMU/MA/SMK	660,15	660,15	326,00	743,00	-

Sumber: LKPJ, 2017

Menilik pada capaian indikator kinerja kunci urusan pendidikan secara umum terdapat peningkatan kinerja urusan pendidikan. Meningkatnya Angka Partisipasi

Kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada kategori TK/RA dan PAUD Non-Formal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Sejenis PAUD) menunjukkan bahwa semakin banyak orang tua memandang bahwa pendidikan anak usia dini penting untuk proses tumbuh kembang anak sehingga mereka memutuskan untuk mengirimkan anak-anak ke lembaga PAUD.

Tolok ukur dalam keberhasilan pelayanan pendidikan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah adalah tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Capaian APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan meskipun belum dapat mecapai angka absolut. Hal ini didukung pula denganpeningkatan angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke SMP/Mts. Namun angka tersebut belum mencapai 100% yang berarti masih terdapat anak-anak usia sekolah yang belum melanjutkan ke jenjang selanjunya. Masih terdapat siswa yang putussekolah dengan berbagai penyebab, meskipun pada tahun 2014 angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat relatif mengalami penurunan. Penurunan angka putus sekolah ini berkat adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Beasiswa Miskin dari pemerintah pusat sehingga mampu menekan Angka Putus Sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK SD/MI/Paket A melebihi 100% dapat dimaknai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan disertai sukses program Kejar Paket A. Sedangkan capaian APK SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih harus ditingkatkan. Perlu adanya kerjasama lintas pihak dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan.

Pelaksanaan ujian sekolah di jenjang SD/MI/Paket A dan ujian nasional jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih merupakan metode untuk mengukur hasil proses pembelajaran. Terjadi peningkatan angka kelulusan di semua jenjang. Namun demikian tetap harus ada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kelulusan peserta didik dalam ujian sekolah maupun ujian nasional. Rasio pendidik dan siswa sudah mendekati tataran yang cukup ideal. Secara kuantitas, jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1 semakin meningkat, namun perlu adanya upaya untuk peningkatan kualitas.

b. Kesehatan

Beberapa indikator capaian kinerja terkait dengan pelaksanaan urusan kesehatan dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Cakupan dan Mutu Pelayanan Dilihat Melalui Indikator antara lain:

a) Angka Kematian Neto / Net Death Rate (NDR)

Rata-rata NDR di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebesar 17,2 %, berarti sudah sangat baik pelayanan rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b) Angka Kematian Umum / Gross Death Rate (GDR)

Rata-rata GDR di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebesar 36,86 %, berarti sudah sangat baik pelayanan rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c) Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit dapat dilihat dari BOR (*Bed Occupancy Rate*), LOS (*Length of Stay*) rata-rata lama dirawat (dalam satuan hari) seorang pasien dan TOI (*Turn Over Interval*).

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu; LOS adalah rata-rata lama perawatan (dalam satuan hari) seorang pasien; dan TOI adalah lamanya pemakaian tempat tidur oleh pasien (dalam satuan hari). Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.25 Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun					Ideal
	2013	2014	2015	2016	2017	
BOR	71,22	72,41	77,00	53,98	73,74	60–85%
LOS (hari)	3,10	3,19	3,54	2,47	3,46	6–9 hari
TOI (hari)	1,25	1,22	1,06	2,10	1,23	1–3 hari
BTO (kali)	83,87	82,74	79,34	69,98	77,66	40-50 kali
GDR (%)	25,0	31,5	34,8	36,16	36,86	< 45%o
NDR (%)	10,5	16,5	14,4	12,03	17,2	< 25%o

Sumber: RSUD Sultan Imanuddin, 2018

2) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2013 - 2017 menunjukkan angka yang fluktuatif dan kondisi pada tahun 2017 sebesar 70,30 %, masih dibawah target yang diharapkan yaitu sebesar 80%. Sebagai gambaran tentang perkembangan kondisi cakupan komplikasi kebidanan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

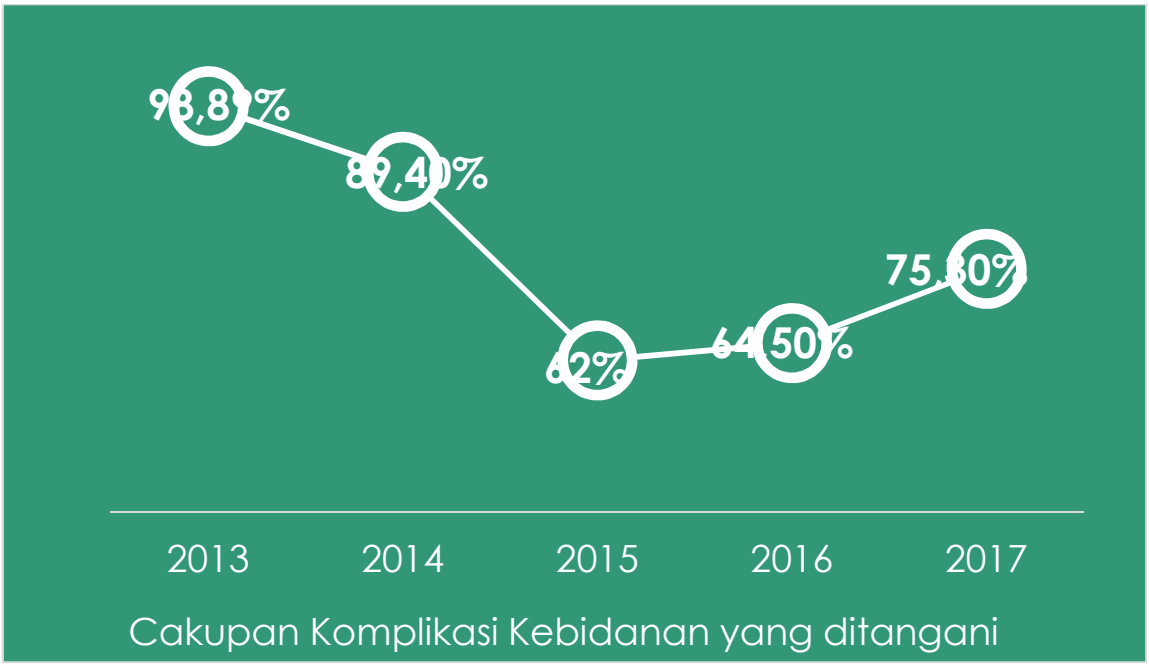

Gambar 2.15: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Tahun 2013 – 2017

3) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (nakes) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes tahun 2013 sebesar 118,99% terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 73%. Penurunan capaian persalinan oleh tenaga kesehatan terjadi karena masih banyak sarana kesehatan swasta yang memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat yang belum melaporkan cakupan pelayanannya kepada dinas kesehatan setempat. Perkembangan kondisi Cakupan Pertolongan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

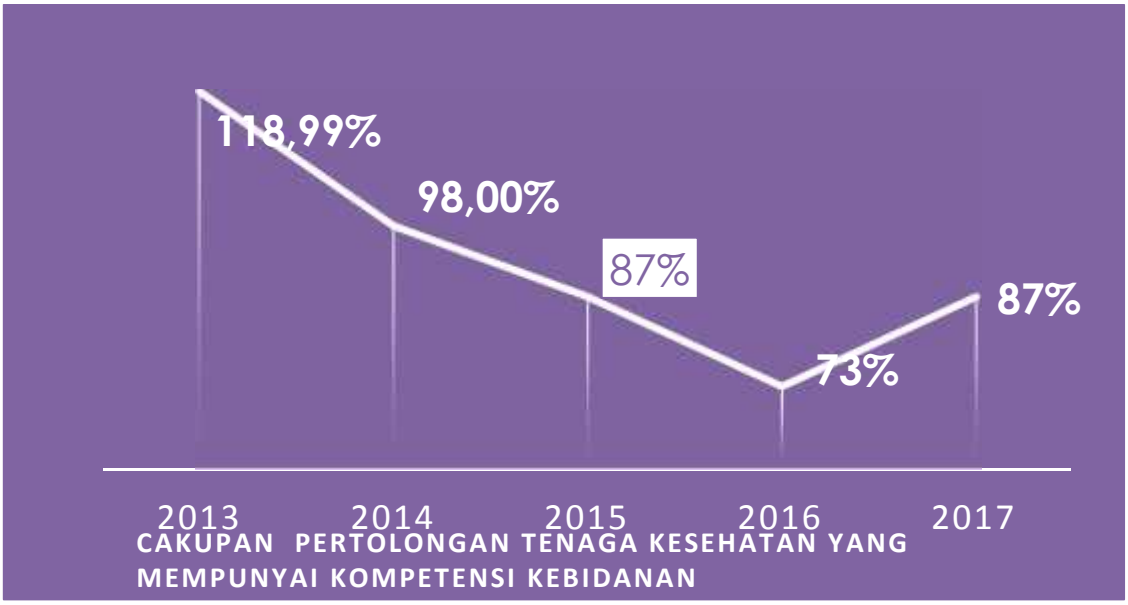

Gambar 2.16: Cakupan Pertolongan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan Tahun 2013- 2017

4) Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Target cakupan UCI menurut indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 95%. Indikator keberhasilan GAIN UCI pada tahun 2016 mencapai UCI 86,1 sedangkan pada tahun 2017 capainnya hanya 71,3 %. Pencapaian UCI desa/kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2017 terlihat pada gambar berikut ini.

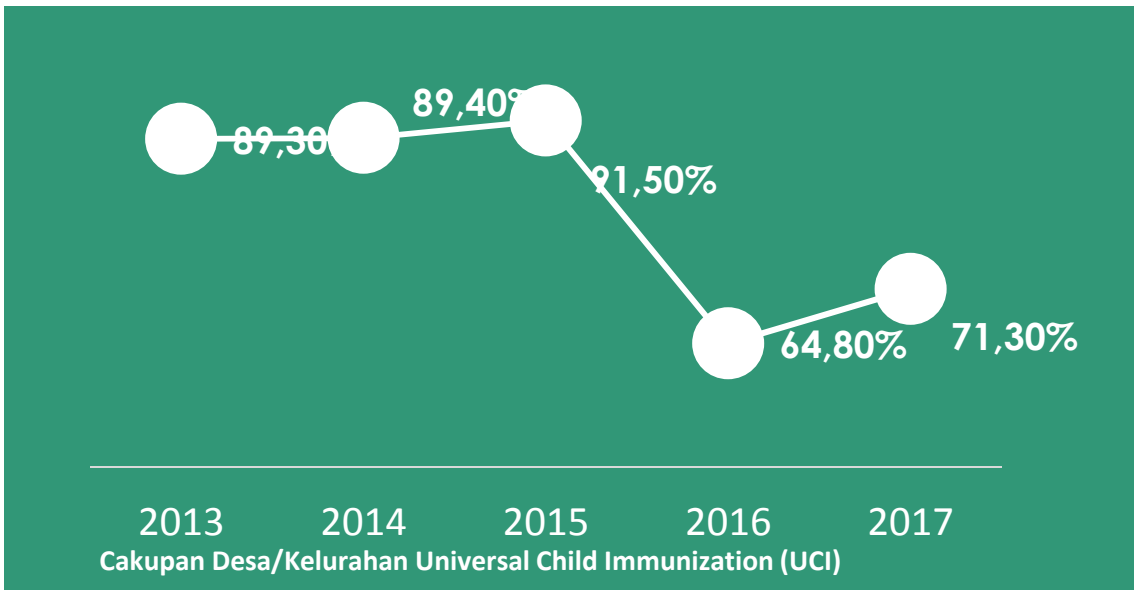

Gambar 2.17: Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2013 – 2017

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa cakupan desa/kelurahan UCI dari tahun 2013-2017 memiliki nilai yang fluktuatif namun masih berada di bawah

95%. Belum tercapainya target cakupan desa/kelurahan UCI dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kesalahan dalam menentukan besaran target sasaran, selain itu adanya mutasi tenaga imunisasi di Kabupaten maupun di Puskesmas.

5) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dari tahun 2013-2017 yaitu 100%. Semua kasus gizi buruk yang terlacak, mendapat perawatan dengan pemberian bantuan MP-ASI selama perawatan/ penanganan. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.18: Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan Tahun 2013 – 2017

6) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Paru.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penderita Penyakit TB Paru Kabupaten Kotawaringin dapat dilihat pada gambar berikut ini:

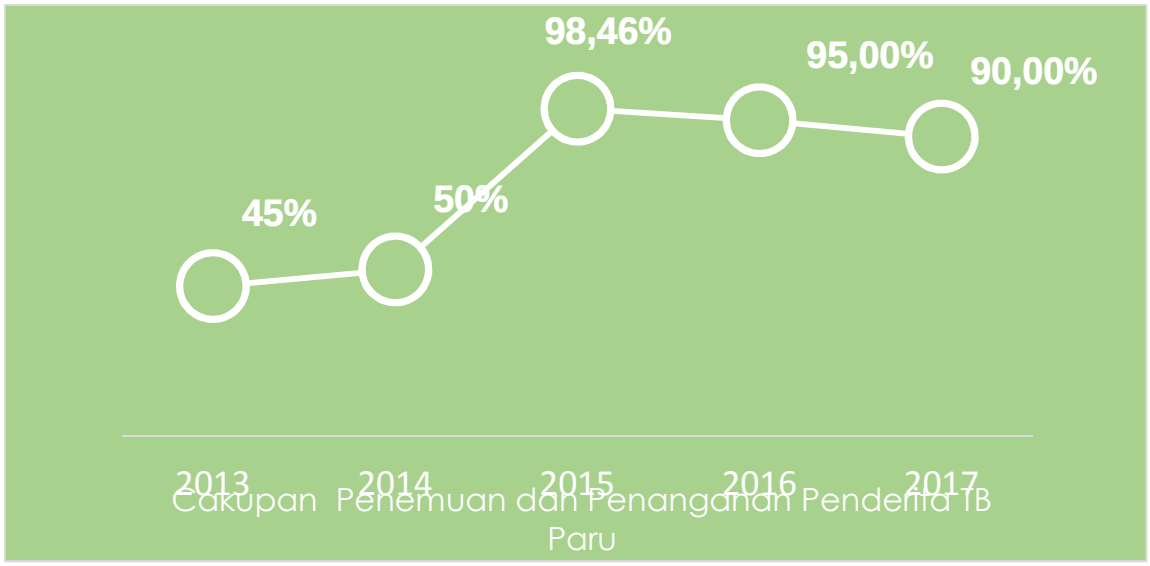

Gambar 2.19: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB Paru Tahun 2013 – 2017

Dari gambar di atas diketahui bahwa cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita menunjukkan angka yang fluktuatif, pada tahun 2012 (50%), tahun 2013 (45%), tahun 2014 (50%), tahun 2015 (98,46%), dan tahun 2016 diprediksi sebesar 90 % dengan capaian sebesar 70 %.

7) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, diutamakan pada pelaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan. Angka Bebas Jentik (ABJ) DBD diharapkan dapat mencapai lebih dari 90%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD sejak tahun 2012 hingga 2016 mencapai target 100%. Ilustrasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

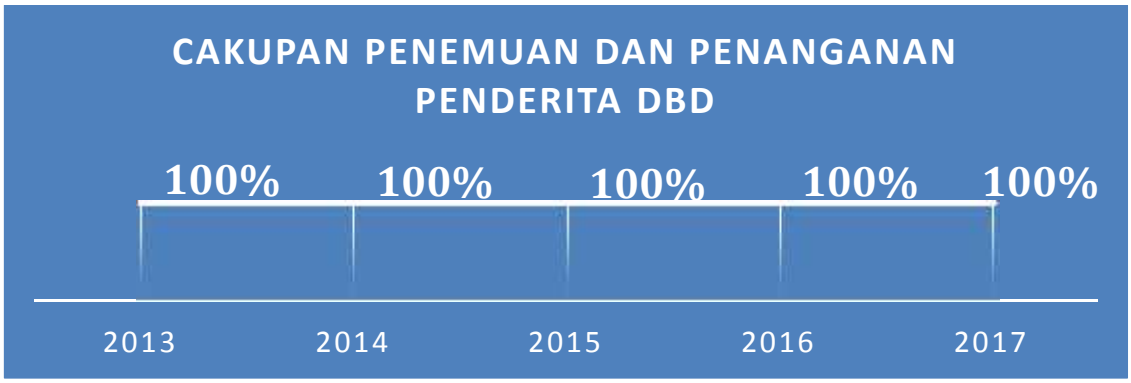

Gambar 2.20: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Tahun 2012-2016

8) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.

Cakupan pelayanan rawat inap masyarakat miskin (dan hampir miskin) dari tahun ketahun selalu menunjukkan peningkatan, terutama pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 100% hingga tahun 2017. Ilustrasi Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

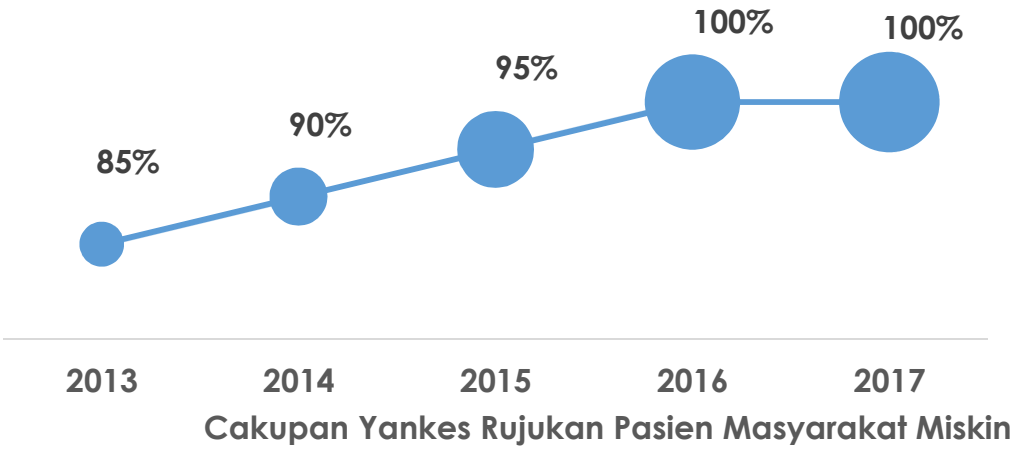

Gambar 2.21: Cakupan Yankes Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2013-2017

9) Cakupan Kunjungan Bayi.

Gambar di bawah ini menampilkan cakupan kunjungan bayi di Kabupaten

Kotawaringin Barat yang sejak tahun 2013-2017 menunjukkan tren penurunan yaitu pada pada tahun 2013 sebesar 100,94% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 83,13% akan tetapi mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 sebesar 90,%. Dari target 40 %.

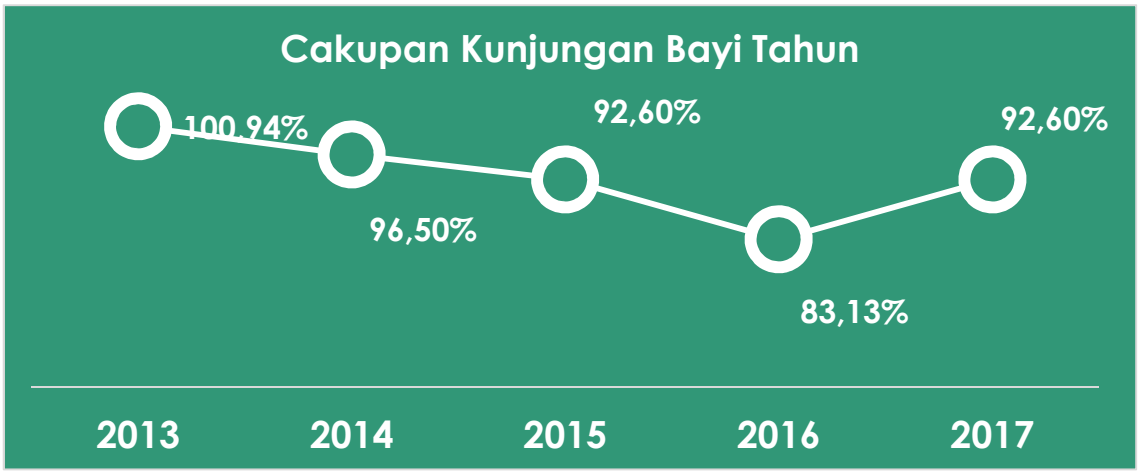

Gambar 2.22: Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2013-2017

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1) Pekerjaan Umum

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013 – 2017

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	*0,27*	*0,26*	*0,45*	*0,36*	*0,37*
2	Rasio Jaringan Irigasi	*0,85*	*0,86*	*0,75*	*0,70*	*0,76*
3	Luas Wilayah Kebanjiran	*15,00%*	*14,00%*	*13,80%*	*12,00%*	-
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*77,96*	
5	Persentase penanganan sampah	*68,93*	*70,45*	*51,63*	*80,80*	
6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	*1,48*	*1,57*	*2,2*	*1,26*	

Sumber: LKPJ, 2017

Beberapa indikator yang belum mencapai target yaitu rasio jaringan irigasi, luasan wilayah yang mengalami kebanjiran dan rasio rumah layak huni. Persentase

penanganan sampah menunjukkan angka yang fluktuatifnamun kondisi pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang cukup significan. Sedangkan rasio tempat pembuangan sampah pada tahun 2016 justru mengalami penurunan. Selain hal tersebut diatas capaian kinerja urusan pekerjaan umum juga dapat ditunjukkan melalui kondisi infrastruktur yang ada khususnya kondisi jalan dan jembatan.

Berdasarkan statusnya, jalan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.27 Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan negara	148,56	6,02	148,56	6,02	156,96	6,36	156,96	6,35	156,96	6,36
2	Jalan provinsi	63,70	2,58	63,70	2,58	55,40	2,24	55,40	2,24	55,40	2,24
3	Jalan kabupaten	1.220,95	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.222,37	49,51	1.222,84	49,51
4	Jalan desa	1.033.02	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89
Jumlah		**2.466,23**	**100**	**2.469,65**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.467,75**	**100**	**2.469,75**	**100**

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2018

Tabel 2.198: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Jenis Permukaannya

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan Aspal	656,99	26,64	1.018,41	41,24	1.022,37	41,40	1.039,46	44,09	1.053,35	42,65
2	Jalan Batu/kerikil	137,10	5,56	102,38	4,15	100,65	4,08	92,03	3,73	90,56	3,67
3	Jalan Tanah	1.436,85	58,26	1.098,68	44,49	1.082,92	43,85	1.074,44	43,5	1.058,52	42,86
4	Tidak dirinci: -Beton -Titian -Lainnya	 111,54 27,89 95,86	 4,52 1,13 3,89	 125,00 29,11 96,16	 5,06 1,18 3,89	 137,81 29,85 96,16	 5,58 1,21 3,89	 137,81 29,85 96,16	 5,58 1,21 3,89	 141,02 30,15 96,16	 5,71 1,22 3,89
Jumlah		**2.466,23**	**100**	**2.469,65**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2018

Panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2015 - 2017 adalah 2.469,75 Km, dimana jalan Provinsi berkurang dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan status jalan pada ruas jalan Akses ke Pelabuhan Tanjung Kalap (Bumi Harjo) yang

sebelumnya status jalan Provinsi menjadi Status Jalan Negara/nasional. Sementara untuk jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten tidak mengalami perubahan panjang, dimana pada tahun 2015 - 2017 fokus pekerjaan bukan pada penambahan panjang jalan tetapi lebih kepada peningkatan infrastruktur dan kemantapan jalan.

Tabel 2.29: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang(Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan Baik	490,46	19,89	845,98	34,26	890,50	36,06	897,27	36,33	915,63	37,07
2	Jalan Sedang	816,60	33,11	784,19	31,75	761,46	30,83	772,31	31,27	768,86	31,13
3	Jalan Rusak Ringan	856,56	34,73	620,51	25,13	608,00	24,62	610,18	24,71	607,70	24,61
4	Jalan Rusak Berat	302,61	12,27	218,97	8,87	209,79	8,49	189,99	7,69	177,56	7,19
Jumlah		**2.466,23**	**100**	**2.469,65**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 2.29 dapat disampaikan bahwa kinerja proporsi panjang jalan munurut kondisinya dari tahun 2013 -2017 sebagai berikut: Jalan kondisi baik meningkat sebesar 17,18 %; jalan kondisi sedang mengalami penurunan sebesar 1.98 %, jalan rusak ringan dan mengalami penurunan 10,12 %, jalan rusak berat mengalami penurunan 5,08 %.

Tabel 2.30: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kelas Jalan

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Kelas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kelas III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kelas III A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kelas III B	212,26	8,61	212,26	8,60	212,36	8,60	212,36	8,60	212,36	8,60
	Kelas III C	451,14	18,29	456,12	18,47	456,12	18,47	465,90	18,86	465,90	18,86
	Kelas Tidak dirinci	1.802,83	73,10	1.801,27	72,93	1801,27	72,93	1.791,49	72,54	1.791,49	72,54
Jumlah		**2.466,23**	**100**	**2.469,65**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat atahun 2018

Sedangkan kondisi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel 2.31berikut ini:

Tabel 2.31: Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya

No	Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1	Jembatan Baik	24	5,97	141	74,6	141	77,47	162	76,06	205	87,61
2	Jembatan Sedang	378	94,03	30	15,87	26	13,76	20	9,39	11	4,70
3	Jembatan Rusak	-	-	16	8,47	14	7,41	15	7,04	8	3,42
4	Jembatan Rusak Berat	-	-	2	1,06	1	0,53	16	7,51	10	4,27
Jumlah		402	100	189	100	182	100	213	100	234	100

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

2) Penataan Ruang

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.32: Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
2.	Perda RTRW	-	-	-	-	-
3.	Dokumen RDTR	2	2	-	-	-
4.	Ketaatan pada RTRW	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat ketersediaan Perda RTRW masih belum ada. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini mekanisme penetapan perda RTRW masih dalam proses. Sedangkan untuk ketaatan terhadap RTRW terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang hingga kini masih belum mengingat Perda tentang Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang dijadikan acuan masih dalam proses.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Capaian kinerja pada Urusan Perumahan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.33: Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2013 – 2017

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih	23,00	70,00	70,55	72,00	74,21
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (jamban sendiri)	76,29	72,10	75,49	77,96	80,39
3	Persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik	98,12	98,12	98,78	98,8	
4	Persentase rumah tinggal dengan lantai tanah	-	-	2,74	2,35	
5	Persentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah	96,66	96,90	97,26	97,5	
6	Persentase rumah tinggal dengan dinding tembok	47,92	50,19	55,19	58,2	
7	Rasio rumah layak huni	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92
8	Rasio permukiman layak huni	0,99	0,99	0,99	0,99	
9	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,06	0,1	0,12	0,09	

Sumber: Dinas PU dan BPS Kab. Ktw Barat Tahun 2017

Capaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2013 sampai 2017 antara lain dapat dilihat pada persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih yang menunjukkan adanya peningkatan mencapai 74,21%, Rumah tangga bersanitasi mencapai 80,39 %, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam mengelola sanitasi sangat baik.

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Penaggulangan Bencana

Adapun Capaian Kinerja yang berhasil dicapai dalam penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.34: Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriTahun 2012 – 2016

No.	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah tenaga/satuan linmas (orang)	-	1.226	1.226	1.226	1.226
2	Jumlah pos jaga/ronda (unit)	4	4	8	5	
3	Jumlah tenaga/satuan linmas yang dilatih (orang)	-	400	-	-	-
4	Tingkat gangguan kebisingan lingkungan	-	-	-	-	-
5	Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	-	-	-
6	Data laporan hasil monitoring	2 kec.	-	-	-	6 buku
7	Kondisi daerah yang kondusif (kec)	6	6	6	6	6
8	Tingkat Kehamonisan umat beragama (org)	90	90	-	-	-
9	Tingkat Kehamonisan antar etnis (org)	-	-	220	300	200
10	Tingkat partisipasi pemuda pemudi pada kegiatan IBAB dan Hari Sumpah Pemuda (org)	-	1000	80	80	40
11	Peningkatan SDM tokoh lintas agama dan forum (forum)	5	4	4	3	3
12	Implementasi SKB 3 Menteri (org)	75	50	200	300	84
13	Tingkat penyalahgunaan miras & narkoba (org)	50	50	400	300	-
14	Tingkat praktek prostitusi (org)	-	200	100	-	230
15	Data laporan hasil monitoring	-	6 Kec.	-	-	10 buku
16	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pendidikan politik (org)	60	360	70	120	150
17	Jumlah parpol dan ormas/LSM (parpol/ormasdan LSM)	38 / 102	20 / 50	12/ 70	12 / 70	12 / 40
18	Jumlah data base parpol dan ormas/LSM (buku)	-	10	-	10	-
19	Data laporan hasil monitoring (kec)	6	6	-	6	6
20	Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya bencana	140 org	15 org	100 org	100 org	-

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Kab. Ktw. Barat Tahun 2017

Adapun perkembangan dari hasil pengawasan terhadap Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35: Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2017

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran (kali)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1	3	3	43	27
2.	Minuman Keras (Miras)	20	50	80	61	59
3.	PSK liar/prostitusi/Pasangan Mesum	57	20	39	81	2
4.	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)	4	6	6	13	2
5.	Premanisme	2	-	-	-	-
6.	Judi Togel	-	-	1	-	-
7.	Mucikari	-	-	14	9	8
8.	KTP	-	-	9	4	-
9.	Ngelem Fox	-	-	1	6	-
Jumlah		**84**	**79**	**153**	**217**	**98**

Sumber: LKPJ , 2018

Adapun capaian kinerja penanggulangan bencana, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.36: Capaian Kinerja Penaggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Desa / Kelurahan yang telah mendapat Sosialisasi/ Pelatihan/ Pembinaan	-	5	12	23	29
2	Jumlah Personil Penanggulangan Bencana yang Terlatih	-	-	5	5	5
3	Prosentase Kejadian Bencana yang Dapat Ditangani	-	70%	75%	75%	-

Sumber: Badan Penaggulangan Bencana Daerah 2018

f. Sosial

Untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.37: Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2017

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	15	17	17	21	21
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	68,75	68,75	88,12	2.675	4.014
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (kasus)	68,42	63,64	91,22	1.024	1.186

Sumber: Dinas Sosia Tahun 2018.

2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Program yang diupayakan pemerintah untuk mengoptimalkan tenaga kerja Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

b. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Adapun capaian kinerja pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38: JumlahPeserta KB Aktif Tahun 2013-2017

No	Peserta KB Aktif	2013	2014	2015	2016	2017
1	IUD	783	943	1015	1054	1033
2	MOP	115	119	140	134	126
3	MOW	697	736	758	762	727
4	IMPLANT	2.436	3.162	3.175	2.463	2.362
5	SUNTIK	13.482	19.324	19.174	18.261	17.721
6	PIL	6.519	8.190	8.610	9.085	9.126
7	KONDOM	727	736	1.044	884	921
Jumlah		24.759	33.375	33.916	32.643	32.016

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2018

Selanjutnya capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Indikator	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3,8	3	3	3
2.	Jml peserta KB aktif	24.759	33.375	33.916	32.643	32.016
3.	Jml Pasangan Usia Subur (PUS)	32.154	49.238	49.578	45.852	44.388
4.	Rasio akseptor KB (%)	87,9	80,12	69,92	72,25	48,85
5.	Cakupan peserta KB aktif/ PA (%)	77	67,78	68,41	71,19	72,13
6.	Keluarga Pra Sejahtera	1.474	2.701	2.325	4.226	4.226
	Keluarga Sejahtera I	4.197	9.545		18.452	18.452

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami penurunan kualitas. Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus lebih meningkatkan lagi capaian kinerjanya.

c. Pangan

Capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.40: Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan

No.	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita	2.465/ 72,69	2.452/ 72,37	2.576/ 73,38	2.588/ 74,63	2.589/ 74,65
2	Penguatan Cadangan Pangan	-	-	57,8%	61,4%	60,39%
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	12 / Th	12 / Th	12 / Th	12 / Th	12/Th
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	60	60	60	60	60
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,7	80,7	84,56	91,1	92,7
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	55	57	59	66,6	70,77

No.	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017

Berdasarkan Tabel Standar Pelayanan Minimal di atas, dari tujuh indikator dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Sebagian besar indikator telah mencapai SPM bahkan melebihi SPM yang ditetapkan. Namun, indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, belum bisa memenuhi target SPM dikarenakan terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana dan kurangnya SDM.

Tabel 2.41: Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersedian Pangan (Beras)

No.	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah penduduk (Jiwa)	253.000	261.000	269.629	278.141	286.714
2	Jumlah produksi (Ton)	17.277	18.445	18.573	11.797	12.494
3	Jumlah Kebutuhan (Ton)	30.805	30.744	32.830	33.866	34.910
4	Jumlah Kekurangan (Ton)	13.527	12.298	14.256	22.070	22.417

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2016

Berdasarkan tabel diatas, dalam sistem ketersediaan pangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 masih mengalami defisit atau tergantung dari luar daerah yang mencapai rata-rata 25% - 30% per tahun.

d. Pertanahan

Perkembangan jumlah tanah bersertifikat dan luas tanah yang bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan tahun 2015, dari 875.871 Hektar tanah yang belum bersertifikat, tanah yang bersertifikat sebanyak 237.347 Hektar.

Tabel 2.42: Perkembangan Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Dan Luas Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

No.	Indikator	satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas tanah bersertifikat	Hektar	808,88	808,88	808,88	808,88	808,88
2.	Luas tanah yang	Hektar	-	-	-	-	-

No.	Indikator	satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
	belum bersertifikat						
3.	Jumlah bidang tanah bersertifikat	bidang	103.470	103.470	103.470	103.470	103.470
4.	Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat	bidang	-	-	-	-	-
5.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten	bidang	769	769	769	769	769
6.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan pemkab yang sudah bersertifikat	bidang	401	429	429	429	429
7.	Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten dengan status hak pakai/ hak guna bangunan kepada pihak ketiga	bidang	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
8.	Jumlah Ijin lokasi yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan tanah kas desa	Ijin	-	-	-	-	-
9.	Konflik pertanahan yang terjadi	kasus	5	4	3	4	4
10.	Konflik pertanahan yang terselesaikan	kasus	4	4	3	3	3

Sumber: Bagian Administrasi dan Perlengkapan Setda 2017

e. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kinerja urusan lingkungan hidup sesuai indikator kinerja selama tahun 2012 - 2016, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43: Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Penanganan sampah	65	73,5	48,47	51,63	60,75
2.	Jumlah Duta Lingkungan (orang)	-	-	2	-	-
3.	Jumlah Kader lingkungan (orang)	50	39	39	40	-

No.	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
4.	Jumlah Adhiwiyata (orang)	50	50	50	50	50
5.	Pencemaran status mutu air	2	2	2	2	2
6.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air:					
	Mangrove (bibit)	3.000	3.000	-	-	-
	Ruang Terbuka Hijau (bibit)	600	1.000	678	200	-
	Biopori (Lubang Tanam)	1.000	2.000	32.000	-	-
7.	Penegakan Hukum Lingkungan	1	1	1	4	-

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Tahun 2017

Adapun capaian Indikator kinerja Urusan Kehutanan dari tahun 2012-2016 dituangkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.44: Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	-	-	-	3,29	-
2.	Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-
3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,63	0,55	0,57	0,61	0,55
4.	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	75	34	100	155,25	25
5.	Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)	1.241,50	292	75	1.400	300

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2016

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Rehabilitasi hutan Mangrove) di Desa Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Keraya baru tercapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 10 Ha, atau sebesar 3,29 dari yang ditargetkan. Sedangkan capaian kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkat, pada tahun 2015 PDRB sektor kehutanan sebesar 0,61%(*angka sangat sementara) dari total PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, atau meningkat sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0.57%.

Jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan dilihat berdasarkan jenis komoditas kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2012-2016 dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45: Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2012-2016

Komoditas (Kelompok)	Jumlah Produksi (dalam M^3)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kayu Meranti	43.775,35	27.689,61	40.219,03	38.608,07	-
Kayu Rimba Campuran	1.996,07	2.772,03	6.223,98	5.741,29	-
Kayu Indah	68,87	-	-	-	-
Jumlah	**45.840,29**	**30.461,64**	**46.443,01**	**44.349,36**	**-**

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2016

f. Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2013-2017 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.46: Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Nasional	32,67	81,30	95	97,78	
2	Persentase jumlah penduduk yang memiliki Elektronik KTP (e_KTP)	71,56	73,10	54,13	90,00	101,2
3	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KK Nasional	58,64	78,22	76,25	76,6	78,37
4	Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	28,09	52,08	58,36	61,26	73,46
5	Persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan dan Akta lainya	163	217	271	167	102,4

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2018

Persentase jumlah pemilik KTP berbasis NIK pada tahun 2017 mengalami terjadi kenaikan sebesar 11 % dari tahun 2016. Pada tahun 2017 persentase jumlah

kepemilikan Kartu Keluarga (KK) terjadi peningkatan 1,77 % dibandingkan tahun 2016. Sedangkan persentase kepemilikan akte kelahiran dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2013 sebesar 28,09 % meningkat menjadi 73,46 %. Meningkatnya persentase kepemilikan akte kelahiran ini disebabkan oleh adanya kebijakan penerbitan akte kelahiran secara gratis atau bebas bea bagi bayi yang berusia kurang dari 60 hari, dan tumbuhnya kesadaran dari orang tua akan pentingya dokumen kependudukan dalam hal ini akte kelahiran sebagai identitas diri pertama dan hak sipil anak paling utama yang dimiliki anak. Selain itu akta kelahiran juga merupakan bukti yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47: Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Desa yang Terperbaharui Profil Desanya	25 Desa	75 Desa	77 Desa	77 Desa	80 Desa
2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	81 Desa /Kel	81 Desa/ Kel	81 Desa/ Kel	94 Desa/ Kel	94 Desa/ Kel
3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih	-	188 Org	-	-	-
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	1	-	1	1	1

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ada satu target IKK yang belum tercapai 100%, yaitu Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, dari target 94 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan akhir tahun 2015 baru ada 77 Desa yang telah memiliki Profil Desa yang representatif.

Tabel 2.48: Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Aparatur Desa, Anggota BPD Kelembagaan Desa dan SM2L yang mengalami Peningkatan Pemahaman tentang Pembangunan Partisipatif	90	90	90	120	120
2	Jumlah Siswa/Siswi yang mendapat penyaluran dana PMT-AS untuk anak sekolah di Desa Tertinggal	1.509	1.104	325	276	-
3	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan Monitoring	94	94	94	94	94
4	Jumlah Desa yang dapat difasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes	94	94	94	94	94
5	Jumlah Fasilitasi Pembentukan BUMDes	-	6	25	57	
6	Jumlah Perempuan yang terlatih dalam Pelatihan Keterampilan P2W	30	30	30	60	60
7	Jumlah Profil Desa Yang Terperbahurui	-	25	75	77	77
8	Jumlah pelaksanaan BBG-RM	1	1	1	1	1
9	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih	-	-	188	-	-
10	Jumlah Juara Lomba Desa/Kelurahan	6	6	6	6	6
11	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	2	1	-	1	1
12	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	5	5	7	7	7

Sumber: BPMD Tahun 2017

h. Perhubungan

Adapun beberapa indikator kinerja dalam usaha pencapaian target kinerja pembangunan dibidang urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.49: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Tingkat Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Pelabuhan Laut	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Terminal	4	4	4	4	3
4.	Jumlah Halte	11	11	12	12	19
5.	Jumlah Jaringan Trayek AKDP	3	3	3	3	4
6.	Jumlah Jaringan Trayek Perdesaaan	5	5	9	9	7
7.	Jumlah Dermaga LLASDP	16	17	19	22	28
8.	Jumlah Trayek LLASDP	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

i. Komunikasi dan Informatika

Pencapaian kinerja dari tahun 2013-2017 dalam usaha mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50: Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Tingkat Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketersediaan web site pemerintah daerah	unit	-	16	16	16	-
2.	Ketersediaan informasi daerah dalam bentuk digital	Keping CD,	⁾100 cd kegiatan ⁾350 CD kilas kobar ⁾350 cd majalah digital	⁾82 CD Kegiatan ⁾350 CD Kilas Kobar ⁾350 CD majalah digital	⁾62 CD Kegiatan ⁾350 CD Kilas Kobar ⁾350 CD majalah digital	⁾62 CD Kegiatan ⁾350 CD Kilas Kobar ⁾350 CD majalah digital	⁾47VCD ⁾Kegiatan ⁾300 VCD Kilas Kobar ⁾300 VCD Profile Kotawaringin Barat
3.	Ketersedian bulletin, buku dan poster pemerintah daerah,foto,spanduk, baliho	Eksemplar, buku,lembar	⁾50 album foto kegiatan ⁾150 Buku Himpunan Pidato Bupati ⁾400 Kalender Meja ⁾350 buletin ⁾350 warta bergambar ⁾350 foto	⁾15 album foto kegiatan ⁾100 Buku Himpunan Pidato Bupati ⁾400 buletin ⁾400 Buku sejarah Kerajaan dan kab.	⁾20 album foto kegiatan ⁾150 Buku Himpunan Pidato Bupati ⁾500 buletin ⁾3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi) ⁾150 Buah	⁾20 album foto kegiatan ⁾150 Buku Himpunan Pidato Bupati ⁾500 buletin ⁾3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi) ⁾500 Kalender Meja	⁾24 photo book kegiatan ⁾150 Buku Himpunan Pidato Bupati ⁾500 Jurnal Kegiatan

No.	Indikator	Satuan	Tingkat Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
			bupati/wakil ⟩ 10 photo mantann bupati ⟩ 100 lembar spanduk ⟩ 240 m2 baleho ⟩ 13 media langganan koran	Ktw.barat ⟩ 400 Buku Profil Kota P.bun ⟩ 400 Kalender Meja ⟩ 400 Kalender dinding ⟩ 276 m2 baleho kegiatan ⟩ 125 lembar spanduk kegiatan ⟩ 830 Photo Bupati/Wakil	Photo Presiden dan Wakil Presiden RI ⟩ 500 Kalender Meja ⟩ 500 Kalender dinding ⟩ 279 m2 baleho kegiatan ⟩ 98 lembar spanduk kegiatan	⟩ 500 Kalender dinding ⟩ 279 m2 baleho kegiatan ⟩ 98 lembar spanduk kegiatan ⟩ 5 buah baleho Kecamatan	Pemda ⟩600 Kalender Meja ⟩600 Kalender dinding ⟩420 buah foto Bupati/ Wakil Bupati ⟩727 m2 baleho kegiatan ⟩28 lembar spanduk kegiatan ⟩365 eksemplar kliping berita
4.	Terselenggaranya pameran/ ekspo	kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
5.	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	media	6 Media	6 Media	7 media	5 media	4 media
6.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal/ Media Online	Media	5 Media (2 Radio lokal,radio RRI, SBTV dan TVRI)	5 Media (2 Radio lokal, RRI, SBTV dan TVRI)	6 media	4 media	2 media
7	Jumlah Pemberitaan melalui media cetak	media	5 media	5 media	7 media	7 media	2 media
8	Siaran Keliling /Publikasi Keliling	kali	-	46 kali	48 kali	47 kali	25 kali

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2018

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.51: Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Prosentase Koperasi aktif (%)	78,81	80,49	81,10	81,61	95,96
2.	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	
3.	Jumlah UMKM (Unit)	10.828	11.245	11.349	11.349	11.349

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2017 (diolah)

Berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah, perkembangan jumlah persentase koperasi yang aktif dan UMKM terus mengalami peningkatan. Jumlah koperasi aktif meningkat dari tahun 2013 sebesar 78,81% menjadi 95,96% pada tahun 2017 dengan kenaikan sebesar 17,15%. Jumlah UMKM juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 10.828 unit menjadi 11.349 unit pada tahun 2017 dengan persentase kenaikan sebesar 4,81%.

k. Penanaman Modal

Capaian kinerja utama urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat dari sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.52: Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 2013-2017

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016*	2017
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	42	29	35	45	
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	-	-	-	-	-
3.	PMDN (Rp)	6.044.026.347.434	6.518.940.123.391	714.448.540.000	3.710.499.700.000	265.396.300.000
4.	PMA ($)	792.229.370,40	920.119.034	455.203,99	1.996.616,4	4.489.380,00
5.	Rasio daya serap tenaga kerja	-	879,79	667,86	-	
6.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	2.544,03	474,91	108,81	459,1	

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2018
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Investor semakin berminat untuk membuka Investasi baru dan sudah mulai melihat prospek dan peluang pasar yang lebih baik. Hal ini didukung pula dengan kemudahan dalam proses pengurusan ijin usaha yang telah menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

l. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian kinerja urusan Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.53: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga 2013 – 2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional				12	14	-
	a. POPNAS	medali	6	9	4	7	-
	b. POSPENAS	medali	6	5	3	3	-
2.	Jumlah organisasi pemuda	buah	83	97	105	235	28
3.	Jumlah organisasi (klub) olah raga	buah	96	120	122	124	29
4.	Gedung olah raga/balai remaja	unit	7	8	8	8	3
5.	Lapangan olahraga	buah	150	150	150	150	7

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2018

Secara umum kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik, namun perhatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk perkembangan yang lebih baik.

m.Statistik

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	Target	Capaian Kinerja				
				2012	2013	2014	2015	2016
1.	Ketersediaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka	Buku	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Ketersediaan buku PDRB Kotawaringin Barat	Buku	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2016

n. Kebudayaan

Berdasarkan hasil inventarisasi Benda Cagar Budaya yang telah dilakukan terdapat 18 obyek yang merupakan benda cagar budaya terdiri dari kelompok kawasan, bangunan rumah tradisional, bangunan peribadatan, bangunan makam pendiri Kotawaringin Barat, kelompok gapura, tugu monumen, perabot jalan, dan kelompok ruang terbuka atau taman. Namun karena keterbatasan anggaran, setiap tahunnya baru 3 situs kawasan cagar budaya yang mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah.

Pelestarian kekayaan dan keragaman budaya daerah telah dilakukan melalui pembinaan grup kesenian di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 105 grup kesenian. Selain itu untuk lebih memperkenalkan kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki, setiap tahunnya diselenggarakan festival seni dan budaya dimana selama tahun 2012 sampai dengan 2017 telah dilaksanakan 23 kali penyelenggaraan.

o. Perpustakaan

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.55: Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perpustakaan	232	292	328	343	
2.	Jumlah anggota perpustakaan	4.711	5.621	7.012	8.732	1.599

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan	23.469	28.450	75.309	93.737	124.582
4.	Jumlah peminjam	6.965	11.017	45.287	73.393	13.158
5.	Jumlah koleksi bahan pustaka	15.473	16.645	18.173	21.799	36.4098
6.	Ratio Jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	232 : 261.200	292 : 252.492	328 : 278.141	343 : 286.714	
7.	Ratio jumlah pustakawan terhadap jumlah penduduk	2 : 261.200	3 : 252.492	1 : 278.141	1 : 286.714	

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan dari 15.473 judul buku menjadi 36.409 judul buku.

o. **Kearsipan**

Terkait dengan Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.56: Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan	2	-	-	5	-
3.	Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis	3	-	4	4	1
4.	Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)	4:36	4:36	4:36	4:36	5:36
5.	Arsip audio visual	265	265	-	265	30
6.	Arsip Foto/Album	0	279	309	30	36
7.	Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa	-	-	21	21	21
8.	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	-	19.462	19.515	19.515	300
9.	Jumlah Arsip Statis/Vital yang dikelola	-	1.001	1.008	7	311

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2013-2017

Capaian indikator pembangunan daerah urusan kearsipan adalah tersediannya pengelolaan arsip secara baku yang telah diselenggarakan tahun 2013 hingga saat ini dan meningkatnya jumlah Arsip In Aktif yang dikelola tahun 2014 meningkat 50 arsip di tahun 2015 dan 2016 menjadi 19.515 Arsip In Aktif.

2.2.3 Urusan Pemerintahan pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

a. Pertanian dan Peternakan serta Perkebunan

Capaian kinerja urusan Pertanian berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.57: Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2013 -2017

No.	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1.	***Luas tanam tanaman pangan***					
	Padi sawah (Ha)	7.200	6.866	5.412	4.209	646
	Padi ladang (Ha)	3.104	2.862	1.454	746	166
	Jagung (Ha)	503	638	1.526	2.438	601
2.	***Luas Panen Tanaman Pangan***					
	Padi sawah (Ha)	6.823	6.914	4.000	4.731	3.934
	Padi ladang (Ha)	2.814	2.674	1.664	1.296	732
	Jagung (Ha)	488	616	608	1.171	2.025
3.	***Produktivitas tanaman pangan***					
	Padi sawah (Ton/Ha)	3,39	3,42	3,73	3,63	3,43
	Padi ladang (Ton/Ha)	2,18	2,18	2,28	2,05	2,01
	Jagung (Ton/Ha)	3.69	3,75	3,65	3,73	3,87
4.	***Produksi tanaman pangan***					
	Padi sawah (Ton)	23.130	23.646	14.928	17.174	13.482
	Padi ladang (Ton)	6.148	5.837	3.797	2.657	1.472
	Jagung (Ton)	1.799	2.308	2.219	4.368	7.842

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2016

Pada tabel di atas capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari produktivitas padi atau bahan pangan utama, dimana dari tahun ke tahun selama 2013-2017 produktivitasnya semakin menurun. Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang juga semakin menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk capaian kinerja sub sektor peternakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Peternakan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1.	***Populasi Ternak***					
	Sapi (ekor)	11.148	13.155	14.397	17.203	4.789
	Kerbau (ekor)	-	-	-	-	-
	Kambing /Domba (ekor)	2.118	2.398	2.764	2.538	3.997
	Babi (ekor)	5.327	5.498	5.718	5.881	
	Ayam buras (ekor)	342.230	343.941	345.661	346.843	
	Ayam ras petelur (ekor)	-	-	46.500	50.794	293.219
	Ayam ras pedaging (ekor)	163.699	166.973	158.253	210.115	
	Itik (ekor)	39.708	40.317	41.527	42.574	880
2.	***Produksi Daging Ternak***					
	Sapi (Ton)	551,99	552,96	572,24	625,86	1.047,68
	Kerbau (Ton)	-	-	-	-	
	Kambing / Domba(Ton)	49,43	49,62	58,14	33,02	42,88
	Babi (Ton)	94,00	93,25	94,47	86,53	86,15
	Ayam buras (Ton)	317,36	388,09	340,50	400,6	
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	20,39	
	Ayam Ras Pedaging (Ton)	885,56	886,34	817,78	1.031,75	
	Itik (Ton)	15,77	17,78	14,12	17,09	
3.	***Produksi Telur***					
	Ayam buras (Ton)	207,98	208,76	207,98	212,71	
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	209,25	366,39	388,31
	Itik (Ton)	133	133,42	133,19	179,97	
4.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	0,77	072	0,63	0,61	
5.	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,22	1,18	1,20	1,12	
6.	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%)	28,32	27,70	26,38	26,06	

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2016

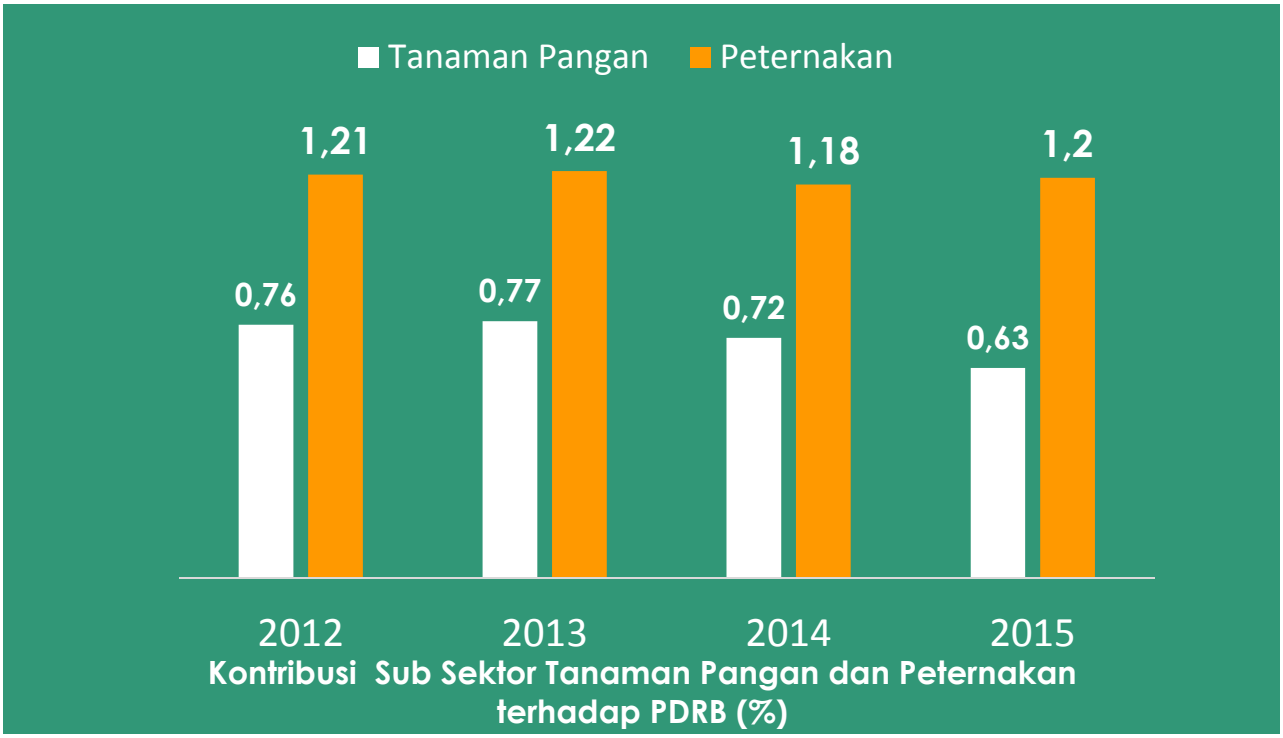

Gambar 2.23: Kontribusi SubSektor Tanaman Pangan dan Peternakan terhadap PDRB Kab. Kotawaringin Barat (%)

Berdasarkan Tabel 2.58 di atas terlihat populasi sapi potong dari tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan sebesar 45,82%. Secara umum populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah ternak sapi, kambing, ayam petelur dan ayam ras pedaging. Populasi ternak kambing/domba dari tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 21,03%, Populasi ternak babi dari tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 4,41% namun pada tahun 2016 mengalami penurunan.Lokasi pengembangan terbesar berada di Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama. Populasi ternak unggas dari tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 27,35%, dan tahun 2015 populasi ayam ras petelur mulai diusahakan dengan sekala ekonomis dengan populasi sebesar 46.500 ekor melampaui target populasi sebesar 38.500 ekor atau 122%.

Capaian kinerja sub sektor perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	35,25	35,25	21,61	21,61	25,25
2.	Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)	83,73	83,73	88,6	88,6	42,81
3.	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US$)	263.608.993,65	31.074.462,39	189.439,16	189.439,16	28.920.764
4.	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	48.018	48.018	55.160	55.160	55.160
5.	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	1	-	15	15	14
6.	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	14.670.000.000	14.670.000.000	12.447.807.384	12.447.807.384	7.511.246.815
7.	Kemitraan/Plasma	28,785,91	32.634.59	28.785,91	28.785,91	28.785,91
8.	**Pengembangan/ perluasan areal perkebunan**	**204.868,62**	**192.846,56**	**212.426**	**212.426**	
a.	Karet	17.451,50	17.907	14.560,30	14.560,30	12.470
b.	Kelapa sawit	184.695,33	173.048,34	196.541,30	196.541,30	200.759,35
c.	Kelapa	1.176,51	1.069,52	738,75	738,75	938,75

No.	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
d.	Lada	875,20	578,20	318,6	318,6	312,90
e.	Lainnya	313,50	243,50	267,51	267,51	268,51
9.	**Produksi komoditi perkebunan**	**3.029.378**	**3.593.559**	**2.981.823,68**	**2.981.823,68**	
a.	Karet (lump)	8.012,06	7.619,19	7.253,83	7.253,83	7.235,00
b.	Kelapa (kopra)	358,57	343,83	265,45	265,45	260,22
c.	Kelapa Sawit (Tbs)	3.020.668,88	3.585.307,15	2.974.134,28	2.974.134,28	2.731.511
d.	Lada (putih/hitam)	316,81	268,95	156,49	156,49	156,00
e.	Lainnya	21,50	20,24	13,63	13,63	13,63

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2018

Produksi perkebunan per komoditi dari 2013 – 2017 mengalami penurunan pada semua komoditi karena pengaruh musim kemarau panjang. Namun pada komoditas karet pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 23,62%, Produksi kelapa sawit mengalami peningkatan tahun 2014 sebesar 18,69%. Penurunan produksi komoditas perkebunan khususnya komoditas kelapa dalam sudah kurang berproduksi karena umur tanaman sudah tua, sehingga perlu peremajaan.

b. Kelautan dan Perikanan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kelautan dan Perikanan dari tahun 2012 sampai 2015 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.60: Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Produksi perikanan (Jumlah Produksi dibagi target daerah dikalikan 100%)	108,23	97,22	113,03	109,38	106,54
2.	Komsumsi Ikan (Jumlah komsumsi dibagi target daerah dikalikan100%)	97,53	98,99	98,74	99,06	106,71
3.	Cakupan Bina kelompok Nelayan (Jumlah kelompok nelayan yang	85,21	54,35	61,87	36,95	40,12

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
	mendapatkan bantuan Pemda dibagi jumlah kelompok nelayan pada tahun n dikalikan 100%)					
4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Jumlah produksi ikan hasil kelompok nelayan dibagi jumlah produksi ikan daerah dikalikan 100%)	14,31	36,09	18,57	20,09	10,16

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat 2017

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 – tahun 2017 seperti tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.61: Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan Tahun 2013-2017

No.	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi perikanan (TON)	13.506,67	16.345,53	16.661,43	19.922,39	20.813,94
2.	Perikanan tangkap (TON)	10.684,10	12.165,80	12.050,40	14.792,70	15.851,87
3.	Perikanan Budi daya (TON)	2.822,57	4.179,73	4.611,03	5.129,69	4.962,07
4.	Konsumsi ikan (KG/KAPITA)	37,23	37,5	38	41,35	45
5.	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan (KELOMPOK)	424	374	458	453	
6.	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang dibina (KELOMPOK)	99	115	165	209	
7.	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	463,77	1.357,13	431,3	493,97	

No.	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
8.	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	9.201,96	10.338,75	10.152,69	10.402	
9.	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	37,5	38,5	39	42,2	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat 2017

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi produksi perikanan tiap tahunnya sebesar 2,66%/tahun dimana peluang pengembangan eksplorasi dan eksploitasi produksi masih sangat besar. Rata-rata realisasi Komsumsi Ikan tiap tahunnya terdapat kecenderungan peningkatan dimana peningkatan tersebut telah melampaui target tingkat komsumsi ikan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 3,5 kg/kapita.

c. Pariwisata

Pencapaian kinerja dari tahun 2012-2016 dalam usaha mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62: Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	13.355	16.035	12.564	15.106	24.693
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. (%)	1,28	1,24	1,31		

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2018

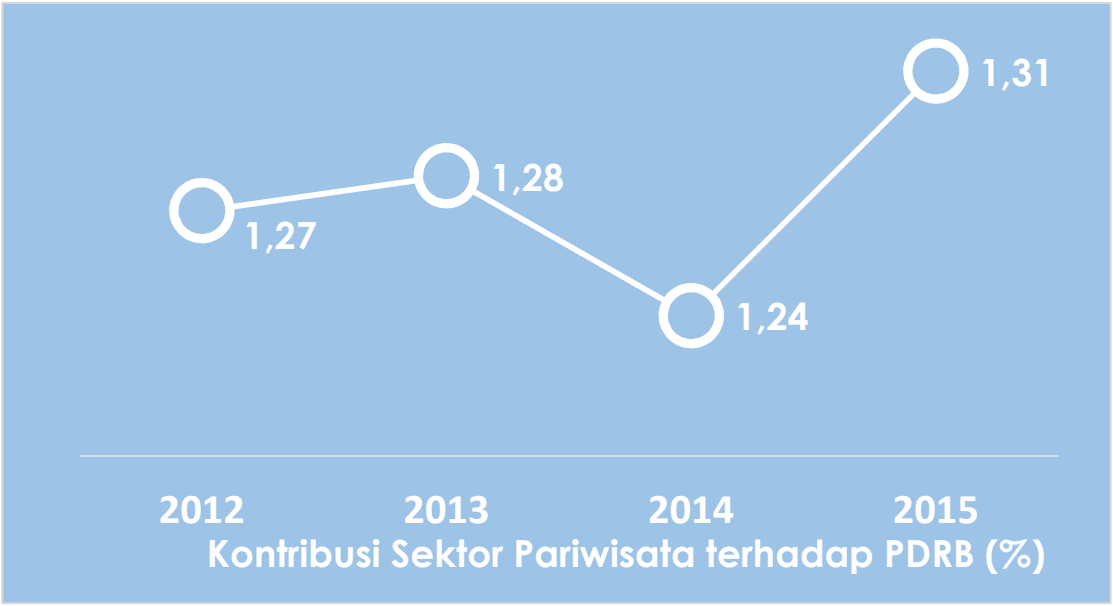

Gambar 2.24: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)

Jumlah kunjungan wisatawan dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan. Penurunan jumlah wisatawan dikarenakan krisis Ekonomi Eropa dan adanya bencana kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan dan Sumatera, walaupun jumlah wisatawan menurun tetapi pendapatan retribusi meningkat terutama TNTP, karena perubahan tarif masuk. Kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2012 sebesar 1,27% dan meningkat di tahun 2015 menjadi 1,31% atau meningkat 0,04% yang berasal dari sub sektor penyediaan akomodasi dan sub sektor penyediaan makan minum.

d. Energi dan Sumberdaya Mineral

Capaian kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.63: Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015*	2016**
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,80	1,75	1,45	1,36	1,38

Sumber: Kobar dalam angka BPS,2017
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja di atas Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terus mengalami penurunansebesar 0,42%. Penurunan tersebut sebagai akibat dari adanya penutupan lokasi atau penertiban penambangan secara berkala di seluruh 6 kecamatan.

Tabel 2.64: Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Volume dan Nilai Ekspor Pertambangan Tahun 2013 – 2017

Uraian	Volume Ekspor(MT)					Nilai Ekspor(dalam Ribuan Rp)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Zircon Sand	11.642	10.346	13.998	12.446	14.043	2.328.400	2.069.200	2.779.600	2.489.200	2.808.600
Lump Ore Zink	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Iron Ore	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Ilmenite	4.923	-	-	-	-	123.075	-	-		-
Jumlah	**16.565**	**10.346**	**13.998**	**12.446**	**14.043**	**2.451.475**	**2.069.200**	**2.779.600**	**2.489.200**	**2.808.600**

Sumber Data: Bagian Perekonomian dan SDA Tahun 2017

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja diatas, volume dan nilai perdagangan ekspor di Kabupaten Kotawaringin Barat terus berjalan dari tahun 2012-2016 walaupun mengalami fluktuasi.

Tabel 2.65: Kontribusi sektor Ketenagalistrikan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sektor listrik terhadap PDRB	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05

Sumber: Kobar Dalam Angka Tahun 2017

Kontribusi sektor Ketenagalistrikan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut pada tahun 2015 sebesar 0,05% dikarenakan adanya perubahan tarif dasar listrik (TDL) oleh pemerintah, meningkatnya pemasangan jaringan listrik untuk rumah masyarakat dan adanya perubahan tegangan voltase atau KWH dari 450 ke 900, 1300 atau 2200 yang berdampak kepada meningkatnya penerimaan dari sektor listrik ini untuk daerah.

e. Perindustrian

Capaian Indikator kinerja Urusan Perindustrian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dituangkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.66: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	24.25	13,87	13,2	25,24	25,3
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	1,5	6,52	5,22	6,2	4,82
3.	Pertumbuhan Industri (unit)	71	28	55	43	17
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin (Kelompok)	3	7	16	19	0

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2017

Sebagian besar target indikator kinerja dapat dicapai bahkan jauh melebihi target, pada indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari 24,25% pada tahun 2012 meningkat menjadi 25,3 % di Tahun 2016. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri meningkat juga nilainya dari 1,5 % di tahun 2012 menjadi 4,82 % di tahun 2016. Sementara indikator pertumbuhan Industri mengalami penurunan dari 71 unit pada 2012 menjadi 17 unit di tahun 2016, namun angka ini masih melampaui target sedangkan indikator cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2012-2013 yang tidak mencapai target namun pada 2014-2015 angka indikator tersebut telah melampaui target. Untuk indikator pertumbuhan industri, terjadi dinamika yang fluktuatif.

f. Perdagangan

Capaian kinerja urusan perdagangan pada tahun 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 67: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	11,91	11,93	12,02	12,59	12,67
2	Ekspor Bersih Perdagangan ($)	547.585.488	215.253.097,17	183.735.699,94	186.428.669,99	120.298.709,60
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	53.865.000	-	-	-	-

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2017

Capaian kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, yang selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar 11,91% meningkat di tahun 2015 menjadi sebesar 12,59% atau meningkat 0,68%. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya volume perdagangan besar dan eceran serta perdagangan ekspor. Sedangkan nilai ekspor bersih dari tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

g. Transmigrasi

Capaian kinerja urusan Transmigrasi berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.68: Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jenis sarana dan prasarana yang dibangun di wilayah transmigrasi	2 unit mesin penggiling padi, 1 unit tambatan klotok berikut selter dan siring batu sepanjang 5 meter serta buku-buku hasil identifikasi	Pembangunan workshop, Pembangunan lantai jemur, Pembangunan kantor koperasi Pembinaan Pembangunan KTM di desa Tanjung	Pembangunan tambatan klotok dan shelter, Sarana TPQ, Badan jalan	Pengadaan tanah kuburan di UPT kumai seberang, Penimbunan badan jalan dan Pembuatan siring batu	Pengadaan tanah kuburan di UPT kumai seberang (0,5 ha), Penimbunan badan jalan (700 m) dan Pembuatan siring batu (220 m3)

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
		kawasan transmigrasi.	Terantang dan penyelesaian sengketa lahan transmigrasi			

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2017

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Beberapa perspektif tentang daya saing yang mencakup wilayah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Daya saing tempat (lokalitas dan daerah) merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal (setempat) untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi warga/penduduknya.
2. Daya saing daerah berkaitan dengan kemampuan menarik investasi asing (eksternal) dan menentukan peran produktifnya.
3. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Beberapa indikator untuk mengukur daya saing adalah:

1. Indikator makroekonomi, di mana indikator daya saing dilihat dari beberapa aspek seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca antara ekspor dan impor.
2. Indikator kualitas infrastruktur. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan sektor infrastruktur, sektor ini diketahui telah mengalami peningkatan dari semula dari peringkat 96 menjadi peringkat 90.
3. Indikator kesehatan dan pendidikan dasar yang meningkat dari peringkat 82 menjadi peringkat 62. Menurut laporan Program (Millenium Development Goals/MDG’s), pada 2010 bidang kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama

dalam masalah gizi buruk, kematian ibu sewaktu melahirkan, dan penyakit HIV AIDS.

Secara umum, daya saing dapat dilihat dari posisi dibandingkan dengan daerah lain. Salah satu penilaian yang dilakukan dan dijadikan parameter umum keunggulan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah analisis tipologi klassen. Dengan menggunakan data tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita tahun 2011-2015, hasil analisis Tipologi Klassen terhadap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

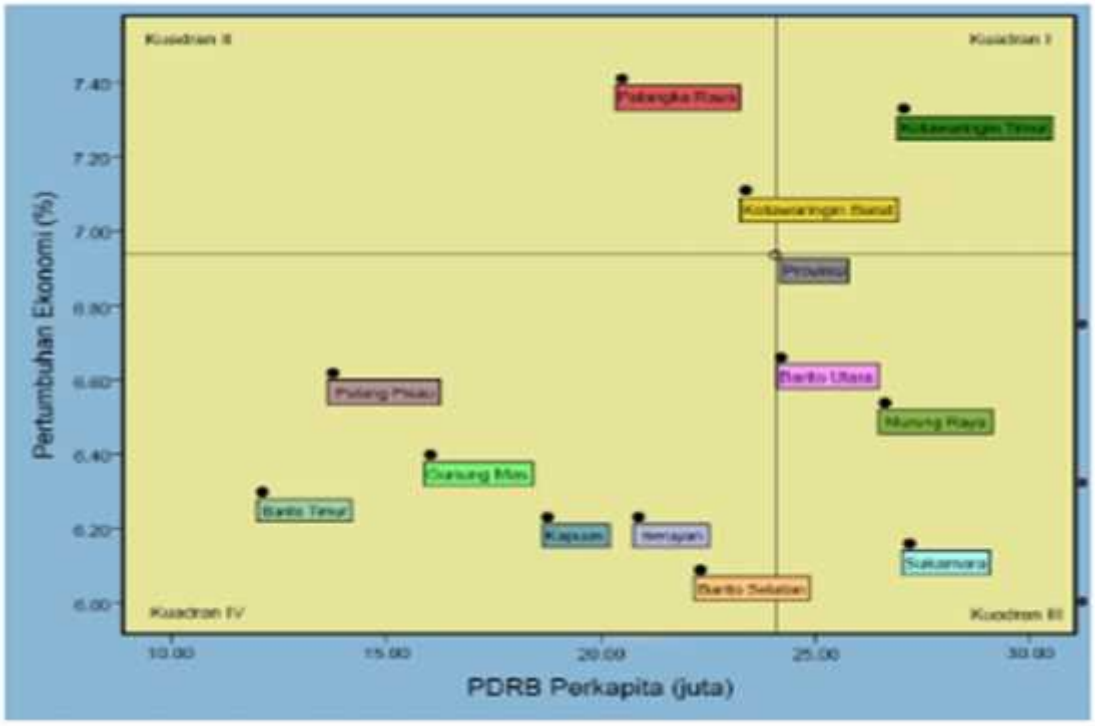

Gambar 2.25
Hasil Analisis Tipologi Klassen terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

Analisis tersebut membagi daerah dalam empat kuadran wilayah, yaitu:

- Kuadran 1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota.
- Kuadran 2. Daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota.
- Kuadran 3. Daerah Maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.

- Kuadran 4. Daerah relatif tertinggal yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.

Hasil analisis Tipologi Klassen di atas menunjukkan Kabupaten Kotawaringin Barat masuk dalam kuadran I, yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi dan tingkat pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota. Hasil analisis tersebut memberikan gambaran bagi pemerintah untuk dapat mengambil langkah kebijakan mempertahankan dan meningkatkan kondisi saat ini, yakni melalui optimalisasi sektor unggulan untuk mendorong peningkatan PDRB di semua sektor.

2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 – 2015 meningkat dari 6,91% menjadi 7,32%. Namun pada tahun 2015 – 2016 terjadi penurunan dari 7,32% menjadi 5,81% dan pada tahun 2017 naik menjadi 6.81 %

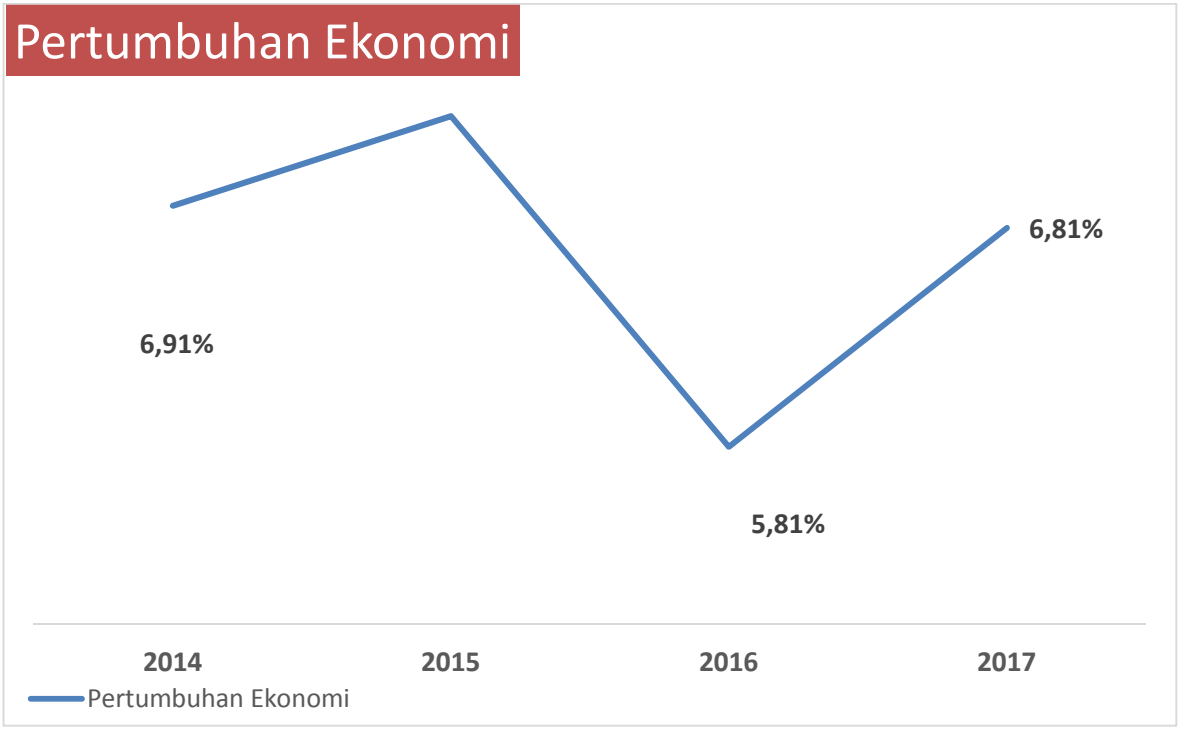

Gambar 2. 26: Pertumbuhan Ekonomi

2.3.1.2. Pertanian, Perkebunan, Peternakan

Salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, yaitu “Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis

pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup", menyiratkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan adanya upaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan kemandirian ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian.

Pada Tahun 2016 Sektor Pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebesar 24,13 persen, meskipun kontribusinya dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.69 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sektor Pertanian, terhadap PDRB (%)	27,70	26,35	25,88	24,36	24,13

Sumber : Publikasi BPS Kab. Ktw Barat 2017

Tabel 2.70: Capaian kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 -2016

No	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2013		2014		2015		2016		2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	***Luas tanam tanaman pangan***										
	Padi sawah (Ha)	7.251	7.200	7.848	6.866	8.453	5.412	9.065	4.209	8.453	646
	Padi ladang (Ha)	3.681	3.104	3.781	2.862	3.881	1.454	3.981	746	3.881	166
	Jagung (Ha)	1.336	503	1.402	638	1.472	1.526	1.546	2.438	1.678	601
	Luas Panen Tanaman Pangan										
	Padi sawah (Ha)	6.889	6.823	7.456	6.914	8.030	4.000	8.612	4.731	8.030	3.934
	Padi ladang (	3.497	2.814	3.592	2.674	3.687	1.664	3.782	1.296	3.687	732
	Jagung (Ha)	1.269	488	1.332	616	1.399	608	1.469	1.171	1.399	2.025

3.	***Produktivitas tanaman pangan***										
	Padi sawah (Ton/Ha)	3,23	3,39	3,55	3,42	3,79	3/,73	4,10	3,63	3,79	3,43
	Padi ladang (Ton/Ha)	2,10	2,18	2,11	2,18	2,12	2,28	2,13	2,05	2,50	2.01
	Jagung (Ton/Ha)	3,16	3.69	3.20	3,75	3,25	3,65	3.30	3,73	3,63	3,87
4.	***Produksi tanaman pangan***										
	Padi sawah (Ton)	22.224	23.130	26.467	23.646	30.435	14.928	35.308	17.174	30.435	13.482
	Padi ladang (Ton)	7.330	6.148	7.579	5.837	7.816	3.797	8.056	2.657	7.816	1.472
	Jagung (Ton)	4.010	1.799	4.262	2.308	4.547	2.219	4.848	4.368	5.078	7.842

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2018

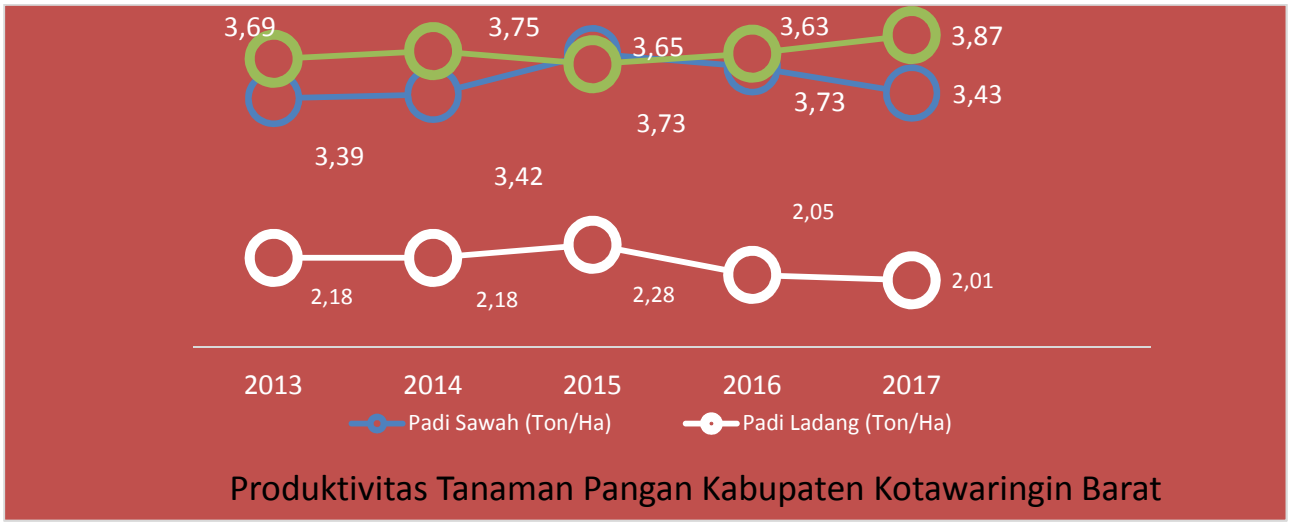

Gambar 2. 27: Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian produktivitas tanaman pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 produktivitas tanaman padi sawah mencapai 3,39 Ton/Ha naik menjadi 3,43 Ton/Ha pada tahun 2017. Tanaman padi ladang ada kecerungan mengalami penurunan produktivitas dari 2,18 Ton/Ha pada tahun 2013, menjadi 2,01 Ton/Ha pada tahun 2017. Sedangkan Capaian prooduktivitas tanaman jagung pada tahun 2013 yaitu 3,69 Ton/Ha, lalu mengalami peningkatan hingga 3,87 Ton/Ha pada tahun 2017.

Tabel 2. 71: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2013		2014		2015		2016		2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Kontribusi sub sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB (%)		23,36		22,96		21,56		21,25	25.25	25.25
2.	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US$)	161.306.735,49	263.608.993,65	161.306.735,49	31.074.462,39	199.182	189.439,16		189.439,16	28.920.764.	28.920.764.
3.	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	67.820	48.018	67.820	48.018	79.820	55.160		55.160	55.160	55.160
4.	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	1	1	1	-	1	15		15	14	14
5.	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	12.000.000.000	14.670.000.000	12.000.000.000	14.670.000.000	3.000.000.000	12.447.807.384		12.447.807.384	11.500.000.000	7.511.246.815
6.	Kemitraan/Plasma	25.958,00	28,785,91	25.957,91	32.634.59	25.958,00	28.785,91		28.785,91	25.957,91	28.785,91
7.	**Pengembangan/ perluasan areal perkebunan**	219.753,00	204.868,62	219.753,29	192.846,56	225.833,00	212.426		212.426		214.750
a.	Karet	17.434	17.451,50	17.834	17.907	18.284	14.560,30		14.560,30	12.470	12.470
b.	Kelapa sawit	199.909	184.695,33	199.909	173.048,34	204.909	196.541,30		196.541,30	200.759,35	200.759,35
c.	Kelapa	1.177	1.176,51	1.176,51	1.069,52	1.205	738,75		738,75	938,75	938,75
d.	Lada	875	875,20	875,20	578,20	1.042	318,6		318,6	312,90	312,90
e.	Lainnya	358,58	313,50	358,58	243,50	394	267,51		267,51	268,51	268,51
8.	Produksi komoditi perkebunan	4.103.985	3.029.378	4.103.985	3.593.559	16.402	2.981.823,68		2.981.823,68		2.739.175,85
a.	Karet (lump)	6.805,19	8.012,06	6.805,19	7.619,19	15.600	7.253,83		7.253,83	7.253,83	7.235,00
b.	Kelapa (kopra)	374,04	358,57	374,04	343,83	347	265,45		265,45	265,45	260,22
c.	Kelapa Sawit (Tbs)	4.096.334,35	3.020.668,88	4.096.334,35	3.585.307,15	.550.000	2.974.134,28		2.974.134,28	2.974.134,28	2.731.511
d.	Lada (putih/hitam)	448,33	316,81	448,33	268,95	432	156,49		156,49	156,49	156,00
e.	Lainnya	23,40	21,50	23,4	20,24	23,40	13,63		13,63	13,63	13,63

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2017

Sub Sektor Tanaman Perkebunan yang merupakan komponen dari Sektor Pertanian menjadi penyumbang kontribusi yang paling besar setelah Industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu tercatat sebesar 21,25 persen pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan menjadi 25,25 %. Melihat fenomena ini bisa dikatakan bahwa sub sektor tanaman perkebunan (terutama kelapa sawit) sangat mempengaruhi terhadap PDRB Kabupaten

Kotawaringin Barat. Apabila golongan ini mengalami gangguan maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

Tabel 2.72: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Peternakandi Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2013		2014		2015		2016		2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	***Populasi Ternak***										
	Sapi (ekor)	14.681	11.148	16.777	13.155	18.726	14.397	20.872	17.203		
	Kerbau (ekor)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kambing /Domba (ekor)	2.225	2.118	2.373	2.398	2.530	2.764	2.699	2.538		
	Babi (ekor)	5.371	5.327	5.761	5.498	6.178	5.718	6.625	5.881		
	Ayam buras (ekor)	354.482	342.230	399.856	343.941	451.037	345.661	508.770	346.843		
	Ayam ras petelur (ekor)	-	-	-	-	38.000	46.500	-	50.794		
	Ayam ras pedaging (ekor)	183.461	163.699	203.164	166.973	224.984	158.253	249.148	210.115		
	Itik (ekor)	40.355	39.708	42.901	40.317	45.608	41.527	48.485	42.574		
2.	***Produksi Daging Ternak***										
	Sapi (Ton)	591,81	551,99	623,29	552,96	694,99	572,24	737,42	625,86		
	Kerbau (Ton)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kambing / Domba(Ton)	51,60	49,43	54,61	49,62	57,79	58,14	61,16	33,02		
	Babi (Ton)	102,28	94,00	108,52	93,25	115,14	94,47	122,16	86,53		
	Ayam buras (Ton)	354,48	317,36	393,64	388,09	435,95	340,50	482,82	400,6		
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	-	-	-	-	20,39		
	Ayam Ras Pedaging (Ton)	839,04	885,56	839,86	886,34	892,1	817,78	947,59	1.031,75		
	Itik (Ton)	13,70	15,77	14,41	17,78	15,14	14,12	15,9	17,09		
3.	***Produksi Telur***										
	Ayam buras (Ton)	224,08	207,98	251,31	208,76	281,84	207,98	316,09	212,71		
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	-	171,00	209,25	-	366,39		
	Itik (Ton)	138,13	133	149,20	133,42	161,17	133,19	174,09	179,97		
4.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	-	0,77	-	075	-	0,65	-	0,64		

No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2013		2014		2015		2016		2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5.	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	-	1,22	-	1,18	-	1,20	-	1,28		
6.	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%)	-	28,32	-	27,70	-	26,38	-	26,06		

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2017

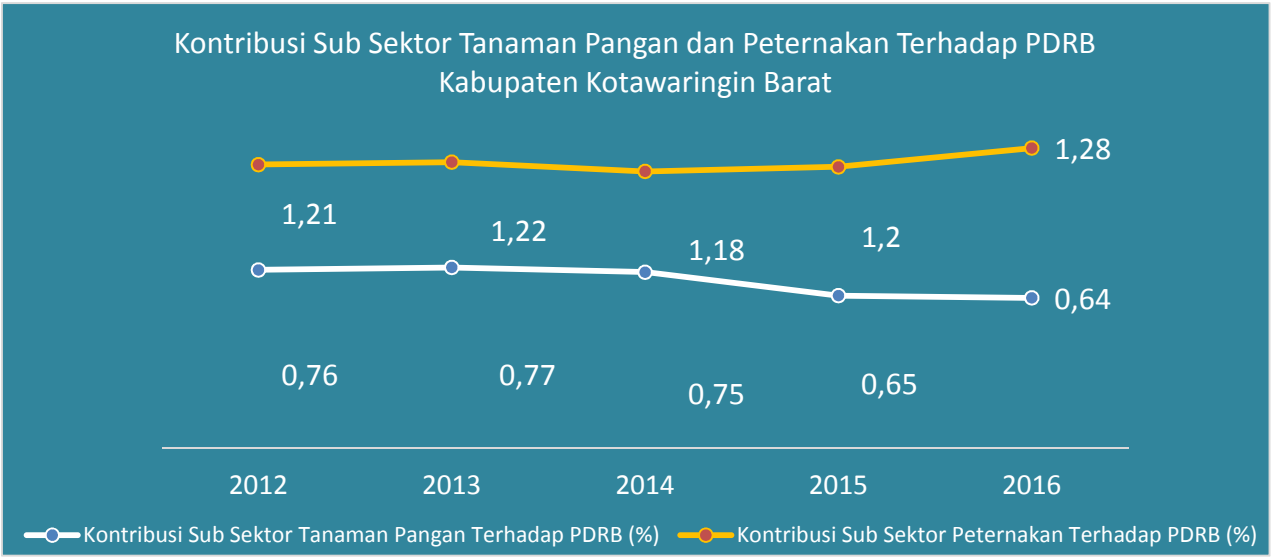

Gambar 2. 28: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

Populasi sapi potong dari tahun 2012–2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 4,70%, meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan jumlah populasi bila dibandingkan pada tahun 2012 yang disebabkan adanya mutasi ternak sapi ke luar daerah.

Populasi ternak kambing/domba dari tahun 2012 – 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 9,83%, Populasi ternak babi dari tahun 2012 – 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 4,41%, lokasi pengembangan terbesar berada di Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama.

Populasi ternak unggas dari tahun 2012 – 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 3,32%, dan tahun 2015 populasi ayam ras petelur mulai diusahakan dengan sekala ekonomis dengan populasi sebesar 46.500 ekor. melampau target populasi sebesar 38.500 ekor atau 122%.

Secara umum populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah ternak sapi, kambing, ayam petelur dan ayam ras pedaging. Peningkatan populasi sapi, kambing/domba dikarenakan jumlah kelahiran lebih banyak dibandingkan jumlah

pemotongan. Selain itu minat masyarakat dalam memelihara ternak sapi juga meningkat, terutama pola pengembangan integrasi sawit-sapi. Populasi ayam petelur mulai tahun 2015 mulai meningkat karena banyak masyarakat yang berminat usaha ayam petelur yang lebih menguntungkan.

Selanjutnya dari sisi produksi nampak bahwa produksi daging di Kabupaten Kotawaringin Barat terus naik dari tahun ke tahun. Produksi daging mengalami peningkatan disebabkan populasi sapi, kambing/domba, babi, ayam ras pedaging meningkat, sedangkan produksi telur berfluktuasi dalam kurun waktu Tahun 2012-2015. Produksi telur ayam buras sempat mengalami penurunan pada Tahun 2015 karena banyak ayam buras yang tidak sedang dalam masa produksi, namun pada Tahun 2015 produksi telur mengalami peningkatkan dikarenakan populasi ayam petelur meningkat.

2.3.1.3 Perikanan dan Kelautan

Tabel 2.73: Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Utama Urusan Kelautan dan Perikanan	Capaian Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi perikanan (Jumlah Produksi dibagi target daerah dikalikan 100%)	97,22	113,03	109,38	106,54	103,29
2.	Komsumsi Ikan (Jumlah komsumsi dibagi target daerah dikalikan 100%)	98,99	98,74	99,06	106,71	100
3.	Cakupan Bina kelompok Nelayan (Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda dibagi jumlah kelompok nelayan pada tahun n dikalikan 100%)	54,35	61,87	36,95	40,12	
4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Jumlah produksi ikan hasil kelompok nelayan dibagi jumlah produksi ikan daerah dikalikan 100%)	36,00	18,57	20,09	10,16	23,8

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

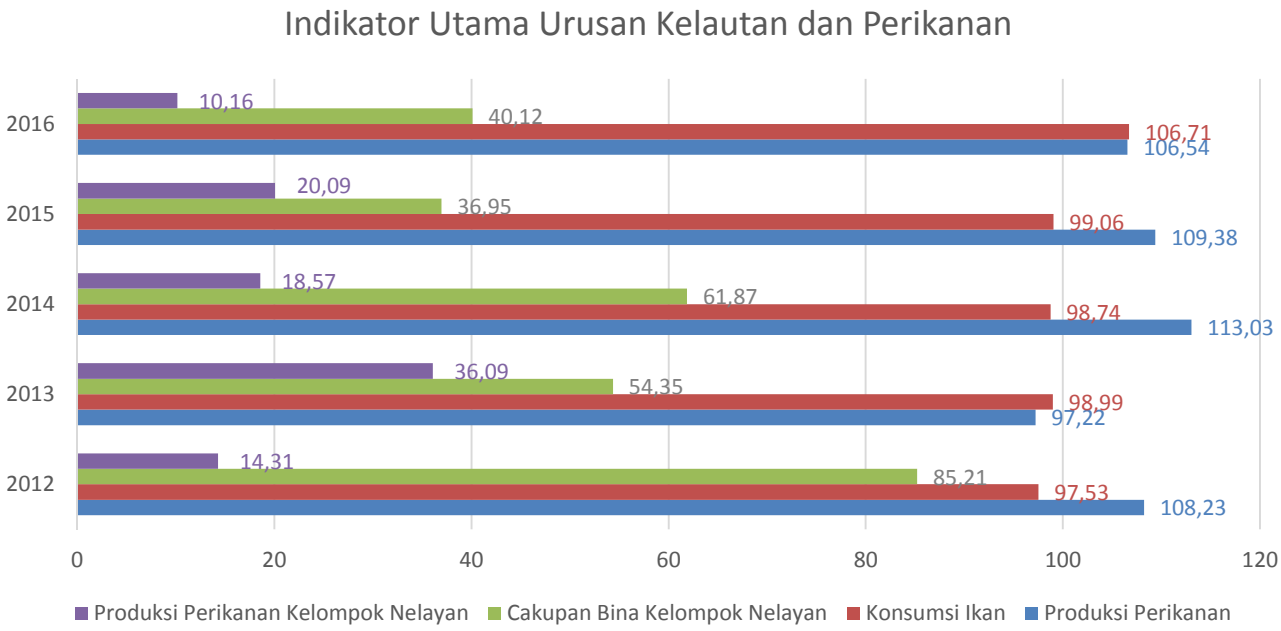

Gambar 2.29: Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami fluktuatif dimana terjadi peningkatan dan penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 106,71 pada tahun 2016. Pada indikator cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Kondisi yang sama juga terjadi pada Produksi Perikanan Kelompok dimana pada tahun 2013 menunjukkan capaian tertinggi sebesar 36,00 % dan pada tahun 2017 capaiannya mengalami penurunan menjadi 23,8 %.

Potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Luas Areal Penangkapan ikan di perairan umum yang mencapai 135.00 Ha, Potensi Perikanan Lestari 50% /tahun : (48.120 ton/th); dengan rincian Perairan Umum 5.400 ton/th dan Perairan laut 42.720 ton/th, dan Lahan pertambakan udang sebesar 766 Ha.

2.3.1.4 Kehutanan

Tabel 2.74: Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Di Kabupaten

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	-	-	-	3,29	-
2.	Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-
3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,63	0,55	0,57	0,61	0,55
4.	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	75	34	100	155,25	25
5.	Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)	1.241,50	292	75	1.400	300

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2017

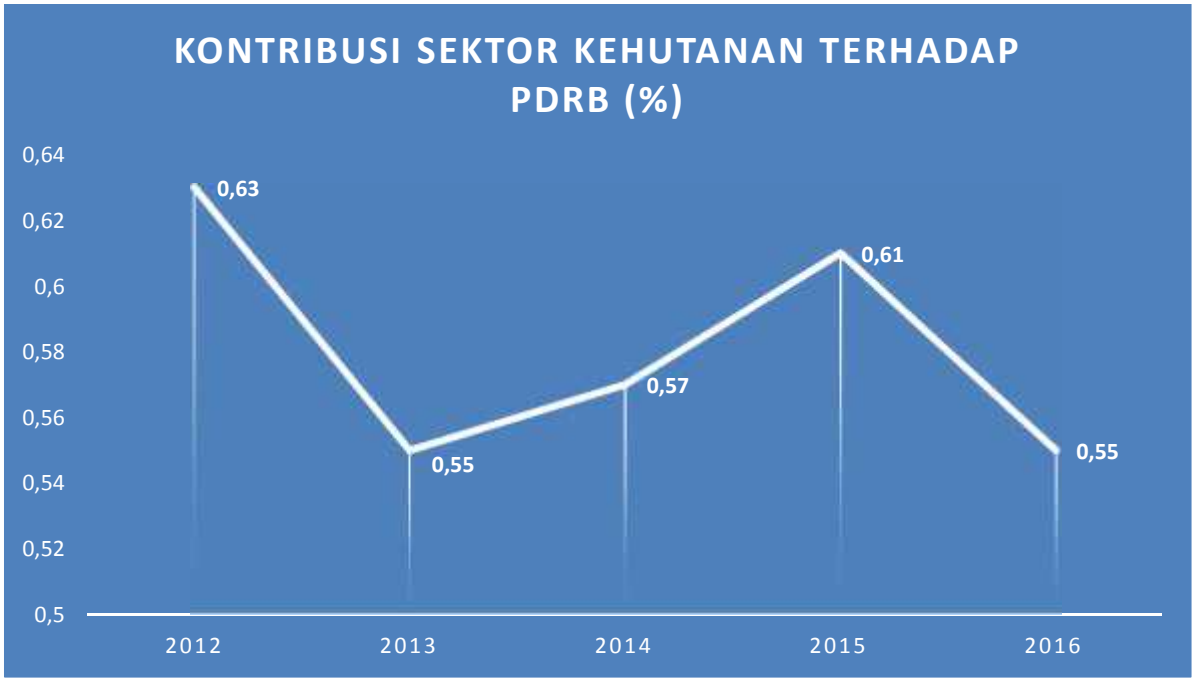

Gambar 2.30: Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi kehutanan yang cukup tinggi, dengan luas potensi hutan mencapai 985.437 Ha. Hutan rakyat dan lahan terbuka hijau terus mengalami peningkatan sejak tahun 2013, yaitu sebanyak 100 Ha pada

tahun 2014 dan 155,25 Ha pada tahun 2015. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kondisi yang fluktuatif, mengalami peningkatan dan penurunan.

2.3.1.5 Industri

Tabel 2.75: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Target di RPJMD Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	15,25	24.25	15,30	24,81	25.43	25,53	15,35	25,53		25,36
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	1,3	1,5	1,35	6,52	6,2	5,22	1,4	6,2		4,82
3.	Pertumbuhan Industri (unit)	2,17	71	2,18	28	43	55	2,19	43		17
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin (Klpk)	12	3	12	7	19	16	12	19		0

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2017

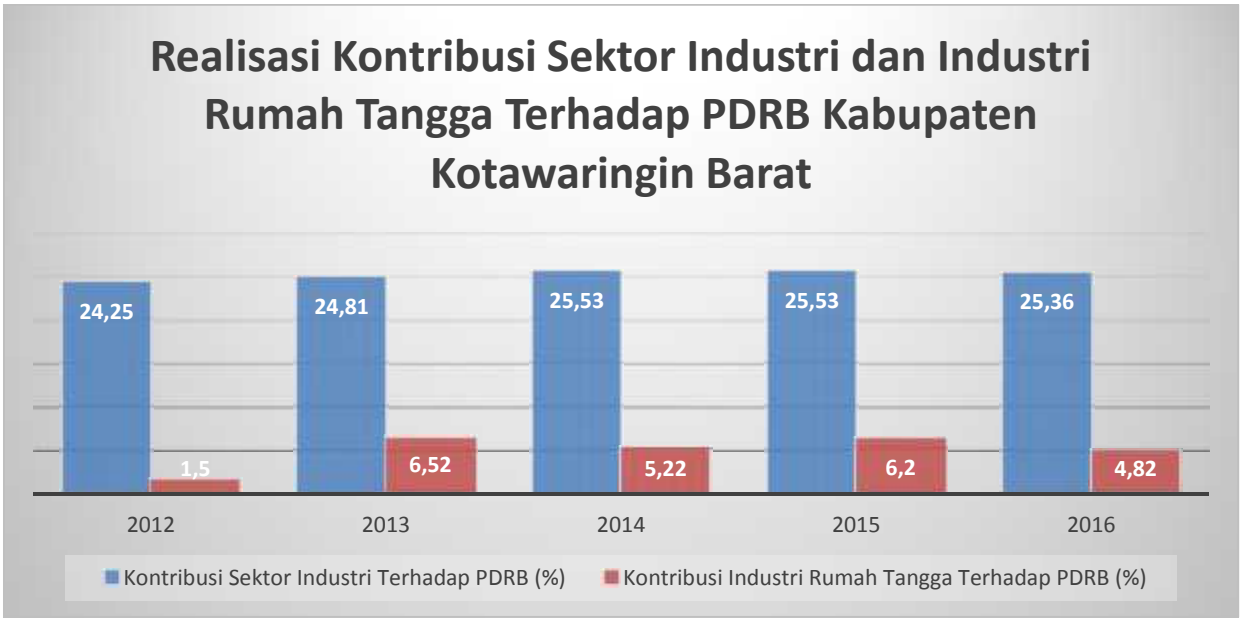

Gambar 2.31: Realisasi Kontribusi Sektor Industri dan Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 mencapai 24,25%, meningkat pada tahun 2013 menjadi 24,81%, tahun 2014 dan 2015 mencapai 25,53%, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 25,36%. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri mengalami peningkatan secara drastis dari 1,5% pada tahun 2012 menjadi 6,52% pada tahun 2013. Namun, penurunan terjadi di tahun 2014 menjadi 5,22% dan kembali meningkat menjadi 6,2% di tahun 2015 dan pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 4,82%. Pertumbuhan industri bersifat fluktuatif hingga pada 2016 mencapai 17 unit. Sedangkan, cakupan bina kelompok pengrajin terus mengalami peningkatan hingga mencapai 19 kelompok pada tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016 belum terdata.

2.3.1.6 Pariwisata

Tabel 2.76: Indikator Kinerja Urusan Pariwisata berdasarkan RPJMD 2012-2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target RPJMD	Capaian Kinerja				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	29.400	12.286	13.355	16.035	12.564	15.106
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. (%)	-	1,27	1,28	1,24	1,31	

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 20175

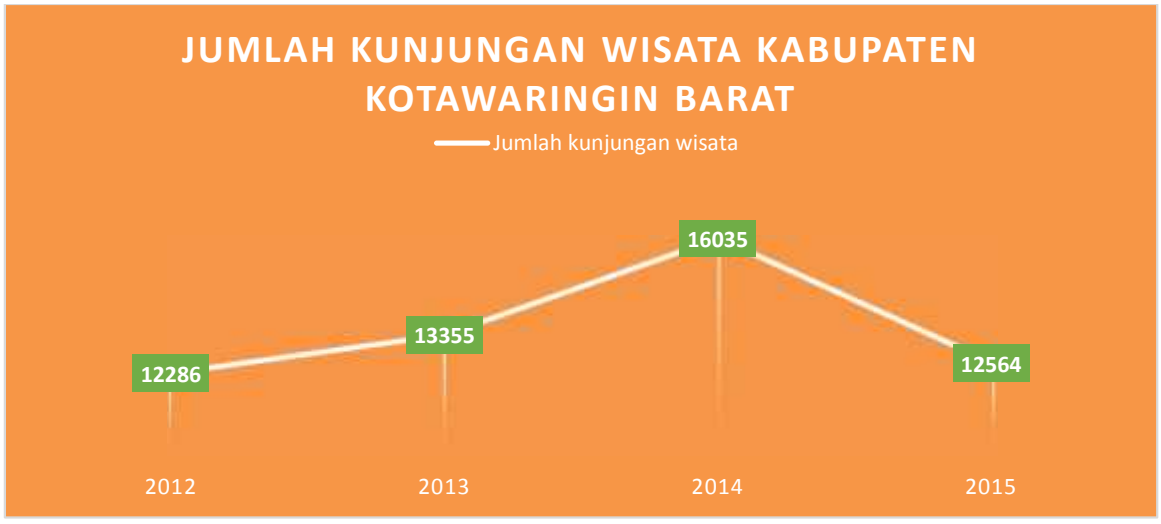

Gambar 2.32: Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat

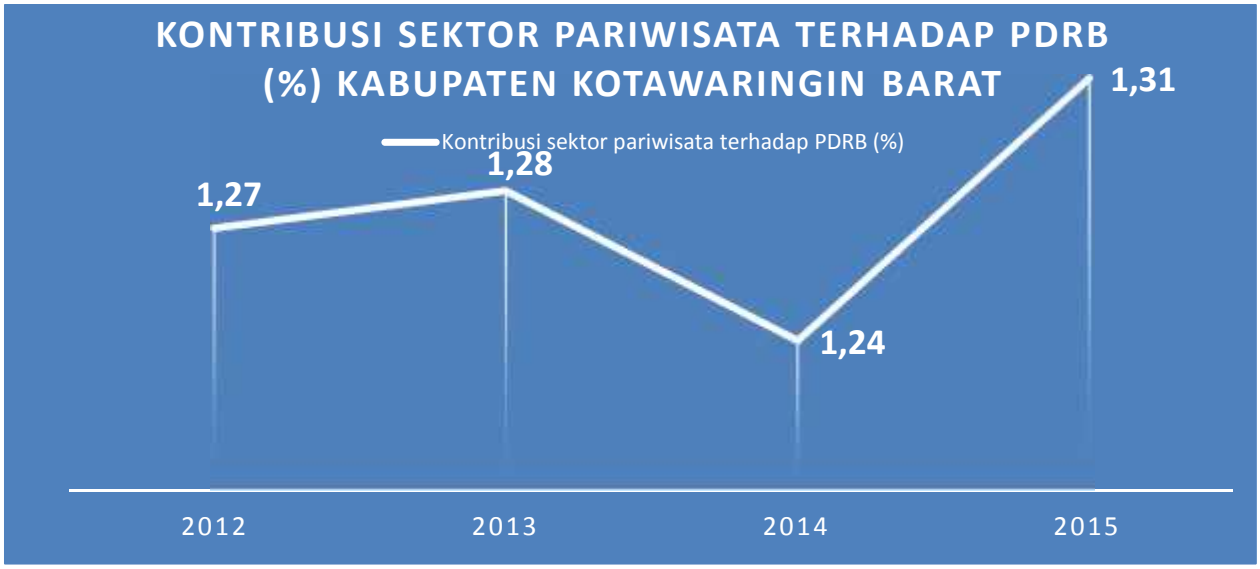

Gambar 2.33: Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%) kab. Kotawaringin Barat

Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan jumlah kunjungan mencapai 12.564 orang. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 meningkat sebanyak 0,01% dari tahun sebelumnya, kemudian menurun sebanyak 0,04% di tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan sebanyak 0,07% di tahun 2015 mencapai 1,31%.

2.3.1.4 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.mencerminkan kemampuan petani. Angka NTP di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.77: Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	**Nilai Tukar Petani**	*98,66*	*102,41*	*98,69*	*97,74*	*98,81*

Sumber : BPS Prov.Kalteng Tahun 2012-2016

2.3.1.6 Angka Konsumsi RT Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran

konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.78: Angka Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2012-2016 (000)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pengeluaran RT rata-rata (pangan)	5.936,56	5.744,72	5.808,72	5.782,26	7311,375
2	Pengeluaran RT rata-rata (non pangan)	5.870,44	6.112,28	6.099,28	6.196,74	7.238,63
3	Total Pengeluaran RT	11.807,00	11.857,00	11.908,00	11.979,00	14.550,00
4	Jumlah RT	64.546	68.600	70.865	72.886	75.133
5	Rasio (1/2)	101,13%	93,99%	95,24%	93,31%	101,01%

Sumber : Statistik Daerah Kab. Ktw. Barat Tahun 2013-2017

2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.3.2.1 Perhubungan

Tabel 2.79:Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya Tahun 2013 – 2017

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan negara	148,56	6,02	148,56	6,02	156,96	6,36	156,96	6,36	156,96	6,36
2	Jalan provinsi	63,70	2,58	63,70	2,58	55,40	2,24	55,40	2,24	55,40	2,24
3	Jalan kabupaten	1.220,95	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51
4	Jalan desa	1.033.02	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89
Jumlah		**2.466,23**	**100**	**2.469,65**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2017

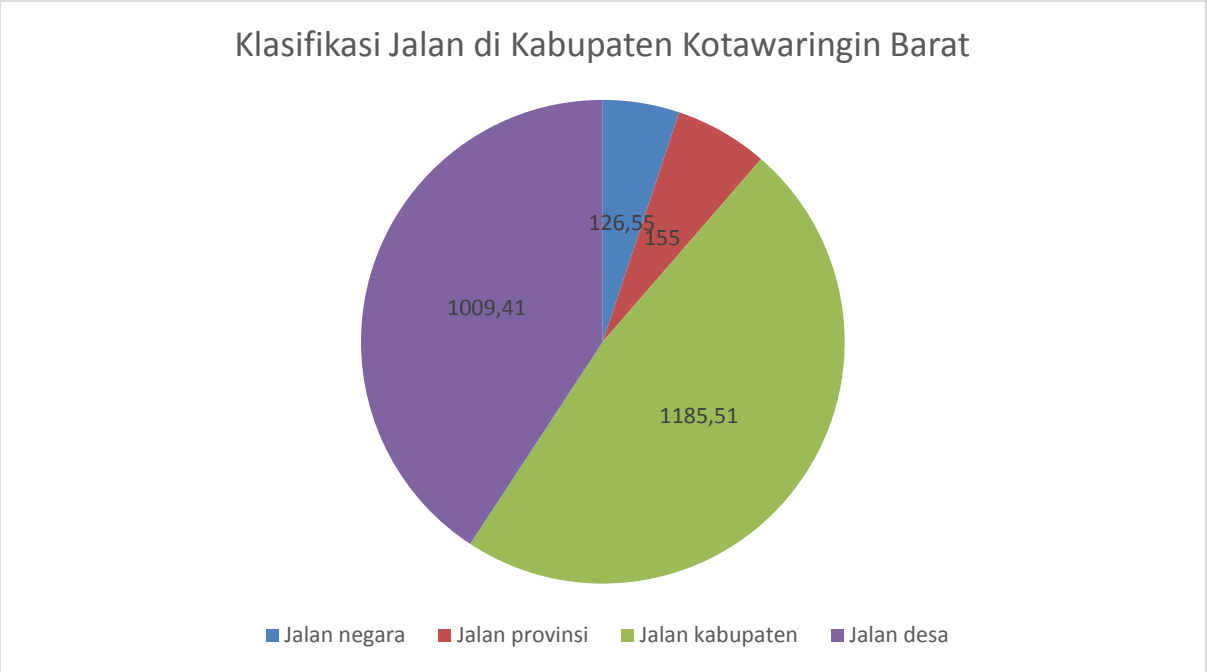

Gambar 2. 34: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Panjang Jalan Kabupaten Kotawaringin Barat bersifat fluktuatif, pada tahun 2013 jumlah Panjang jalan menurun sebesar 10,44 km dari tahun sebelumnya, lalu meningkat sebanyak 3,52 km hingga tahun 2015 dan kembali mengalami penurunan sebanyak 1,07 km di tahun 2016 dengan total Panjang jalan sebesar 2.470,82 km.

Tabel 2.80: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013 - 2017

No.	Indikator	Tingkat Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Pelabuhan Laut	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Terminal	4	4	4	4	3
4.	Jumlah Halte	11	11	12	14	19
5.	Jumlah Jaringan Trayek AKDP	3	3	3	4	4
6.	Jumlah Jaringan Trayek Perdesaaan	5	5	9	9	7
7.	Jumlah Dermaga LLASDP	16	17	19	26	28
8.	Jumlah Trayek LLASDP	4	4	4	3	4

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2017

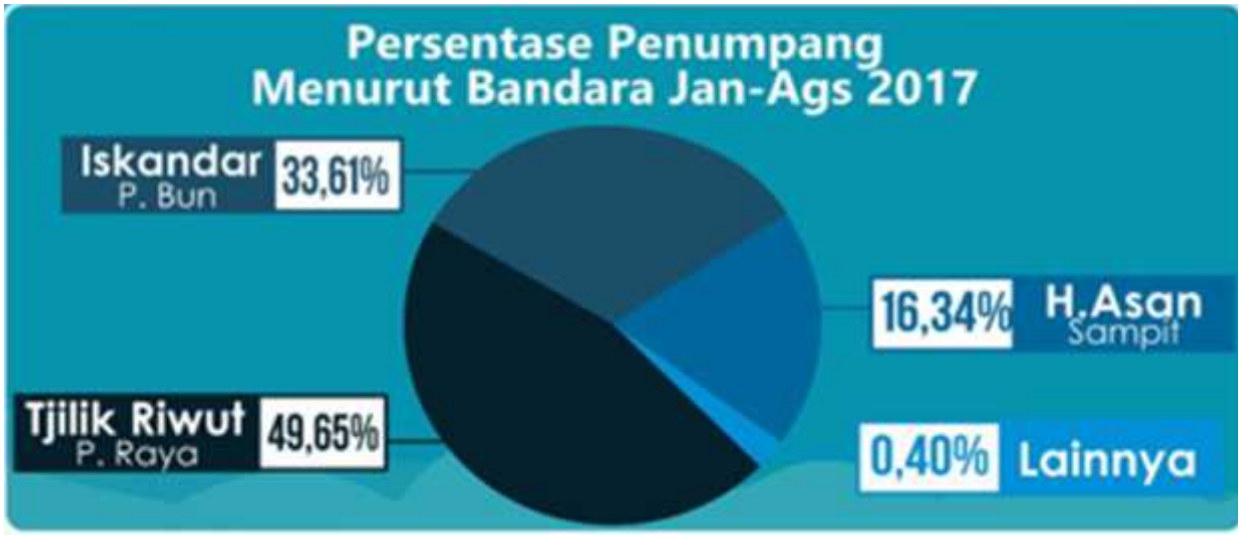

Gambar 2. 35. Persentase Penumpang Penerbangan di Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki satu bandara dengan persentase penumpang mencapai 33,61% dari total penumpang di Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 2.36. Persentase Penumpang Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tiga pelabuhan laut, salah satu pelabuhan yaitu Pelabuhan Kumai memiliki persentase penumpang mencapai 57,78% dari total penumpang di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3.2.2 Air Bersih Dan Listrik

Tabel 2.81: Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2013 – 2017

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator kinerja	Capaian Kinerja					Target di akhir tahun RPJMD	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih	23	70	70,55	72	74,21	90	Belum tercapai
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (jamban sendiri)	76,29	72,1	75,49	77,96	80,39	100	Belum tercapai
3	Persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik	98,12	98,12	98,78	98,8		80	Melampaui
4	Persentase rumah tinggal dengan lantai tanah	-	-	2,74	2,35		-	
5	Persentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah	96,66	96,9	97,26	97,5		-	
6	Persentase rumah tinggal dengan dinding tembok	47,92	50,19	55,19	58,2		-	
7	Rasio rumah layak huni	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,65	Melampaui
8	Rasio permukiman layak huni	0,99	0,99	0,99	0,99		0,99	Sesuai
9	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,06	0,1	0,12	0,09		0,14	Belum Tercapai

Sumber : Dinas PU dan BPS Kab. Ktw Barat

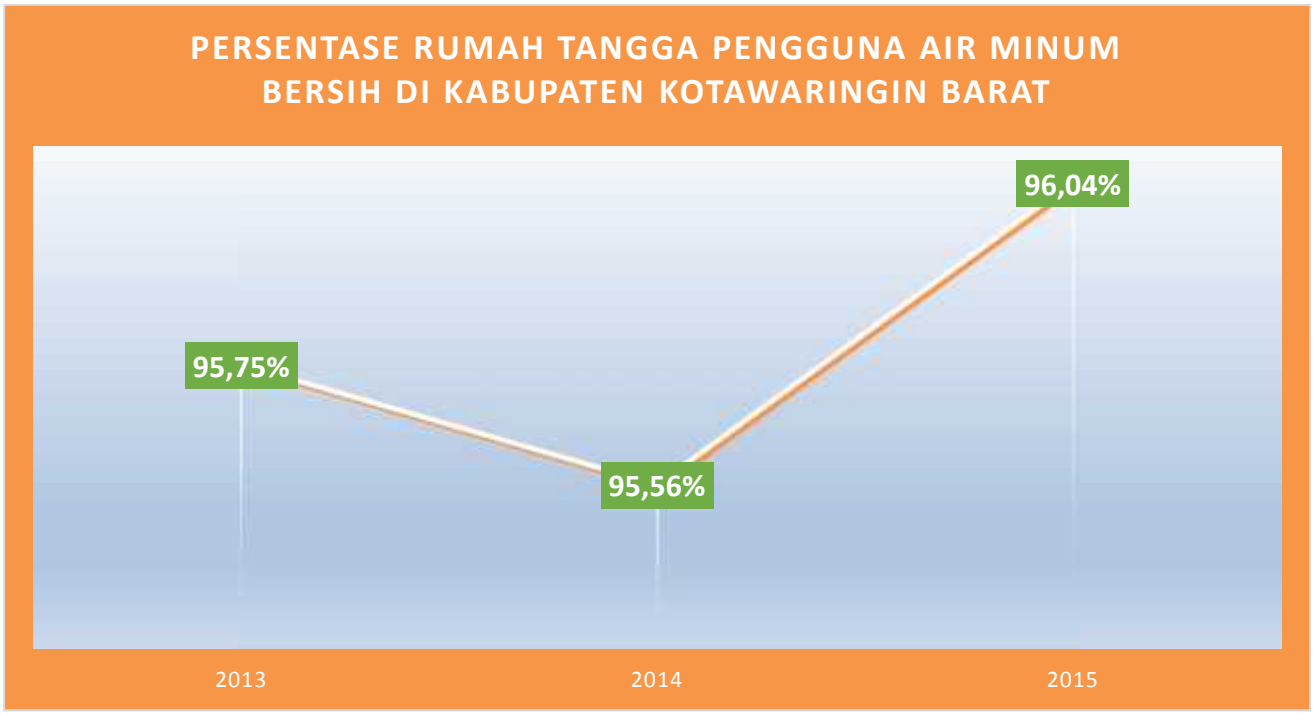

Gambar 2.37: Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat

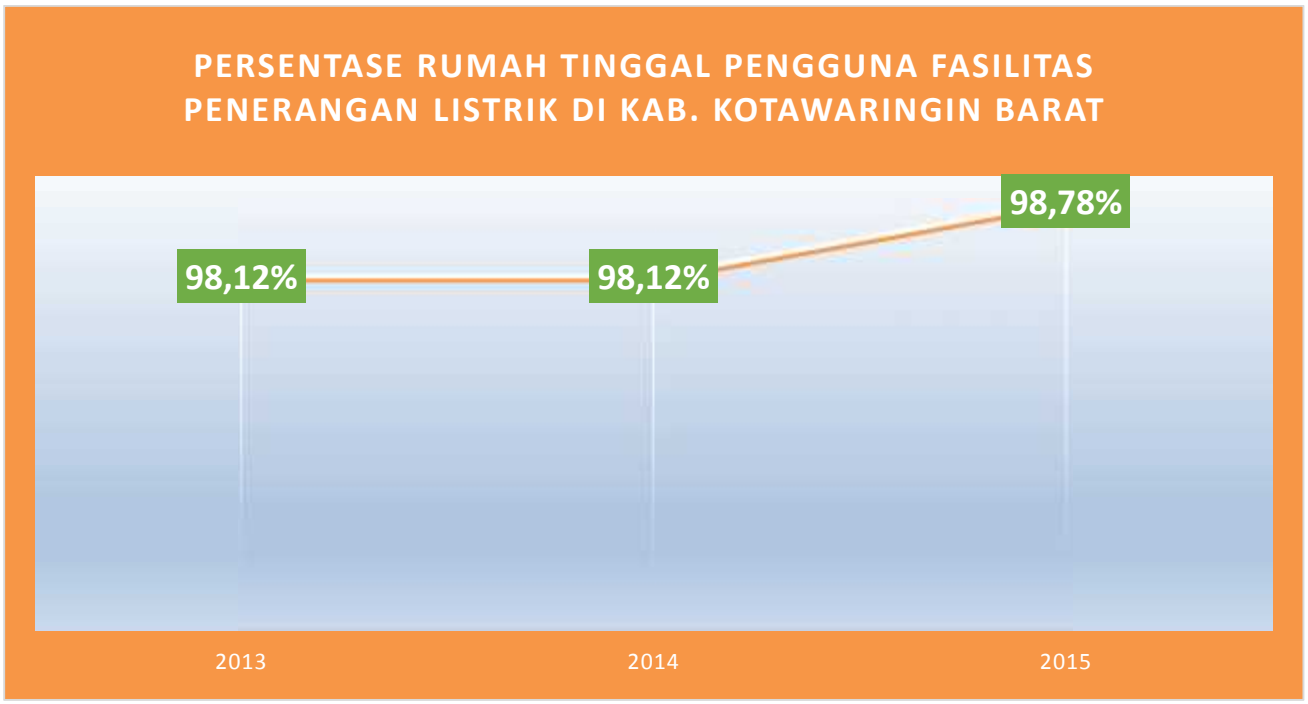

Gambar 2.38: Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang sesuai dengan standar hidup masyarakat diperlukan indikator-indikator kinerja yang mampu mendukung sasaran pembangunan tersebut. Presentase rumah tangga pengguna air minum bersih merupakan salah satu indikatornya. Tahun 2013 – 2015 presentase rumah tangga pengguna air minum bersih Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada angka 95,56 – 96,04 dengan target pada RPJMD di angka 90. Secara interpretasi

pencapaian tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan di RPJMD. Itu artinya standar hidup masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal penggunaan air minum bersih sudah sangat baik dan sadar akan pentingnya mengkonsumsi air bersih. Sementara untuk indikator persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik dari tahun 2013 – 2015 mengalami kenaikan dari 98,12 menjadi 98,78 dan berhasil melampaui target pada RPJMD di angka 80. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendapatkan akses listrik.

Tabel 2.82: Rasio Ketersediaan Daya Listrik

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pelanggan (RT)	47.034,00	47.034,00	54.750,00	129.242,00	N/A
2	Daya Tersambung (Kva)	55.062,12	55.062,12	66.942,57	66.942,57	N/A
3	Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)		98,12	98,12	98,78	98,80
4	Jumlah Rumah Tangga	64.546,00	68.600,00	70.865,00	72.886,00	75.133,00
5	Rasio Elektrifikasi					

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017

Tabel 2.83: Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bank Umum (Pemerintah dan Swasta)	12	12	11	11	13
2	BPR	2	2	3	3	3
3	Jumlah	14	14	14	14	16

Sumber: Statistik Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2016

Tabel 2.84: Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran dan Penginapan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jenis dan jumlah restoran	-	-	-	163	
	- restoran					
	- rumah makan					
2.	Jenis dan Jumlah hotel	30	30	30	30	33
	- hotel berbintang	2	2	3	3	3
	- hotel melati	28	28	27	27	30

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017

2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk kesuatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.Daya saing investasisuatu daerah tidak terjadi dengan serta merta.Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus – menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemudahan perijinan,keamanan dan ketertiban daerah.

2.3.3.1 Kriminalitas

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013, pada tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat naiknya jumlah demo, namun hal tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga para investor tidak perlu takut untuk tetap menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan tantangan berat bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, karena menyangkut beberapa peraturan baik di pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Berikut tabel kondisi iklim investasiKabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.85 Angka Kriminalitas Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kasus Narkoba	20	23	28	33	59
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	3	2	2	1	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	15	30	20	19	17
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	17	30	19	21	22
5	Jumlah Kasus Pencurian	114	76	118	90	110
6	Jumlah Kasus Penipuan	5	19	11	7	10
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	1	-	1	-	-
	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	**469**	**425**	**414**	**420**	**453**
	Jumlah Demo	6	6	12	2	5
	Jumlah Penduduk	252.999	261.200	269.629	278.141	286.714
	Angka Kriminal	18,54	16,27	15,35	15,10	15,80

Sumber : Polres Kotawaringin Barat 2017

Tabel 2.86 Jumlah Dan Jenis Perda Yang Mendukung Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah - Pajak Daerah - Retribusi	 9 -	 10 -	 11 -	 11 -	 11 19
2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	9	10	11	11	11

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat 2017

2.3.3.2 Perkembangan Investasi

Tabel 2.87: Perkembangan Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	PMDN (Rp)	5.896.800.000.000	6.044.026.347.434	6.518.940.123.391	714.448.540.000	3.710.499.700.000
2.	PMA ($)	619.450.000	792.229.370,40	920.119.034	455.203,99	1.996.616,40

2.3.3.3 Desa Berstatus Swasembada

Tabel 2.88: Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Desa	81	81	81	81	81
2	Desa Swasembada					
3	Persentase (2/1)*100%					

2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.3.4.1 Ketenagakerjaan

Tabel 2.89: Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	184.860	195.373	202.545	209.717	202.545
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	124.101	136.864	145.749	155.605	145.749
3.	Bekerja (jiwa)	119.533	133.222	141.011	150.689	141.011
4.	Menganggur (jiwa)	4.568	3.642	4.738	4.916	4.738
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,13 %	70,05%	71,96 %	74,19	71,96
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,68	2,66	3,25	3,16	3,25
7.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	96,32	97,33	96,45	96,84	96,75
8.	Bukan Angkatan Kerja	60.759	58.509	56,796	54.112	56.796
9.	Sekolah	15.141	17.465	18.956	18.981	18.135
10.	Mengurus Rumah Tangga	39.732	35.598	36.698	29.336	37.949
11.	Lainnya	5.886	5.446	6.346	5.765	3.992

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2017

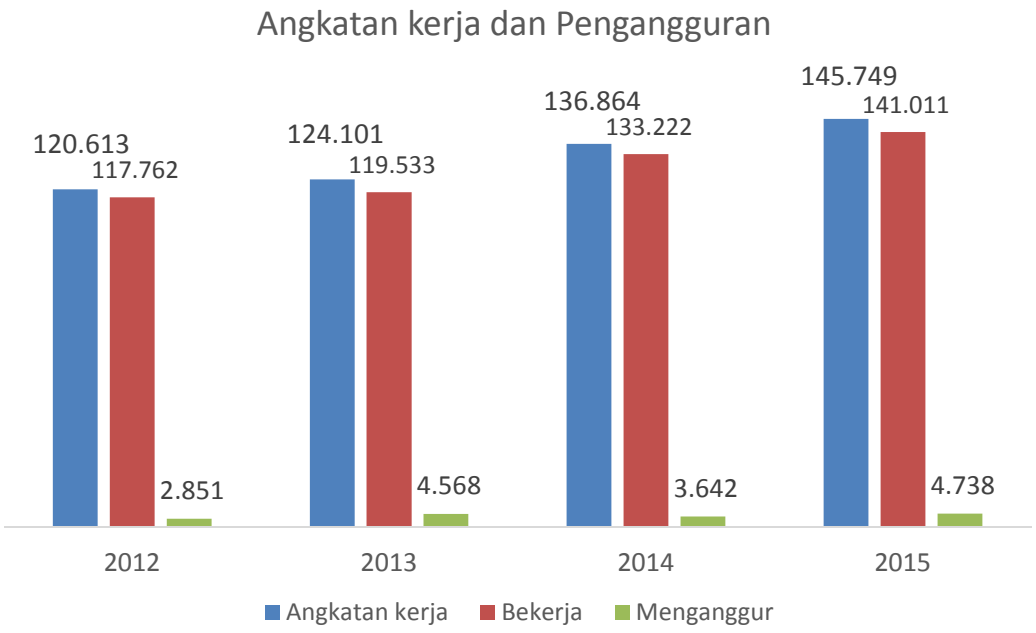

Gambar 2.39: Angkatan kerja dan Pengangguran

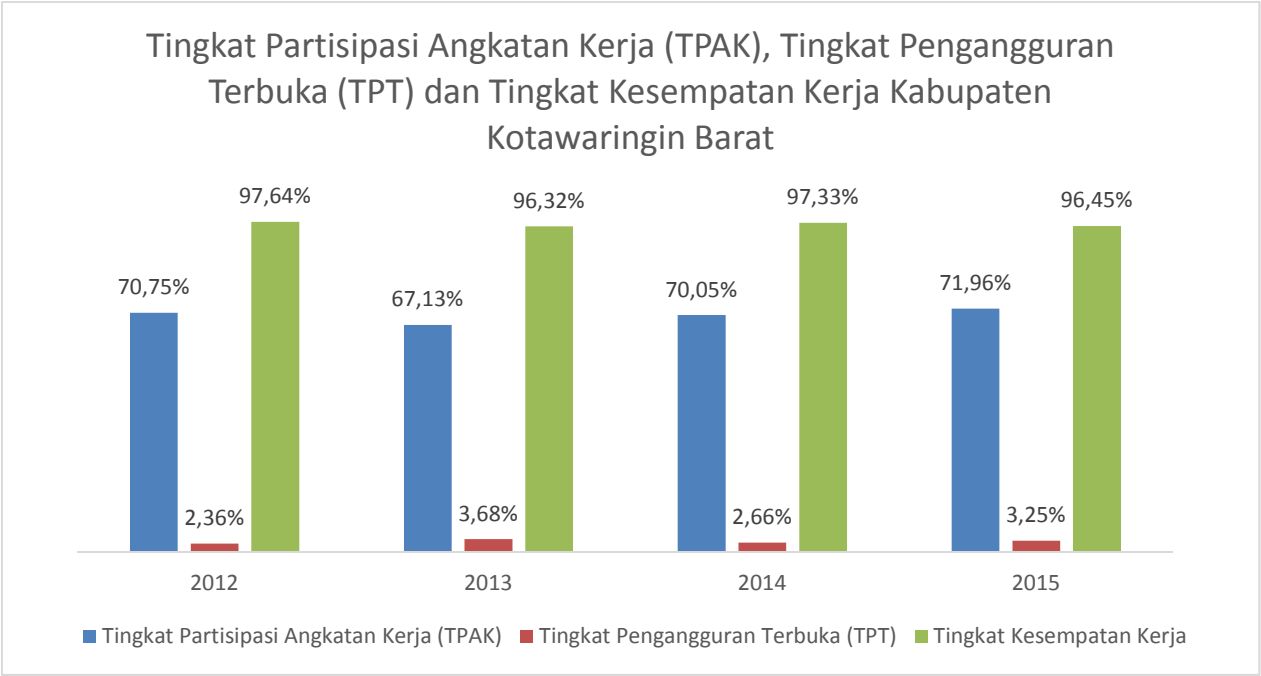

Gambar 2.40: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat

Di bidang ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat dari data pada tahun 2012 – 2015 jumlah daya serap masyarakat yang bekerja dari kategori angkatan kerja Kabupaten Kotawaringin Barat cukup baik. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dari tahun 2012 hingga 2015 yang diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2012 hingga 2015. Meski begitu, angka pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berhasil

ditekan secara signifikan. Terlihat dari tahun 2012 – 2013 jumlah penduduk yang menganggur justru mengalami kenaikan dari 2.851 ke 4.568 kemudian dari tahun 2013 – 2014 mengalami penurunan dari 4.568 ke 3.642 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2014 – 2015 yaitu dari 3.642 ke 4.738. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2014, TPAK Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat 2,92% dari tahun berikutnya dan kembali mengalami peningkatan sebanyak 1,91% di tahun 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2014, TPT sempat mengalami penurunan sebanyak 1,02% dari tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan sebanyak 0,59% di tahun 2015. Kondisi yang fluktuatif seperti ini disebabkan penyerapan tenaga kerja penduduk usia kerja belum maksimal.

2.3.4.2 Rasio Ketergantungan

Tabel 2.90: Rasio Ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	75.900	73.223	75.312	76.705	77.951
2	Jumlah Penduduk Usia >64 tahun	5.490	6.382	7.157	7.535	7.952
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1 dan 2)	81.390	81.618	82.469	84.240	85.903
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	171.610	163.525	187.160	193.901	200.811
5	Rasio Ketergantungan (3/4)	47,43%	49,91%	44,06%	43,44%	42,78%

Sumber : Ktw. Barat Dalam Angka Tahun 2017

Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)* adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka rasio ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 42,78% pada tahun 2016.

2.3.4.3 Rasio Lulusan

Tabel 2.91: Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	7.187	7.886	6.467	6.741	7.451
2.	Jumlah lulusan S2	203	227	185	212	249
3.	Jumlah lulusan S3	2	4	2	2	3
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	7.392	8.117	6.654	6.955	7.703
5.	Jumlah Penduduk *)	252.999	261.200	269.629	278.141	286.714
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3	292,18	310,76	246,78	250,05	268,66

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasai RPJMD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD, maka urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi :
    1. Pendidikan
    2. Kesehatan
    3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
    5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan
    6. Sosial.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :
    1. Tenaga Kerja
    2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    3. Pangan
    4. Pertanahan
    5. Lingkungan Hidup

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaandan
18. Kearsipan.

C. Urusan Pilihan, meliputi :
1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi.

Belanja Langsung (BL) dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai urusan yang tertuang dalam program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2017 sebesar Rp.775.872.004.000 dengan realisasi anggaran Rp.722.405.599.591 atau sebesar 93,11%.

Selengkapnya, berkenaan dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.4.1 Urusan Pendidikan

a) Kondisi Umum

Masyarakat yang maju ditandai dengan tingginya tingkat pendidikan dan partisipasi pendidikan penduduk serta jumlah dan kualitas tenaga ahli serta

tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Upaya untuk mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang maju memerlukan peran serta segenap pemangku kepentingan dalam menciptakan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel dengan dukungan sumber daya manusia yang handal.

Mengingat bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian integral dari pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum sekaligus sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka diperlukan pemahaman secara komprehensif terhadap visi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keberhasilan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2017 khususnya pada bidang pendidikan ditandai dengan tercapainya 27 indikator Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) pendidikan dasar. Di antaranya, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan setiap desa telah terlayani pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan sarana pendidikan SMP yang ada telah mencapai 59 satuan pendidikan di Tahun 2016 dan Tahun 2017 bertambah menjadi 60 sekolah yang terdiri atas SMP Negeri berjumlah 44 sekolah dan SMP Swasta sebanyak 16 sekolah. Capaian ini menandakan bahwa penyediaan sarana pendidikan dasar telah dapat mengakomodir jumlah anak usia sekolah.

Begitu pula dengan peningkatan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditandai dengan peningkatan jumlah satuan PAUD di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari 142 satuan PAUD pada Tahun 2016 bertambah menjadi 157 satuan PAUD di Tahun 2017 serta telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Sedangkan untuk jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS belum dapat terpenuhi terutama pada tingkat sekolah dasar. Salah satu penyebabnya akibat kebijakan moratorium penerimaan PNS dari pemerintah pusat.

Urusan wajib bidang pendidikan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat. Tolok ukur pencapaian target kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dicermati dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2022.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwa untuk menghitung tingkat pencapaian target indikator kinerja menggunakan data pendukung yang didapat dengan cara manual/ meminta secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki data, maka mulai tahun 2017 data pendukung diambil dari sistem Dapodik yaitu suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan bahwa Dapodik bertujuan untuk mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.91 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017	
				Target	Realisasi
1	Angka Melek Huruf	%	97,05	98	97,05
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,05	8,95	8,05
3	Angka Partisipasi Kasar				
	a. PAUD	%	30,03	30,10	38,04
	b. SD/MI	%	118,20	118,35	95,02
	c. SMP	%	98,90	99	80,68
4	Angka Partisipasi Murni				
	a. PAUD	%	20,13	27	-
	b. SD/MI	%	98,80	98,82	80,74
	c. SMP	%	86,65	86,70	56,90
5	Angka Kelulusan				
	a. SD/MI	%	98,92	100	100
	b. SMP	%	99,98	100	98,65
6	Angka melanjutkan				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP	%	99,75	99,90	99,75
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	%	99,66	99,80	98,65
7	Angka Putus Sekolah				
	a. SD/MI	%	0,14	0,14	0,26
	b. SMP	%	0,70	0,54	0,37
8	Rasio ketersediaan sekolah dibandingkan penduduk usia sekolah (Jumlah penduduk usia sekolah/ Jumlah sekolah)				
	a. SD/MI	%	162,15	196,68	162,15
	b. SMP	%	332,19	332,19	332,19
9	Rasio jumlah guru/murid				

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017	
				Target	Realisasi
	a. SD/MI	%	1:17,28	1:21	1:26
	b. SMP	%	1:14,90	1:19	1:19
10	Persentase sekolah yang memiliki ruang kelas sesuai SPM				
	a. SD/MI	%	33,10	33,15	33,10
	b. SMP	%	52,80	52,81	52,80
11	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV				
	a.Guru SD/SDLB	%	98	97,08	88,06
	b.Guru SMP/SMPLB	%	98,50	98,45	96,06

Sumber: LKPJ, 2017

Dalam pelaksanaan urusan di bidang pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan 11 (sebelas) indikator kinerja. Salah satu indikator kinerja pada upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Kasar (APK). Yang dimaksud APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APK, berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. APK bermanfaat untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2016 sebesar 30,03%, sedangkan di Tahun 2017 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat menjadi 38,04%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A pada tahun 2016 sebesar 118,20%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 95,02%. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B pada tahun 2016 sebesar 98,90%, dan di tahun 2017 sebesar 80,68%.

Angka Partisipasi yang juga digunakan sebagai indikator kinerja adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Definisi APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu dengan capaian ideal 100%. APM bermanfaat untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A tahun 2016 sebesar 98,80% dan pada tahun 2017 sebesar 80,74%. SMP/Paket B di tahun 2016 sebesar 86,65% sedangkan di tahun 2017 menjadi 56,90%.

Penurunan angka partisipasi baik APK maupun APM terjadi dikarenakan perubahan data pendukung yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Di samping itu, penurunan angka partisipasi juga disebabkan tidak dimasukannya data SDLB/SMPLB dalam proses perhitungan karena telah menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Peningkatan akurasi data Pendidikan Non Formal Paket A dan Paket B juga menjadi penyebab turunnya angka partisipasi.

Angka kelulusan pada tingkat SD/MI Tahun 2017 sebesar 100%, sedangkan untuk tingkat SMP sebesar 98,65%. Angka kelulusan tersebut dihitung berdasarkan jumlah siswa yang berhasil lulus dibandingkan dengan jumlah siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian. Apabila angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa yang berhasil lulus dibandingkan dengan siswa yang mengikuti ujian, maka diperoleh Angka Kelulusan mencapai 100% untuk semua jenjang pendididkan, sedangkan untuk tingkat SMP sebesar 98,65%.

Angka putus sekolah untuk jenjang SD pada tahun 2017 sebesar 0,26%. Angka ini sedikit lebih besar dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 0,14%. Angka putus sekolah untuk jenjang SMP sebesar 0,37% mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,70%.

Pada umumnya yang melatarbelakangi alasan putus sekolah karena faktor budaya yaitu adanya pemahaman lama yang beranggapan bahwa anak bisa baca tulis sudah cukup dan tidak perlu mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, juga dipengaruhi faktor geografis berupa jarak sekolah di beberapa wilayah yang relatif cukup jauh serta domisili orang tua yang tidak menetap karena tuntutan pekerjaan. Upaya untuk menekan angka putus sekolah dilakukan dengan penambahan jumlah SD, jumlah ruang kelas, adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan daerah.

Indikator kinerja lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah rasio siswa per guru. Rasio siswa per guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru untuk jenjang pendidikan tertentu yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio berarti semakin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau semakin kurang jumlah guru di jenjang pendidikan tersebut. Rasio siswa per guru untuk tahun 2017 pada jenjang SD adalah 1:26 sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP adalah 1:19.

Norma nasional untuk mengukur rasio siswa/guru adalah SD/MI sebesar 1:32 dan untuk SMP sebesar 1:36. Berdasarkan standar dan norma nasional

tersebut, dapat dikatakan bahwa rasio siswa per guru SD dan SMP di Kabupaten Kotawaringin Barat telah sesuai pada standar nasional yang ditetapkan.

Apabila dicermati dari ketersediaan ruang belajar, rata-rata kepadatan ruang belajar di SD/MI adalah 24 siswa/kelas dan SMP adalah 28 siswa/kelas. Sebenarnya hal ini menunjukan ketersediaan ruang belajar telah memenuhi standar sesuai SPM pendidikan dasar yaitu untuk SD maksimal 32 siswa/kelas dan SMP maksimal 36 siswa/kelas. Akan tetapi, apabila dicermati berdasarkan jumlah siswa dalam rombongan belajar (rombel) pada tiap satuan pendidikan, maka terdapat kesenjangan jumlah siswa dalam rombel antara wilayah perkotaan/yang padat penduduk dibandingkan wilayah pedesaan/yang jarang penduduk. Satuan pendidikan pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi sebagian besar jumlah siswa dalam rombel melampui standar sesuai SPM pendidikan dasar untuk jenjang SD dan SMP, sehingga masih perlu adanya penambahan fasilitas ruang belajar pada tiap jenjang satuan pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM pendidikan dasar/standar sarana dan prasarana serta memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 81.841.652.000 dan terealisasi sebesar Rp. 78.239.019.917 atau 95,60%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan urusan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.92 Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Disdikbud	**81.841.652.000**	**78.239.019.917**	**95,60**	**100**				
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**2.791.408.000**	**2.560.100.711**	**91,71**	**100**	**Waktu penyediaan jasa surat menyurat**			
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**3.654.257.500**	**3.516.927.300**	**96,24**	**100**	**Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk kantor Dikbud dan kantor cabang**			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						dinas			
3	Program peningkatan disiplin aparatur	192.800.000	192.371.000	99,78	100	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan			
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	301.200.000	271.100.637	90,01	100	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Disdikbud dan cabang dinas			
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.450.000	21.784.000	67,13	100	Adanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			
6	Program pendidikan anak usia dini	2.742.931.000	2.607.037.825	95,05	100	Bangunan gedung PAUD dan TK			
7	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	69.827.727.600	67.151.001.052	96,17	100	Terbangunnya gedung kantor yang layak			
8	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1.906.610.900	1.624.961.400	85,23	100	Jumlah kegiatan pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)			
9	Program manajemen pelayanan pendidikan	392.267.000	293.735.992	74,88	100	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan informasi bidang pendidikan			

Sumber : LKPJ, 2017

Adapun capaian SPM dan target SPM pada urusan Pendididkan di Kabupaten Kowaraingin Barat sebagai berikut:

Tabel 2.93 Capaian dan target SPM pada urusan Pendididkan

No.	Urusan	Jenis SPM	Capaian 2017	Target 2019
1	Pendidikan	a. Pendidikan Anak Usia Dini		
		b. Pendidikan Dasar	87,00 %	94,90 %
		c. Pendidikan Kesetaraan		

2.4.2 Urusan Kesehatan

a) Kondisi Umum

Tujuan dari pembangunan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada: 1) perikemanusiaan; 2) pemberdayaan dan kemandirian; 3) adil dan merata; serta 4) pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan bagi seluruh penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat disertai perbaikan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Sarana kesehatan yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk melayani seluruh masyarakat Kobar. Hal ini dapat terlihat dari jumlah puskesmas, rumah sakit, dan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2017, di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1 unit rumah sakit pemerintah, 1 unit rumah sakit swasta, 2 rumah bersalin swasta, 1 klinik pengobatan swasta, 18 unit puskesmas, 75 unit puskesmas pembantu, 57 unit Poskesdesdan didukung 742 orang tenaga kesehatan.

Beberapa hal yang menjadi isu mendasar pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah peningkatan jaminan pemeliharaan semesta, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan pendidikan/pelatihan tenaga kesehatan. Perlu disadari bahwa persoalan

kesehatan bukan sekedar tanggung jawab pemerintah, namun membutuhkan keterlibatan semua pihak seperti dunia usaha, LSM, dunia pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Sebab, permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan geografis dan lingkungan, sosial budaya, IPTEK, dan lain sebagainya. Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.94 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2017

No.	INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2017
			2016	2017	2016	2017	
A	**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR**						
	1	Cakupan kunjungan ibu hamil (K-4)	95	90	87,35	87,17	Tidak memenuhi target dan turun dibanding tahun 2016
	2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95	80	80	75,3	Tidak memenuhi target dan turun dibanding tahun 2016
	3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	95	88	87	Tidak memenuhi target dan turun dibanding tahun 2016
	4	Cakupan pelayanan nifas	90	90	88,7	87,3	Tidak memenuhi target dan turun dibanding tahun 2016
	5	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	80	74,22	63,44	Tidak memenuhi target dan turun dibanding tahun 2016
	6	Cakupan kunjungan bayi	98	100	91,83	92,60	Tidak memenuhi target dan meningkat dibanding tahun 2016
	7	Cakupan desa / kelurahan UCI (*universal child immunization*)	100	100	86,1	71,3	Tidak memenuhi target dan turun dibanding tahun 2016
	8	Cakupan pelayanan anak balita	100	100	93,71	93,59	Tidak memenuhi target dan turun dibanding tahun 2016
	9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia (6-24 bulan)	100	100	100	100	Tercapai
	10	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100	100	3	100	Tercapai
	11	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	100	Tercapai
	12	Cakupan peserta KB aktif	95	80	138	89,78	Tercapai
	13	Angka penderita *Acute Flacid Paralysis* (AFP) per 100.000 anak < 15 tahun	2	2	0	0	Tidak ada penemuan penyakit AFP pada tahun 2017

No.	INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2017
			2016	2017	2016	2017	
	14	Cakupan penemuan penderita pneumonia balita	100	100	100	100	Tercapai
	15	Cakupapan penemuan dan penanganan penderita baru TB BTA positif	90	70	72	90	Melebi target dan meningkat dibanding tahun 2016
	16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	Tercapai
	17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	100	100	81,2	100	Tercapai
	18	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	Tercapai
B	**PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN**						
	19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	Tercapai
	20	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS Kab / Kota	100	100	100	100	Tercapai
C	**PENYELIDIKAN EPIDEMOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB**						
	21	Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	Tercapai
D	**PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**						
	22	Cakupan desa siaga	80	85	81,9	82	Tidak memenuhi target namun melebihi capaian tahun 2016
E	**RASIO FASILITAS KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN DAN UMUR HARAPAN HIDUP**						
	23	Rasio rumah sakit per satuan penduduk.	1:286.714	1:289.741	1:286.714	1:144.870	Tercapai
	24	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk.	1:8333	1:8333	1:11589	1:10689	Belum tercapai
	25	Rasio dokter umum per satuan penduduk	1:2083	1:2083	1:3863	1:3708	Belum tercapai
	26	Rasio dokter gigi per satuan penduduk (1:9090)	1:9090	1:9090	1:15452	1:18543	Belum tercapai
	27	Rasio tenaga bidan per satuan penduduk bidan	1:1333	1:1333	1:1082	1:1030	Tercapai target
	28	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	1:632	1:632	1:753	1:1069	Belum tercapai
	29	Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk	1:8333	1:8333	1:46356	1:4880	Tercapai target
	30	Rasio tenaga SKM per satuan penduduk	1:8333	1:8333	1:7726	1:5563	Tercapai target
	31	Rasio tenaga perawat gigi per satuan penduduk	1:6250	1:6250	1:15452	1:23178	Belum tercapai
	32	Rasio tenaga gizi per satuan penduduk	1:4166	1:4166	1:4000	1:9271	Belum tercapai
	33	Rasio tenaga sanitarian per satuan penduduk (1:6666)	1:6666	1:6666	1:16361	1:13907	Belum tercapai
	34	Umur harapan hidup (tahun)	72	72	72	72	Tercapai target

Sumber : LKPJ, 2017

Capaian derajat kesehatan (umur harapan hidup, angka kematian balita, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan) Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata secara nasional. Capaian usia harapan hidup di suatu wilayah menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi pada umumnya di wilayah tersebut.

.Sebagaimana disajikan dalam tabel, untuk data angka harapan hidup yang tersedia adalah data kondisi tahun 2017 dimana umur harapan hidup Kabupaten Kotawaringin Barat masih sama dengan tahun 2016 yaitu mencapai 72 tahun. Hal tersebut mengartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kotawaringin Barat yang lahir pada tahun 2017 akan hidup hingga mencapai umur 72 tahun.

Peningkatan layanan kesehatan dan daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori dan tingkat pendidikan yang lebih baik memungkinkan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai pada gilirannya juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Capaian umur harapan hidup yang tinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat memberi konsekuensi dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat usia lanjut.

Capaian indikator kesehatan lainnya, seperti angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita, dan angka kematian bayi, serta gizi masyarakat menunjukkan tren positif. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 194 per-100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 menjadi 125 per-100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Angka tersebut masih di bawah angka kematian ibu nasional sebesar 228 per-100.000 kelahiran hidup. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja petugas kesehatan dalam menekan AKI di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Angka kematian balita di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 adalah 6 per-1000 kelahiran hidup lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2016 adalah 7 per-1000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh di bawah angka nasional sebesar 43 per-1000 kelahiran hidup (SDKI 2007). Sedangkan angka kematian bayi pada tahun 2017 ini tercatat 5 per-1000 kelahiran hidup. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 7 per-1000

kelahiran hidup. Angka tersebut di bawah angka nasional sebesar 34 per-1000 kelahiran hidup (SDKI 2007).

Pola penyakit menular yang selalu menjadi sepuluh besar penyakit (puskesmas) selama beberapa tahun terakhir adalah influensa, diare, pneumonia, typhus perut klinis, diare berdarah (disentri), tersangka TB paru, campak dan TBC dengan BTA (+). Sementara untuk balita, pola penyakit masih didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi. Seiring dengan peningkatan status ekonomi, perubahan gaya hidup dan efek samping modernisasi, problem penyakit tidak menular pun cenderung meningkat. Beberapa penyakit tersebut di antaranya penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), hipertensi, stroke, diabetes mellitus, kanker, hingga gangguan jiwa.

Prevalensi balita dengan gizi buruk dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hanya 1 (satu) orang dan telah mendapatkan perawatan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus-kasus gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak terpantau.

Untuk itu, seluruh elemen masyarakat, birokrat dan swasta diharapkan tetap waspada serta dapat bersama sama meningkatkan komitmennya untuk menurunkan prevalensi gizi buruk atau minimal mempertahankan.

Ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target nasional dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya seperti pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar. Hal ini terjadi karena kegiatan tersebut merupakan program restrukturisasi dari program bidang pelayanan kesehatan ke bidang kesehatan masyarakat yang tidak berdasarkan perencanaan riil di lapangan, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja yang menurun. Selain itu, di wilayah terpencil jarak antara fasilitas kesehatan dengan tempat tinggal penduduk yang cukup jauh, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya penyuluhan kesehatan pada ibu hamil serta minimnya tenaga kesehatan yang ada di daerah tersebut sehingga menurunkan minat masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat. Untuk alokasi anggaran urusan kesehatan tahun 2017 sebesar Rp.66.324.909.000 dan terealisasi sebesar Rp.59.523.552.467 atau 93,95%.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat. Melalui kegiatan tersebut telah berhasil memenuhi target penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dasar.

Program prioritas lainnya adalah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu yang tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan tahun 2017 sebanyak 74.345 jiwa dengan premi 23.000/ jiwa/ bulan. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 36.747 jiwa dengan besar premi yang sama yakni sebesar Rp. 23.000/jiwa/bulan. Adapun untuk pembayaran premi bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Entry point Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui desa siaga, dengan telah dimilikinya 32 ambulance desa yang bersumber dari masyarakat, stimulan pemerintah daerah dan bantuan lainnya (CSR) yang tidak mengikat. Adapun realisasi anggaran program kegiatan urusan kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.95 Program Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
DINAS KESEHATAN		66.324.909.000	59.523.552.467	89,75	93.95				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.148.924.040	1.965.379.187	91.46	96.06	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran			
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.663.922.000	1.564.887.509	94.05	98.58				
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	65.000.000	65.000.000	100	100				
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	15.000.000	13.004.220	86.69	100				

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
5 .	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	289.116.000	254.094.872	87.89	94.39				
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.500.000	8.500.000	100	100	-			
7.	Program obat dan perbekalan kesehatan	5.912.109.000	5.842.149.419	98.82	99.72	-			
8.	Program upaya kesehatan masyarakat	20.240.448.860	18.450.708.257	91.16	95.18				
9.	Program pengawasan obat dan makanan	777.485.000	755.895.294	97.22	99.97	-			
10.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	36.315.000	29.274.901	80.61	83.91	-			
11.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	649.454.500	523.735.780	80.64	86.71	-			
2.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	290.200.000	287.650.000	99.12	99.91	-			
13.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	842.366.800	717.670.519	85.20	92.78	-			
14.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.532.872.750	1.301.331.404	84,89	91.06	-			
15.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	1.271.418.250	1.165.380.349	91.66	96.11	-			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
16.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya	8.414.855.000	7.901.632.170	93.90	99.38	-			
17.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	19.357.818.000	17.772.729.886	91.81	92.49	-			
18.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	84.254.800	83.754.800	99.41	100				
19.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	76.460.000	74.640.000	97.62	99.61				
20.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.648.389.000	746.133.900	28.17	60.33				
RSUD SULTAN IMANUDDIN		134.322.034.000	119.759.041.011	89,16	91,16	-			
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.753.761.250	2.700.749.597	94,10	100	Terlaksanya kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	5	5	Keg.
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.410.486.500	471.394.500	97,86	100	Terlaksanya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	Keg.

3.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**196.700.000**	**195.030.000**	**99,15**	**100**	**Terlaksanya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur**	**1**	**1**	**Keg.**
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**145.500.000**	**141.043.771**	**96,94**	**100**	**Terlaksanya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**1**	**1**	**Keg**
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**11.000.000**	**11.000.000**	**100**	**100**	**Terlaksanya kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**3**	**3**	**Lap.**
6.	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	**51.462.586.250**	**50.560.852.713**	**96,64**	**100**	**Terlaksanya kegiatan pada program standarisasi pelayanan kesehatan**	**3**	**3**	**Keg**
7.	**Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	**342.000.000**	**289.257.515**	**84,58**	**97,98**	**Terlaksanya kegiatan pada program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	**3**	**3**	**Keg.**
8.	**Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat**	**78.000.000.000**	**64.480.828.415**	**82,67**	**85,29**	**Terlaksanya kegiatan BLUD RSSI pada program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat**	**1**	**1**	**Thn**

Sumber : LKPJ, 2017

Capaian keberhasilan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang mendukung pencapaian keberhasilan dibidang kesehatan adalah :

1. RSUD Sultan Imanuddin telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional dan propinsi sejak tahun 2015.
2. Pada bulan Desember 2015 RSUD Sultan Imanuddin telah ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B dan pada bulan Okteber tahun 2017 RSUD Sultan Imanuddin mendapatkan izin operasional kelas B.
3. Berdasarkan hasil survey akreditasi pada bulan November 2017 RSUD Sultan Imanuddin mendapat predikat rumah sakit Terakreditasi Paripurna.
4. Pencapaian Indikator tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit sebagai berikut :
   a. *Bed Occupancy Rate (BOR)* : 73,74% (ideal 60-85%);
   b. Average Length of Stay (Av LOS) : 3,46 hari (ideal 6-9 hari);
   c. Bed Turn Over (BTO) : 77,66 kali (ideal 40-50 kali);
   d. Turn Over Interval (TOI) : 1,23 hari (ideal 1-3 hari);
   e. Net Death Rate (NDR) : 17,2% (nilai yang masih ditolerir 25 per seribu);
   f. *Gross Death Rate (GDR) : 36,86% (seyogyanya tidak lebih dari 45 per seribu).*
   g. Berdasarkan grafik *Barber Johnson,* data tersebut di atas menunjukkan tingkat efisiensi pelayanan RSUD Sultan Imanuddin telah memberikan pelayanan yang efisien.
   h. Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan, angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,67% dengan kategori sangat baik.

Adapun capaian SPM dan target SPM pada urusan Kesehatan di Kabupaten Kowaraingin Barat sebagai berikut:

Tabel 2.96 Capaian dan target SPM pada urusan Kesehatan

No.	Urusan	Jenis SPM	Capaian 2017	Target 2019
1.	Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil	87,17 %	100 %
		b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	87 %	100 %
		c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	92,60 %	100 %
		d. Pelayanan kesehatan balita	93,59 %	100 %
		e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	95 %	100 %

		f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	86,32 %	100 %
		g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	78,18 %	100 %
		h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 %	100 %
		i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100 %	100 %
		j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 %	100 %
		k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 %	100 %
		l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif	90 %	100 %

2.4.3 Urusuan Lingkungan Hidup

a) Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk mencegah hal tersebut, maka upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif, perlu terus dilaksanakan. Mengingat persoalan lingkungan merupakan persoalan yang bersifat lintas wilayah administrasi, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, maka tingkat capaian kondisi kualitas lingkungan pada dasarnya merupakan akumulasi dari tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara umum.

Konsistensi partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat, merupakan kunci penting bagi keberhasilan penanganan urusan lingkungan hidup.

Adapun realisasi kinerja urusan lingkungan hidup atau pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2017 sebagai berikut.

1) Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air

a. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara Ambien

1. Hasil pemantauan kualitas udara ambien semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan konsentrasi parameter debu (TSP) pada lokasi simpang empat Pasar Indra Sari sebesar 135,13 µg/Nm³, simpang tiga Terminal Kumai sebesar 73,42 µg/Nm³, dan Bundaran Pancasila sebesar 52,26 µg/Nm³. Sedangkan hasil pemantauan kualitas udara ambien semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan November menunjukkan konsentrasi parameter debu (TSP) pada lokasi simpang empat Pasar Indra Sari sebesar 8,01 µg/Nm³, simpang tiga Terminal Kumai sebesar 12,61 µg/Nm³, dan Bundaran Pancasila sebesar 54,52 µg/Nm³. Hasil pengukuran pada ketiga lokasi tersebut masih berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu sebesar 230 µg/Nm³.
2. Hasil pemantauan kualitas udara ambien semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan konsentrasi parameter Karbon Monoksida (CO) pada lokasi simpang empat Pasar Indra Sari adalah sebesar 0,43 µg/Nm³, simpang tiga Terminal Kumai sebesar 7,94 µg/Nm³, dan Bundaran Pancasila sebesar 3,47 µg/Nm³. Sedangkan hasil pemantauan kualitas udara ambien semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan November tidak mendeteksi konsentrasi parameter Karbon Monoksida (CO). Hasil pengukuran pada ketiga lokasi tersebut masih berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu sebesar 30.000 µg/Nm³.
3. Hasil pemantauan kualitas udara ambien semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan konsentrasi parameter Sulfur Dioksida (SO_2) lokasi simpang empat Pasar Indra Sari adalah sebesar 53,40 µg/Nm³, simpang tiga Terminal Kumai sebesar 5,94 µg/Nm³ dan Bundaran Pancasila sebesar 6,15 µg/Nm³. Hasil pemantauan kualitas udara ambien semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan November menunjukkan konsentrasi parameter Sulfur Dioksida (SO_2) lokasi simpang empat Pasar Indra Sari adalah sebesar 36,07 µg/Nm³, simpang tiga Terminal Kumai sebesar 43,70 µg/Nm³ dan Bundaran

Pancasila sebesar 33,21 µg/Nm³. Hasil pengukuran pada ketiga lokasi tersebut masih berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu sebesar 900 µg/Nm³.

4. Hasil pemantauan kualitas udara ambien semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan konsentrasi parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) lokasi simpang empat Pasar Indra Sari adalah sebesar 16,43 µg/m³, simpang tiga Terminal Kumai sebesar 15,95 µg/m³, dan Bundaran Pancasila sebesar 9,95 µg/m³. Sedangkan hasil pemantauan kualitas udara ambien semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan November tidak mendeteksi konsentrasi parameter Nitrogen Dioksida (NO_2). Dari semua titik lokasi diketahui bahwa hasil pengukuran masih berada di bawah baku mutu yaitu sebesar 400 µg/m³.
5. Hasil pemantauan kualitas udara ambien semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan konsentrasi parameter Oksidan (O_3) lokasi simpang empat Pasar Indra Sari sebesar 176,38 µg/m³, simpang tiga Terminal Kumai sebesar 191,09 µg/m³, Bundaran Pancasila sebesar 201,68 µg/m³. Sedangkan hasil pemantauan kualitas udara ambien Semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan November tidak mendeteksi konsentrasi parameter Oksidan (O_3). Dari ketiga lokasi tersebut masih berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu sebesar 235 µg/m³.

b. Tingkat Penurunan Pencemaran Air Sungai Arut dan Sungai Kumai

Parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solids/TSS), Kebutuhan Oksigen Biologis (Biological Oxygen Demand/BOD), Kebutuhan Oksigen Kimia (Chemical Oxygen Demand/COD), Kadar Oksigen Terlarut (Demand Oxygen/DO), Total Phospat, Fecal Coli, dan Total Coli. Objek pemantauan ada dua yaitu Sungai Arut dan Sungai Kumai.

1. Parameter Padatan Tersuspensi (TSS)

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar parameter TSS Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) 228 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 59,5 mg/l, lokasi Jembatan Kolam (A.3) sebesar 53 mg/l, hilir Korindo (A.4) sebesar 45 mg/l, dan Sungai Lamandau (hilir sungai Arut) (A.5) sebesar 146 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air

sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar parameter TSS Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) 22 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 144 mg/l, lokasi Jembatan Kolam (A.3) sebesar 23 mg/l, Lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 28 mg/l, dan lokasi Sungai Lamandau (Hilir sungai Arut) (A.5) sebesar 42 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air sungai Arut pada tahun 2017, terjadi peningkatan kualitas parameter TSS dari semester I yang hampir semua lokasi melampaui baku mutu air sungai Kelas II sebesar 50 mg/l seperti yang dipersyaratkan PP Nomor 82 Tahun 2001. Kemudian di semester II kualitas TSS Sungai Arut meningkat dan memenuhi baku mutu.

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar parameter TSS Sungai Kumai pada lokasi Kelurahan Kumai Hulu sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 30,5 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 19,5 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 168 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar parameter TSS Sungai Kumai pada lokasi Kelurahan Kumai Hulu sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 45 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 35 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 20 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air Sungai Kumai pada tahun 2017, terjadi peningkatan kualitas parameter TSS dari semester I yang melampaui baku mutu air sungai Kelas II sebesar 50 mg/l seperti yang dipersyaratkan PP Nomor 82 Tahun 2001 pada lokasi K.3. Kemudian di semester II, kualitas TSS Sungai Arut meningkat dan memenuhi baku mutu air sungai Kelas II PP Nomor 82 Tahun 2001 pada ketiga lokasi pemantauan.

2. Parameter BOD

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar parameter BOD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 3,63 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 5,47 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 4,25 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 5,48 mg/l dan Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 5,48 mg/l. Sedangkan hasil

pemantauan kualitas air sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar parameter BOD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 8,42 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 7,63 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 15,6 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 11,6 mg/l dan Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 2,9 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air sungai Arut pada tahun 2017, terjadi penurunan kualitas parameter BOD di semester I maupun semester II dimana hampir semua lokasi pemantauan melampaui baku mutu air sungai Kelas II sebesar 3 mg/l seperti yang dipersyaratkan PP Nomor 82 Tahun 2001. Peningkatan BOD mengindikasikan terjadinya peningkatan buangan limbah organik ke badan sungai. Limbah organik dihasilkan dari berbagai kegiatan yang ada di lokasi tersebut yaitu pemukiman dan aktivitas industri.

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar parameter BOD Sungai Kumai sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hilir (K.1) sebesar 4,86 mg/l, Desa Sekonyer (K.2) sebesar 5,47 mg/l dan Kumai Hulu (K.3) sebesar 4,86 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar parameter BOD Sungai Kumai sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hilir (K.1) sebesar 2,7 mg/l, Desa Sekonyer (K.2) sebesar 2,88 mg/l dan Kumai Hulu (K.3) sebesar 2,55 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air Sungai Kumai pada tahun 2017, terjadi peningkatan kualitas parameter BOD dari semester I yang melampaui baku mutu air sungai Kelas II sebesar 3 mg/l seperti yang dipersyaratkan PP Nomor 82 Tahun 2001 pada semua lokasi pemantauan. Kemudian di semester II kualitas TSS Sungai Kumai meningkat dan memenuhi baku mutu air sungai Kelas II PP Nomor 82 Tahun 2001 pada ketiga lokasi pemantauan.

3. Parameter COD

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar COD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 15,6 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 29,5 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3)

sebesar 30,2 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 23,4 mg/l, lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 30,9 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar COD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 18,7 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 15 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 30,9 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 35 mg/l, lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 24 mg/l.

Dari hasil pemantauan semester I kadar COD melampaui baku mutu kelas II sebesar 25 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001 pada lokasi A.2, A.3, dan A.5. Sedangkan hasil pemantauan semeseter II kadar COD melampaui baku mutu kelas II sebesar 25 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001 pada lokasi A.3, dan A.4. Tingginya kadar COD pada beberapa lokasi tersebut mengindikasikan tingginya buangan limbah organik yang bisa berasal dari aktifitas domestik maupun industri.

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar COD Sungai Kumai di lokasi Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 43,9 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 37,4 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 38,6 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar COD Sungai Kumai di lokasi Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 23,8 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 24,0 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 16,0 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air Sungai Kumai pada tahun 2017, terjadi peningkatan kualitas parameter COD dari semester I yang melampaui baku mutu air sungai Kelas II sebesar 25 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 pada semua lokasi pemantauan. Kemudian di semester II kualitas COD Sungai Kumai meningkat dan memenuhi baku mutu air sungai Kelas II PP Nomor 82 Tahun 2001 pada ketiga lokasi pemantauan.

4. Parameter DO

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar DO Sungai Arut di lokasi

Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 7,24 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 6,44 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 6,44 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 6,04 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 5,63 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai Semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar DO Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 2,38 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 2,46 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 2,38 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 2,46 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 4,10 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air sungai Arut pada tahun 2017, terjadi penurunan kualitas parameter DO dimana pada semester I masih memenuhi baku mutu air kelas II minimal 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001, tetapi pada semester II kualitas DO Sungai Arut menurun dan melebihi baku mutu air kelas II minimal 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001.

Adapun pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar DO Sungai Kumai di sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 6,24 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 6,44 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 6,04 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar DO Sungai Kumai di sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 4,8 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 4,8 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 4,7 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air sungai Kumai pada tahun 2017, terjadi peningkatan kualitas parameter DO yang masih memenuhi baku mutu air kelas II minimal 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa perairan Sungai Kumai masih tergolong sebagai perairan yang baik.

5. Parameter Total Phospat

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar parameter Total Phospat Sungai Arut di Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 0,11 mg/l,

Jembatan Runtu (A.2) sebesar 0,15 mg/l, Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 0,18 mg/l, hilir Korindo (A.4) sebesar 0,22 mg/l dan Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,06 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar parameter Total Phospat Sungai Arut di Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 0,24 mg/l, Jembatan Runtu (A.2) sebesar 0,12 mg/l, Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 0,15 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 0,24 mg/l dan Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,16 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air Sungai Arut pada tahun 2017 masih memenuhi baku mutu air kelas II sebesar 0,2 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001.

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar Total Phospat Sungai Kumai di sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,57 mg/l, Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,07 mg/l dan Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,6 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar Total Phospat Sungai Kumai di lokasi sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,1 mg/l, Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,15 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,12 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air Sungai Kumai pada tahun 2017, terjadi peningkatan kualitas Total Phospat di mana pada semester I melampaui baku mutu air kelas II sebesar 0,2 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001, kemudian pada semester II kadarnya telah memenuhi baku mutu air kelas II sebesar 0,2 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001.

6. Parameter Fecal Coli

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar Fecal Coli Sungai Arut di Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 500 mg/l, Jembatan Runtu (A.2) sebesar 90 mg/l, Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar < 2 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 50 mg/l dan Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 230 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai

semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar Fecal Coli Sungai Arut di Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 700 mg/l, Jembatan Runtu (A.2) sebesar 500 mg/l, Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 500 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 2.800 mg/l dan Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 500 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air Sungai Arut pada tahun 2017, kadar Fecal Coli pada hampir semua lokasi tersebut masih memenuhi baku mutu air kelas II sebesar 1.000 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001, kecuali pada lokasi A.4 pada semester II melampaui baku mutu.

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar Fecal Coli Sungai Kumai di hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 280 mg/l, Desa Sekonyer (K.2) sebesar < 2 mg/l dan Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 50 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar Fecal Coli Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 800 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 700 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 500 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air Sungai Kumai pada tahun 2017, terjadi peningkatan kualitas Fecal Coli, namun masih memenuhi baku mutu air kelas II sebesar 1.000 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001.

7. Parameter Total Coli

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar Total Coli Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 900 mg/l, Jembatan Runtu (A.2) sebesar 140 mg/l, Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 23 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 80 mg/l dan Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 300 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar Total Coli Sungai Arut di Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 1.400 mg/l, Jembatan Runtu (A.2) sebesar 1.100 mg/l, Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 1.600 mg/l, Hilir Korindo

(A.4) sebesar 16.000 mg/l dan Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 1.600 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air Sungai Arut pada tahun 2017 kadar Total Coli pada hampir semua lokasi tersebut masih memenuhi baku mutu air kelas II sebesar 5.000 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001, kecuali pada lokasi A.4 pada semester II melampaui baku mutu.

Hasil pemantauan kualitas air sungai semester I Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan Maret menunjukkan kadar Total Coli Sungai Kumai di hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 350 mg/l, Desa Sekonyer (K.2) sebesar <2 mg/l dan Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 90 mg/l. Sedangkan hasil pemantauan kualitas air sungai semester II Tahun 2017 yang dilakukan pada bulan September menunjukkan kadar Total Coli Sungai Kumai di hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 3.000 mg/l, Desa Sekonyer (K.2) sebesar 4.000 mg/l dan Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 1.200 mg/l.

Dari hasil pemantauan kualitas air Sungai Kumai pada tahun 2017, terjadi peningkatan kualitas Total Coli, namun masih memenuhi baku mutu air kelas II sebesar 5.000 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001.

2) Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani

Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani tahun 2017 target yang ditentukan sebanyak 15 unit usaha, dan terealisasi sebanyak 19 unit usaha atau sebesar 126 persen. Sumber pencemar yang tertangani tersebar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Umumnya merupakan kegiatan usaha yang wajib Amdal dan UKL/UPL seperti hotel, rumah sakit, industri yang menimbulkan pencemaran air sungai akibat buangan limbah cair yang sebagian dari para pelaku usaha belum mengelola limbahnya dengan baik, begitu juga pencemaran udara akibat emisi dari cerobong asapnya.

3) Penurunan Luas Kerusakan Lahan

Tahun 2017 dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa pengadaan pupuk kompos dengan spesifikasi teknis: pupuk kompos hasil pengolahan sampah bahan-bahan organik, mengandung unsur hara N, K, Ca, Mg, P dan S. Sasaran kegiatan yaitu Bundaran Pancasila, Jalan Iskandar, Jalan Samari, Taman Segitiga, dan pada Dinas Lingkungan

Hidup (di lakukan pembibitan untuk bunga di taman kota). Selain itu, dilakukan pemeliharaan pada taman-taman kota/RTH di wilayah Kecamatan Arut Selatan. Adapun maksud dan tujuannya adalah:

a. Guna mendukung sosialisasi pola hidup bersih dan sehat serta mempertahankan kota Pangkalan Bun sebagai Kota Adipura;
b. Salah satu upaya pencegahan terjadinya pemanasan global, banjir dan longsor;
c. Edukasi kepada masyarakat akan manfaat pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik mandiri yang secara tidak langsung dapat mendukung program ketahanan pangan dan penghijauan di lingkungan masyarakat tersebut.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 12 (dua belas) Ruang Terbuka Hijau Publik seluas 126.139,21 M^2 dengan persentase dari luas RTH perkotaan sebesar 13,25% dan persentase luar RTH administrasi kota sebesar 22,13%. Sedangkan luas hutan kota sebesar 787,75 Ha atau 7,3% dari luas Kabupaten Kotawaringin Barat. Target penyediaan lahan RTH di kawasan perkotaan tahun 2017 sebesar 9,20%, dan terealisasi sebesar 9,20%. Kecilnya target karena disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

4) Pengelolaan Persampahan.

Pengelolaan persampahan merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Sistem pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan luas area 30 Ha, pada saat ini menggunakan system Sanitary Landfiil. TPA dilengkapi fasilitas fisik pendukung berupa kantor, mushola, rumah tinggal penjaga, sarana MCK, garasi alat berat, tempat pencucian dump truck sampah, rumah timbang, pos jaga, garasi mobil, sumur pantau dan kolam lindi. Jarak TPA dengan permukiman terdekat adalah 2 Km, jarak TPA dengan sungai atau badan air terdekat 5,2 Km dan jarak TPA dengan pantai 40 Km.

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA digunakan alat angkut berupa dump truck dan pick up dengan rotasi 2 kali/hari. Jumlah dump truck dan pick

up yang beroperasi per hari sebanyak 11 unit dengan kapasitas 8 m^3 sebanyak 9 Unit, 6 m^3 sebanyak 2 Unit dan kapasitas 3 m^3 sebanyak 4 unit. Pengangkutan menggunakan dump truck melayani wilayah kota Pangkalan Bun dan Kumai. Khusus gerobak sampah dioperasikan pada masing-masing RT lingkungan permukiman, fasilitas perdagangan, fasilitas perkantoran dengan membentuk lembaga pengelola sampah dan menunjuk petugas untuk mengoperasionalkan pengambilan sampah dari setiap lingkungan.

Cakupan pelayanan di TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang adalah sampah yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas area pelayanan tahun 2017 sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 1.186 km^2. Sampah yang diperbolehkan dibuang di TPA sampah adalah sampah rumah tangga (sampah padat yang berasal dari aktifitas rumah tangga) dan sampah sejenis rumah tangga (sampah padat yang berasal dari fasilitas umum dan fasilitas komersial). Selama tahun 2017, jumlah sampah yang masuk ke TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat sekitar 143 m^3/tahun dari total timbulan 165 m^3/hari atau 86,67%. Untuk realisasi retribusi kebersihan tahun 2017 sebesar Rp. 22.272.000,- atau 36,77% dari target sebesar Rp. 60.568.000,-

Jumlah kapasitas timbulan sampah yang dapat tertampung dari total sarana kotak sampah sampai pada tahun 2017 adalah 165 m^3. Guna mendukung terjalinnya pengelolaan sampah yang baik dari sumber sampai dengan proses akhir, ketersediaan sarana dan prasarana dari pemerintah sangat diperlukan disamping swadaya dari masyarakat.

Tabel 2.97 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2017

No.	URAIAN		CAPAIAN KINERJA
1.	Penanganan Sampah	Volume sampah yang ditangani 143 (m^3) / Volume produksi sampah 165 (m^3) X 100 %	86,66 %
2.	Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS 240 (m^3) / Jumlah penduduk 276.243 jiwa X 100%	0,087 %

Sumber : DLH 2017

Tabel 2.98 Jumlah TPS Di Kabupaten Kobar Tahun 2017

No.	LOKASI TPS	UNIT
1.	Translik baru Desa Pasir Panjang	1
2.	Desa Sumber Agung	1
3.	TPS 3R : - Desa Sungai Kapitan - Kelurahan Madurejo - Kelurahan Kotawaringin Hulu	 1 1 1
4.	Kelurahan Raja	2
5.	Kelurahan Sidorejo	1
6.	Kelurahan Baru	2
7.	Kelurahan Kumai Hilir	1
8.	Kelurahan Kumai Hulu	1
9.	Kelurahan Candi	1
10.	Desa Kubu	1
Jumlah		**14**

Sumber : DLH 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan total alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 14.006.096.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.366.649.261,- atau 95,48% dengan realisasi fisik sebesar 98,25%. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.99 Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Satuan
			Realisasi	(%)					
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		**14.006.096.000**	**13.366.649.261**	**95,48**	**98,25**				
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**751.716.200**	**654.292.537**						
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**141.030.000**	**128.004.443**						
3.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**58.300.000**	**58.300.000**						
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**172.000.000**	**76.037.697**						

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Keuangan							
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Satuan
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.600.000	2.600.000						
6.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	9.228.889.000	9.153.175.490						
7.	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	834.608.800	732.372.803						
8.	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	19.000.000	12.000.000						
9.	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	550.000.000	544.588.000						
10.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	461.475.000	441.285.791						
11.	Program peningkatan pengendalian polusi	20.000.000	19.935.000						
12.	Program pengendalian kebakaran hutan	37.441.500							
13.	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.728.535.500	1.544.057.500						

Sumber : LKPJ, 2017

Capaian keberhasilan urusan lingkungan hidup Tahun 2017 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Adipura ke 11 (Adipura Buana).
2. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten 2 sekolah, Adiwiyata Nasional 1 sekolah dan Adiwiyata Mandiri 1 sekolah.
3. Terlaksananya PROPER ke sejumlah perusahaan. Pada tahun 2017, terdapat 4 perusahaan yang mendapat predikat hijau. Adapun predikat hijau pada kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu :
   - PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona.

- PT. Gunung Sejahtera Dua Indah.
- PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi.
- PT. Surya Indah Nusantara Pagi.

4. Terlaksananya pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup pada 19 perusahaan (tindakan preventif dan kuratif terhadap obyek/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan). Target ada 15 perusahaan dan terealisasi sebanyak 19 perusahaan sebagai berikut :
   - PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona
   - PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
   - PT. Gunung Sejahtera Dua Indah
   - PT. Surya Indah Nusantara Pagi
   - PT. Korintiga Hutani
   - PT. Ensbury Kalteng Minning
   - PT. Sawit Sumbermas Sarana
   - PT. Sabut Mas Abadi
   - PT. Bumi Langgeng
   - PT. Korindo Ariabima
   - PT. Bumitama Gunajaya Abadi
   - PT. Eksploitasi Energi Indonesia
   - PT. Indoturba
   - PT. Wana Sawit Subur Lestari
   - PT. Bangun Jaya Alam Permai
   - PT. Sinar Alam Permai
   - PT. SLS
   - Klinik Harapan Insani
   - RSUD Sultan Imanuddin
5. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 pada unit-unit usaha, target ada 8 perusahaan dan terealisasi sebanyak 10 perusahaan, sebagai berikut :
   - PT. Surya Sawit Sejati
   - PT. Mutuagung Lestari
   - PT. Ensbury Kalteng Mining
   - PT. Sawit Sumbermas Sarana
   - PT. Mitra Mendawai Sejati

- PT. Kalimantan Sawit Abadi
- PT. Sinar Alam Permai
- PT. Kapuas Prima Citra
- PT. Indoturba Tengah
- PT. Korindo Ariabima Sari

6. Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan dengan dokumen UKL-UPL dari tahun 2003 sampai dengan 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.100 Jumlah Rekomendasi dan Izin Lingkungan dengan Dokumen UKL - UPL Tahun 2013 – 2017

No.	Tahun					Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	
	11	8	18	26	4	

Sumber : DLH 2017

Tabel 2.101 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017

No.	URAIAN		CAPAIAN KINERJA
1.	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi 17 / Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL 41 X 100 %	41,46%

Sumber : DLH 2017

7. Tersedianya data dan terlaksananya uji kualitas air di Sungai Arut dan Sungai Kumai sebanyak 2 kali (2 semester).
8. Tersedianya data dan terlaksananya uji kualitas udara ambien sebanyak 2 kali (2 semester) di 6 titik dalam kota Pangkalan Bun.
9. Tersedianya laporan DIKPLHD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.
10. Tersedianya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebanyak 25 dokumen.
11. Tersedianya dokumen rencana inventarisasi neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebanyak 25 dokumen.
12. Tahun 2017 ada 1 pengaduan kasus lingkungan dan bisa tertangani 1 kasus, kinerja 100% karena yang dinilai dari sisi tertanganinya kasus.

13. DLH melaksanakan program kebersihan salah satunya melalui pembuatan KAMPUNG SEGA di wilayah (rumah bantaran sungai) Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Raja, Pangkalan Bun.
14. Terlaksananya kegiatan :
    - Sosialisasi/pembinaan Adiwiyata
    - Sosialisasi pengelolaan persampahan di tingkat kecamatan.
    - Peringatan hari-hari penting lingkungan hidup.
    - Lomba kebersihan lingkungan tingkat RT, sekolah, kantor dan kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin Barat.
    - Lomba kreasi baju daur ulang tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA se-Kabupaten Kotawaringin Barat.
    - Pengadaan angkong sebanyak 24 unit/buah untuk persampahan.
    - Pengadaan bahan-bahan dan alat-alat laboratorium guna mendukung pelaksanaan kerja di laboratorium lingkungan hidup.
    - Tahun 2017 dilakukan inventarisir melalui kegiatan pembuatan sistem manajemen Adipura (nonfisik Adipura) berupa pemutakhiran data pengelolaan persampahan, RTH, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai upaya mendukung Program Adipura Kota Pangkalan Bun.
    - Di Kabupaten Kotawaringin Barat juga terdapat Bank Sampah sehingga penanganan dalam pemanfaatan sampah-sampah bisa lebih maksimal dilakukan. Daur ulang sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis cukup tinggi.
15. Tersedianya 6 buah baliho pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
16. Tersedianya 4 buah baliho Adipura.
17. Tersedianya spanduk himbauan tentang pengelolaan persampahan di TPS-TPS, sekolah-sekolah, di jalan-jalan protokol sebanyak 50 buah.

2.4.4 Urusan Pekerjaan Umum

a) Kondisi Umum

Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur terutama jalan yang merupakan salah satu sarana penunjang transportasi.

Dengan adanya jalan, maka akses terhadap suatu wilayah akan lebih mudah sehingga pembangunan terhadap segala aspek kehidupan, baik itu kesehatan, pendidikan, ekonomi dapat lebih mudah dilakukan. Pembangunan di bidang pengembangan fasilitas transportasi meliputi prasarana perhubungan yang menyangkut prasarana jalan dan jembatan lebih diarahkan untuk membuka keterisolasian dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan.

Bina Marga

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Adapun hasil yang dicapai pada tahun 2017 diantaranya :

1. Kegiatan pembangunan jalan sepanjang 7,16 km berupa peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran badan jalan, pembangunan jembatan 34 buah, peningkatan jalan sepanjang 29,351 km (peningkatan struktur jalan), pemeliharaan jalan sepanjang 1,15 km dan swakelola sepanjang 117,158 km, pemeliharaan jembatan 29 buah, serta tersusunnya data base jalan dan data base jembatan tahun 2017;
2. Terbukanya daerah terisolir. Daerah pesisir Kubu-Sungai Bakau-Teluk Bogam– Keraya-Sebuai telah fungsional dan pada tahun 2017 melalui DAK dilakukan peningkatan struktur jalan berupa aspal di ruas jalan Teluk Bogam-Keraya- Sebuai Timur-Sebuai-Batas Tanjung Putri;
3. Terbukanya jalan lingkar selatan meliputi Pangkalan Bun-Kumpai Batu-Tanjung Putri-Sebuai;
4. Terbukanya jalan lingkar, dalam rangka mendukung kawasan industri yang menghubungkan daerah luar melalui pelabuhan Tanjung Kalap-Pelabuhan *Ro-Ro* Panglima Utar, diantaranya lanjutan pembangunan Jembatan Sungai Kakap Tahap III berupa pekerjaan pemasangan girder, cor lantai dan oprit, pada tahun 2018 ini dilanjutkan pembangunan Sungai Kakap tahap IV berupa penyelesaian timbunan oprit dan pada tahun 2018 ini juga dilanjutkan pembangunan Jembatan Sungai Nyirih Tahap III;
5. Terbukanya jalan menuju lokasi Bandara Baru di Sebuai berupa perbaikan tanah dengan pelebaran dan penimbunan pada ruas jalan tersebut;
6. Terbukanya jalan menuju *hinterland* Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Sukamara, Lamandau dan Manis Mata (Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat) melalui pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin

Lama dengan penimbunan geotextile dan peningkatan struktur jalan berupa aspal;

7. Peningkatan skala pelayanan kota dengan peningkatan jalan kota Pangkalan Bun seperti Jalan Ahmad Wongso, Jalan Samari, Jalan Kasanrejo, Jalan Udan Said, Jalan Malijo dan peningkatan jalan lainnya di dalam kota;

Berdasarkan statusnya, jalan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.102 Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Statusnya Tahun 2015 – 2017

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan negara	156,96	6,36	156,96	6,36	156,96	6,36
2	Jalan provinsi	55,40	2,24	55,40	2,24	55,40	2,24
3	Jalan kabupaten	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51
4	Jalan desa	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89
Jumlah		**2469,75**	**100**	**2469,75**	**100**	**2469,75**	**100**

Sumber: Dinas PUPR 2017

Tabel 2.103 Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2015 – 2017

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Jalan Aspal	1.022,37	41,23	1.039,46	42,09	1053,35	42,65
2	Jalan Batu/kerikil	100,65	4,15	92,03	3,73	90,56	3,67
3	Jalan Tanah	1.082,92	44,49	1074,44	43,5	1058,52	42,86
4	Tidak dirinci :						
	⟩ Beton	137,81	5,06	137,81	5,58	141,02	5,71
	⟩ Titian	29,85	1,18	29,85	1,21	30,15	1,22
	⟩ Lainnya	96,16	3,89	96,16	3,89	96,16	3,89
Jumlah		**2.469,75**	**100**	**2469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**

Sumber : Dinas PUPR 2017

Panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 adalah 2.469,75 km. Untuk jalan yang merupakan kewenangan kabupaten tidak mengalami perubahan panjang, dimana pada tahun 2017 fokus pekerjaan bukan pada penambahan panjang jalan tetapi lebih kepada peningkatan struktur dan kemantapan jalan.

Tabel 2.104 Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2015 – 2017

No	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Jalan Baik	890,5	36,06	897,27	36,33	915,63	37,07
2	Jalan Sedang	761,46	30,83	772,31	31,27	768,86	31,13
3	Jalan Rusak ringan	608,00	24,62	610,18	24,71	607,70	24,61
4	Jalan Rusak Berat	209,79	8,49	189,99	7,69	177,56	7,19
Jumlah		**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**

Sumber : Dinas PUPR 2017

Berdasarkan tabel 2.99 dapat disampaikan bahwa kinerja proporsi panjang jalan munurut kondisinya sebagai berikut: Jalan kondisi baik meningkat sebesar 0,74%, jalan kondisi sedang mengalami penurunan sebesar 0,14%, jalan rusak ringan mengalami penurunan 0,1%, jalan rusak berat mengalami penurunan 0,4%.

Tabel 2.105 Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kelas Jalan Tahun 2015 – 2017

No	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Kelas I	-	-	-	-	-	-
2	Kelas II	-	-	-	-	-	-
3	Kelas III	-	-	-	-	-	-
4	Kelas III A	-	-	-	-	-	-
5	Kelas III B	212,36	8,60	212,36	8,60	212,36	8,60
6	Kelas III C	456,12	18,47	465,90	18,86	465,90	18,86
7	Kelas Tidak dirinci	1.81,27	72,93	1.791,49	72,54	1.791,49	72,54
Jumlah		**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.469,75**	**100**

Sumber : Dinas PUPR 2017

Sedangkan kondisi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai akhir tahun 2017 dapat dilihat dari berikut ini :

Tabel 2.106 Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2015 – 2017

No	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Jembatan Baik	141	77,47	162	76,06	205	87,61
2	Jembatan Sedang	26	14,29	20	9,39	11	4,70
3	Jembatan Rusak	14	7,69	15	7,04	8	3,42
4	Jembatan Rusak Berat	1	0,55	16	7,51	10	4,27
	Jumlah	**182**	**100**	**213**	**100**	**234**	**100**

Sumber : Dinas PUPR 2017

Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Berbagai macam wujud perairan permukaan terdapat di Indonesia, seperti: sungai, danau dan rawa. Semua wujud perairan permukaan mempunyai manfaat, seperti untuk irigasi, pelayaran, perikanan, pembangkit tenaga listrik, pengendali banjir, objek wisata serta digunakan untuk air baku guna mencukupi kebutuhan air minum. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air.

Pengelolaan sumber daya air pada daerah irigasi dan daerah rawa bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air dan inspeksi saluran di kawasan daerah irigasi/rawa dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan kegiatan peningkatan jaringan irigasi. Adapun untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, dan menambah debit air telah dilaksanakan pembuatan saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 21.294 m serta peningkatan saluran dengan pasangan batu sepanjang 3.021 m. Guna kemudahan akses menuju lahan pertanian dibuat jembatan layanan sebanyak 19 buah dan peningkatan jalan inspeksi. Untuk pemeliharaan sistem irigasi yang telah dibangun dilaksanakan dalam kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan melaksanakan rehabilitasi saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 34.229 m dan dengan melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 181.730 m. Agar terpenuhinya fungsi bangunan air sebagai drainase, suplesi dan retensi air irigasi/rawa di lahan pertanian dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan pintu air. Adapun pada tahun 2017 telah dilaksanakan pembuatan dan rehabilitasi pintu air sebanyak 14 buah. Capaian kinerja jaringan irigasi pada tahun 2017 sebesar 76% dari kebutuhannya, sehingga ketersedian air untuk melayani musim tanam 2017 masuk indeks kinerja sistem irigasi kategori baik.

Pengelolaan sumber daya air dalam upaya untuk pengendalian banjir dilaksanakan dalam kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, serta normalisasi/pemeliharaan saluran sungai. Kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai bertujuan untuk mengurangi titik-titik daerah banjir baik dari hujan lokal maupun sungai yang melintas di dalam kota. Pada tahun 2017, telah

dilaksanakan peningkatan saluran induk pengendali banjir dengan pasangan batu sepanjang 237 m dan dengan cor beton saluran induk pengendali banjir sepanjang 339 m. Untuk pemeliharaan saluran induk dilaksanakan normalisasi saluran induk pengendali banjir sepanjang 6.315 m dan rehabilitasi saluran induk pengendali banjir 7.636 m dan pemeliharaan saluran induk pengendali banjir 31.610 m. Kegiatan normalisasi/pemeliharaan saluran sungai bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai dan membentuk profil sungai. Adapun pada tahun 2017 telah dilaksanakan normalisasi saluran sungai sepanjang 8.470 m. Untuk pemeliharaan sungai telah dilaksanakan sepanjang 15.200 m.

Dalam upaya mengendalikan tingkat abrasi pantai dan erosi tebing sungai pada daerah pantai dan sungai dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai dan pembangunan turap/talud/bronjong. Pembangunan prasarana pengaman pantai sendiri mempunyai tujuan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi dengan membangun bangunan pemecah ombak *(breakwater)* dan *groin.* Pada tahun 2017 telah dibangun bangunan pemecah ombak sepanjang 116,6 m. Kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong bertujuan untuk mencegah erosi dan longsor, konstruksi yang dibangun berupa pasangan batu sepanjang 493,2 m, dan konstruksi bronjong 76 m.

Untuk menjaga ketersedian air baku guna mencukupi kebutuhan air sehari-hari bagi masyarakat dan sebagai konservasi air telah dilaksanakan kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya pada tahun 2017 ini, dan telah dibangun embung sebanyak 8 buah meliputi Desa Arga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Karang Sari Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama, Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Batu Belaman Kec. Kumai, Danau Kura-Kura Kecamatan Pangkalan Lada, dan Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada.

Bidang Cipta Karya

Air Limbah

Pengolahan air limbah pemukiman secara umum di Kabupaten Kotawaringin Barat ditangani melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (*on-site*) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (o*ff site*) sebagai berikut :

- SPALD Setempat (o*n-site*): sistem individual maupun komunal yang akan dibangun meliputi: MCK, MCK++ fasilitas umun dan sosial, septictank individual dan komunal baik yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan.

  Pembangunan MCK komunal, septictank individual dan septictank komunal akan difokuskan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi yang sesuai dengan area beresiko sanitasi, dan juga daerah perdesaan yang sudah ODF (*Open Defecation Free*).
- SPALD Terpusat (o*ff-site*): penataan dan pengelolaan bangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan dan pemeliharaan IPAL yang sudah di bangun di Desa Pasir Panjang, Kelurahan Kumai Hilir, Kelurahan Raja Seberang, Kelurahan Mendawai Seberang serta Kelurahan Baru. Untuk meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan fungsi IPLT, akan dilaksanakan program Penyedotan Lumpur Tinja Terjadual (PLTT) pada infrastruktur yang sudah dibangun baik SPALD Setempat maupun SPALD Terpusat.

Dalam rangka untuk mendukung pemenuhan pencapaian Akses Universal 2019 yaitu untuk menciptakan ODF (*Open Defecation Free*) perlu dukungan dari semua pihak terkait, terutama untuk membangun infrastruktur sanitasi harus mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendanaan lain yang peduli sanitasi.

Tabel 2.107 Jumlah Infrastruktur Air Limbah
Kabupaten Kotawaringin Barat

No	SPAL	Tahun			Total Infrastruktur 2008 – 2017
		2008-2015	2016	2017	
1.	IPLT	1	-	-	1 Unit
2.	IPAL	1	-	5	6 Unit
3.	MCK Komunal	11	1	1	13 Unit
4.	SR IPAL	336	-	-	336 KK
5.	Septictank Komunal	-	1	-	1 Unit
6.	Septictank Individual	-	-	200	200 Unit
7.	Toilet Umum	-	2	-	2 Unit

Sumber : Dinas PUPR 2017

Drainase

Sistem drainase yang telah ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar berada di daerah perkotaan yang ada di sepanjang jaringan jalan dan permukiman, namun dengan semakin bertambahnya penduduk mengakibatkan daerah resapan dan aliran air menjadi terganggu dikarenakan berubah fungsi menjadi perumahan dan permukiman, sehingga berpotensi timbulnya titik genangan baru. Beberapa daerah cekungan juga merupakan kendala di dalam mengatasi aliran air sehingga masih ada daerah-daerah yang tergenang air atau banjir sesaat pada waktu turun hujan deras.

Dengan intensitas curah hujan yang besar dan ketersediaan drainase relatif kecil ataupun aliran air yang terganggu, maka rawan terjadinya luapan air akibat daya tampung saluran yang kurang mencukupi dan saluran yang terhambat. Dalam masterplan drainase yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat, semua sistem saluran drainase bermuara di Sungai Arut, Sungai Buun, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau.

Secara umum, layanan drainase di Pangkalan Bun masih relatif lambat dalam mengurangi genangan. Ini dikarenakan pada titik-titik genangan tersebut harus melakukan penanganan yang secara teknis lebih rumit dan membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam pelaksanaannya. Namun demikian, ada beberapa kondisi yang perlu diwaspadai dan dapat menjadi masalah baru yang dapat menurunkan keefektifan layanan drainase, yaitu:

a. Proses sedimentasi

   Sedimentasi pada saluran dapat mengurangi kapasitas pengaliran (*passing capacity*) akibat berkurangnya luas penampang saluran akibat pendangkalan.

   Beberapa sumber endapan adalah:

   1) Butiran tanah yang terkikis dari lahan khususnya dari kawasan atas akibat banyaknya pembangunan;
   2) Endapan sampah.

b. Kerusakan prasarana

   Akibat umur, beberapa prasarana drainase mengalami kerusakan secara fisik. Yang paling banyak adalah keruntuhan dinding saluran dan menurunnya penutup gorong-gorong.

c. Pola pengurugan lahan yang tidak teratur

   Pengurugan yang tidak teratur elevasinya akan mengacaukan pola aliran dan mengurangi kecepatan menuju ke saluran. Secara teoritis, waktu

konsentrasi yang lama akan meningkatkan akumulasi genangan per satuan waktu. Pengamatan di lapangan menunjukan, beberapa saluran mempunyai endapan rata-rata antara 5 cm hingga 20 cm, bahkan pada saluran drainase yang sudah memiliki umur pembangun yang lama, kondisinya sudah berada di titik rawan sehingga perlunya rehabilitasi maupun pemeliharaan.

Tabel 2.108 Capaian Pembangunan Drainase Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Panjang Drainase (m)	Rasio Pembangunan (%)
1.	2014	25.493	14,1
2.	2015	16.011	8,8
3.	2016	8.673	4,7
4.	2017	12.754	7,1

Sumber: Dinas PUPR 2017

Dari tabel di atas, dapat dilihat rasio pembangunan saluran drainase dari tahun ke tahun mengalami penurunan disebabkan rasionalisasi anggaran dan juga akibat peningkatan harga material bahan bangunan. Namun, mulai ada peningkatan di tahun 2017. Total panjang saluran drainase terhitung dari tahun 2009 sampai tahun 2017 sebesar 181.160 meter tersebar di 6 (enam) kecamatan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terbagi dalam 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu UPTD Alat Berat dan UPTD Laboratorium Konstruksi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 264.885.579 dan terealisasi sebesar Rp. 262.178.988.497,61 atau 98,98%. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.109 Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
DINAS PUPR		**264.885.579.000**	**262.178.988.497,61**	**98,98**	**99,75**				
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**3.758.471.600**	**3.261.053.279,61**	**86,77**	**100**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**%**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**848.365.000**	**811.208.670**	**95,62**	**100**	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**92.733.300**	**92.733.300**	**100**	**100**	Tingkat kepatuhan aparatur	100	100	%
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**195.000.000**	**191.532.497**	**98,22**	**100**	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100**	**100**	**%**
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**3.037.500**	**3.036.750**	**99,98**	**100**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100**	**100**	**%**
6.	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	**171.244.310.650**	**170.708.027.150**	**99,69**	**100**	**Persentase panjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total panjang jalan kabupaten**	**100**	**100**	**%**
7.	**Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong**	**13134501400**	**13.080.844.000**	**99,59**	**100**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**100**	**100**	**%**
8.	**Program pembangunan turap/talud/ brojong**	**1.622.514.400**	**1.603.451.800**	**98,83**	**100**	**Rasio jumlah lokasi pembangunan turap/talud/bronjong terhadap jumlah seluruh wilayah rawan longsor**	**100**	**100**	**%**
9.	**Program rehabilitasi/ pemeliharaan**	**5.728.191.350**	**5.607.714.560**	**97,90**	**100**	**Panjang jalan yang memenuhi kondisi jalan**	**100**	**100**	**%**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	jalan dan jembatan					**baik dan sedang**			
10.	**Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan**	**194.727.500**	**194.727.500**	**100**	**100**	**Cakupan informasi/ database jalan dan jembatan**	**100**	**100**	**%**
11.	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebina margaan**	**1.202.714.800**	**1.121.998.400**	**93,29**	**100**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan**	**100**	**100**	**%**
12.	**Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**	**27.390.998.100**	**26.414.787.491**	**96,44**	**100**	**Persentase luas irigasi dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**%**
13.	**Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya**	**2.220.067.100**	**2.215.878.100**	**99,81**	**100**	Tersedianya cadangan air	**100**	**100**	**%**
14.	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	**10.162.398.800**	**10.077.541.400**	**99,16**	**100**	**Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/mck**	**100**	**100**	**%**
15.	**Program pengendalian banjir**	**5.289.737.800**	**5.267.440.200**	**99,58**	**100**	**Mengendalikan banjir pada daerah genangan air**	**100**	**100**	**%**
16.	**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	**8.657.632.000**	**8.514.757.500**	**98,35**	**100**	**Rasio luas wilayah strategis dan cepat tumbuh terhadap luas wilayah kabupaten**	**100**	**100**	**%**
17.	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	**13.140.177.700**	**13.012.255.900**	**99,03**	**100**	**Jumlah rumah tangga pengguna air bersih**	**100**	**100**	**%**

Sumber: LKPJ, 2017

Adapun capaian SPM dan target SPM pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kowaraingin Barat sebagai berikut:

Tabel 2.110 Capaian dan target SPM pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Urusan	Jenis SPM	Capaian 2017	Target 2019
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari;dan	66,8 %	72,4 %
		b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	84,10 %	100 %

Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi menjadi salah satu bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat terbentuk secara efektif mulai Tahun Anggaran 2017. Tugas pokok bidang ini adalah memberikan 7 (tujuh) Layanan Informasi melalui Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan meningkatkan ketrampilan tenaga kerja konstruksi dengan melaksanakan sertifikasi tenaga kerja terampil konstruksi serta pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 di mana kewenangan pemerintah kabupaten pada sub urusan jasa konstruksi meliputi:

a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
c. Penerbitan izin usaha jasa nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar;
d. Pengawasan tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pada Tahun Anggaran 2017 tugas pokok tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum adanya dana yang tersedia di bidang Bina Konstruksi ini. Namun demikian, terhadap tugas memberikan 7 (tujuh) Layanan Informasi melalui SIPJAKI dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) telah menerbitkan sebanyak 64 rekomendasi;

2. Terbentuknya Tim Pembina Jasa konstruksi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 183 Tahun 2017;
3. Terupdatenya daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi.

Tabel 2.111 Standar Pelayanan Minimal Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Informasi	Bobot (%)	Tahun 2017	
			Ada	Update
1	Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala	35	342	216
2	Data badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala *)	10	342	216
3	Data tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara berkala *)	10	1	0
4	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	10	1	0
5	Tanda daftar usaha perseorangan yang terupdate secara berkala	10	1	0
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 (enam) bulan	15	2	1
7	Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota	10	1	1
	NILAI SPM LAYANAN DASAR SIPJAKI (%)	**100**		**46**

Sumber: Dinas PUPR 2017

Tabel 2.112 Standar Pelayanan Minimal Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Kotawaringin Barat

NO.	JENIS INFORMASI	TAHUN 2017
1.	Jumlah IUJK yang diterbitkan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap	64
2.	Seluruh jumlah IUJK yang diterbitkan setelah persyaratan lengkap	64
	Nilai SPM Pelayanan Pada Akhir Tahun Pencapaian SPM (%)	**100**

Sumber: Dinas PUPR 2017

2.4.5 Urusan Penataan Ruang

a) Kondisi Umum

Bidang penataan ruang adalah salah satu bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang terbentuk pada tahun 2017. Salah satu hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah pembagian kewenangan yang tegas antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk peran pemerintah pusat dan propinsi dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

penataan ruang nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota. Adapun wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah:

1. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
2. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Pada pelaksanaan penataan ruang, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

2. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM pada Bidang Penataan Ruang adalah Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Penataan Ruang pada bidang Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR pada tahun 2017 belum memiliki program dan anggaran karena merupakan bidang baru yang dibentuk dan belum tersedianya kode anggaran kegiatan untuk kegiatan penataan ruang karena masa transisi penyusunan Renstra 2017-2022.

2.4.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

a) Kondisi Umum

Perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Pengelolaan pembangunan yang baik menunju pada terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, sebagai buah dari analisis, formulasi, implementasi dan evaluasi dari kebijakan pembangunan yang terencana, terintegrasi dan sistematik. Perencanaan adalah basis dalam mencapai suatu tujuan karena perencanaan merupakan arahan dan pedoman kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansi. Maka berkaitan dengan mekanisme, pilihan terhadap perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat), dan subtansial (jenis kebutuhan yang secara nyata diperlukan masyarakat). Sehingga, dengan mekanisme *bottoum up planning* seperti ini sesungguhnya merupakan proses agregatif (hasil kesepakatan bersama) yang harus secara konsisten dipatuhi dan menjadi pijakan dalam setiap proses berikutnya.

Konsep perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif bermakna melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antar pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta kesepakatan pada semua tahapan. Proses ini juga memberi dampak positif yaitu pertama, masyarakat akan berperan aktif di dalam proses pembangunan. Kedua, mendorong kemandirian di tingkat desa. Ketiga, menjalin koordinasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan struktur pemerintah di bawahnya serta pemerintah kabupaten dengan masyarakat. Keempat, menghasilkan sebuah pembangunan di tingkat kabupaten yang menjadi kehendak publik.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan

pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Terkait dengan urusan perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja setiap tahunnya. Capaian indikator kinerja urusan perencanaan pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.113 Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017

No.	Indikator	2016	2017		
			Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah di tetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	100%
2.	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	100%
3.	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	100%
4.	Penjabaran program RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	100%

Sumber: Bappeda 2017

Adapun urusan perencanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup beberapa program antara lain Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pengembangan Data/Informasi yang menentukan arah dan alur pembangunan. Melalui Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pemerintah dapat mengawasi dan mengoreksi pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun metodenya melalui penelitian dan pemahaman dokumen perencanaan, identifikasi laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan, laporan dokumentasi monitoring evaluasi kegiatan pembangunan, pendataan SDDKN (Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional), melalui website administrasi pembangunan yang berisi informasi pembangunan Kotawaringin Barat yang dapat diakses dengan luas oleh masyarakat maupun melalui rapat evaluasi program kerja pembangunan.

Sementara itu, Program Pengembangan Data/Informasi memberikan andil dengan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Aplikasi LPSE merupakan pusat informasi bagi pengadaan barang/jasa pemerintah yang

menggerakan proses pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. LPSE menjanjikan proses pelelangan yang jujur, kompetitif dan menghasilkan penghematan anggaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Informasi dan Kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik**" diukur melalui 1 (satu) indikator pada **"Program Pengembangan Data/ Informasi"** Indikator kinerja, target dan realisasi di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.114 Capaian Sasaran Program Pengembangan Data Informasi

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Capaian standar pelayanan pengelolaan LPSE	52	71	136

Sumber: Setda 2017

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, efektif, efisien dan transparan guna mendukung *e-government*, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menerapkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui alamat http://lpse.kotawaringinbaratkab.go.id. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) telah mendorong kepada seluruh LPSE agar dapat memenuhi 17 standar yang ditetapkan oleh LKPP dengan mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai bentuk kematangan sebuah organisasi, anggaran dan keamanan dari unit LPSE. Adapun jumlah standar pelayanan yang ditargetkan untuk dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 adalah 9 (sembilan) standar sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikelola oleh Sekretariat Daerah telah meraih 12 (dua belas) dari 17 (tujuh belas) standar pelayanan yang ditetapkan LPSE.

c) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretariat Daerah dengan total pagu sebesar Rp 7.700.991.000. Rinciannya, Bappeda

sebesar Rp. 6.434.741.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.928.332.741 atau 92,13%. Sedangkan Sekretariat Daerah dengan pagu sebesar Rp 1.266.250.000 dan realisasi Rp 1.170.519.147 atau 95,12%. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.115 Program Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	CapaianKinerja Program/KegiatanKinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
BAPPEDA		**6.434.741.000**	**5.928.332.741**	**92.13**	**99.34**				
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**1.070.270.800**	**987.934.197**	**92,31**	**99,94**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran**	**12**	**12**	**keg.**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**1.368.090.000**	**1.327.085.014**	**97,00**	**99,56**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**5**	**5**	**keg.**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**50.050.000**	**50.050.000**	**100**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur**	**2**	**2**	**keg.**
4.	**Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS**	**11.350.000**	**11.350.000**	**100**	**100**	**Jumlah pegawai yang dipulangkan**	**1**	**1**	**Org**
5.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**112.000.000**	**106.531.605**	**95.12**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**1**	**1**	**keg.**
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**4.260.000**	**2.269.000**	**53,26**	**53,26**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**3**	**3**	**keg.**
6.	**Program pengembangan data informasi**	**47.007.500**	**22.113.500**	**47,04**	**52,45**	**Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan data informasi**	**1**	**1**	**keg.**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	CapaianKinerja Program/KegiatanKinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
7.	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1.239.081.000	1.196.703.900	96.58	99.09	Terlaksananya kegiatan pada program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	1	keg.
8.	Program perencanaan pembangunan daerah	1.808.153.700	1.524.168.315	84,29	100	Terlaksananya kegiatan pada program perencanaan pembangunan daerah	6	6	keg.
9.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	109.562.500	93.485.227	85.33	100	Terlaksananya kegiatan pada program perencanaan pembangunan ekonomi	1	1	keg.
10.	Program perencanaan sosial budaya	178.330.500	174.254.673	97.71	100	Terlaksananya kegiatan pada program perencanaan sosial budaya	2	2	keg.
11.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	349.185.000	346.847.200	99.33	100	Terlaksananya kegiatan pada program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1	1	dok.
12.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	76.363.750	61.818.750	80,95	87,23	Terlaksanya koordinasi perencanaan bidang sanitasi, drainase dan air minum skala kabupaten	1	1	Keg.

Sumber : LKPJ, 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
SETDA		1.265.250.000	1.170.519.147	95,12	100	-			
1	Program pengembangan data/informasi	139.950.000	135.688.970	96,96	100	Jumlah sistem informasi bid. administrasi pembangunan dan pengadaan barang yang diterapkan dalam	1	1	Sistem informasi

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						mendukung e-goverment			
2.	**Program pengembangan wilayah perbatasan**	**163.575.000**	**159.464.981**	**97,49**	**100**	**Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar kabupaten**	**1**	**1**	**Keg.**
3.	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**962.725.000**	**875.365.196**	**90,93**	**100**	· Persentase laporan kinerja pemerintah daerah yang tersusun tepat waktu · Persentase data bidang administasi pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan · Persentase pelayanan pengadaan barang jasa melalui ULP	3	**3**	**Keg**

Sumber: LKPJ, 2017

Capaian keberhasilan urusan perencanaan pembangunan Tahun 2017 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya musrenbang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan musrenbang tingkat kabupaten dengan baik sebagai suatu rangkaian implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
2. Tersedianya pedoman untuk arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan daerah berupa dokumen RKPD Tahun 2018;
3. Terlaksanannya penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
4. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra SKPD) Bappeda Tahun 2017-2022;
5. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) Bappeda Tahun 2018;

6. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016;
7. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD Bappeda Tahun 2017;
8. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Bappeda Tahun 2017;
9. Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka adopsi aplikasi e-*planning* (sistem manajemen informasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan);
10. Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bappeda dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda), Kementerian Dalam Negeri dan Universitas Brawijaya Malang dalam rangka penyusunan dan pendampingan penyiapan dokumen RPJMD dan dokumen Renstra;
11. Tersediannya teknologi informasi perencanaan berupa Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (simral) di akses melalui http://203.130.214.218/sikd dan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) di akses melalui http://203.130.214.10/sisrenbangda_2017;
12. Tersedianya teknologi informasi pelaporan berupa Sistem Informasi Pelaporan Daerah (Siporda) di akses melalui http://203.130.214.218:90/siporda_2017;
13. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan antar satker/sektor bidang sarana prasarana, ekonomi dan sosial pemerintahan.

2.4.7 Urusan Perumahan

a) Kondisi Umum

Rumah (papan) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, selain kebutuhan sandang (pakaian) dan pangan (makan). Berbagai kondisi fasilitas perumahan seperti fasilitas penerangan, air minum, jamban dan lain-lain merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam mengamati tingkat kesejahteraan rakyat. Rumah yang baik serta lingkungan yang sehat diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi anggota rumah tangga yang menghuninya. Tempat tinggal yang nyaman dan sehat sepatutnya memiliki tempat buang air

besar. Di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat 2,76% rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar (BAB). Walaupun jumlahnya kecil, namun hal tersebut masih harus menjadi perhatian pemerintah, karena fasilitas pembuangan air besar mempengaruhi kesehatan rumah tangga yang bersangkutan.

Fasilitas tempat BAB yang paling dominan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah fasilitas pembuangan air besar yang digunakan sendiri oleh tiap-tiap rumah tangga yaitu sebesar 79,55%. Sementara untuk fasilitas yang digunakan bersama-sama dan umum cukup kecil yaitu 9,41% dan 8,28%.

Selain dari segi penggunaan fasilitas pembuangan air besar, sanitasi yang baik juga harus ditinjau dari indikator penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah. Penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah akan mencegah limbah yang dibuang oleh rumah tangga merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi kesehatan manusia.

Kabupaten Kotawaringin Barat dilalui beberapa sungai besar, antara lain Sungai Arut, Sungai Lamandau, dan Sungai Kumai. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kebiasaan masyarakat khususnya terhadap pemilikan septik tank. Pada 2017, baru 80,06% rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir limbah (tinja), sungai/danau/laut 10,02%, lubang tanah 8,33% dan pantai/tanah lapang/kebun 1,59%. Dari kondisi tersebut, masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama yang tinggal di daerah sempadan sungai dan di pedesaan masih perlu diberikan penyuluhan tentang budaya pentingnya fasilitas tempat buang air besar karena sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketersediaan dan distribusi air bersih menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. Sumber air bersih oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari air ledeng (berlangganan PDAM), air sumur gali, air sumur bor, air sungai, mata air, mata air tak terlindung dan air hujan. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum menjadi hal penting karena sangat menentukan kualitas air minum itu sendiri. Rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak memiliki fasilitas air minum sekitar 1,42%. Sementara rumah tangga dengan fasilitas air minum sendiri memiliki persentase paling besar yakni 51,91%. Hal tersebut

menggambarkan kondisi yang cukup baik dimana setiap rumah tangga, sekitar 98,14% sudah memiliki fasilitas air minum.

Sebagian besar sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah air isi ulang sebesar 32,78% dan sumur terlindung sebesar 30,83%. Sementara sumber air minum yang paling sedikit digunakan oleh rumah tangga di Kotawaringin Barat adalah air hujan yang hanya sebesar 0,42%.

Penduduk Kotawaringin Barat yang tinggal di daerah bantaran sungai sudah mulai meninggalkan penggunaan air sungai sebagai sumber air minum dan beralih ke penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum utama. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan PDAM mengakibatkan masih ada rumah tangga yang mengkonsumsi air yang diduga kurang bersih, seperti air sungai, air hujan, sumur gali (jika tercemar), dan mata air tak terlindung. Begitu pula dengan air minum, sebagian warga memilih menggunakan air minum isi ulang yang mungkin kebersihannya kurang terjaga dengan alasan harganya yang lebih ekonomis jika dibandingkan dengan air isi ulang bermerek. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Indikator lain dalam urusan perumahan adalah rasio tempat pemakaman umum. Luas pemakaman di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 445.170 m^2 dengan rincian luas tempat pemakaman umum 374.170 m^2, luas tempat pemakaman bukan umum 26.00 m^2, luas tempat pemakaman khusus 25.000 m^2 dan luas taman makam pahlawan 20.000 m^2. Daya tampung tempat pemakaman sebanyak 144.681 unit dengan rincian tempat pemakaman umum 121.606 unit, tempat pemakaman bukan umum 8.450 unit, tempat pemakaman khusus 8.125 unit dan taman makam pahlawan 6.500 unit.

Tabel 2.116 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2016-2017

No.	Indikator	2016		2017		Persentase Terhadap Target
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Rumah tangga pengguna air bersih	65	72	65	74,21	110,76
2.	Rumah tangga bersanitasi	97,79	77,96	97,79	80,39	82,20
3.	Rumah layak huni	85	89,71	91	91,54	103,59
4.	Rasio tempat pemakaman	77,18	77,18	77,18	77,18	100

No.	Indikator	2016		2017		Persentase Terhadap Target
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
	umum persatuan penduduk					
5.	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	7,5	1,26	7,5	1,33	17,73

Sumber: Dinas PUPR 2017

Pada tahun 2017, sebagaimana tabel di atas menunjukkan gambaran yaitu indikator rumah tangga pengguna air bersih dimana pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami peningkatan 2,23%. Untuk rumah tangga bersanitasi dalam dua tahun terakhir belum mencapai target maksimal dengan persentase capaian di tahun 2017 hanya sebesar 82,20%. Sedangkan indikator lainnya yaitu rasio rumah layak huni dan rasio tempat pemakaman umum tidak mengalami perubahan sesuai capaian 100% dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Adapun indikator rasio tempat pembuangan sampah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 0,93%. Adapun untuk data rumah layak huni per kecamatan disajikan dalam tabel 2.110 berikut ini.

Tabel 2.117 Data Perumahan Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah	%
1	Arut Selatan	25.335	774	26.109	97,04
2	Kumai	10.655	748	11.403	93,44
3	Pangkalan Lada	7.823	404	8.227	95,09
4	Pangkalan Banteng	4.662	278	4.940	94,37
5	Arut Utara	750	200	950	78,95
6	Kotawaringin Lama	4.321	679	5.000	86,42
	TOTAL	53.546	3.083	56.629	94,56

Sumber: Disperkim 2017

Sebagian pemukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat masih banyak menggunakan konstruksi bangunan kayu dan beratap seng. Kondisi ini menjadikan tingkat kerawanan bahaya kebakaran cukup besar. Untuk menanggulangi bahaya tersebut, Satpol PP dan DAMKAR secara khusus membuat Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Perumahan dilaksanakan 2 (dua) SKPD yakni oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Disperkim) dan Satpol PP dan DAMKAR dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.831.524.000 dan realisasi Rp. 4.546.909.750 atau 94,11%. Rinciannya, Disperkim Rp. 3.553.522.500 dan terealisasi sebesar Rp. 3.311.117.200 atau sebesar 93,18%. Sedangkan Satpol PP dan DAMKAR Rp. 1.278.001.500 dan realisasi Rp. 1.235.792.550. Adapun rincian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perumahan berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.118 Program Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2017

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman		**3.553.522.500**	**3.311.117.200**	**93,18**	**95**				
1.	**Program pengembangan perumahan**	**829.980.000**	**633.188.700**	76,28	**85**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengembangan perumahan**	**1**	**1**	**keg.**
2.	**Program pengelolaan areal pemakaman**	**2.703.542.500**	**2.677.928.500**	99,05	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengelolaan pemakaman**	**1**	**1**	**keg.**

Sumber: LKPJ, 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
SATPOL PP DAN DAMKAR									
1	**Program peningkatan kesiagaan dan**	**1.278.001.500**	**1.235.792.550**	**96,70**	**99,68**	**Jumlah kecamatan yang mempunyai**	**3**	**3**	**Keg**

	pencegahan bahaya kebakaran					**pos pemadam kebakaran**			

Sumber : LKPJ, 2017

2.4.8 Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

a) Kondisi Umum

Penerapan kebijakan kepemudaan dilakukan dengan memberikan iklim yang kondusif bagi pemuda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minatnya melalui peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta mengembangkan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan kebijakan kepemudaan dilakukan dengan :

1. Pemberian kesempatan dan kebebasan kepada pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, prioritas, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat;
2. Pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri;
3. Perlindungan terhadap generasi muda dari hal-hal destruktif terutama penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba;
4. Pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda guna memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, bangga dan rela berkorban demi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
5. Kegiatan mempersiapkan pemuda dalam menghadapi persaingan global dan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain melalui berbagai aktivitas yang mendukung, dengan mengedepankan semangat kemanusiaan yang berkeadilan, beradab, dan demokratis, dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai suatu bangsa;
6. Pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Sedangkan pembangunan di bidang olahraga dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain :

1. Melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan pemerintah di bidang keolahragaan;
2. Melaksanakan pembinaan cabang-cabang olahraga;
3. Memetakan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal di bidang olahraga;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga;
5. Membina dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga;
6. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan.

Dalam usaha memberikan bekal kewirausahaan, dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai, namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap goncangan dan persaingan.

Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat kabupaten. Bibit-bibit berprestasi akan terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi.

Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi. Melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung bidang kepemudaan dan olahraga diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.119 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015 – 2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016			2017		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dan Internasional		12	14	14	100	-	-	-
	a. POPNAS	Peringkat	4	10	7	70	-	-	-
	b. POSPENAS	Peringkat	3	5	3	60	-	-	-
	c. PRSI/NPC	Peringkat	-	-	-	-	5	2	40
2.	Jumlah organisasi pemuda	buah	28	30	28	93	30	28	93
3.	Jumlah organisasi olah raga	buah	77	62	124	200	35	29	83
4.	Gedung olah raga/balai remaja (selain milik swasta)	buah	7	8	8	100	3	3	100
5.	Lapangan olahraga	buah	150	150	150	100	7	7	100
6.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	-	-	-	-	28	28	100
7.	Persentase wirausaha muda	persen	-	-	-	-	2.254	975	43
8.	Cakupan pembinaan olahraga	persen	-	-	-	-	29	29	100
9.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	orang	-	-	-	-	35	15	43
10.	Cakupan pembinaan atlet muda	orang	-	-	-	-	35	29	83
11.	Jumlah atlet berprestasi	orang	-	-	-	-	5	2	40
12.	Jumlah prestasi olahraga	orang	-	-	-	-	1	1	100

Sumber: Data DIKBUD 2015-2016, DISPORA 2017

Kegiatan kepemudaan dan olahraga diukur dengan jumlah organisasi pemuda, jumlah cabang olahraga, serta ketersediaan gedung dan lapangan olahraga sebagai wadah bagi warga untuk beraktifitas. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hingga kini telah memiliki 3 buah gedung olahraga dan 7 buah lapangan olahraga. Kemudian terdapat 29 klub olahraga dan 28 organisasi pemuda, 975 wirausaha muda, pelatih bersertifikat 15 orang, 29 klub olahraga, dan 2 atlet yang berprestasi di tingkat nasional.

Sedangkan organisasi kepemudaan adalah organisasi kepramukaan dan pemuda di bawah KNPI. Secara umum, kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik. Namun, perhatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk perkembangan yang lebih baik.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan dengan total alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.193.287.000 dan terealisasi sebesar

Rp. 3.855.916.131 atau 91,95%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.120 Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
DISPORA		**3.968.387.000**	**3.632.379.131**	**91,53**	**98,53**				
1.	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	1.012.598.000	951.050.031	93,92	98,92	**Terlaksanany a kegiatan operasional pemuda dan kegiatan lainnya**	**1**	**1**	**keg.**
2.	**Program pembinaan dan pemasyarakata n olahraga**	2.955.789.000	2.681.329.100	90,71	97,71	**Program pembinaan dan pemasyarakat an olahraga**	**1**	**1**	**keg**
3.	**Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga**	224.900.000	223.537.000	99,39	100	**Terlaksanany a sarana dan prasarana olahraga**	**1**	**1**	**keg**

Sumber : LKPJ, 2017

2.4.9 Urusan Penanaman Modal

a) Kondisi Umum

Terbatasnya sumber daya modal adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh kebanyakan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Sementara di sisi lain, kebutuhan peningkatan pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan dalam upaya pemerintah daerah mendorong kegiatan ekonominya seoptimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Kotawaringin Barat masih memerlukan sejumlah tambahan dana dalam bentuk investasi swasta, baik yang berasal dari investor dalam negeri maupun investor asing.

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat menyimpan beberapa peluang seperti spesifikasi keunggulan lokal di bidang pariwisata dan budaya, komitmen pemerintah daerah yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Adapun isu strategis yang mengemuka dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global

dengan negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni realisasi investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil, investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan, perlunya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lain (termasuk kesiapan lahan), regulasi yang mantap dalam fasilitasi investasi, serta upaya peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju.

Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian, masih banyak sektor lain yang masih potensial untuk dikembangkan, sehingga sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan potensi daerah. Salah satu kendala pelaksanaan investasi di daerah adalah masih belum disahkannya RTRW propinsi dan kabupaten menjadi kendala utama dalam upaya menarik investor. Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi, baik untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas utamanya dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.

Salah satu tujuan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah agar masyarakat dapat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu tempat (*one stop service*), dimana penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat. Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah mengembangkan sistem pelayanan perizinan yang cepat, tepat, sederhana, transparan dan murah sehingga terjamin kondisi yang kondusif dan kesempatan yang sama dalam bekerja/berusaha. Saat ini, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengembangkan aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat pada alamat website yaitu **simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id**. Website ini berguna untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat secara cepat, serta memberikan berbagai informasi perizinan dengan mudah.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 menangani beberapa jenis izin yaitu sebanyak 15 jenis izin yang berjalan sejak sebelum perubahan nomenklatur dinas (masih berstatus kantor). Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan/Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan jumlah yang sudah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebanyak 125 perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. Berikut ini adalah informasi tentang jenis dan realisasi perizinan/non perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

Tabel 2.121 Jenis dan Realisasi Perizinan/ Non Perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

No.	Jenis Izin Usaha	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1.	IMB	749	749	301	40,19
2.	SITU	587	587	459	78,19
3.	HO	496	496	368	74,19
4.	Reklame	0	0	0	
5.	TDP	389	389	302	77,63
6.	IUI	1	1	1	100,00
7.	TDI	3	3	7	233,33
8.	SIUP	363	363	260	71,63
9.	TDG/R	10	10	4	40,00
10.	IUA	0	0	0	-
11.	IT (Izin Trayek)	0	0	0	-
12.	IUA-PP	15	15	1	6,67
13.	IT-PP	0	1	2	200,00
14.	IBA dan Logpond	23	23	18	78,26
15.	IUJK	103	103	84	81,55
JUMLAH		**2.739**	**2.740**	**1.807**	**65,95**

Sumber: Bidang PTSP DPMPTSP 2017

Berdasarkan tabel di atas, beberapa izin mengalami penurunan realisasi dalam penerbitan. Hal ini sangat mungkin disebabkan jumlah usaha tidak mengalami peningkatan dan masa berlaku izin usaha belum habis. Sedangkan untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ada beberapa faktor yang menyebabkan izin tersebut tidak bisa terbit salah satunya karena melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Untuk informasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 dan realisasinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.122 Realisasi Pendapatan Retribusi
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017

No.	Retribusi	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.843.897.572	2.624.937.000	1.011.256.100	38,52
2	Izin Gangguan (HO)	2.499.698.550	1.638.389.000	1.790.158.325	109,26
3	Denda Retribusi Perizinan Tertentu	18.611.997	17.000.000	14.681.748	86,36
	JUMLAH	**5.362.208.119**	**4.280.326.000**	**2.816.096.173**	**65,79**

Sumber: DPMPTSP 2017

Pada tahun 2016, realisasi PAD pada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan sebesar Rp. 5.362.208.119. Sedangkan pada tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi PAD dari retribusi IMB sebesar Rp. 1.011.256.100 dari targetnya yaitu Rp. 2.624.937.000, retribusi HO sebesar Rp. 1.790.158.325 dari targetnya Rp. 1.638.389.000 serta pendapatan denda retribusi sebesar Rp. 14.681.748 dari targetnya Rp. 17.000.000. Dengan demikian, total PAD retribusinya sebesar Rp. 2.816.096.173 dari target PAD sebesar Rp. 4.280.326.000. Untuk penanaman modal, target dan realisasi nilai investasi penanaman modal pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.123 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	2017		
			Target	Realisasi	(%)
1	Nilai realisasi investasi penanaman modal				
	PMA (US $ dalam ribuan)	US $	219.578,00	44.893,80	20,45
	PMDN (Rp. dalam Juta)	Rp.	4.081.549,70	265.396,30	6,50

Sumber: DPMPTSP 2017

Berdasarkan data di atas (sumber data BKPM), bahwa realisasi investasi PMDN sebanyak 26 proyek dengan nilai investasi Rp. juta (265.396.3) dan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.095 orang. Sedangkan realisasi investasi PMA dengan proyek sebanyak 20 dengan nilai investasi US $. Ribu (44.893,8) dan tenaga kerja Indonesia sebanyak 454 orang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Dalam melaksanakan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.934.619.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.566.469.304 atau 80,97%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.124 Program Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
DPMPTSP		**1.934.619.000**	**1.566.469.304**	**93,62**	**80,97**				
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	907.286.700	787.360.546	86,78	**98,51**	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**98,51**	**%**
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	278.182.000	252.088.909	90,62	100	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**%**
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	36.790.400	36.790.000	100,00	100	**Meningkatnya disiplin aparatur**	**100**	**100**	**%**
4	**Program peningkatan kapasitas sumber**	205.503.400	159.269.690	77,50	96,11	**Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**	**100**	**96,11**	**%**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	daya aparatur								
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	4.651.500	4.420.500	95,03	100	**Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100**	**100**	**%**
6	**Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi**	134.005.000	84.470.101	63,04	63,04		**100**	**63,04**	**%**
7	**Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi**	145.000.000	103.344.900	71,27	71,27	**Terlaksananya program/ kegiatan yang mendukung dalam peningkatan iklim investasi**	**100**	**71,27**	**%**
8	**Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	223.200.000	138.724.658	62,15	95,18	**Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat dalam PTSP**	**100**	**95,18**	**%**

Sumber : LKPJ, 2017

Dari tabel di atas, realisasi fisik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 93,62% dan realisasi keuangan hanya sebesar 80,97%. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Program dan kegiatan yang tidak bisa terlaksana secara maksimal disebabkan program dan kegiatan tersebut merupakan pelimpahan dari Disperindag, UMKM dan Pasar yang pelaksanaanya baru bisa direalisasikan setelah perubahan anggaran tahun 2017;
2. Kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah tidak terlaksana karena kesalahan kode rekening dan waktu pelaksanaan yang tidak memadai (setelah perubahan anggaran);
3. Sub kegiatan audit BUMD PD. Agrotama tidak terlaksana karena terkendala ketidakjelasan tupoksi DPMPTSP dalam pembinaan BUMD dan ketidakjelasan organ-organ BUMD dalam pelaksanaan/permohonan audit PD. Agrotama Mandiri.

2.4.10 Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

a) Kondisi Umum

Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya koperasi dan UMKM diarahkan untuk memantapkan perekonomian daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM. Kontribusi koperasi dan UMKM sangat signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kelompok akar rumput sehingga lebih merata dan berkeadilan. Dalam memberdayakan dan mengembangkan koperasi dan UMKM disinergikan dengan kebijakan dan program pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan UMKM melalui fasilitasi dalam mendapatkan akses bantuan permodalan ke lembaga-lembaga keuangan, sosialiasi program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelaku koperasi dan UMKM baik dari pemerintah propinsi maupun pusat, memfasilitasi pelaku koperasi dan UMKM dalam mengikuti pameran baik tingkat kabupaten, propinsi dan nasional, melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru (WUB), peningkatan kelembagaan koperasi, meningkatkan sumber daya manusia pelaku koperasi dengan mengadakan pelatihan, pengembangan lembaga penjaminan untuk usaha kecil dan menengah, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi mikro di pedesaan, fasilitasi dan pembinaan manajemen usaha-usaha UMKM, dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak *multiplier* yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 menegaskan bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen memberikan porsi yang besar untuk koperasi dan UMKM agar dapat maju dan berkembang. Hal ini terlihat dengan antusiasnya permohonan pembuatan badan hukum koperasi baru, perkembangan usaha dan jumlah anggota koperasi yang semakin meningkat, dan semakin besarnya SHU (sisa hasil usaha) serta terus bertambahnya jumlah UMKM. Pada tahun 2017, tercatat terdapat 223 buah koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Petani Plasma, Koperasi Nelayan, Koperasi Pegawai, Koperasi Guru, dan lain

sebagainya. Jumlah tersebut mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016.

Tabel 2.125 Jumlah Koperasi dan Statusnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 – 2017

Koperasi	Tahun 2016 (unit)	Tahun 2017 (unit)	+/(-)
Akti	213	214	1
Tidak Aktif	48	9	-39
Primer	261	223	38
KUD	25	22	-3
Non KUD	236	201	-35

Sumber: Disperindagkop UKM 2017

Berangkat dari perkembangan koperasi dan UMKM yang semakin baik dan pengaruh signifikannya pada roda perekonomian masyarakat, tentu menjadi hal yang membanggakan dan menjadikan motivasi segenap *stakeholders* untuk terus menciptakan iklim serta progress pencapaian maksimal. Sedangkan untuk jumlah UMKM mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.126 Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 – 2017

Jenis UMKM	Tahun 2016 (unit)	Tahun 2017 (unit)	+/(-)
Aneka Jasa	1738	1738	-
Perdagangan	5046	5046	-
Industri Pertanian	1613	1613	-
Industri Non Pertanian	1394	1394	-
Pertanian	1558	1558	-
Jumlah	**11.349**	**2144**	**-**

Sumber: Disperindagkop UKM 2017

Sementara itu, pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan kinerja usaha mikro masih membutuhkan kerja keras karena pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro masih dominan dalam menyerap tenaga kerja.

Selanjutnya peningkatan secara umum penilaian KSP/USP di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2017 yang ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.127 Penilaian Kondisi KSP/USP
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 – 2017

Koperasi	Tahun 2016 (unit)	Tahun 2017 (unit)	+/(-)
Sehat	2	-	2
Cukup Sehat	2	3	1
Kurang Sehat	2	-	2
Tidak Sehat	-	-	-
Jumlah	**6**	**3**	**-**

Sumber: Disperindagkop UKM 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Disperindagkop UKM dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 5.043.774.200 dengan realisasi sebesar Rp. 4.719.963.896 atau 93,58%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.128 Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
Perindagkop UKM		5.043.774.200	4.719.963.896	93,58	100				
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	1.250.247.710	1.170.870.514	93,56	100	**Pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran mendukung tugas pokok dan fungsi serta pelayanaan kedinasan**	**13**		**Keg**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1.175.803.240	1.154.166.050	98.16	100	**Menunjang pelaksanaan kegiatan**	**6**		**Keg.**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	89.660.000	86.115.800	96,05	100	**Aparatur disiplin dalam berpakaian**	**2**		**keg**
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	153.000.000	149.228.300	97,53	100	**Pengetahuan, wawasan, kompetensi dan kapasitas aparatur meningkat**	**1**		**keg.**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	8.958.750	7.944.500	88,68	100	**Laporan semakin baik dan selesai tepat waktu**	**2**		**keg.**
6	**Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif**	866.647.500	575.562.437	66,41	100	**Menumbuhkan wirausaha baru**	**6**		**keg.**
7	**Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah**	189.355.000	121.274.800	64,05	85,37	**Terbukanya akses pasar bagi koperasi baik di kabupaten, propinsi dan nasional sehingga pemasaran produk yang semakin luas**	**4**		**keg**
8	**Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah**	171.537.500	16.380.500	72,36	100	**Koperasi/LKM menggunakan dana pemerintah dengan tepat dan cermat**	**2**		**keg**
9.	**Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**	992.097.000	551.197.950	55,56	66,41	**Nilai manfaat koperasi bertambah baik dan berdaya saing bagi anggota maupun masyarakat**	**6**	**6**	**keg.**

Sumber : LKPJ, 2017

2.4.11 Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil

a) Kondisi Umum

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini disebabkan kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Masalah kependudukan memiliki posisi yang sangat penting bagi pembangunan daerah sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan maupun perencanaan program.

Lebih luas lagi, data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Urusan kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif. Perencanaan di berbagai bidang pembangunan tentunya membutuhkan data kependudukan yang akurat dan valid.

Informasi administrasi kependudukan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengambilan kebijakan di sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk senantiasa melakukan pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mensukseskan program elektronik KTP (KTP-el), Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan verifikasi data kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir tahun 2017 berjumlah **75.361** Kepala Keluarga (berdasarkan Data Agregat Kependudukan semester I tahun 2017). Berikut ini dapat disampaikan mengenai perkembangan capaian indikator kinerja utama bidang kependudukan.

Tabel 2.129 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator	Realisasi Tahun 2016	s/d Tahun 2017		%
		Target	Realisasi	
Kepemilikan Kartu Keluarga Nasional	89.870 (78,37%)	115.000	75.361	78,37
Perekaman KTP-el	158.546 (82,67%)	167.150	169.150	101,17
Kepemilikan KIA	-	-	13.410	-
Penduduk Pindah dari Kabupaten Kotawaringin Barat ke luar Daerah	4.589	-	3.080	-
Penduduk datang dari luar Daerah ke Kabupaten Kotawaringin Barat	4.868	-	3.403	-
Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil :				
) Kepemilikan Akta Kelahiran	171.896 (63,70%)	244.292	179.449	73,46
) Kepemilikan Akta Perkawinan	1.431 (95,40%)	1.900	1.945	102,37

Indikator	Realisasi Tahun 2016	s/d Tahun 2017		%
		Target	Realisasi	
(Non Muslim)				
Kepemilikan Akta Kematian	1.801	-	2.221	-
Kepemilikan Akta Perceraian (Non Muslim)	44	-	45	-
Kepemilikan Akta Perubahan Nama	41	-	93	-
Kepemilikan Akta Pengesahan anak	47	-	91	-
Kepemilikan Akta Pengangkatan anak	6	-	7	-
Kepemilikan Akta Perubahan Kewarganegaraan	0	-	-	-

Sumber: Disdukcapil 2017

Keterangan:

1. Tingkat Kepemilikan KK Nasional masih rendah karena belum semua desa terjangkau pelayanan;
2. Target perekaman KTP-el sudah mencapai 101,17% dan sudah melampaui target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 100% pada akhir tahun 2017;
3. Kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk secara umum masih rendah karena untuk akta yang terbit sebelum adanya aplikasi SIAK belum terdata dalam data SIAK serta pelayanan belum mampu menjangkau semua desa, namun untuk akta kelahiran anak usia 0-18 tahun telah melampaui target nasional yang ditetapkan (85%) yaitu sebesar 86,59% (sejumlah 72.456 akta dari 83.676 jiwa). Tercapainya target ini karena adanya program Kartu Identitas Anak (KIA) dimana persyaratannya adalah KK dan Akta Kelahiran sehingga akta kelahiran yang belum terdata dapat dientry;
4. Akta perkawinan belum mencapai target karena belum adanya kesadaran warga melaporkan perkawinan terutama di desa-desa.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.520.624.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.330.565.048 atau 92,46%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.130 Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun Anggaran 2017

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan						
			Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
Disdukcapil		2.520.624.000	2.330.565.048	92,46	**96,54**				
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	1.094.296.975	984.721.837	89,98	**96,59**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran**	**11**	**11**	**keg.**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	444.920.000	426.701.339	95,90	**97,75**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**5**	**5**	**keg.**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	65.748.000	64.664.500	98,35	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur**	**3**	**3**	**keg.**
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	152.000.000	126.693.147	83,35	**82,24**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**1**	**1**	**Keg.**
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	7.300.000	7.224.000	98,95	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**2**	**2**	**keg.**
6.	**Program penataan administrasi kependudukan**	756.359.025	720.520.225	95,26	98,28	**Terlaksananya kegiatan pada program penataan administrasi kependudukan**	**5**	**5**	**keg.**

Sumber : LKPJ, 2017

Capaian keberhasilan pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tabel kinerja output dan outcome adalah :

a. Pembangunan dan pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu sekaligus pembersihan data ganda antara data SIAK kabupaten/kota dan perekaman biometrik KTP elektronik untuk mendapatkan data akurat pemilih untuk pemilu tahun 2019;
b. Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan melalui:

a. Melalui media cetak dengan iklan layanan masyarakat melalui koran Palangka Post sebanyak 60 hari tayang dengan 3 macam desain (Administrasi Kependudukan, KTP el dan KIA);
b. Melalui media elektronik yaitu iklan layanan masyarakat melalui siaran Radio Primadona dan saluran televisi lokal SBTV sebanyak 60 kali tayang (siaran);
c. Melalui penyuluhan/sosialisasi langsung ke masyarakat di desa-desa sebanyak 9 desa.

c. Penyusunan kebijakan kependudukan. Melalui rapat koordinasi bidang terkait, mememutuskan perlunya memperkuat mekanisme pencatatan peristiwa penting dan pencatatan sipil agar kualitas database kependudukan (SIAK) semakin baik dan validasi serta ketunggalan data yang semakin akurat.

2.4.12 Urusan Ketenagakerjaan

a) Kondisi Umum

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). Dari total penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar 69% berada dalam usia kerja (15 tahun ke atas). Rasio antara angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2016 ke tahun 2017. TPAK mengalami penurunan dari 74,19% menjadi 71,96%.

Tabel 2.131 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	184.860	195.373	202.545	209.717	202.545
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	124.101	136.864	145.749	155.605	145.749
3.	Bekerja (jiwa)	119.533	133.222	141.011	150.689	141.011
4.	Menganggur (jiwa)	4.568	3.642	4.738	4.916	4.738
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,13 %	70,05%	71,96%	74,19%	71,96%
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,68	2,66	3,25	3,16	3,25

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
7.	Tingkat Kesempatan Kerja	96,32	97,33	96,75	96,84	96,75
8.	Bukan Angkatan Kerja	60.759	58.509	56.796	54.112	56.796
9.	Sekolah	15.141	17.465	18.135	18.981	18.135
10.	Mengurus Rumah Tangga	39.732	35.598	33.405	29.336	37.949
11.	Lainnya	5.886	5.446	5.256	5.765	3.992

Sumber: Disnakertrans 2017

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan dimulai dari tahun 2013 sebesar 67,13%, sedangkan tahun 2015 sebesar 71,96%, tahun 2016 sebesar 74,19%. Adapun untuk tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 71,96%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja (penduduk yang berusia di atas 15 tahun). Semakin tinggi jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dan menganggur), maka akan semakin besar angka TPAK. Sebaliknya, semakin rendah jumlah angkatan kerja, maka angka TPAK semakin kecil.

Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung fluktuatif (naik turun). Untuk tahun 2013, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,68%, sedangkan untuk 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 2,66%. Pada tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik sebesar 3,25% dan turun pada tahun 2016 menjadi 3,16%. Adapun pada 2017, kembali terdongkrak naik menjadi 3,25%.

Berbagai faktor yang turut mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di antaranya kenaikan jumlah penduduk usia kerja dan faktor perekonomian, terutama kaitannya dengan pengurangan tenaga kerja di perusahaan perkebunan akibat menurunnya harga komoditas perkebunan.

Tabel 2.132 Kondisi Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Upah Minimum Regional (UMK) /Rp.	1.538.244	1.789.066	2.003.745	2.391.470	2.391.470
Kondisi Pasar Kerja						
2.	Pendaftaran	2.063	2.379	2.669	876	908
3.	Permintaan	367	522	346	177	403
4.	Pengiriman	261	510	210	92	264
5.	Penempatan	207	510	176	78	83

Sumber: Disnakertrans 2017

Pasar tenaga kerja juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Ini dapat dilihat dari tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja, yang besarnya mencapai lebih dari 96,75% untuk tahun 2017. Tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 3,16% di tahun 2016 menjadi 3,25% di tahun 2017. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan lagi berbagai upaya terkait dengan peningkatan penyediaan kesempatan kerja guna untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang cukup signifikan, agar target RPJMD untuk angka pengangguran sebesar 2% pada tahun 2017 dapat tercapai.

Untuk tingkat perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat masih tinggi, sehingga perlu adanya mediasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelesaian kasus di perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.133 Data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Jumlah Kasus	Jumlah Pekerja dalam Kasus	Jumlah Kasus Selesai	Jenis Perselisihan	Penyelesaian Kasus (PB/Anjuran)	Jumlah Sisa Kasus
1	PT. PULAU BARU	1	1	1	PHI	PB	-
2	PT. WSSL	1	1	1	PHK	Anjuran	-
3	PT. FIF	1	1	1	PHK	Anjuran	-
4	PT. SSS	1	12	1	PHI	PB	-
5	PT. BLP	1	43	1	PHI	PB	-
6	PT. BLP	1	1	1	PHK	PB	-
7	AVILLA HOTEL	1	1	1	PHK	PB	-

8	BANK BRI	1	3	1	PHK	PB	-
9	PT. KORINDO ARIABIMA SARI	1	1	1	PHI	Anjuran	-
	JUMLAH	**9**	**64**	**9**			

Sumber: Disnakertrans 2017

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial tahun 2017 di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang kasusnya terselesaikan dengan jumlah 64 pekerja yang berada dalam kasus pada 9 (sembilan) perusahaan. Jenis perselisihan yang terjadi pada perusahaan tidak sama yaitu berupa Perselisihan Hubungan Industrial dari 4 (empat) perusahaan dan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan terhadap tenaga kerja ada 5 (lima perusahaan). Dengan penyelesaian kasus ada berupa anjuran dan Perjanjian Bersama (PB). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan merupakan kesepakatan akhir/penyelesaian akhir dari perusahaan dan tenaga kerja yang dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Indikator kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat dari tabel 2.127 di bawah ini:

Tabel 2.134 Capaian Indikator Kinerja Ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Urusan	Indikator Kinerja (IKK)	Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja
Ketenagakerjaan	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja (Buruh) peserta program jamsostek aktif (34.685)}}{\text{Jumlah pekerja (Buruh) (47.963)}} \times 100\%$	72,31
	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (63)}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar (908)}} \times 100\%$	9,14
	Pencari kerja yang mengikuti pelatihan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang yang mengikuti pelatihan (180)}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar mengikuti pelatihan (250)}} \times 100\%$	72%

Sumber: Dinas Nakertrans 2017

Dari tabel 2.127 terlihat bahwa untuk capaian dalam bidang ketenagakerjaan pelayanan kepesertaan jamsostek bagi pekerja buruh, terlihat bahwa jumlah buruh di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengikuti Jamsostek sebesar 72,31%. Sedangkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dari data

pengurusan AK.1/ pencari kerja) yang tercatat tahun 2017 sebanyak 908 pencari kerja dan untuk pencari kerja yang ditempatkan hanya 83 orang atau 9,14%.

Pasar tenaga kerja juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Ini dapat dilihat dari tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja, besarnya mencapai lebih dari 96,75% untuk tahun 2017. Tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 3,16% di tahun 2016 menjadi 3,25% di tahun 2017. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan lagi berbagai upaya terkait dengan peningkatan penyediaan kesempatan kerja guna untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang cukup signifikan.

Sedangkan jumlah pencari kerja yang mendaftar mengikuti pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin 250 orang dengan jumlah yang untuk mengikuti pelatihan sebanyak 180 orang atau 72%. Pelatihan tenaga kerja dilaksanakan dalam mengurangi jumlah pengggangguran dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kerjasama (MoU) dengan pihak ketiga yaitu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sampit tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor Perjanjian: 501/DTT/HU-HI/IV/2017 dan 49/ktr/VIII-07/0417 Tanggal 27 April 2017.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung yang sebesar Rp. 3.861.642.000 dengan realisasi sebesar Rp.3.474.750.024 atau 89,98%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketenagakerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.135 Program Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2017

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	975.249.818	851.679.165	87,73	94,43	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran**	**13**		**keg.**
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	620.459.500	604.193.964	97,38	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**7**	**7**	**keg.**
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	52.580.000	52.294.000	99.46	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur**	**1**	**1**	**keg.**
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	126.000.000	102.925.605	81,69	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**1**	**1**	**keg.**
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	3.684.000	1.632.000	44,30	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**3**	**3**	**keg.**
6	**Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja**	1.531.881.890	1.416.662.190	92,48	99,58	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja**	**3**	**3**	**keg.**
7	**Program peningkatan kesempatan kerja**	284.708.542	265.440.100	93,23	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kesempatan kerja**	**2**	**2**	**keg.**
8	**Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan**	267.078.250	179.923.000	67,37	74,47	**Terlaksananya kegiatan pada program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan**	**3**	**3**	**keg.**

Sumber : LKPJ, 2017

2.4.13 Urusan Ketahanan Pangan

a) Kondisi Umum

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Ketahanan pangan merupakan sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, keterjangkauan dan konsumsi pangan. Ketersediaan mengandung arti ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, berasal dari pangan lokal, impor dan stok masyarakat. Distribusi pangan mengandung arti pangan tersedia bagi setiap rumah tangga sepanjang waktu dan di mana saja.

Keterjangkauan mengandung arti kemampuan fisik akses terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis. Sedangkan konsumsi pangan mengandung arti penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang, sehat, dan aman. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2017-2022, ketahanan pangan merupakan salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Upaya peningkatan ketahanan pangan yang dibangun dari peningkatan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan sangatlah kompleks dan multi disiplin, sehingga menuntut peran serta pemerintah, masyarakat, dan segenap pemangku kepentingan.

Keberhasilan ketahanan pangan di suatu wilayah menjadi tolok ukur dan sumbangan bagi keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan yang benar-benar mampu memperkokoh perwujudan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar

manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat. Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai *wage good*), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri.

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Rastra/beras untuk keluarga sejahtera) adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas penyaluran Program Rastra.

Keberhasilan Program Rastra ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan penanganan pengaduan oleh K/L terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Rastra Pusat. Pelaksanaan penyaluran Rastra oleh Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Rastra dari Titik Distribusi (TD) sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari Titik Distribusi (TD) sampai ke RTS. Sasaran program Rastra tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Arut Utara,

Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Kumai dengan jumlah RTS sebanyak 8.163 RTS secara gratis.

Produksi padi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 sebesar 12.345,1 ton. Produksi padi tersebut bila dikonversi dalam bentuk beras dengan asumsi 1 kg padi menghasilkan 0,63 kg beras, maka produksi beras Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 sebesar 7.771,4 ton. Jika dibandingkan dengan kebutuhan, maka produksi padi belum mampu memenuhi kebutuhan beras seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan asumsi kebutuhan beras per kapita per tahun sebesar 121,76 kg dan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 286.714 jiwa (naik 0,005% dari tahun 2016 sebesar 286.699 jiwa) maka kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 34.910,3 ton, masih kekurangan sebesar 27.132,9 (77,7%). Upaya menekan defisit beras tersebut dengan peningkatan produksi tanaman padi.

Peningkatan produksi ini diupayakan melalui peningkatan luas areal tanam dan panen, peningkatan indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas tanaman. Di samping, itu juga perlu ada gerakan, kampanye maupun sosialisasi pentingnya diversifikasi pangan dan substitusi pangan beras menjadi pangan non-beras seperti jagung, ubi jalar dan ubi kayu.

Ketiga komoditi ini sangat sesuai dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Capaian luas panen dan produksi jagung Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 sebesar 587,6 ha dan 7.716,1 ton, luas panen dan produksi ubi jalar sebesar 82,5 ha dan 444,2 ton, sedangkan luas panen dan produksi ubi kayu mencapai 274,1 ha dan 3.092,0 ton.

Produksi daging di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 mencapai 2.192,27 ton, yang berasal dari daging sapi sebesar 1.047,68 ton, daging kambing/domba sebesar 42,88 ton, daging babi sebesar 86,15 ton dan daging unggas sebesar 1.872,11 ton. Berdasarkan angka produksi daging, apabila dikaitkan dengan kebutuhannya sebesar 6.279,04 ton (kebutuhan daging per kapita per tahun sebesar 21,90 kg), maka produksi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Apabila kebutuhan daging hanya dipenuhi dari daging sapi maka kekurangan daging tahun 2017 relatif besar yaitu sebesar 5.231,36 ton. Apabila kebutuhan daging tersebut disubstitusi dari ternak lainnya maka kekurangan dagingnya akan lebih kecil. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

daging, salah satunya dengan penggalakan kegiatan pengembangan peternakan sapi yang diintegrasikan dengan kebun kelapa sawit.

Dari kebun kelapa sawit dapat diambil daun dan limbah solidnya sebagai pakan sapi, sedangkan dari sapi bisa dihasilkan tenaga untuk mengangkut hasil sawit serta kotoran sapi bisa digunakan sebagai pupuk tanaman kelapa sawit. Beberapa perusahaan perkebunan besar dan kelompok tani telah merintis program integrasi tanaman kelapa sawit dan ternak sapi.

Kebutuhan telur sebagai sumber protein bagi masyarakat dapat dipenuhi dari telur ayam buras, telur ayam ras dan telur itik. Pada 2017, di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terdapat tiga pengusaha/investor yang mengembangkan peternakan ayam ras petelur, sehingga terdapat populasi ternak sebesar 293.219 ekor dengan produksi telur mencapai 388,31 ton.

Untuk telur ayam bukan ras dan telur itik dalam skala kecil sudah diusahakan sendiri oleh peternak di daerah. Produksi telur ayam buras dan itik di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 mencapai 779,89 ton. Dengan asumsi kebutuhan telur per kapita per tahun sebesar 7,30 kg, maka kebutuhan telur mencapai 2.093,01 ton. Sehingga produksi telur yang dihasilkan di daerah (779,89 ton) belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Upaya memenuhi kebutuhan telur tersebut, perlu menarik investor agar menanamkan investasi dalam bidang peternakan baik dalam budidaya maupun penyediaan sarana dan prasarananya seperti pembibitan, penyediaan pakan maupun usaha pengolahan dan pemasarannya. Selain daging dan telur, ikan juga merupakan salah satu sumber pangan hewani yang kaya akan protein.

Ikan dapat diperoleh dari penangkapan maupun budidaya. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 178 km sehingga potensi penangkapan ikan di perairan laut cukup besar. Di samping itu, juga terdapat sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya.

Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua kecamatan. Produksi perikanan pada tahun 2017 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 20.813,94 ton. Apabila kebutuhan ikan per kapita per tahun sebesar 40,58 kg (Susenas 2012), maka secara total kebutuhan ikan (sebesar 11.634,85 ton) di Kabupaten

Kotawaringin Barat pada tahun 2017 dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 286.714 jiwa, sudah terpenuhi, bahkan mengalami surplus sebesar 9.174,09 ton.

Berdasarkan sistem ketersediaan pangan, produksi pangan di daerah berupa beras, daging dan telur, masih terjadi defisit atau tergantung dari luar daerah. Ditinjau dari sistem distribusi pangan, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan di Propinsi Kalimantan Tengah, dimana terdapat pelabuhan dan bandara yang memperlancar arus keluar masuk barang dan penumpang.

Arus barang dari pulau jawa ke Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melalui pelabuhan Panglima Utar di Kecamatan Kumai, yang selanjutnya didistribusikan secara lancar ke kecamatan sampai tingkat desa. Namun, faktor cuaca buruk seringkali menghambat distribusi pangan dari luar pulau. Arus bongkar muat dari Pelabuhan Pangkalan Bun dan Kumai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan Kabupaten Kotawaringin Barat melainkan juga untuk kabupaten tetangga seperti Lamandau, Sukamara dan sebagian Seruyan.

Harga barang ditingkat rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat relatif terjangkau sampai seluruh pelosok wilayah kecamatan dan desa-desa. Terkait dengan stabilitas harga dan pasokan barang, harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal. Pasokan pangan di suatu wilayah masih dinyatakan dalam kondisi stabil jika terjadi penurunan pasokan pangan kurang dari 40%. Umumnya gejolak harga dan pasokan pangan biasa terjadi pada saat menjelang hari besar keagamaan dan cuaca ekstrim. Komoditi pangan yang harganya seringkali melonjak (mendorong inflasi) adalah daging ayam, cabe dan bawang merah.

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dari bulan ke bulan pada tahun 2017 relatif stabil sesuai perkembangan jumlah penduduk. Hanya saja, terjadi sedikit peningkatan pada kondisi tertentu yaitu pada saat memasuki bulan Ramadhan atau pada saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengatur pasokan bahan pangan ke dalam suatu daerah/wilayah dapat berjalan normal, fungsi distribusi, transportasi, dan efisiensi distribusi perlu dikendalikan, sehingga mobilitas pasokan, baik keluar maupun masuk ke suatu daerah/wilayah, dapat berjalan normal. Dengan demikian, akan terjadi keseimbangan antara produksi setempat dan pasokan bahan pangan dari luar daerah. Kemudian terkait dengan kondisi rawan pangan, berdasarkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak

ada satupun dari desa di wilayah Kotawaringin Barat yang masuk dalam kategori desa rawan pangan. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya kita bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan.

Penentuan desa rawan pangan mendasarkan pada tiga indikator, yaitu kurang energi dan protein, kemiskinan, dan produksi pertanian/pangan. pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia mempunyai peran penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan.

Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Keragaman sumber daya manusia dan aktivitas penyelenggaraan penyuluhan dapat dilihat dari jumlah Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berjumlah 102 orang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Pangan dilaksanakan oleh 4 (empat) SKPD yaitu Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Perikanan. Alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp. 1.630.338.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.436.774.577 atau 88,12%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketahanan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.136 Program Urusan Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan						
			Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
DINAS KETAHANAN PANGAN		**1.630.338.000**	**1.436.774.577**	**88,12**	**96,56**				
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**657.479.800**	**598.769.219**	**91,07**	**100**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**%**
2.	**Program peningkatan sarana**	190.060.200	139.899.167	73,60	100	**Persentase cakupan sarana dan**	**100**	**100**	**%**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	dan prasarana aparatur					**prasarana aparatur**			
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	92.400.000	89.000.000	96,32	100	**Persentase peningkatan kepatuhan pegawai**	**100**	**100**	**%**
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	113.000.000	93.040.890	82,33	91,66	**Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100**	**91, 66**	**%**
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.400.000	3.570.250	66,11	100	**Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100**	**100**	**%**
6.	**Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebun**	458.198.000	417.403.580	91,09	94,75	**Persentase peningkatan ketahanan pangan daerah**	**100**	**94, 75**	**%**

Sumber : LKPJ, 2017

Tabel 2.138 Program Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
Urusan Pilihan : Pertanian									
1.	**Program peningkatan kesejahteraan petani**	113.800.000	95.091.471	**83,56**	**88,47**	**Persentase kegiatan lembaga tani**	**100**	**100**	**%**

Sumber : LKPJ, 2017

KET : Untuk program dan kegiatan peningkatan kemampuan lembaga petani masuk ke urusan pertanian, kemudian pada tahun 2018 program dan kegiatan sudah dipindahkan ke dinas terkait.

2.4.14 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a) Kondisi Umum

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 dan dijabarkan didalam RPJMN 2015-2019 dihadapkan pada tiga isu strategis yaitu : (1) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (2) meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan (3) meningkatnya kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Oleh sebab itu, isu strategis dalam PUG adalah membangun kualitas manusia yang merupakan sasaran yang dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin, agar laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan aspirasi, pengalaman dan kebutuhan masing-masing sehingga mendapatkan keadilan dan kesetaraan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperlukan. Sedangkan IPG mengukur hal sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adapun IDG mengukur partisipasi perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015 meningkat dari 69,51 menjadi 70,14. IPM Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 – 2015 meningkat dari 69,51 menjadi 70,14. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto per kapita selama periode tersebut.

Sedangkan IPG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015 meningkat dari 86,67 menjadi 90,04. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat berhasil meningkatkan perbandingan perempuan secara umum dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pendapatannya. Pada tahun 2014 Kalimantan Tengah tercatat sebagai propinsi dengan IDG tertinggi dengan capaian 77,90. Sedangkan IDG pada tahun 2015 mencapai sebesar 63,48.

Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan semua komponen IDG terutama peran perempuan dalam parlemen yang naik dari 13,33% (4 orang perempuan dari 30 anggota periode 2010-2014) menjadi 20% (6 orang perempuan dari 30 anggota periode 2014-2019). IPG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 : 61,32, Tahun 2012 : 61,86, Tahun 2013 : 86,87, Tahun 2014 : 90,04, Tahun 2015 : 90,04. IDG Kotawaringin Barat Tahun 2011 : 58,96, Tahun 2012 : 60,92, Tahun 2013 : 60,75, Tahun 2014 : 64,48, Tahun 2015 : 63,98.

Tanggung jawab sosial masyarakat terhadap permasalahan perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik akses maupun layanan terhadap kesejahteraan anak, perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Meningkatnya partisipasi perempuan dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan, jumlah pejabat struktural perempuan, jumlah pengusaha perempuan, pengusaha mikro dan kecil, jumlah pejabat publik dan profesi perempuan di segala bidang. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik jumlah dan kompetensinya. Berikut ini adalah tabel capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.139 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2017

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Keterangan
			Target	Realisasi (%)	Realisasi (%)	
1.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	-	91,2	-	-	Data tahun 2015 IPG sebesar 90,04 untuk tahun 2016, 2017 data belum rilis
2.	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	-	64,5	-	-	Data tahun 2015 IDG sebesar 63,98 untuk tahun 2016, 2017 data belum rilis
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	2.100 (48,30%)	3.250	2.100	64,62	
4.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	49.805 (34,17%)	67.735	49.805	73,53	
5.	Rasio KDRT	34 (0,012%)	15	10	0,306	
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan (%)	51,61%	30	10	33,33	

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Keterangan
			Target	Realisasi (%)	Realisasi (%)	
7.	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan terhadap anak	-	20	13	0,65%	

Sumber: DP3AP2KB 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan total pagu Rp. 4.942.646.400 dan realisasi Rp. 4.362.462.131 atau 88,26%. Rinciannya, DP3AP2KB alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.066.328.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.545.533.602 atau sebesar 87,19%. DPMD alokasi anggaran Rp. 876.318.400 dengan realisasi Rp. 816.928.529 atau 93,22%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.140 Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	748.677.200	712.964.267	95,23	100	Terlaksananya kegiatan program pelayanan administrasi perkantoran			
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.652.320.000	1.565.194.195	94,73	100	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
3	Program peningkatan disiplin aparatur	36.960.000	34.760.000	94,05	100	Meningkatkan disiplin aparatur			
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	63.000.000	54.746.290	86,90	100	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.000.000	6.690.000	83,63	100	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur			
6	Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak	251.849.000	226.215.418	89,82	100	Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak			
7	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	68.302.500	52.012.512	76,15	100	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan			
8	Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	614.849.800	560.960.420	91,24	100	Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			
9	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	26.275.000	21.113.000	80,43	100	Terlaksananya workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan			

Sumber : LKPJ, 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/KegiatanKinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
DPMD		**876.318.400**	**816.928.529**	**93,22**	**93,22**				
1.	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**876.318.400**	**816.928.529**	**93,22**	**93,22**	Tercapainya sasaran kegiatan pada program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1	1	Keg.

Sumber : LKPJ, 2017

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan berkaitan dengan pengarustamaan gender masih pada tahap sosialisasi guna meningkatkan pemahaman bagi *stakeholder* terkait khususnya bagi aparat perencanaan di tingkat SKPD.

Selanjutnya guna memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya terhadap kasus KDRT dan *trafficking* telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (belum dibentuk Pokja TPPO). Jumlah kasus KDRT yang tertangani baik yang berkaitan dengan perempuan maupun anak sampai saat ini mencapai yang tersebar pada 6 kecamatan dan sudah tertangani dan diselesaikan.

2.4.15 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a) Kondisi Umum

Jumlah penduduk yang besar merupakan suatu keuntungan bagi pembangunan, dimana tersedianya sumberdaya manusia yang dapat digunakan untuk menjalankan roda pembangunan. Namun jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak terkontrol serta tidak disertai dengan kualitas SDM yang baik hanya akan menambah beban bagi pemerintah. Oleh karena itu diperlukannya tindakan pencegahan dan pengontrolan terhadap jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Untuk mengontrol pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang tepat dilakukan adalah dengan mengontrol jumlah kelahiran penduduk dan jumlah migrasi. Pengontrolan terhadap jumlah kelahiran dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan program kelarga berencana (KB). Dengan program ini diharapkan tercipta penduduk dengan jumlah dan kualitas yang ideal bagi pembangunan.

Program KB yang dulu pernah dinyatakan berhasil kini digalakkan kembali dengan mengusung slogan lama, yakni dua anak cukup. Program KB adalah salah satu program penting dalam upaya mencapai keluarga sejahtera yang memiliki sasara untuk mengendalikan lalu pertumbuhan penduduk dengan cara mengendalikan angka kelahiran. Tujuan akhirnya bermuara pada mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Lahirnya program KB terutama dilatarbelakangi tingginya angka kelahiran. Program KB sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat

dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat tidak akan efektif dan berhasil maksimal karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk.

Aspek yang harus dipantau dalam proses pengontrolan terhadap jumlah kelahiran adalah aspek usia perkawinan dan aspek penggunaan alat kontrasepsi. Pada aspek usia perkawinan, yang perlu diperhatikan adalah usia perkawinan dari perempuan. Semakin muda seorang perempuan kawin maka semakin besar pula peluang mereka untuk menghasilkan lebih banyak anak.

Akseptor KB Baru Kabupaten Kotawaringin Barat Bulan Januari - Desember 2017 sebesar 5.109 atau 48,95 dari target sebesar 10.425 akseptor. Hal ini tidak tercapai karena target ditetapkan oleh BKKBN Propinsi Kalimantan Tengah terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan Sisa Pasangan Usia Subur (PUS) baru yang belum ber-KB. Sedangkan untuk akseptor KB aktif di Kabupaten Kotawaringin Barat (angka CPR) adalah sebesar 72,13% dari Pasangan Usia Subur sebesar 44.388 (khusus Kecamatan Arut Utara tidak masuk perhitungan karena tidak adanya penyuluh KKBPK) telah menunjukkan CPR Kabupaten Kotawaringin Barat lebih tinggi dari pada target RPJMN yaitu sebesar 65%. Untuk angka TFR Kabupaten Kotawaringin Barat masih berkisar 2,17% dari target nasional sebesar 2,15%.

Sementara itu, jika ditilik dari usia perkawinan pertama untuk perkawinan umur 19 tahun ke atas menunjukkan kondisi yang cukup baik. Perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung untuk menikah pada umur 15-19 tahun sebesar 13,01%, umur 20-24 tahun = 32,05%, umur 25-29 tahun = 18,52%, umur 30-34 tahun = 16,34%, umur 35-39 tahun = 10,07% , umur 40-44 tahun = 7,08%, umur 45-49 tahun keatas = 2,62%. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga masih terdapat 4,84% wanita usia kurang dari 15 tahun yang menikah untuk pertama kali. Padahal semakin muda umur perkawinan, maka peluang untuk terjadinya kematian ibu dan bayi juga semakin besar disebabkan masih belum siap dan matangnya si ibu untuk melahirkan anak. Maka untuk mengurangi ledakan penduduk, diperlukan program Keluarga Berencana yang akan membantu mengurangi jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya, persentase usia kawin pertama di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terlihat seperti diagram dibawah ini:

Diagram. 4.1
Persentase Usia Wanita Kawin Pertama
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

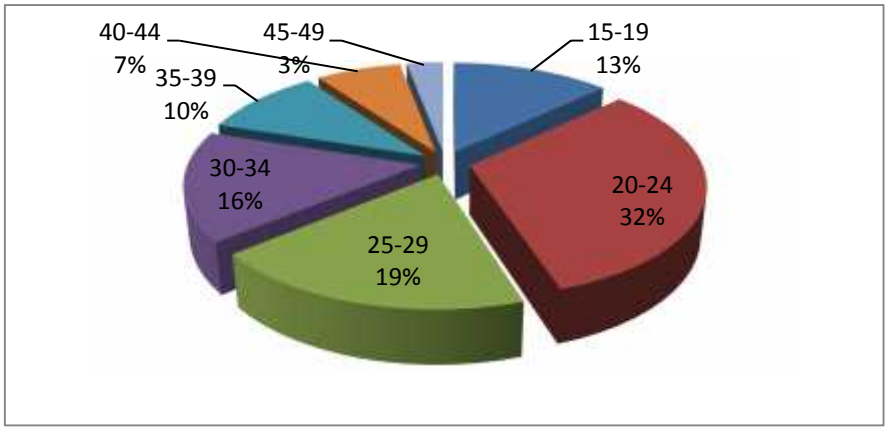

Sumber: DP3AP2KB 2017

Dari pelaksanaan Pelayanan KB selama tahun 2017 seperti diagram diatas maka secara keseluruhan dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2017 dapat disampaikan perolehan peserta KB Baru sebanyak 5.103 peserta atau 48,95% dari target sebesar 10.425 peserta. Untuk lebih jelasnya, Pencapaian KB Baru Per Mix Kontrasepsi dapat dilihat seperti dalam diagram di bawah ini :

Diagram 4.2
Pencapaian Peserta KB Baru
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

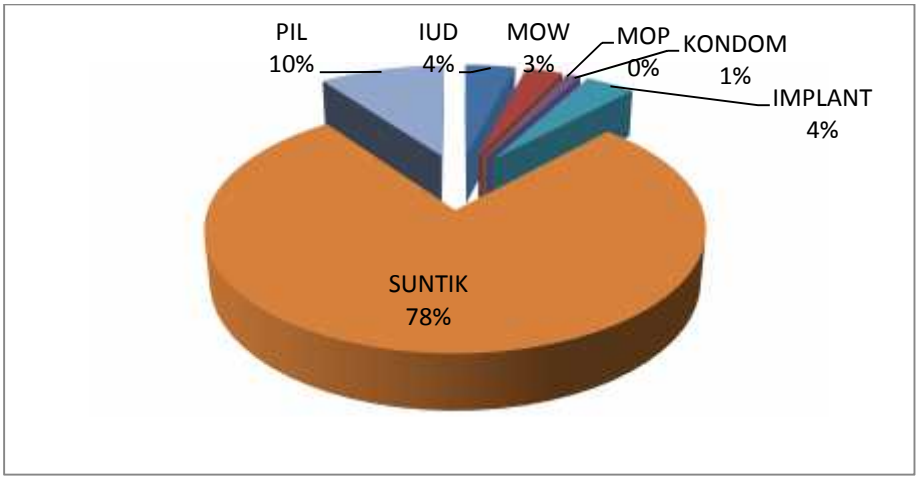

Sumber: DP3AP2KB 2017

Sedangkan untuk kepesertaan KB Aktif sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 32.016 KB aktif atau 72,13% dari Pasangan Usia Subur sebanyak 44.388. Untuk lebih jelasnya pencapaian peserta KB aktif per mix kontrasepsi sampai dengan Desember Tahun 2017 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:

Diagram 4.3
Pencapaian Peserta KB Aktif
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

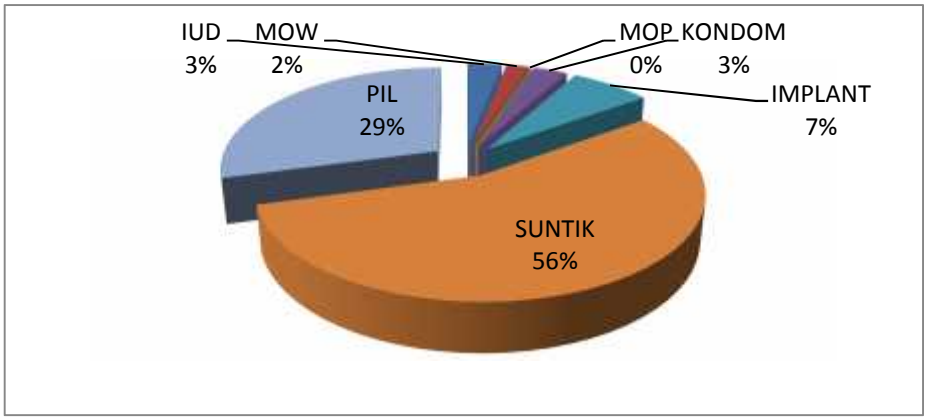

Sumber: DP3AP2KB 2017

Keterangan : di Kecamatan Arut Utara tidak ada petugas PLKB sejak April 2016 karena Petugas Lapangan KB (PLKB) atas nama Suraya, Mansur, SH, dan Asmiril, SH dimutasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi tenaga struktural tanpa ada personil pengganti. Hal ini menyebabkan tidak adanya laporan kepesertaan KB aktif di Kecamatan Arut Utara.

Dalam mensukseskan program KB, tidak sedikit upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka *Total Fertility Rate* (TFR)/ jumlah satu keluarga dari 2,17 anak menjadi 2,1 sesuai dengan slogan program KB pada tahun 2017 yaitu 2 (dua) Anak Cukup. Adapun capaian kinerja urusan keluarga berencana selama tahun 2017 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.141 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016-2017

No.	Indikator	Capaian 2016	2017			Keterangan
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	
1.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	3	3	3	100%	-
2.	Rasio Akseptor Kb	72,25	10.425	5.103	48,85%	-
3.	Cakupan Peserta Kb Aktif	71,19	44.315	32.016	72,2%	-
4.	Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera Ii	9,06 39,54 51,41	6% 30,5% 63,5%	4.226 18.452 23.991	9,06% 39,54% 51,41%	Data Tahun 2015

Sumber : DP3AP2KB 2017

Berdasarkan pendataan sampai dengan bulan Desember 2017, peserta KB aktif sebanyak 32.016 atau 72,13% dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang berjumlah 44.388 pasangan.

Tabel 2.142 Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2016-2017

No.	Peserta KB Aktif	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	IUD	530	1.054	198,9	407	1033	253,8
2	MOP	83	134	161,4	35	126	360,0
3	MOW	933	762	81,7	348	727	208,9
4	IMPLANT	2.581	2.463	95,4	2243	2362	105,3
5	SUNTIK	20.748	18.261	88	15.095	17.721	117,4
6	PIL	8.499	9.085	107,5	10.355	9.126	88,1
7	KONDOM	627	884	141	507	921	181,7
	Jumlah PA	33.951	32.643	96,10	28.990	32.016	110.44
	Jumlah PUS	45.852	45.852	100	-	44.388	
	% PA/PUS		71,19				72,13

Sumber: DP3AP2KB 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan alokasi anggaran Belanja Langsung Sebesar Rp. 596.094.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 310.857.500,00 atau sebesar 52,15%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.143 Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
1	**Program keluarga berencana**	**26.912.500**	**16.205.000**	**60,21**	**100**	**Terlaksananya kegiatan koalisi kependudukan**			
2	**Program pelayanan kontrasepsi**	**248.885.000**	**91.750.000**	**36,86**	**100**	**Pelayanan kontrasepsi**			
3	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**194.349.500**	**87.610.000**	**45,08**	**100**	**Peningkatan pemahaman serta peran masyarakat tentang kampung KB**	**6**	**6**	Keg
4	**Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**	**105.000.000**	**102.750.000**	**97,86**	**100**	**Peningkatan kegiatan pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
5	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	20.947.500	12.545.500	59,88	100	Terlaksananya pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak			
6	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan					Terlaksananya penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan			
7	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU					Terlaksananya pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU			

Sumber : LKPJ, 2017

2.4.16 Urusan Perhubungan

a) Kondisi Umum

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Bidang perhubungan merupakan mata rantai transportasi nasional, regional dan lokal yang merupakan pendukung dan penggerak mobilitas orang, barang dan jasa dalam menunjang dinamika pembangunan perekonomian.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat serius dalam membangun sektor perhubungan. Pembangunan sektor perhubungan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah, membuka keterisoliran suatu wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Moda transportasi yang digunakan masyarakat adalah transportasi angkutan darat dan angkutan sungai karena menyesuaikan dengan karakteristik wilayah Kotawaringin Barat yang luas dan di kelilingi oleh sungai. Sedangkan untuk menghubungkan antar pulau dilayani dengan transportasi laut dan udara. Sebagai daerah yang sedang berkembang, maka semua moda transportasi tersebut sangat memungkinkan untuk dikembangkan potensi dan peranannya sebagai penghubung wilayah dalam menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat.

Adapun beberapa indikator pembangunan di bidang perhubungan sampai tahun 2017 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.144 Jumlah Sistem Jaringan Transportasi Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Capaian 2016	Tahun 2017 (akumulasi)		
			Target	Realisasi	%
1	Jumlah Bandara (Buah)	1	0	1	100
2	Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	3	0	3	100
3	Terminal	4	0	3	100
4	Halte	14	6	19	100
5	Jaringan Trayek AKDP	4	0	4	100
6	Jaringan Trayek Perdesaaan	9	0	7	100
7	Dermaga LLASDP	26	2	28	100
8	Trayek LLASDP	3	1	4	100

Sumber: Dishub 2017

Tabel 2.145 Jumlah Sarana Pendukung Keselamatan Lalu Lintas

No.	Uraian	Capaian 2016	Tahun 2017 (Akumulasi)		
			Target	Realisasi	%
1	Rambu Lalu lintas darat	699	50	749	100
2	APILL	5	0	5	100
3	RPPJ	13	0	13	100
4	*Traffic Cone*	58	0	58	100
5	Paku Jalan	0	0	0	0
6	Tenda *Portable*	4	0	4	100
7	Rambu lalu lintas sungai	94	0	94	100
8	Baju Pelampung	166	0	166	100
9	*Delinator*	45	0	45	100
10	*Warning Light*	4	0	8	100

Sumber: Dishub 2017

Tabel 2.146 Jumlah Kendaraan Yang di Uji

No.	Jenis Kendaraan	Capaian 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
1	Mobil Penumpang	114	400	464	100
2	Mobil Bus	238	200	221	100
3	Mobil Barang	6.541	4.500	6.312	100
4	Speed boat	67	0	57	100
5	Kelotok	64	18	82	100

Sumber: Dishub 2017

Data arus lalu lintas Angkutan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun yang sifatnya penerbangan domestik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

a. Tahun 2016

No.	Bulan	Pesawat		Penumpang		Load Factor Penumpang (%)		
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Rata-rata
1	Januari s.d Desember 2016	3.554	3.555	249.032	250.807	61,95	68,52	65,23
Jumlah		**3.554**	**3.555**	**249.032**	**250.807**	**61,95**	**68,52**	**65,23**

Sumber: Dishub 2016

b. Tahun 2017

No	Bulan	Pesawat		Penumpang		Load Factor Penumpang (%)		
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Rata-rata
1	Januari s.d Desember 2017	3.932	3.936	306.194	297.021	61,95	68,52	65,23
Jumlah		**3.932**	**3.936**	**306.194**	**297.021**	**66,67**	**71,67**	**69,17**

Sumber: Dishub 2017

Setelah memperhatikan dari tabel di atas, maka arus lalu lintas angkutan bandar udara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pergerakan pesawat kedatangan maupun keberangkatan serta jumlah penumpang kedatangan maupun keberangkatan.

Data tersebut diperoleh dari arus lalu lintas angkutan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun yang sifatnya penerbangan domestik dengan jumlah maskapai penerbangan sebanyak 4 (empat) maskapai yaitu:

1. Wings Air
2. Nam Air
3. Trigana Air
4. Garuda Indonesia

Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami peningkatan di sebabkan:

1. Jumlah penumpang yang mengalami peningkatan;
2. Berkurangnya armada pesawat dari 5 maskapai menjadi 4 maskapai;
3. Bertambahnya rute penerbangan pesawat;
4. Adanya pergantian armada kapasitas pesawat kecil menjadi kapasitas pesawat yang lebih besar (boeing).

Dengan adanya beberapa faktor tersebut, maka arus lalu lintas angkutan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun yang sifatnya penerbangan domestik mengalami peningkatan. Untuk itu, kapasitas daya angkut penumpang pesawat

jenis ATR dengan kapasitas 72 penumpang diganti dengan pesawat boeing dengan kapasitas tempat duduk 168 penumpang. Dengan semakin banyaknya penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara, maka pihak maskapai menambah durasi penerbangan dari satu kali menjadi dua kali penerbangan dalam satu hari guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi udara.

Sedangkan Program Pengembangan Bandara Baru untuk sementara waktu tidak dilaksanakan atau dihentikan dikarenakan masih menunggu penetapan status kawasan bandara baru. Adapun untuk penetapan status kawasan bandara baru telah dianggarkan pada tahun 2018 guna percepatan proses pembangunan bandara baru.

Jalan Khusus Industri

Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempunyai sarana transportasi yang representatif dalam mendukung distribusi hasil sumber daya alam khususnya pada sektor tambang dan perkebunan. Di lain pihak, pemanfaatan jalan umum dan kelancaran arus lalu lintas oleh masyarakat untuk aktivitas sehari hari tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perkebunan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus dan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan, menetapkan sejumlah ketentuan antara lain:

1. Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:
   a. Memiliki muatan sumbu terberat (MST) diatas 8 (delapan) ton
   b. Memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter
   c. Konvoi kendaraan/angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan
2. Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batu bara, bijih besi dan zirkon;
3. Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, *Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Slab* dan *Lumb;*
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan:

a. Hasil hutan
b. Material bangunan
c. Sembilan bahan pokok.

5. Panjang Jalan Khusus adalah 197,34 Km, yang terdiri dari:
   a. Main Road Timur (Nanga Mua–Semanggang) dengan panjang 53,41 Km;
   b. Main Road Barat (Rangda–Sei Rangit Jaya) dengan panjang 51,80 Km;
   c. Ruas Semanggang–Pabrik Pulp dengan panjang ruas 18,80 Km;
   d. Jalan penghubung main road timur dan barat yakni:
      a) Ruas Semanggang – Sei rangit Jaya dengan panjang 25,90 Km
      b) Ruas Sei Rangit Jaya – Bumi Harjo dengan panjang 8,43 Km
      c) Ruas Jalan masuk dari Seruyan dengan panjang 39 Km.
6. Pembangunan Jalan Khusus yang telah dikerjakan oleh PT. Korintiga Hutani dengan rincian sebagai berikut :
   a. Main Road Timur (Nanga Mua–Semanggang) sepanjang 28,44 Km;
   b. Jalan di Area Konsesi HTI PT. Korintiga Hutani sepanjang 24,97 Km;
   c. Ruas Semanggang – Pabrik Pulp sepanjang 18,80 Km;
   d. Pembangunan 3 buah jembatan pada main road timur (Nanga Mua-Semanggang) dan Ruas Semanggang – Pabrik Pulp, yakni:
      a) Jembatan Sungai Arut 40 meter
      b) Jembatan Sungai Jampau 15 meter
      c) Jembatan Sungai Hijau 15 meter.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 15.055.497.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.834.096.288 atau 91,88%. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.147 Program Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2017

No	Program/ Kegiatan	Input				Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Keuangan			Real. Fisik (%)	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)					
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.317.557.920	1.934.813.465	83,48	100	Terlaksananya kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	13	13	keg
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.437.922.080	2.104.634.378	86,32	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9	9	keg.
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	104.400.000	54.140.000	51,85	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	30.000.000	8.032.000	26,77	100	Terlaksananya pemulangan pegawai yang purna tugas ke daerah asal	1	1	Keg
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	107.000.000	67.669.092	63,24	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	2	keg.
6.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	940.400.000	906.906.000	96,43	100	Terlaksananya kegiatan pada program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1	1	keg.
7.	Program peningkatan pelayanan angkutan	510.200.000	399.048.700	78,21	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan pelayanan angkutan	1	1	tahun
8.	Program pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	929.982.000	926.036.000	99,57	100	Terlaksananya kegiatan pada rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	1	1	keg.
9.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	2.049.900.000	1.996.308.500	97,38	100	Terlaksananya kegiatan pada program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	3	3	keg.

No	Program/ Kegiatan	Input				Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Real. Fisik (%)	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
10.	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	1.081.250.000	1.029.830.000	95,24	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**1**	**1**	**keg.**
11.	**Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP**	1.104.100.000	1.088.582.429	98,59	100	**Terlaksananya kegiatan pada program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP**	**1**	**1**	**keg.**

Sumber : LKPJ, 2017

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan perhubungan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana lalu lintas untuk mendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan, kelancaran, keamanan dan ketertiban berlalu lintas;
3. Terealisasinya pendapatan retribusi di bidang perhubungan tahun 2017. Dari target sebesar Rp. 1.920.640.000 berhasil terealisasi sebesar Rp. 1.903.276.200 atau 99,09%;
4. Secara umum meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pada sektor perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.4.17 Urusan Komunikasi Dan Informatika

a) Kondisi Umum

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat akan diwujudkan dalam bentuk layanan electronic government (*e-gov*). Layanan ini meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Hal ini ditujukan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*) dan lebih murah *(cheaper*) baik secara internal (birokrasi) maupun eksternal (masyarakat). Untuk itu, Pemerintah harus

merubah/ membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen dan proses kerja secara digital.

Untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah berbasis e-government, diperlukan langkah-langkah konkret yang terukur dan efektif melalui beberapa komponen, antara lain:

1. Kebijakan, yaitu proses kebijakan, visi dan misi, strategi penerapan kebijakan, pedoman, peraturan, keputusan instansi, skala prioritas, dan manajemen resiko/evaluasi;
2. Kelembagaan, yang terdiri dari keberadaan struktur organisasi yang efektif, tugas dan fungsi, ketersediaan sistem dan prosedur kerja, ketersediaan SDM meliputi jumlah dan tingkat kompetensi, serta pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Infrastruktur, merupakan sarana yang sangat penting dalam sistem layanan E-Government yang meliputi data center, jaringan data, keamanan (data/informasi dan fisik), fasilitas pendukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, *disaster recovery* (database backup) serta pemeliharaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
4. Aplikasi, yang terdiri dari berbagai jenis sesuai kebutuhan dalam implementasi *e-government*.

Sebagai langkah awal, dilakukan perencanaan yang meliputi pengorganisasian/fungsi, mekanisme perencanaan master plan TIK, dokumen master plan TIK, implementasi master plan TIK, serta pembiayaan. Adapun untuk pengukuran capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.148 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2017

No.	Indikator	Satuan	2016	2017		
				Target	Realisasi	(%)
Kehumasan						
1.	Ketersediaan web site pemda	Unit	16	-	-	
2.	Ketersediaan informasi daerah dalam bentuk digital	Keping CD,	- 62 CD Kegiatan - 350 CD Kilas Kobar - 350 CD majalah digital	- 50 VCD - Kegiatan - 300 VCD Kilas Kobar - 300 VCD Profile Kotawaringin Barat	- 47VCD - Kegiatan - 300 VCD Kilas Kobar - 300 VCD Profile Kotawaringin Barat	99

No.	Indikator	Satuan	2016	2017		
				Target	Realisasi	(%)
3.	Ketersedian bulletin, buku dan poster pemerintah daerah, foto, spanduk, baliho	Eksemplar, buku, lembar	- 20 album foto kegiatan - 150 Buku Himpunan Pidato Bupati - 500 buletin - 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi) - 500 Kalender Meja - 500 Kalender dinding - 279 m2 baleho kegiatan - 98 lembar spanduk kegiatan - 5 buah baleho kecamatan	- 24photo book kegiatan - 150 Buku Himpunan Pidato Bupati - 500 Jurnal Kegiatan Pemda - 600 Kalender Meja - 600 Kalender dinding - 420 buah foto Bupati/ Wakil Bupati - 396 m2 baleho kegiatan - 130 lembar spanduk kegiatan - 365 Eksemplar Kliping berita	- 24 photo book kegiatan - 150 Buku Himpunan Pidato Bupati - 500 Jurnal Kegiatan Pemda - 600 Kalender Meja - 600 Kalender dinding - 420 buah foto Bupati/ Wakil Bupati - 727 m2 baleho kegiatan - 28 lembar spanduk kegiatan - 365 eksemplar kliping berita	105
4.	Terselenggaranya pameran/ekspo	Kali	1 kali	1 kali	1 kali	100
5.	Pemberitaan melalui media cetak/surat kabar nasional/lokal	Media	5 media	4 media	4 media	100
6.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal/media online	Media	4 media	2 Media (SBTV dan TVRI)	2 media	100
7	Jumlah pemberitaan melalui media online	Media	7 media	2 media	2 media	100
8	Siaran keliling /publikasi keliling	Kali	47 kali	50kali	25 kali	50
Diskominfo						
9	Penyusunan SIM sebaran menara telekomunikasi	Paket		1	1	100
10	Pelatihan jurnalistik	Kegiatan		1	1	100
11	Sosialisasi e-government	Kegiatan		1	1	100
12	Rencana induk pengembangan e-government	Buku		5	5	100
13	Portal pengelolaan data statistik	Web		1	1	100
14	Portal daerah	Web		1	1	100
15	Website berita online	Web		1	1	100
16	Webside PPID	Web		1	1	100

Sumber: Diskominfo, Statistik dan Persandian Dan Bagian Prokom Setda 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo, SP) dan Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah dengan total belanja langsung Rp 4.584.106.400. Rinciannya, Diskominfo, SP dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp. 2.914.974.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.613.990.802 atau 89,67%. Adapun alokasi anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Setda Kobar sebesar Rp.1.670.132.400 dengan realisasi sebesar Rp.1.620.823.450 atau 97,05%. Realisasi anggaran program kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.149 Program Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**1.098.771.996**	**972.167.316**	**88,48**	**90,12**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**449.910.000**	**446.930.000**	**99,34**	**100**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**			
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**42.900.000**	**42.900.000**	**100**	**100**	**Tingkat kepatuhan aparatur**			
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	21.450.0000	21.450.000	100	100	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	39	39	stell
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**272.750.000**	**215.282.687**	**79,11**	**100**	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**			
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**3.000.000,00**			**100**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja keuangan**	**6**		**buku**
6.	**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	**248.231.000**	**215.282.687**	**86,73**	**90,00**	**Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	**1**	**1**	**Tahun**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
7.	**Program kerjasama informasi dan media massa**	**299.620.000**	**720.937.550**	**90,18**	**92,68**	**Tingkat kerjasama informasi dan media massa**			

Sumber : LKPJ, 2017

No.	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
SEKRETARIAT DAERAH									
1.	**Program kerjasama informasi dan media massa**	**1.670.132.400**	**1.620.823.450**	**97,05**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program kerjasama informasi dan media massa**	**2**	**2**	**keg.**

Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Setda 2017

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut di atas dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Komunikasi Dan Informatika oleh Bagian Prokom Setda adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan peliputan dalam bentuk foto dan DVD video kegiatan sebagai bahan penyebarluasan informasi serta dokumentasi daerah;
2. Tersedianya media informasi *offline* dalam bentuk himpunan pidato bupati, majalah digital, tabloid Warta Kobar, buletin Marunting Batu Aji, kalender dinding, dan spanduk serta baleho kegiatan;
3. Tersedianya sarana penyebaran informasi melalui media elektronik (siaran di radio dan televisi) dan media cetak sehingga informasi tentang pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat sampai ke semua lapisan masyarakat;
4. Tersedianya sistem informasi berbasis *website.* Dengan adanya sistem informasi berbasis *website* ini, maka informasi tentang Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diakses melalui internet secara *on-line;*
5. Pengembangan web Kabupaten Kotawaringin Barat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan pemerintah daerah seperti:

a) Tersedianya konten ULP untuk mengumumkan pelelangan dan pemenangnya;
b) Tersedianya konten arsip perda untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi peraturan daerah;
c) Tersedianya konten artikel, berita dan forum komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2017, Diskominfo, Statistik dan Persandian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan buku statistik sebanyak 50 buah dan portal pengelolaan data statistik. Sedangkan layanan data statistik melalui portal baru bisa dilayani pada tahun 2018 karena pengadaan dan peralatan pendukung lainnya baru dilaksanakan pengadaannya pada anggaran perubahan Tahun Anggaran 2017. Untuk urusan statistik dan persandian pada 2017 belum memiliki program/kegiatan karena dinas baru terbentuk pada tahun tersebut.

2.4.18 Urusan Pertanahan

a) Kondisi Umum

Urusan pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi salah satu aspek yang penting dan sangat sensitif karena akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat apabila tidak mendapat penanganan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan urusan pertanahan bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan meningkatkan penataan pertanahan di Kabupaten Kobar.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Kobar tidak memiliki kewenangan di bidang pertanahan karena menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan instansi vertikal baik di pusat maupun daerah. Kewenangan pemerintah daerah adalah melakukan fasilitasi terhadap permasalahan-permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Meski demikian, sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Urusan Pertanahan untuk Tahun Anggaran 2017 sudah tidak ditangani oleh Sekretariat Daerah dan beralih ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Program dan kegiatan urusan pertanahan yang dilaksanakan Disperkim adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Urusan pertanahan diarahkan untuk memfasilitasi

permasalahan sengketa tanah di perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Kobar.

Tabel 2.150 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2017

No.	Indikator	2016		2017		
		Target (%)	Realisasi (%)	Target	Realisasi	% Terhadap Target
1.	Persentase lahan perumahan dan permukiman yang didata	-	-	60 i	45	93,75
2.	Persentase sosialisasi pencegahan konflik/sengketa pertanahan di tingkat desa/kelurahan	-	-	5	5	50

Sumber: Disperkim 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 139.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 115.340.755 atau 82,50%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.151 Program Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**139.800.000**	**115.340.755**	**82,50**	**86,84**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengembangan perumahan**	**1**	**1**	**keg**

Sumber : LKPJ, 2017

2.4.19 Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

a) Kondisi Umum

Kesatuan bangsa memiliki arti adanya rasa kebersamaan di dalam satu bangsa, yaitu Bangsa Indonesia. Kondisi politik dalam negeri dipengaruhi oleh

adanya kemajemukan masyarakat, mulai dari suku bangsa, agama, bahasa daerah, dan juga golongan. Kemajemukan masyarakat merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa, tetapi dapat juga menjadi ancaman atau potensi penyebab konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Begitu juga di Kabupaten Kotawaringin Barat yang notabene memiliki heteroginitas masyarakat yang tinggi, apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi konflik yang berbasis SARA.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kerukunan masyarakat dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di Kotawaringin Barat. Usaha itu di antaranya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dialog Antar-Umat Beragama/ Forum Umat Beriman, serta Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan program pendidikan politik masyarakat seperti Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol dan pemerintah di daerah, kegiatan Rapat koordinasi daerah (RAKORDA), Forum Diskusi Politik dalam pengembangan pendidikan politik masyarakat dan pelajar, serta Sosialisasi Undang-Undang Parpol bagi Partai Politik peserta Pemilu 2017. Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dilakukan agar terwujudnya kerjasama yang baik dan persatuan antar Parpol, ormas dan LSM. Selama tahun 2017, pembinaan Ormas dan LSM hanya berupa rapat-rapat koordinasi dan tidak ada kegiatan yang bersifat spesifik. Pembinaan Ormas dan LSM secara intensif akan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan baru pada tahun 2018.

Tabel 2.152 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Yang Dilaksanakan Kesbangpol

No.	Uraian	Satuan	Capaian 2016	2017		%
				Target	Realisasi	
1.	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan	kegiatan	4	4	4	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	1	1	1	100
3.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM,ORMAS dan OKP	kegiatan	-	-	-	-

Sumber: Bakesbangpol 2017

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif dan represif. Proses penegakan peraturan daerah dilakukan melalui sosialisasi peraturan kepada masyarakat, pemantauan apakah masyarakat sudah memahami peraturan yang disosialisasikan.

Tabel 2.153 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Yang Dilaksanakan Satpol PP dan DAMKAR

No.	Uraian	Satuan	Capaian 2016	2017		%
				Target	Realisasi	
1.	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	kegiatan	85	50	80	160
2.	persentase kecamatan yang mempunyai pos pemadam kebakaran	kegiatan	0	90	90	100

Sumber : Satpol PP dan Damkar 2017

Kemudian, untuk masyarakat yang melanggar, dilakukan operasi non-yustisi dengan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Selanjutnya, perlakuan terhadap pelanggar ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu pelanggar diproses secara hukum.

Tabel 2.154 Pelanggaran Perda di Kab. Kobar Tahun 2016 – 2017

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran (kali)		+/(-)	Ket
		Tahun 2016	Tahun 2017		
1.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	43	27	-	
2.	Minuman keras (Miras)	61	59	-	
3.	PSK liar/prostitusi/pasangan mesum	81	2	-	
4.	Gelandangan dan pengemis (GEPENG)	13	2	-	
5.	Premanisme	0	0	-	
6.	Judi togel	0	0	-	
7.	Mucikari	9	8	-	
8.	KTP	4	0	-	
9.	Ngelem Fox	6	0	-	
10.	Pengamen	22	0	-	
11.	Waktu kunjung warnet	1	0	-	
12.	Pelajar bolos sekolah	1	0	-	
	Jumlah	**241**	**90**	**-**	

Sumber: PPNS Satpol PP dan Damkar 2017

Berdasarkan tabel di atas, hampir semua jenis pelanggaran mengalami penurunan pada tahun 2017 antara lain PKL, Miras, PSK, GEPENG. Sedangkan untuk jenis pelanggaran premanisme, judi togel, KTP, ngelem fox, pengamen, waktu kunjung warnet dan pelajar bolos sekolah tidak ditemukan pelanggaran.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yakni Bakesbangpol, Satpol PP dan DAMKAR dan Setda dengan total anggaran sebesar Rp. 7.113.528.500 dan realisasi Rp. 6.661.802.731 atau 93,65%.

Rinciannya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan anggaran sebesar Rp. 2.857.759.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.466.592.399 atau 86,31%. Satpol PP dan DAMKAR anggaran Rp. 4.198.769.500 dengan realisasi Rp. 4.139.276.210 atau 99,98%. Setda anggaran Rp. 57.000.000 dengan realisasi Rp. 55.934.122 atau 98,13%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.155 Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2017

No.	Program	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan						
			Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	745.150.500	667.093.673	89,52	95,18	Pelaksanaan kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	12	12	keg.
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	349.245.000	310.827.825	89,00	95,99	Cakupan kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	5	keg.
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	37.400.000	37.400.000	100	100	Cakupan kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.

No.	Program	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan						
			Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
4.	Program fasilitasi pindah/purnatugas PNS	10.000.000	9.345.000	93,45	100	Pelaksanaan kegiatan pada program fasilitasi pindah/purnatugas	1	1	Keg.
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	108.800.000	87.227.808	80,17	85,75	Pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.000.000	8.777.750	97,53	100	Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.
7.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	535.560.000	517.986.902	96,72	100	Pelaksanaan kegiatan pada program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	1	keg.
8.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	280.705.000	263.653.500	93,93	100	Terlaksanany a kegiatan pada program pengembangan wawasan kebangsaan	2	2	keg.
9.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	259.390.000	227.740.000	87,80	98,19	Pelaksanaan kegiatan pada program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	2	2	keg.
10.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	284.210.000	153.380.441	53,97	82,62	Pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1	1	keg.
11.	Program pendidikan politik masyarakat	238.298.500	183.159.500	76,86	91,19	Terlaksanany a kegiatan pada program pendidikan politik masyarakat	2	2	keg.

Sumber : LKPJ, 2017

No.	Program	Input			Real.	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Fisik				
			Realisasi	(%)	(%)	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
SATPOL PP		4.198.769.500	4.139.276.210	99.98	98,58				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	921.298.353	861.805.063	93,54	99,92	Cakupan layanan administrasi perkantoran			
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	305.220.000	273.611.500	89,64	100	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12	12	Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	148.500.000	147.609.000	99,40	100	Tingkat kepatuhan aparatur	1	1	keg.
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	108.000.000	82.317.548	76,44	100	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	1	1	keg.
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.847.500	7.556.000	85,40	90,42	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.
6.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.499.892.250	2.354.232.978	98,04	99,24	Persentase anggota LINMAS yang mendapat pelatihan	4	4	keg.
7.	Program pemeliharaan kantrantibmas & pencegahan tindak kriminal	13.625.000	13.625.000	100	100	Jumlah pengawasan dan pengendalian kantrantibmas	3	3	keg.
8.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	193.386.397	174.130.000	90,04	98,87	Penurunan jumlah penyakit masyarakat	3	3	keg.

Sumber : LKPJ, 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
SETDA						-			
1.	**Program pendidikan politik masyarakat**	**57.000.000**	**55.934.122**	**98,13**	**100**	-	1	1	Keg

Sumber : LKPJ, 2017

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri oleh Bakesbangpol dan Satpol PP dan DAMKAR sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan ketentuan daerah atau nasional yang mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi dan berbagai penyuluhan;
2. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, ideologi berbangsa dan bernegara, maupun toleransi bermasyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi dan berbagai penyuluhan;
3. Penegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan lain di daerah yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan umum pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta operasi yustisi. Melalui kegiatan tersebut, berdampak positif dalam menciptakan ketertiban umum di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2017.

Adapun pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya kegiatan monitoring, pelaporan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017;
2. Mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung proses penyelenggaraan pemilukada;
3. Tersedianya bahan informasi kepada pihak terkait serta masukan bagi penyelenggara pemilu. Untuk permasalahan kedua, pada tahun anggaran

2018 bahwa biaya bahan bakar minyak gas/pelumas yang telah ditetapkan dalam standar biaya umum (SBU) tahun 2018 dengan standar biaya yang lebih rasional sehingga penggunaan bahan bakar minyak gas/pelumas lebih efisien;

1) Untuk permasalahan ketiga yaitu sebaiknya ketika ada program dari pemerintah pusat yang diimplementasikan ke daerah, agar dalam perencanaan dan penganggaran dapat mempertimbangkan waktu pelaksanaan, supaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD pemangku dapat lebih optimal, efektif dan efisen dari segi waktu dan anggarannya;
2) Untuk permasalahan keempat yaitu agar setiap bidang teknis dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan dapat lebih berkoordinasi dan konsultasi antar pelaksana teknis kegiatan supaya perencanaan dan penganggaran lebih efektif dan efisien.

Adapun capaian SPM dan target SPM pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kowaraingin Barat sebagai berikut:

Tabel 2.156 Capaian dan target SPM pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

No.	Urusan	Jenis SPM	Capaian 2017	Target 2019
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	93 %	80 %
		b. Pelayanan informasi rawan bencana	90 %	85 %
		c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	90 %	85 %
		d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	90 %	85 %
		e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	90 %	85 %

2.4.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

a) Kondisi Umum

Kebijakan otonomi daerah pada hakekatnya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya.

Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan yang pengelolaannya masuk dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

20.1 SEKRETARIAT DAERAH

a) Kondisi umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.

Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian adalah urusan yang menjembatani serta mendukung pembangunan dan pemerintahan agar dapat

berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa urusan terkait fasilitasi kepala daerah dalam menunjang pelaksanaan tugasnya.

b) Sasaran strategis

1. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**" diukur melalui 1 (satu) indikator pada program Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan pada tabel 4.65 berikut :

Tabel 2.157 Capaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP Kabupaten	CC	CC	100

Sumber: Setda 2017

Target nilai SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 adalah bernilai **CC**. Realisasi hasil evaluasi tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada tanggal 23 Januari 2018 mendapatkan nilai 50,23 atau dengan predikat penilaian **CC**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

2. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kabupaten" diukur melalui 1 (satu) indikator pada "Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi". Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.158 Capaian Sasaran Kualitas Layanan Publik

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD	65	75	115

Sumber: Setda 2017

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 telah melakukan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap 5 (lima) instansi pemerintah/SKPD antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

c) Realisasi Anggaran Tahun 2017

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD yang berperan sebagai koordinator bagi SKPD lainnya mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2017 dengan alokasi Belanja Langsung pada Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian sebesar Rp. 22.775.976.600 dan terealisasi Rp. 19.783.875.177 atau 86,86% seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.159 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
SETDA		**22.775.976.600**	**19.783.875.177**	**86,86**	**89,51**	**-**			
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**11,268,577,400**	**10,433,540,634**	**92.55**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran**	**16**	**16**	**Keg.**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**6.631.189.200**	**5.746.070.533**	86,65	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**12**	**12**	**keg.**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**274.500.000**	**269.400.000**	**98,14**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur**	**2**	**2**	**Keg.**
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**346.500.000**	**291.488.974**	**84,12**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**1**	**1**	**Thn**
5.	**Program peningkatan pengemban**	**8.000.000**	**7.500.000**	**93,75**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program**	**2**	**2**	**Keg.**

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
	gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
6.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah	1.928.010.000	1.781.107.939	92,38	95,80	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	4	4	Keg.
7.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	249.959.088	215.279.309	86,13	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada prog. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	1	Keg.
8.	Program penataan peraturan perundang - undangan	715.100.000	567.482.307	79,36	88,84	Tercapainya sasaran kegiatan pada program penataan peraturan perundang - undangan	3	3	Keg.
9.	Program pembinaan dan pelayanan hukum	1.129.700.000	329.901.006	29,20	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pembinaan dan pelayanan hukum	1	1	Keg.
10.	Program peningkatan kesadaran dan pemahaman hak asasi manusia	74.400.000	0	0	0	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kesadaran dan pemahaman HAM	1	-	Keg.
11.	Program pembinaan dan pengembangan organisasi	150.040.912	142.104.475	94,71	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pembinaan dan pengembangan organisasi	1	1	Keg.

Sumber : Setda 2017

Pencapaian kinerja output dan outcome kegiatan pada Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah

20.2 SEKRETARIAT DPRD

Dalam Misi 1 Bupati Kotawaringin Barat adalah memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyediaan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk mendukung misi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 12.872.393.000 dan terealisasi sebesar Rp.10.908.232.296 atau 84,74% yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.160 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Real.	(%)					
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**					**Terlaksananya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan DPRD**	**16**	**15**	**keg.**
2.	**Program peningkatan sarpras aparatur**					**Sarana dan prasarana pendukung bangunan kantor**	**9**	**9**	**keg.**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**					**Terlaksananya kegiatan pada prog. peningkatan disiplin aparatur**	**2**	**2**	**keg.**
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**					**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**1**	**1**	**keg.**
5.	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**					**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**7**	**7**	**keg.**

Sumber : Setwan 2017

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sejumlah program/kegiatan yang capaiannya rendah antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan pengadaan buku peraturan perundang-undangan pada tahun 2017 tidak terlaksana karena di Pangkalan Bun tidak tersedia distributor yang mampu menyediakan buku tersebut;
2. Penyediaan jasa surat menyurat hanya terealisasi 3 dokumen dari alokasi sebanyak 12 dokumen karena sisanya 9 dokumen di bawa/disampaikan langsung;
3. Kegiatan hearing (dengar pendapat) dilaksanakan sebanyak 3 kali dari total 12 kali karena pelaksanaan kegiatan tersebut sangat ditentukan oleh permohonan dari organisasi/kelompok masyarakat/tokoh agama;
4. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan pada 2 kecamatan dari total 6 kecamatan yang direncanakan karena waktu pelaksanaan yang singkat serta bahan dokumen untuk sosialisasi yang belum siap.

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD :

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi dibidangnya jumlahnya terbatas, sehingga mengakibatkan beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kurang maksimal dan hanya staf tertentu saja yang diberdayakan.

Upaya Pemecahan masalah Sekretariat DPRD:

Permasalahan yang menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) diselesaikan secara internal dengan melakukan pembinaan bagi para pegawai agar meningkatkan kinerjanya.

20.3 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang didukung dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat maka dibentuklah suatu badan baru yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pengelolaan keuangan dan aset daerah wajib dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, akuntabilitas dalam arti bahwa proses perencanaan,

penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik tidak dapat dipisahkan dari fungsi pembinaan administrasi keuangan dan aset daerah.

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu pada peraturan perundangan-undangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Untuk tahun 2017, telah disahkan 3 (tiga) peraturan daerah yaitu:

- Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017;
- Perda Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017;
- Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD TA 2018.

Serta 3 (tiga) peraturan bupati yaitu:

- Perbup Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017;
- Perbup Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2017;
- Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018.

Kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan di tahun anggaran 2017 adalah :

a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017;
b. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017;
c. Perda Pertanggungjawaban APBD Nomor 7 Tahun 2017 dan Peratuan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD Nomor 17 Tahun 2017 yang meliputi :
    - Laporan Realisasi Anggaran;
    - Laporan Arus Kas;
    - Neraca;
    - Catatan L/K.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.161 Capaian Indikator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Realisasi Dari Target
1	Indeks Opini atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100
2	Persentase Sertifikasi dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah	100	96,98	96,98
3	Persentase Penyerapan Belanja langsung dan Tidak Langsung	100	95,63	95,63
4	Persentase Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Seimbang	100	94,87	94,87
5	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berupa Penyediaan Aneka jasa	100	90,92	90,92

Sumber: BPKAD 2017

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 95,68%. Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Perubahan Tahun Anggaran 2017, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 13.593.833.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.897.513.029 atau 94,87%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.162 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh BPKAD

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
BPKAD		**13.593.833.000**	**12.897.513.029**	**94,87**	**100**	**-**			
1.	**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**6.178.050.000**	**5.991.684.240**	**96,98**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**1**	**1**	**Keg.**
2.	**Program pelayanan administrasi**	2.760.909.750	2.510.454.963	90,92	100	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program**	**12**	**12**	**Keg.**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	perkantoran					**pelayanan adm. perkantoran**			
3.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1.673.616.500	1.610.434.245	96,22	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**7**	**7**	**keg**
4.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	71.850.000	71.245.900	99,15	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur**	**2**	**2**	**Keg.**
5.	**Program fasilitas pindah/purna tugas PNS**	15.000.000	15.000.000	100	100	**Terlaksananya kegiatan pada program fasilitas pindah/purna tugas PNS**	**1**	**1**	**Keg.**
6.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	501.962.200	494.318.508	98,47	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**1**	**1**	**Keg.**
7.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	93.291.000	77.011.677	82,54	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1**	**1**	**Keg.**
8.	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	2.299.153.550	2.127.363.496	92,52	100	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**10**	**10**	**Keg.**

Sumber : LKPJ, 2017

20.4 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam melaksanakan Urusan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.972.007.000 dan terealisasi

sebesar Rp. 4.055.063.592 atau 81,56%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.163 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
BAPENDA		**4.972.007.000**	**4.055.063.592**	**81,86**	**89,95**	**-**			
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**1.575.296.800**	**1.359.521.151**	**81,08**	**86,30**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan adm. perkantoran**	**12**	**12**	**Keg**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**763.072.100**	**712.436.829**	**93,36**	**98,27**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**5**	**5**	**keg**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**61.000.000**	**61.000.000**	**99,80**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur**	**1**	**1**	**Keg.**
5.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**441.850.000**	**441.850.000**	**94,74**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**1**	**1**	**Keg.**
6.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**3.000.000**	**3.000.000**	**87,80**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1**	**1**	**Keg.**
7.	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**2.127.788.100**	**1.500.978.079**	**70,54**	**91,13**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**2**	**2**	**Keg.**

Sumber : LKPJ, 2017

20.5 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Salah satu sasaran dalam program Nawacita (RPJMN 2015 – 2019) adalah terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, Pemkab

Kotawaringin Barat merumuskan salah satu misi pada RPJMD 2017 – 2022 yaitu memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat diperlukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme PNS secara berkesinambungan. Hal ini dikarenakan PNS merupakan unsur utama dalam organisasi yang memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh PNS yang menjadi penggerak jalannya organisasi. Tanpa didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional, suatu organisasi akan kesulitan dalam mencapai tujuannya. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme PNS dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten di bidang tugasnya. PNS dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula.

Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam jenjang karir. Perekrutan PNS diawali dengan penyusunan formasi sesuai persyaratan jabatan dan seleksi sesuai kriteria yang dipersyaratkan dan diusulkan ke Kementerian PAN dan RB melalui aplikasi e-formasi. Penyelenggaraan penerimaan pegawai didukung adanya formasi pegawai, kebutuhan pegawai serta adanya pedoman pengadaan pegawai yang menganut prinsip-prinsip transparan, obyektif, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif serta tidak dipungut biaya dengan menggunakan seleksi *Computer Asissted Test* (CAT). Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak pertama diangkat hingga pensiun. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dilaksanakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri (izin belajar) serta pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dikembangkan sistem *reward and punishment*. Kedisiplinan PNS digunakan sebagai salah satu indikator kinerja PNS. Ke depannya, pengawasan disiplin PNS akan menggunakan sarana teknologi informasi yang terintegrasi untuk menentukan *reward dan punishment*. *Reward* diberikan kepada PNS berupa tunjangan sesuai dengan kehadiran dan kinerjanya. Selain itu, *reward*

juga diberikan dalam bentuk usulan untuk mendapatkan piagam Satya Lencana dan promosi jabatan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. *Punishment* diterapkan kepada PNS berupa penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Seleksi Penerimaan CPNS.

Dalam rangka mengisi formasi tambahan PNS pada SKPD/Satuan Unit Kerja, dilaksanakan melalui pengusulan formasi dan pengadaan CPNSD Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemkab Kotawaringin Barat pada tahun 2017 mengusulkan total 1.097 usulan formasi. Akan tetapi karena masih berlakunya moratorium terbatas dari pemerintah pusat, tidak ada alokasi formasi yang diberikan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hanya mendapatkan kuota CPNS dari PTT Kesehatan dan PHL – TB Penyuluh Pertanian. Rincian usul dan alokasi formasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.164 Usulan dan Alokasi Formasi PNS Tahun 2010 – 2017

TH	USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU PER JENIS TENAGA				ALOKASI FORMASI YG DITERIMA PER JENIS TENAGA				KETERANGAN
	GURU	KES	TEKNIS	JML	GURU	KES	TEKNIS	JML	
2010	619	50	613	1.282	117	50	93	260	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	2	-	13	15	2	-	13	15	
2013	50	4	18	72	50	4	18	72	Dari hasil tes tenaga honorer K.2 sebanyak 71 orang + 1 orang dari formasi khusus dokter
2014	632	206	320	1158	42	36	17	101	Formasi jalur khusus dokter 6 + formasi umum 95
2015	661	150	337	1148	-	-	-	-	Tidak ada penerimaan CPNS karena adanya moratorium dari pemerintah pusat
2016	661	166	366	1163	-	-	-	-	Tidak ada penerimaan CPNS karena adanya moratorium dari pemerintah pusat
2017	490	366	241	1097	-	25	2	27	

Sumber : BKPP 2017

2. Penempatan PNS

Melalui penempatan PNS diharapkan dapat mengisi jumlah, kualitas, komposisi, distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan SKPD/Satuan Unit Kerja dilaksanakan melalui penempatan PNS dengan mengangkat CPNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.165 Komposisi Penerimaan PNS menurut Golongan Tahun 2010-2017

TAHUN	JUMLAH	GOLONGAN RUANG								KET
		I/a	I/b	I/c	II/a	II/b	II/c	III/a	III/b	
2010	229	0	0	0	0	8	57	161	3	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	15	1	-	3	6	-	2	3	-	
2013	72	2	-	2	49	2	4	12	1	
2014	74	2	-	2	17	5	4	35	9	
2015	90	-	-	-	-	1	26	56	7	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	27	-	-	-	1	-	24	-	2	

Sumber : BKPP 2017

Untuk menyesuaikan komposisi dan permintaan SKPD, dilakukan mutasi PNS. Pada tahun 2017 mutasi PNS yang terjadi dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.166 Rincian Mutasi PNS Kotawaringin Barat Tahun 2017

No.	Kegiatan	Jumlah
1	Persetujuan pindah keluar	29
2	Persetujuan formasi	22
3	Pindah ke dalam daerah	8
4	Pindah dalam daerah	19 + 1034*

** Jumlah ini menyesuaikan dengan permintaan SOPD saat pembentukan Nomenklatur baru SOPD di Kotawaringin Barat*

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan administrasi kepangkatan.

Tabel 2.167 Penyelengaraan Administrasi Kepangkatan PNS Tahun 2010-2017

NO	KEGIATAN	Tahun							Ket
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kenaikan Pangkat	792	1111	814	1012	696	585	504	
2	Peninjauan Masa Kerja	7	7	1	12	3	2	1	Sesuai usulan dari SKPD
3	Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	317	234	4	12	-	79	91	
4	Pencantuman Gelar	13	8	16	28	15	19	19	Sesuai usulan dari SKPD

Sumber : BKPP 2017

4. Penegakan Disiplin dan Pembinaan Aparatur

Untuk menekan dan mengurangi pelanggaran disiplin PNS, BKPP Kotawaringin Barat selama tahun 2017 melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.168 Penegakan Disiplin dan Pembinaan Aparatur Tahun 2016-2017

No	Kegiatan	2016	2017	Keterangan
1	Penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin	8 kasus	17 kasus	
2	Penjatuhan hukuman disiplin	8 PNS	8 PNS	
3	Pemberhentian PNS	1 PNS	6 PNS	
4	Bimbingan Teknis	1 kegiatan	1 kegiatan	Diikuti oleh 200 PNS se Kotawaringin Barat
5	Siraman Rohani	7 kegiatan	7 kegiatan	6 kegiatan untuk PNS beragama Islam, 1 kegiatan untuk PNS beragama Kristen
6	Rakor Kepegawaian	0	1 kegiatan	Diikuti oleh 100 orang PNS se Kotawaringin Barat
7	Pembekalan Purna Tugas	0	2 kegiatan	Diikuti oleh 78 PNS

Sumber : BKPP 2017

Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi melalui pemberian piagam Satyalencana Karya Satya, penyelesaian kartu pegawai, Karis/Karsu, Taspen dan pensiun PNS.

Tabel 2.169 Penghargaan PNS berprestasi sampai dengan Tahun 2017

NO	Kegiatan	Sampai dengan tahun 2016	2017	Jumlah
1	Karpeg	1090	98	1188
2	Karis / Karsu	2331	30	2361
3	Pensiun	519	119	738
4	Satya Lencana	612	170	682
5	Taspen	375	4	379

Sumber : BKPP 2017

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung peningkatan sumber daya PNS dilakukan melalui kegiatan diklat kepemimpinan, diklat prajabatan dan pengiriman mengikuti seleksi tugas belajar serta pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.170 Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2017

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Diklat Kepemimpinan	15 PNS	10 diklatpim tingkat IV dan 5 diklatpim tingkat III
2	Diklat Pra Jabatan	0	Tidak ada kegiatan pengiriman peserta prajabatan, karena BPSDM Kalimantan Tengah tidak mengagendakan kegiatan prajabatan untuk tahun 2017
3	Tugas Belajar	29	15 usul baru dan 14 perpanjangan
4	Ijin Belajar	120	
5	Ujian Dinas	41	
6	Ujian Penyesuaian Ijazah	15	

Sumber : BKPP 2017

Informasi Kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam rangka pembinaan pegawai, melalui peningkatan dalam pengelolaan data base. Jumlah PNS yang masuk data base dari tahun ke tahun terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.171 Data Base Kepegawaian Tahun 2016 – 2017

NO	TAHUN	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV					JUMLAH
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	2016	3	3	12	5	76	74	284	425	571	850	432	617	873	90	32	1	0	**4348**
2	2017	2	3	10	7	61	75	265	377	540	781	483	612	877	93	31	1	0	**4218**

Sumber : BKPP 2017

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 6.566.714.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.008.768.781 atau 76,28%. Rendahnya capaian realisasi keuangan dikarenakan ada kegiatan yang terkait dengan peraturan maupun kebijakan dari pemerintah pusat sehingga tidak bisa maupun tertunda pelaksanaannya. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.172 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian
Tahun Anggaran 2017

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
BKPP		6.566.714.000	5.008.768.781	76,28		-			
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.108.809.800	966.447.678	87,16		Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	14	14	Keg.
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	776.459.300	687.609.100	88,56		Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	7	Keg.
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	53.800.000	44.440.000	82,60		Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg.
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	104.000.000	71.228.204	68,49	100	Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg.
5.	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.620.000	17.570.000	99,72	100	Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg.
6.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.649.962.000	1.276.790.149	77,78		Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan kap. sumber daya aparatur	4	4	Keg.
7.	Program pembinaan dan pengembang an aparatur	2.856.062.900	1.944.683.650	68,09	88,82	Terlaksanany a kegiatan pada program pembinaan dan pengembanga n aparatur	11	11	Keg.

Sumber : LKPJ, 2017

20.6 INSPEKTORAT KABUPATEN

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan dukungan aparatur pengawasan yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud bahwa:

1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
4. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh kementrian/lembaga pemerintah non kementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Meningkatkan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan;
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, dan pencegahan terhadap peluang praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi.

Pengawasan intern salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran APIP. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dilingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2017 dilakukan beberapa hal yaitu:

1. Target pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) perubahan dengan total obyek pemeriksaan (obrik) 18 SKPD dan 36 desa di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :
   a. pemeriksaan reguler desa, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan pada 36 obrik dengan rincian temuan 98 dan jumlah rekomendasi 284;
   b. kegiatan penyelesaian tindak lanjut desa telah dilaksanakan pada 70 obrik dengan hasil rekomendasi yang telah ditindak lanjuti sebanyak 175;
   c. pemeriksaan SKPD telah dilaksanakan pada 18 obrik.

2. Melakukan reviu laporan kinerja Pemerintah Kabupaten dan SKPD dengan hasilnya adalah Laporan Kinerja Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 yang disusun masih terdapat salah saji dan kekurangan penyajian data dan informasi yang diperlukan, dengan rekomendasi terhadap hasil tersebut adalah memperbaiki laporan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sesuai hasil reviu tim Inspektorat Kobar.

Selanjutnya fungsi pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan jadwal PKPT 2017 meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan reguler SKPD dan desa;
2. Monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Pemeriksaan tujuan tertentu pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
4. Pemeriksaan tujuan tertentu pengawasan dana desa (DD);
5. Reviu penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
6. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
7. Reviu RKA Perubahan dan RKA tahun berikutnya;
8. Pemantauan dan monitoring;
9. Pemeriksaan Khusus (Pemsus);
10. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

Untuk kegiatan reviu RPJMD dan renstra SKPD tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang terbatas dan kegiatan tersebut bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan reguler SKPD.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2017, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi pagu anggaran belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 3.549.248.000 terealisasi Rp. 3.487.434.314 atau 98,25%. Sedangkan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.3.742.419.000 dengan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 3.633.701.741 atau 97,10%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.173 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
Inspektorat		**3.742.419.000**	**3.633.701.741**	**97,10**	**98,84**	Tercapainya semua program yang dilaksanakan	8	8	Program
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**503.288.600**	**477.133.665**	**94,80**	**100**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**%**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**1.195.764.050**	**1.189.618.000**	**99,49**	100	**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**%**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**50.600.000**	**48.400.000**	**95,65**	**100**	**Tingkat kepatuhan aparatur**	**100**	**100**	**%**
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**209.400.000**	**208.817.770**	**99,72**	**100**	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100**	**100**	**%**
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**9.550.000**	**9.298.000**	**97,28**	**97,36**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100**	**100**	**%**
6.	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH**	**1.331.667.350**	**1.280.601.589**	**96,16**	**96,74**	**Tingkat capaian pembinaan dan pengawasan internal terhadap audit**	**100**	**100**	**%**
7.	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	**391.200.000**	**370.321.992**	**94,66**	**100**	**Prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM APIP**	**100**	**100**	**%.**
8.	**Program penataan dan penyempurnan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	**50.949.000**	**49.510.725**	**97,17**	**100**	**Persentase terpenuhinya dokumen Infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 3 (tiga)**	**100**	**100**	**%**

Sumber : LKPJ, 2017

20.7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Maka tanggung jawab tersebut dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Adapun di tingkat daerah, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Oleh karena itu, landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan PRB secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

a. Pertama, bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
b. Kedua, bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/ permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

c. Ketiga, bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh sejumlah instansi seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian PUPR. Begitu pula pada tingkat kabupaten, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 25, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun pengisian dan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas bupati dibidang penanggulangan bencana di daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat dan secara fungsional dibina oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1) Mengurangi resiko bencana;
2) Melindungi masyarakat korban terdampak bencana;
3) Pemulihan kondisi aspek kehidupan masyarakat pasca bencana.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan aparatur;
2) Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana;
3) Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sehubungan dengan situasi dimana pelantikan kepala daerah terpilih terlaksana pada bulan Juni 2017 dan perda Kabupaten Kotawaringin Barat tentang RPJMD 2017 – 2022 baru ditetapkan pada Desember 2017, maka pelaksanaan program kerja pada tahun anggaran 2017 masih mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012 – 2016. Gambaran capaian sasaran kinerja pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.174 Capaian Indikator Sasaran Desa Siaga Bencana

No	Kecamatan	Jumlah Desa Rawan Bencana	Desa Yang Mengikuti Sosialisasi/ Pelatihan		Desa Yang Memiliki Sarpras Penanggulangan Bencana		Desa Yang Memiliki Kelompok Relawan		Jumlah SMU	Jumlah SMU sederajat yang mengikuti sosialisasi		% Desa Siaga Bencana
			Jml	%	Jml	%	Jml	%		Jml	%	
1	Arut Selatan	15	9	60,0	8	53,3	12	80,0	15	15	100	73,3
2	Kotawaringin Lama	6	2	33,3		-	1	16,7	1	0	0	12,5
3	Kumai	14	7	50,0	4	28,6	6	42,9	5	5	100	55,4
4	Pangkalan Lada	3	3	100,0		-	1	33,3	2	2	100	58,3
5	Pangkalan Banteng	9	7	77,8		-	1	11,1	2	2	100	47,2
6	Arut Utara	12	1	8,3		-	1	8,3				4,2
	Jumlah	**59**	**29**	**49,2**	**12**	**20,3**	**22**	**37,3**	**25**	**24**	**96**	**50,7**

Sumber : LKPJ, 2017

Tabel 2.175 Capaian Indikator Sasaran Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Obyek/ Fasilitas terdampak	Jumlah	Tingkat Kerusakan			Penanganan RR	%
					Ringan	Sedang	Berat		
1	Arut Selatan		Boxculvert	1			1	1	100
2	Kotawaringin Lama								
3	Kumai	Abrasi	Jalan	1			1		0
			Jembatan	2			2		0
4	Pangkalan Lada								
5	Pangkalan Banteng	Banjir	Jembatan	4	2		2	1	50
			Sekolah	1	1				
6	Arut Utara	Banjir	Jembatan	3	2		1	1	100
7	Arut Utara	Longsor/ Erosi	Jembatan	1			1	1	100
	Jumlah			**14**	**5**	**0**	**8**	**4**	**50**

Sumber : BPBD 2017

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun Anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 3.569.234.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.468.199.639 atau

97,03%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.176 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik	Capaian Kinerja Program/Kegiatan			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
BPBD		3.569.234.000	3.468.199.639	97,03	100				
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**894.281.500**	**829.693.480**	**92,78**	**100**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**95**	**95**	**%**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**1.705.341.500**	**1.692.909.000**	**99,27**	**100**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**%**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**43.400.000**	**43.338.000**	**99,86**	**100**	**Tingkat kepatuhan aparatur**	**95**	**95**	**%**
4.	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**79.400.000**	**60.239.255**	**75,86**	**100**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**90**	**90**	**%**
5.	**Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**5.236.000**	**3.765.000**	**71,90**	**100**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**95**	**95**	**%**
6.	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**602.865.000**	**601.930.501**	**99,84**	**100**	**Persentase kelurahan siaga bencana**	**60**	**52,5**	**%**
7.	**Program tanggap darurat pasca bencana**	**141.010.000**	**140.193.203**	**99,42**	**100**	**Persentase lokasi kejadian bencana yang telah direhabilitasi/ direkonstruksi**	**60**	**66,67**	**%**
8.	**Program tanggap darurat**	**97.700.000**	**96.131.200**	**98,39**	**100**	**Persentase penaganan tanggap darurat**	**80**	**85,48**	**%**

Sumber : LKPJ, 2017

20.8 KANTOR KECAMATAN

Pemerintahan kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan fungsi

pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjelaskan bahwa tugas kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas umum pemerintahan yang dimaksud meliputi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

8.a KECAMATAN ARUT SELATAN

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017, Kantor Kecamatan Arut Selatan mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.582.109.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.317.223.873 atau 89,74%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.177 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
Kecamatan Arut Selatan		**2.582.109.000**	**2.317.223.873**	**89,74**	**95,05**	**-**			
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**1.401.325.000**	**1.260.774.665**	**92,59**	**95,30**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan**			

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						administrasi perkantoran			
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	984.480.000	90.541.000	95,76	91,47	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	64.900.000	64.605.000	99,55	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur			
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	0	0	-	-				
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	123.930.000	86.479.708	69,78	86,15	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.474.000	4.823.500	64,54	70	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			

Sumber : LKPJ, 2017

8.b KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.603.580.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.522.641.238 atau 94,95%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.178 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real.	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Fisik	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)	(%)				
Kec. Kotawaringin Lama		1.603.580.000	1.522.641.238	96,26	96,32	-			
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.024.976.500	982.686.632	95,87	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	11	11	Keg.
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	432.300.000	412.614.000	95,45	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	10	10	Keg.
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	30.000.000	29.700.000	99,00	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg.
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	72.000.000	71.000.973.606	99,96	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	8	8	OK
7.	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	32.347.000	20.910.000	64,64	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	Keg.

Sumber : LKPJ, 2017

8.c KECAMATAN KUMAI

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 Kantor Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.187.518.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.105.980.083 atau 93,13%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.179 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
Kec. Kumai		**1.187.518.000**	**1.105.980.083**	**93,13**	**100**	-			
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**913.338.000**	**856.829.547**	**93,81**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran**	**11**	**11**	**Keg**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**129.020.000**	**114.004.336**	**88,36**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**5**	**5**	**Keg.**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**31.130.000**	**31.130.000**	**100**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur**	**1**	**1**	**Keg.**
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**72.000.000**	**61.986.200**	**86,09**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**1**	**1**	**Keg.**
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**4.080.000**	**4.080.000**	**100**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**3**	**3**	**Keg.**
6.	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**37.950.000**	**37.950.000**	**100**	**100**	**Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik**	**1**	**1**	**Keg.**

Sumber : LKPJ, 2017

8.d KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017, Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin

Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.118.016.000 dan terealisasi sebesar Rp. 999.051.000 atau 89,36%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.180 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
Kec. Pangkalan Banteng		1.118.016.000	999.051.000	89,36	100	-			
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	507.879.000	438.799.518	86,40	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	11	11	Keg
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	473.825.000	462.243.182	97,56	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8	8	Keg
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	14.630.000	12.430.000	84,96	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.500.000	77.179.109	76,80	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.182.000	0	0	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg
6.	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	11.000.000	8.400.000	76,36	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	Keg

Sumber : LKPJ, 2017

8.e KECAMATAN PANGKALAN LADA

Dalam melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2017, Kantor Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.175.023.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.044.016.423 atau 88,85%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.181 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	617.290.200	547.253.408	88,65	99,76	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	12	12	Bln
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	413.815.300	382.256.576	92,37	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	7	Keg.
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	20.700.000	18.590.000	89,81	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	2	2	Keg.
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	102.000.000	78.295.689	76,76	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.517.500	5.920.750	90,84	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg.
6.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	14.700.000	11.700.000	79,59	97,96	Terlaksananya kegiatan pada program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	Thn

Sumber : LKPJ, 2017

8.f KECAMATAN ARUT UTARA

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2017 Kantor Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat

mendapat alokasi pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.272.260 dan selanjutnya dalam DPPA menjadi Rp. 1.275.185.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.178.688.945 atau 92,43%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.182 Program Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran

No.	Program / Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Real	(%)					
Kec. Arut Utara		1.275.185.000	1.178.688.945	95,81		-			
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	621.011.000	573.777.727	92,39	96,02	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	11	11	Keg.
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	482.740.000	452.120.000	93,66	93,14	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	7	Keg.
3	Program peningkatan disiplin aparatur	18.000.000	18.000.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg.
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	136.500.000	118.123.218	86,54	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	2	Keg.
5	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.499.000	8.233.000	96,87	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan peng. sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	Keg.
6	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	9.385.000	9.385.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	Keg.

Sumber : LKPJ, 2017

2.4.21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a) Kondisi Umum

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku dan pengorganisasian masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya diperlukan pendekatan yang tepat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di desa.

Terbatasnya akses dan belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat (termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan) dapat berpengaruh pada pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat untuk mandiri.

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dilakukan serta dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan kelembagaan dalam masyarakat serta pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui pemantapan nilai sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG). Berikut adalah indikator dan capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2017:

Tabel 2.183 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Jumlah desa yang diperbaharui profil desanya	desa	77	94	80	85,11
2.	Jumlah musyawarah pembangunan desa/ kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel.	94	94	94	100
3.	Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat	desa	1	1	1	100
4.	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang terlatih	orang	0	-	-	-
5.	Jumlah desa/ kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel.	1	1	1	100

Sumber : DPMD 2017

Dalam upaya pengentasan dan percepatan desa tertinggal pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretariat Daerah dengan total alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.382.652.600 dan terealisasi sebesar Rp. 3.243.267.868 atau 95,87%. Rinciannya, Dinas PMD alokasi anggaran Rp. 3.204.352.600 dan terealisasi sebesar Rp. 3.084.211.612 atau 96,25%. Adapun Setda alokasi Rp. 178.300.000 dengan realisasi sebesar Rp. 159.056.256 atau 89,20%. Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.184 Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)		**3.204.352.600**	**3.084.211.612**	**96,76**	**96,25**				
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**548.533.400**	**502.542.881**	**94,61**	**94,61**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran**	**10**	**10**	**Keg.**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**125.600.000**	**118,734,974**	**94,53**	**94,53**	**Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**3**	**3**	**Keg.**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**19.500.000**	**19.461.000**	**99,80**	**100**	**Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur**	**1**	**1**	**Pkt**
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya**	**114.000.000**	**113.024.168**	**99,14**	**100**	**Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan kapasitas**	**1**	**1**	**Keg.**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	aparatur					sumber daya aparatur			
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.400.000	8.400.000	100	100	Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg.
6.	Program peningkatan keberdaya an masyaraka t pedesaan	1.349.927.4 00	1.324.332.4 92	98,10	98,10	Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	3	3	Keg.
7.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	239.700.10 0	230.476.7 89	96,15	96,15	Terlaksanany a kegiatan pada program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan	2	2	Keg.
8.	Program peningkatan partisipasi masyaraka t dalam membangu n desa	494.607.30 0	485.213.8 13	98,10	98,10	Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4	4	Keg.
9.	Peningkata n Kapasitas aparatur pemerintah desa	188.984.50 0	182.928.8 45	96,80	96,80	Terlaksanany a kegiatan pengembanga n kapasitas aparatur pemerintah desa	2	2	Keg.
10.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	80.422.400	64.471.85 0	80,17	80,17	Terlaksanany a pelatihan perempuan di perdesaan	60	60	Org
11.	Program penguatan penyusuna n dan pendayagu naan profil desa dan kelurahan	34.673.500	34.597.50 0	99,78	99,78	Terlaksanany a kegiatan pada program penguatan penyusunan dan pendayaguna an profil desa dan kelurahan	1		Keg.

Sumber : LKPJ, 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
SETDA		**178.300.000**	**159.056.256**	**89,20**	**100**	**-**			
1	**Program peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa**	**44.000.000**	**36.000.000**	**81,82**	**100**	**-**	1	1	Keg
2.	**Program peningkatan papasitas aparatur pemerintah desa**	**134.300.000**	**123.056.256**	**91,63**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**2**	**2**	**Keg.**

Sumber : LKPJ, 2017

Pencapaian kinerja output dan outcome dinas PMD dalam mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut:

a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk peduli lingkungan melalui sosialisasi penggunaan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam sebanyak 120 orang kader pelestarian sumber daya alam desa dengan tingkat capaian 99,92%;
b. Terlaksananya monitoring pengelolaan pasar desa dan Pelatihan Pengelola Pasar Desa sebagai bahan pengembangan pasar desa dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan di desa dan kelurahan di 6 kecamatan yang ada di Kotawaringin Barat dengan tingkat capaian sebesar 97,59%;
c. Terlaksananya pembinaan pembangunan desa tertinggal dalam program Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa/kelurahan di Desa Riam dan Desa Panahan Kec. Arut Utara;
d. Terbentuknya 80 BUMDes di 6 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai cikal bakal desa yang mandiri secara ekonomi;
e. Meningkatnya ketahanan fisik dan daya tahan tubuh siswa anak sekolah (SD/MI/Ponpes Negeri dan Swasta di Desa Tanjung Putri Kec. Arsel, Desa

Sekonyer Kec. Kumai dan desa Panahan dan Desa Sambi Kec. Aruta melalui program PMT-AS berupa pemberian kudapan yang dibagikan secara reguler;

f. Terlaksananya lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa/kelurahan. Pada tahun 2017 didapatkan Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada sebagai Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan;
g. Terlaksananya pelatihan keterampilan perempuan di perdesaan sebanyak 60 orang dalam rangka memberi nilai tambah untuk kemajuan ekonomi keluarganya;
h. Hasil pencapaian pada desa dengan adanya program PM2L adalah sebagai berikut:
    a) Meningkatnya prasarana dasar (jalan, jembatan, gorong-gorong, drainase, dan air bersih);
    b) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan;
    c) Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan;
    d) Meningkatnya ekonomi rakyat (pertanian dalam arti luas, industri rumah tangga, perdagangan, pariwisata dan lain-lain);
    e) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dan masyarakat.
    f) Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan desa dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa khususnya ADD dan dana desa sebanyak 258 orang dengan tingkat capaian 97,06%.

2.4.22 Urusan Sosial

a) Kondisi Umum

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui beberapa program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada. Beragam permasalahan sosial membutuhkan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (orsos), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun unsur masyarakat secara keseluruhan. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk menjadi *leading sector* bagi penanganan berbagai masalah sosial di tingkat kabupaten.

Sasaran dari bidang sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, atau tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterbatasan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, PMKS terdiri atas 26 jenis antara lain:

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak jalanan
5. Anak dengan kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut usia terlantar
9. Penyandang disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan Napza
18. Korban traficking

19. Korban tindak kekerasan
20. Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)
21. Korban bencana alam
22. Korban bencana sosial
23. Perempuan rawan sosial ekonomi
24. Fakir miskin
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis
26. Komunitas adat terpencil.
27. Sasaran Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 2.185 Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Jenis PMKS	Sebaran PMKS per kecamatan	Jumlah PMKS
1	Fakir Miskin	Arut Selatan 9.972 jiwa Kumai 11.768 jiwa Arut Utara 1.251 jiwa Pangkalan Lada 6.469 jiwa Pangkalan Banteng 4.040 jiwa Kotawaringin Lama 3.253 jiwa	36.753 Jiwa
2	Anak Balita Terlantar		0 Bayi
3	Anak Terlantar	Arut Selatan 470 Anak Kumai 242 Anak Pangkalan Lada 33 Anak Pangkalan Banteng 43 Anak Kotawaringin Lama 20 Anak	808 Anak
4	Anak yang berhadapan dengan hukum	Arut Selatan 12 Anak Kumai 1 Anak	13 Anak
5	Anak dengan kedisabilitasan	Arut Selatan 83 Anak Kumai 63 Anak Kotawaringin Lama 33 Anak Pangkalan Banteng 18 Anak Pangkalan Lada 31 Anak Arut Utara 228 Anak	456 Anak
6	Lanjut usia lanjut/miskin	Arut Selatan 1.415 Orang Kumai 673 Orang P. Banteng 452 orang P. Lada 414 Orang Arut Utara 255 Orang	3.209 Orang
7	Penyandang Disabilitas	Arut Selatan 105 Orang Kumai 152 Orang Kotawaringin Lama 100 Orang P Banteng 66 Orang P Lada 43 Orang Arut Utara 11 Orang	515 Orang
8	Tuna Susila	Arut Selatan 195 Orang P. Banteng 141 Orang	336 Orang
9	Gelandangan/Pengemis		0 Orang
10	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan	Arut Selatan 34 Orang	34 Orang
11	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Arut Selatan 15 Orang	15 Orang
12	Korban penyalahgunaan napza	Arut Selatan 38 Orang	38 Orang
13	Pekerja Migran bermasalah	Kotawaringin Barat 117 Orang	111 Orang
14	Korban Bencana Alam	Arut Selatan400 jiwa Kumai 10jiwa Kotawaringin Lama 907 jiwa P. Banteng 217 jiwa	3.754 Orang/jiwa

No	Jenis PMKS	Sebaran PMKS per kecamatan	Jumlah PMKS
		Arut Utara 2220 jiwa	
15	Korban Bencana Sosial (kebakaran)	Arut Selatan 20 jiwa Kumai 3 jiwa Pangkalan Lada 14 jiwa Arut Utara 17 jiwa	54 Orang
16	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Arut Selatan 45 Orang Kumai 30 Orang P Banteng 25 Orang P Lada 30 Orang Kotawaringin Lama 20 Orang	150 Orang
17	Keluarga bermasalah sosial psikologi	Arut Selatan	5 kasus/orang
18	RTS penerima manfaat (Raskin/Rastra)	Arut Selatan 2.148 Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kumai 2568 RTS P Banteng 1.080 RTS P Lada 1.434 RTS Kotawaringin Lama 660 RTS Arut Utara 273 RTS	8.163RTS
19	Komunitas Adat Terpencil		

Sumber: Dinsos 2017.

Dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama keluarga miskin, pada tahun 2017 telah dilakukan upaya pemberdayaan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin untuk 8 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pemberian bantuan bedah rumah kepada 13 unit rumah, pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 15 KK atau 5 Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang merupakan peserta hasil kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di LBK Pangkalan Bun berupa peralatan mesin jahit.

Dalam penanganan fakir miskin Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat melalui Dinas Sosial pada tahun 2017 telah memberikan rekomendasi BPJS sebanyak 759 rekomendasi, dan penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) kepada 8.163 KK, dimana per kepala keluarganya mendapat Rastra sebanyak 15 Kg/Bulan.

Pada Tahun 2017, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan upaya peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha melalui kegiatan sosialisasi perda mengenai pengumpulan uang atau barang dan undian gratis berhadiah. Kegiatan Sosialisasi tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Pangkalan Lada Desa Sumber Agung.

Pada kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu; Rapat

Kerja Karang Taruna Se-Kabupaten Kotawaringin Barat yang berlokasi di Gedung Bakuba Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan selama 1 hari. Sedangkan pada kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat telah mengirimkan 11 orang anggota Karang Taruna dan 1 orang pendamping dari Dinas Sosial untuk mengikuti Kemah Bakti Karang Taruna di Kota Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Selain itu, kegiatan pemberdayaan organisasi sosial (orsos) berupa yayasan atau organisasi dalam bentuk lain milik masyarakat yang melaksanakan penanganan PMKS, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam atau luar panti yang jumlahnya telah mencapai 21 yayasan/orsos.

Kegiatan pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial mempunyai nilai dan peran yang penting bagian penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut bertujuan agar tetap *eksis* dan *establish* peran pemerintah daerah Kotawaringin Barat bagi para pejuang, pahlawan dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah berjasa dalam kemerdekaan maupun pembangunan bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Sosial sebagaimana tupoksinya pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya; memberikan bantuan dalam bentuk makanan dan peralatan mandi, yang dilaksanakan melalui kegiatan anjangsana ke Panti Asuhan, Lembaga Permasyarakatan, Rumah Sakit Daerah, Sekolah Luar Biasa dan Pondok Pesantren, dan pemberian bantuan sembako kepada 71 orang Veteran dan Ahli Waris Pahlawan. Sedangkan untuk menumbuhkan nilai juang kepahlawanan Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan lomba Olimpiade Kepahlawanan tingkat SLTA di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Sosial juga memberikan pelayanan rehabilitasi Sosial. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2017 telah dilaksanakan konseling dan kampanye sosial (KIE) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), pemberian bantuan Bahan Makanan Sembako kepada 30 (tiga puluh) orang lansia pada acara silaturahmi lanjut usia, dan pendampingan kepada 92 (sembilan puluh dua) lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, dan terlaksanannya Sosialisasi Tuna Sosial bagi PMKS sebanyak 2 kali kegiatan di Lokasi prostitusi Dukuh Mola RT 12 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan dan Lokasi Prostitusi Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh para Narasumber dari Kementerian Sosial R.I,

dari Kepolisian Resort Kota Pangkalan Bun, dan dari Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jumlah 200 peserta yang di indikasi bekerja sebagai PSK di 2 lokasi tersebut dan selanjutnya mendapatkan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan program Pemerintah Tahun 2019 yaitu penutupan lokalisasi dalam mewujudkan “Kotawaringin Barat Bebas Prostitusi”.

Selain pelayanan rehabilitasi sosial ada juga pelayanan bagi orang dengan gangguan kecacatan (ODK). Pada pelayanan Orang Dengan Kecacatan tahun 2017 telah terlayani sebanyak 35 ODK yang dilakukan oleh Tim Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dan juga diusulkan untuk mendapatkan bantuan alat kecacatan pada acara HKSN Tingkat Nasional di Surabaya. Bantuan yang telah diberikan kepada ODK yang mendapat alat Kursi Roda sebanyak 12 orang, 2 orang mendapat alat Kruk, 3 orang mendapat Tangan Palsu dan 13 orang yang mendapatkan Kaki Palsu dengan total 30 Orang dengan Kecacatan (ODK).

Program Pembinaan Anak Terlantar Tahun 2017 telah melakukan kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar. Kegiatan tersebut berupa pelatihan Membuat Kue Kering kepada 15 (lima belas) anak yang dilaksanakan di Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan Bun. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, telah dibentuk 3 KUBE dan masing-masing KUBE mendapatkan bantuan stimulan berupa peralatan dan perlengkapan Membuat Kue Kering. Kegiatan lainnya adalah program pembinaan anak terlantar dengan mengirimkan klien sebanyak 2 (dua) orang ke Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW) Palangkaraya untuk mendapatkan pembinaan, pelatihan dan menerima bantuan untuk pengembangan usaha. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat telah memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap 13 orang anak yang berhadapan dengan hukum.

Bantuan dan jaminan sosial merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada Tahun 2017, Dinas Sosial telah memberikan bantuan pemulangan kepada pekerja migran terlantar sebanyak 111 orang, eks napi sebanyak 34 orang, dan psikotik sebanyak 12 orang yang di rujuk ke RS Jiwa Sambang Lihum Propinsi Kalimantan Selatan. Di samping itu, telah terlaksana pendampingan kepada Penerima Bantuan Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.720 KK yang tersebar di 6 kecamatan.

Tabel 2.186 Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Indikator	Satuan	2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Keberadaan Sarana sosial: ⁾ Panti asuhan ⁾ Panti jompo ⁾ Panti rehabilitasi	 Unit Unit Unit	 18 - -	 21 - -	 21 1 1	 21 - -
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	2.533	2.295	4.436	4.014
3.	Upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	kasus	994	956	1.197	1.186
4.	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	60	35,45	60	35,45
5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100

Sumber: Dinsos 2017

Penyediaan panti jompo dan panti rehabilitasi milik pemerintah daerah belum dapat terealisasi pada tahun anggaran 2017. Penyediaan panti tersebut belum dapat terealisasi pada tahun anggaran 2017 dikarenakan penyediaan panti berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa penyediaan dan pengelolaan panti menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.

Pada tabel 4.95 diatas menunjukkan untuk persentase capaian indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2017 sedikit lebih rendah dibanding tahun 2016. Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 4.014 orang dari target 4.436 orang atau sekitar 90,48%. Sedangkan capaian ditahun 2016 yaitu jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sebesar 2.295 orang dari target 2.533 orang atau sekitar 90,60%.

Capaian indikator upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2017 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Pada tahun 2017 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 1.186 kasus dari target 1.197 kasus atau sekitar 99,08%. Sedangkan capaian pada tahun 2016 dengan jumlah kasus yang ditangani sekitar 956 kasus dari target 994 kasus atau sekitar 96,16%.

Persentase realisasi para penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial menerima Jaminan Sosial masih rendah sekitar 35,45%. Masih rendahnya realisasi dikarenakan kuota jaminan sosial bagi para

penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang diberikan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia masih sedikit jika dibandingkan dengan sasaran yang seharusnya menerima jaminan sosial. Pada tahun 2017, kuota jaminan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi para penyandang cacat fisik dan mental sebanyak 25 orang, sedangkan sasaran berjumlah 30 orang. Kuota jaminan sosial bagi lanjut usia tidak potensial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebanyak 92 orang, sedangkan sasaran yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 300 orang. Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak produktif yang menerima jaminan sosial sebanyak 117 orang. Sedangkan sasaran yang seharusnya menerima jaminan sosial sebanyak 330 orang sehingga capaian persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak produktif yang telah mendapatkan jaminan sosial cukup rendah yakni sebesar 35,45%.

Penyaluran bantuan bagi korban bencana alam (banjir, angin puting beliung) dan bencana sosial (kebakaran) pada tahun 2017 capaiannya mencapai 100%. Pada tahun 2017 sasaran masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam atau bencana sosial yang berhak mendapatkan bantuan selama masa tanggap darurat sebanyak 3.544 jiwa dan semuanya diberikan bantuan selama masa tanggap darurat.

Penanganan bencana alam merupakan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada 2017 di antaranya mengirimkan TAGANA untuk mengikuti Pemantapan Shelter (Manajemen Pengungsi) Korban Bencana Alam di Palangka Raya, Kegiatan Pemantapan Petugas Psikososial Korban Bencana Alam di Palangka Raya, Pertemuan Penyusunan dan Pelaporan Logistik Korban Bencana di Palangka Raya, dan Kegiatan Rekruitmen Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Muda pada Tanggal 17 – 10 Maret 2017, serta kesiapsiagaan yang sifatnya pra bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana) maupun pasca bencana lainnya.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.277.329.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.169.348.813 atau 95,08%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.187 Program Urusan Sosial Tahun Anggaran 2017

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	579.380.500	557.295.883	96,08	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	12	12	Keg
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	232.616.000	228.871.000	98,39	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3		
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	24.200.000	24.112.000	99,64	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan disiplin disiplin aparatur	1	1	
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	54.096.000	54.091.005	99,99	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.461.000	9.461.000	100	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	
6.	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtrn Sosial (PMKS) lainnya	470.225.000	464.973.300	98,88	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pemberdayaan fakir miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	2	2	
7.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	363.220.000	311.108.100	85,65	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	4	4	
8.	Program pembinaan anak terlantar	113.500.000	110.941.375	97,75	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pembinaan anak terlantar	1	1	
9.	Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma	53.555.000	50.799.000	94,85	100	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia anak yang mengalami masalah keterlantaran	1	1	

10.	**Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	**377.075.500**	**353.696.150**	**93,8**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	**5**	**5**	

Sumber : LKPJ, 2017

Adapun capaian SPM dan target SPM pada urusan sosial di Kabupaten Kowaraingin Barat sebagai berikut:

Tabel 2.188 Capaian dan target SPM pada urusan Sosial

No.	Urusan	Jenis SPM	Capaian 2017	Target 2019
1	Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	0 %	0 %
		b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	15 %	30 %
		c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	0 %	0 %
		d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	0 %	0 %
		e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	100 %

c) Urusan Kebudayaan

a) Kondisi Umum

Awalnya Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah tujuan transmigrasi yang digalakkan pemerintah pada tahun 1980 an. Dari program transmigrasi ini, warga pendatang dari berbagai daerah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan menetap hingga saat ini. Saat ini penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras, yang telah berasimilasi dengan sangat baik.

Keberagaman suku dan ras penduduk ini tentunya juga menyebabkan keberagaman seni dan budaya yang berkembang. Masing-masing budaya terpetakan dengan sangat baik. Kesenian yang bekembang di suatu kecamatan biasanya juga merefleksikan dominasi kesukuan yang mendiami wilayah tersebut.

Di Kecamatan Arut Selatan sebagai ibukota kabupaten, kesenian yang berkembang didominasi oleh budaya dengan ciri khas Melayu, yang merupakan asal usul Kesultanan Kotawaringin. Terdapat 105 grup/sanggar kesenian yang sudah terdata dan tersebar dibeberapa kecamatan, terdiri dari kesenian hadrah, rebana dan tari tradisional dayak pedalaman dan seni tradisional daerah lain di nusantara seperti kesenian Sunda, Padang dan Jawa. Di Kecamatan Arut Selatan berjumlah 37 sanggar kesenian, Kecamatan Kumai berjumlah 24 sanggar kesenian, Kecamatan Pangkalan Lada berjumlah 19 sanggar kesenian, Kecamatan Pangkalan Banteng berjumlah 12 sanggar kesenian, Kecamatan Arut Utara berjumlah 5 sanggar kesenian serta Kecamatan Kotawaringin Lama berjumlah 8 sanggar kesenian. Pergelaran kesenian merupakan bagian dari kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang melekat dalam kehidupan. Misalnya untuk memperingati tahun baru hijriyah di adakan bersih desa dan pagelaran wayang. Kegiatan berkesenian biasanya ditampung di gedung serbaguna milik desa ataupun di lapangan. Dengan demikian, dapat diasumsikan masing-masing desa di Kecamatan Pangkalan Lada memiliki fasilitas seni.

Sedangkan benda/situs cagar budaya yang sudah terinventarisir terdapat 18 benda/situs cagar budaya yang tersebar di beberapa Kecamatan. Di Kecamatan Arut Selatan terdapat 5 buah benda/situs cagar budaya, Kecamatan Kumai terdapat 6 buah benda/situs cagar budaya, Kecamatan Arut Utara terdapat 4 buah benda/situs cagar budaya dan Kecamatan Kotawaringin Lama terdapat 3 buah benda/situs cagar budaya.

Tabel 2.189 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11 kali	4	11	-	-
2.	Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	-	-
3.	Jumlah group kesenian / Sanggar Seni	105	43	150	105	70
4.	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-
5.	Benda / situs cagar budaya	18	33	18	18	100

Sumber: Setda 2017

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal maupun nusantara. Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global. Langkah yang bisa ditempuh adalah:

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan;
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial;
3. Memberikan dukungan dan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional.

Di bidang keagamaan, terdapat kegiatan pelayanan ibadah haji dengan fasilitasi keberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari Kota Pangkalan Bun menuju Kota Palangka Raya sebanyak 148 orang yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, kegiatan peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan dalam bentuk safari Radaman untuk mempererat tali silaturahim antara Bupati Kotawaringin Barat bersama dengan masyarakat di 6 (enam) kecamatan.

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal maupun nusantara. Langkah yang bisa ditempuh khususnya dalam bidang keagaman di Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesra adalah mendukung, memfasilitasi dan menyemarakkan setiap kegiatan keagamaan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Tabel 2.190 Capaian Sasaran Pelayanan Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan	40%	40%	100%

Sumber: Setda 2017

Pada tahun 2017, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan kegiatan fasilitasi di bidang keagamaan antara lain fasilitasi/ pelayanan dalam pemberangkatan dan pemulangan calon/ jamaah haji sejumlah 148 orang serta melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus dialog keagamaan antara bupati dengan tokoh agama dan tokoh mmasyarakat yang berada di

Kecamatan Arut Selatan, Arut Utara, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Kotawaringin Lama.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah (Setda) dengan total Belanja Langsung Rp. 2.944.796.000 dan terealisasi Rp. 2.786.347.503 atau 94,62%. Rinciannya, Dikbud sebesar Rp 2.360.541.000 dan terealisasi Rp. 2.232.312.503 atau 94,57%. Sedangkan Bagian Kesra Setda sebesar Rp. 584.255.000 dan terealisasi sebesar Rp. 554.035.000 atau 94,82%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.191 Program Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
DISDIKBUD		**2.360.541.000**	**2.232.312.503**	**94,57**	**100**	**-**			
1.	**Program pengelolaan kekayaan budaya**	**919.361.000**	**866.167.000**	**94,21**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengelolaan kekayaan budaya**			
2.	**Program pengelolaan keragaman budaya**	**1.441.180.000**	**1.366.145.503**	**94,79**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengelolaan keragaman budaya**			

Sumber : LKPJ, 2017

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
SETDA		**584.255.000**	**554.035.000**	**94,82**	**100**	**-**			
1.	**Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama**	**448.205.000**	**448.205.000**	**93,48**	**100**	**Terciptanya pelayanan ibadah haji yang prima**	**1**	**1**	**Keg**
2.	**Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai- nilai keagamaan**	**136.050.000**	**135.055.000**	**99,27**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan**	**6**	**6**	**lokasi**

Sumber : LKPJ, 2017

Pencapaian kinerja Dikbud dalam mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kebudayaan adalah:

1. Meningkatnya motivasi masyarakat untuk melestarikan upacara adat hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan upacara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2017;
2. Terinventarisasinya benda cagar budaya yang bergerak maupun tidak bergerak sehingga memudahkan dalam upaya pelestariannya.

Pencapaian kinerja output dan outcome Bagian Kesra Setda dalam mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kebudayaan adalah:

3. Pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya ikatan tali silaturahim antara Pemerintah Daerah, Ulama dan Masyarakat di 6 (enam) Desa di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Bar

2.4.23 Urusan Statistik

a) Kondisi Umum

Data yang lengkap, obyektif dan terpercaya diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan. Untuk memperoleh data yang maksimal, metode statistik perlu digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Statistik adalah

data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Asas yang perlu menjadi pedoman penyelenggaraan statistik adalah asas keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran terhadap penyediaan data statistik yang handal dan terpercaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, statistik terdiri atas : Statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) sepenuhnya menyelenggarakan statistik dasar. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bersama BPS. Adapun statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat, baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya, baik secara mandiri atau bersama dengan BPS.

Terkait dengan urusan statistik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat, saat ini terdapat beberapa isu strategis. Pertama, adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan menyebabkan data statistik yang dibutuhkan masyarakat semakin beragam. Kedua, berbagai data yang dihimpun oleh BPS, memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan di luar BPS. Ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berdampak terhadap perkembangan kegiatan statistik. Keempat, adanya era globalisasi yang ditandai pesatnya arus informasi, menuntut peranan informasi statistik bagi pemerintah dan masyarakat.

Tabel 2.193 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik
Tahun 2016 – 2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017		
				Target	Realisasi	% Realisasi
DISKOMINFO						
1	Cetak buku statistik	buku		50	50	100
2	Portal statistik	web		1	1	100

Sumber : Diskominfo 2017

Pada tahun anggaran 2017 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Daerah mengalokasikan anggaran untuk penggandaan buku statistik sebanyak 50 buku, dan portal pengelolaan data statistik, sedangkan layanan

data statistik melalui portal baru bisa di layani pada tahun 2018 karena pengadaan dan peralatan pendukung lainnya baru dilaksanakan pengadaannya pada anggaran perubahan TA 2017.

b) Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian belum ada program/kegiatan karena Dinas baru di bentuk. Urusan Kearsipan

a) Kondisi Umum

Arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting yang strategis, meliputi penyajian informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, menunjang proses perencanaan, mendukung pengawasan. Selain berguna sebagai sumber informasi, arsip dapat menjadi alat pembuktian, alat untuk kepentingan politik dan ekonomi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Banyak proses pembangunan yang terhambat karena hilangnya salah satu arsip sebagai alat pembuktian. Belajar dari berbagai pengalaman yang terjadi beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa kearsipan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arsip merupakan bukti konkrit yang akan menjelaskan suatu peristiwa.

Perlakuan terhadap arsip di masa sekarang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pengelolaan arsip yang sistematik akan mengendalikan pertumbuhan arsip yang semakin hari semakin menumpuk dengan semakin kompleksnya kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mengembangkan sistem kearsipan dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dan otomasi kearsipan. Tindak lanjut dari penerapan teknologi informasi adalah dengan penyediaan khazanah arsip dalam bentuk digital yang dapat diakses masyarakat secara online. Pengelolaan arsip secara eletronik ini perlu mendapat dukungan dana yang memadai. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertanahan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
i. Membantu percepatan penyelesaian masalah hukum berdasarkan ketersediaan bukti autentik, lengkap dan terpercaya;
j. Membantu keutuhan, keselamatan dan kelestarian arsip yang merupakan memori daerah sebagai bagian dari memori kolektif bangsa dan warisan budaya nasional bangsa.

Terkait dengan indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.194 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator	Capaian 2016	2017			Ket
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1.	Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	1. Depot Arsip 2. Unit Kearsipan
2.	Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan	-	-	-	-	Belum Ada
3.	Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis	5	2	1	100	

No.	Indikator	Capaian 2016	2017			Ket
			Target	Realisasi	% Realisasi	
4.	Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)	4:36	5:36	5:36	5:36	
5.	Arsip audio visual	763	25	30	120	
6.	Arsip Foto/Album	279	21	36	171	
7.	Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa	21	21	21	100	
8.	Sosialisasi kearsipan	2	2	2	100	
9.	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	38.880	250	300	120	
10.	Jumlah Arsip Statis/Vital yang dikelola	1.014	2.000	311	15	

Sumber: DPK 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 130.801.000 dengan realisasi sebesar Rp 129.131.000 atau 98,37%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kearsipan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.195 Program Urusan Kearsipan

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**130.801.000**	**129.131.000**	**98,73**	**100**				
1	**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**	**102.311.000**	**100.641.000**	**98,37**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program perbaikan sistem administrasi kearsipan**	**4**	**4**	**keg**
2	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah**	**9.750.000**	**9.750.000**	100	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah**	**2**	**2**	**keg**
3	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**	**4.800.000**	**4.800.000**	**100**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan**	**1**	**1**	**Keg.**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Keuangan							
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
						prasarana kearsipan			
4.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	5.400.000	5.400.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kualitas pelayanan informasi	2	2	Keg.

Sumber : LKPJ, 2017

2.4.24 Urusan Perpustakaan

a) Kondisi Umum

Perpustakaan memegang peran penting dalam membantu proses akselerasi pembangunan bangsa, terutama dalam mencerdaskan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan sumber belajar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembudayaan gemar membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu. Selanjutnya, pemerintah baik di pusat maupun di daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Sebagai pusat sumber informasi, perpustakaan semestinya menjadi sarana alternatif utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap informasi. Masyarakat yang haus informasi dapat memanfaatkan perpustakaan untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Namun, kenyataan di lapangan kondisi gemar membaca masyarakat belumlah menggembirakan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyatakan minat atau budaya membaca buku di kalangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, terutama di daerah

terpencil atau desa-desa hingga saat ini masih rendah atau kurang menggembirakan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengembangkan pelayanan kepada pengunjung perpustakaan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah koleksi bahan pustaka, baik melalui pengadaan langsung ataupun gerakan hibah buku;
2. Menyediakan ruangan sirkulasi;
3. Menyediakan layanan ruang baca anak;
4. Menyediakan internet/*wifi* gratis;
5. Menyediakan layanan *audio visual*;
6. Menyediakan layanan ruang baca di tempat;
7. Menyediakan layanan referensi;
8. Kelas Berbagi (*workshop photografy*, kelas kecantikan, belajar bersama);
9. Layanan wisata pustaka;
10. Layanan mendongeng/ *story telling* untuk anak usia tk;
11. Layanan mobil perpustakaan keliling (mpk);
12. Layanan pinjam pakai bahan pustaka;
13. Layanan pustaka digital;
14. Layanan bimbingan pemakai/pemustaka;
15. Magang tenaga teknis perpustakaan dan kearsipan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memajukan urusan perpustakaan pada Tahun 2017 meliputi:

1. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, yaitu dengan mengadakan layanan *story telling* (mendongeng) untuk anak TK, Kegiatan gerakan pemasyarakatan minat baca, dan Kegiatan dalam rangka Hari gerakan nasional membaca;
2. Pengembangan minat dan budaya baca, yaitu dengan membuka layanan setiap hari sampai pukul 21.00 WIB, mengadakan lomba bercerita tingkat kabupaten, kegiatan teknikal meeting, mengadakan, dan memberikan layanan kelas berbagi untuk masyarakat;
3. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, yaitu dengan melakukan Kegiatan sosialisasi program Perpuseru berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kegiatan strategi pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca, Kegiatan pelatihan komputer

dasar dan IT begi pengelola perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca, kegiatan *Peer Learning Meeting* (PLM) dan kegiatan *stakeholders meeting*;

4. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca, yaitu dengan kegiatan MPK ke sekolah/desa/kelurahan yang jauh dari Perpustakaan Umum Daerah;
5. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, yaitu dengan mengikuti Kegiatan pameran Kobar ekspo dan mengadakan acara peluncuran koleksi buku baru tahun 2017;
6. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, yaitu pengadaan langsung buku-buku perpustakaan, yang diharapkan dengan bertambahnya bahan pustaka akan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka dan juga akan meningkatkan jumlah pemustaka (anggota baru, pengunjung dan peminjam buku);
7. Monitoring, evalusi dan pelaporan, yaitu melakukan menitoring dan evaluasi kepada perpustakaan desa/kelurahan yang telah mengikuti Bimtek Pengeolaan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh DPK Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Perawatan bahan pustaka, yaitu kegiatan untuk memelihara dan merawat koleksi bahan pustaka agar tidak rusak.

Terkait dengan Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.196 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator	Capaian s/d 2016	2017		
			Target	Realisasi	% Realisasi terhadap target
1.	Jumlah perpustakaan/tahun	14	5	5	100
2.	Jumlah anggota perpustakaan/tahun	6.257	2.000	1.599	80
3.	Jumlah pengunjung ke DPK/tahun	93.737	28.000	124.582	445
4.	Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Kobar/tahun	93.737	28.000	250.292	893,90
4.	Jumlah peminjam/tahun	24.814	3.000	13.158	438
5.	Jumlah koleksi bahan pustaka/tahun (aset dan hibah)	31.411	2.000	4.998	249
6.	Judul buku (aset dan hibah)	18.448	-	1.766	100

Sumber: DPK 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.111.560.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.075.901.681 atau 98,31%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perpustakaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.197 Program Urusan Perpustakaan

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**2.111.037.000**	**2.075.901.681**	**98,31**	**99,92**				
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**768.646.500**	**736.687.253**	**98,02**	**99,84**	**Terlaksanany a kegiatan pada program pelayanan adminitrasi perkantoran**	**13**	**13**	**Keg**
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**520.444.000**	**519.561.217**	**99,83**	**100**	**Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**5**	**5**	**Kegiatan**
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**24.700.000**	**24.200.000**	**97,98**	**97,98**	**Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur**	**1**	**1**	**Keg**
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**107.000.000**	**101.509.210**	**94,87**	**100**	**Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**1**	**1**	**Keg**
5	**Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**8.708.250**	**8.514.000**	**97,77**	**100**	**Terlaksanany a kegiatan pada program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**3**	**3**	**Keg**

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
6	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	699.145.850	685.430.001	98,04	100	Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	9	9	Keg

Sumber : LKPJ, 2017

2.5 Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

2.5.1 Urusan Kelautan Dan Perikanan

a) Kondisi Umum

Pembangunan subsektor kelautan dan perikanan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Subsektor kelautan dan perikanan adalah salah satu pendukung usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan pengganggguran.

Oleh karena itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain tetap menggiatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, juga perlu didukung upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 178 km sehingga potensi dari penangkapan di perairan laut cukup besar. Di samping itu, juga terdapat sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya. Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua kecamatan. Usaha untuk meningkatkan perikanan budidaya perlu terus digalakkan untuk mengurangi ketergantungan dari perikanan nelayan. Produksi perikanan secara keseluruhan pada tahun 2017 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 20.813,94 ton.

Produksi ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih bertumpu pada usaha penangkapan ikan, yaitu perairan laut dan perairan umum (sungai, danau, rawa). Peningkatan produksi ikan perairan umum berhubungan dengan

permintaan pasar yang meningkat dan sumberdaya perairan umum yang potensial. Maka perlu adanya peningkatan dan revitalisasi pembangunan perikanan melalui pengembangan sarana-prasarana produksi perikanan.

Dalam perdagangan skala besar, sektor ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan nilai ekspor. Padahal dilihat dari potensi yang ada, sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menunjang pemasukan devisa negara terutama dari perikanan laut.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih tertinggal perlu dilakukan, terutama di kawasan perairan umum dan pantai. Hal tersebut dilakukan guna peningkatan hasil usaha dan pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain hal tersebut diatas, perlu juga dilakukan perlindungan dan pengembangan reservasi ikan (sungai). Pengukuran capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.198 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator	2016	2017		
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Target
1.	Produksi perikanan (ton)	19.922,39	20.149,50	20.813,94	103,29
2.	Produksi Perikanan tangkap (ton)	12.050,40	14.332,50	15.851,87	110,60
	a. Perairan Laut	10.874,40	12.403,13	12.965,38	104,53
	b. Perairan Umum	3.918,30	1.929,38	2.886,49	149,607
3.	Produksi perikanan budidaya (ton)	5.129,69	5.817	4.962,07	85,30
	a. Budidaya Air Payau	918,20	1.000	970,29	97,03
	b. Budidaya Air Tawar	3.811,16	3.959	3.991,78	100,82
	c. Budidaya Perairan Laut	400,33	858	-	-
4.	Rata-rata konsumsi ikan per orang/tahun (kg)	43,5	45,0	45,0	100
5.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan (%)	14,05%	15,00%	20.19**	134,6%

Sumber : Dinas Perikanan 2017

Berdasarkan tabel di atas, indikator yang ada mengalami kenaikan produksi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan perubahan iklim el nino pada tahun 2017 tidak sepanjang tahun 2016 yang menyebabkan beberapa fisik lokasi rawa atau danau yang kering/luasan berkurang. Sedangkan untuk perairan laut kondisi alam tidak mengurangi/mengganggu aktivitas penangkapan ikan.

Jumlah kapal penangkapan ikan perairan laut terdiri dari 195 perahu tanpa motor, 980 kapal ukuran 0 – 5 GT, 134 kapal ukuran 5 - 30 GT, dan 5 kapal

ukuran lebih dari 30 GT. Jumlah kapal penangkapan ikan di perairan umum terdiri dari 424 buah perahu tanpa motor dan 583 buah motor tempel.

Alat tangkap perairan laut terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 879 buah, jaring tiga lapis sebanyak 796 buah, jaring insang hanyut sebanyak 318 buah, purseine sebanyak 53 buah, rawai sebanyak 210 buah, serok sebanyak 65 buah, alat penangkap kerang 25 buah, bubu 170 buah lain-lain sebanyak 115 buah. Alat tangkap perairan umum terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 632 buah, bubu sebanyak 460 buah, pancing sebanyak 370 buah, rawai sebanyak 680 buah, jala tebar sebanyak 313 buah, sero sebanyak 40, garpu tomba, dan lain-lain 205 buah.

Potensi usaha budidaya tambak tahun 2017 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 35.200 ha. Dari luasan tersebut, yang sudah diusahakan dan aktif beroperasi seluas 93,63 ha atau sebanyak 362 Rumah Tangga Perikanan (RTP), terdapat di Kecamatan Kumai seluas 87,43 ha atau 671 unit tambak atau 341 RTP dan Kecamatan Arut Selatan 6,2 ha yang terdiri dari 24 unit tambak atau 21 RTP dengan total produksi 918,2 ton.

Usaha budidaya kolam ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berkembang di 6 (enam) kecamatan terdiri dari Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Kotawaringin Lama, Kumai dan Arut Utara, terdiri dari 1.520 RTP dengan luas areal 44,74 ha dan 3.388 unit. Hasil produksi sebesar 1.900,28 ton terdiri dari ikan mas, nila, lele, gurame, gabus dan patin.

Usaha budidaya keramba dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di sepanjang daerah aliran sungai Arut dan Lamandau. Areal yang telah dimanfaatkan sebesar 12,90 ha atau sebanyak 7.662 unit. Jumlah hasil produksi sebesar 1.910,88 ton terdiri dari ikan nila, patin, mas, jelawat, toman, baung, bawal, batutu dan ikan lainnya.

Usaha budidaya rumput laut pada tahun 2017 tidak ada penambahan di sebabkan tidak ada kegiatan pengadaan rumput laut pada anggaran belanja. Pada tahun 2016, budidaya rumput laut hanya di Desa Teluk Bogam dengan jumlah 60 RTP, luas areal 10 ha atau sebanyak 600 unit. Jumlah produksi sebesar 400,33 ton basah. Bila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan pembudidaya kekurangan bibit rumput laut terutama pada musim penghujan. Mereka tidak bisa mempertahankan bibit rumput laut untuk bisa dijadikan bibit setelah musim hujan berakhir.

Adapun untuk usaha budidaya mina padi masih belum dikembangkan. Untuk menyebarluaskan usaha budidaya mina padi, pada tahun 2017 telah dibuat kawasan terpadu pertanian di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Pangkalan Banteng yang mempunyai potensi untuk dikembangkan serta didorong atas keinginan dari masyarakat setempat.

Sasaran produksi usaha budidaya ikan pada tahun 2017 sebesar 5.050 ton dan mencakup Rumah Tangga Perikanan (RTP) sebanyak 1.750 RTP dengan rincian jumlah unit usaha budidaya tambak 800 ha dengan produktivitas 500-1.000 kg/ha/tahun, kolam ikan 140 ha dengan produktivitas 10.000-20.000 kg/ha/tahun, karamba 2.850 unit dengan produktivitas 400-1.000 kg/unit/tahun.

Perkembangan usaha perikanan sasaran pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum masih sangat minim sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah unit pengolahan, pabrik es dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan. Namun demikian dalam beberapa tahun ini usaha untuk meningkatkan mutu produk hasil perikanan serta perluasan pasar ikan telah banyak diusahakan, antara lain:

1. Pembangunan gedung outlet pemasaran ikan;
2. Pengadaan alat penepung ikan, alat penghancur es, ice storage, long pan dan ice can;
3. Pengadaan boks dingin (cool box) untuk menjaga rantai dingin;
4. Pembangunan sentra pemasaran;
5. Peralatan outlet pemasaran ikan.

Pengendalian mutu produk hasil perikanan sangat bergantung pada sarana rantai dingin. Hal ini karena produk perikanan merupakan jenis produk yang mudah busuk (ferisable food) dimana perlu terjaga rantai dingin dari pasca penangkapan/pasca budidaya hingga sampai ke konsumen.

Pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 difokuskan pada pelaksanaan peningkatan produksi budidaya dan pemberdayaan nelayan kecil dengan penerapan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan penertiban izin usaha perikanan.

Salah satu program pengelolaan sumberdaya perikanan yang sangat mendesak adalah pembentukan daerah suaka perikanan, dimana hal ini sangat penting guna menjaga dan melestarikan sumberdaya laut dan perikanan dari kerusakan yang tidak diinginkan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah di susun

zonasi/daerah sumberdaya perikanan. Beberapa potensi sumberdaya perikanan yang dapat dikelola menjadi daerah suaka antara lain :

1. Gosong Senggora;
2. Gosong Sepagar;
3. Gosong Sebogor-Lubang Buaya;
4. Danau Masorayan;
5. Danau Seluluk;
6. Danau Terusan;
7. Danau Gatal Kiri-Kanan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.535.793.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.477.042.586 atau 94,33%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perikanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.199 Program Dinas Perikanan

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
Dinas Perikanan dan Kelautan		**9.535.793.000**	**7.477.042.586**	**94,33**	**96,86**				
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**1.335.256.500**	**1.148.186.103**	**85,99**	**91,66**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran**	**10**	**10**	keg
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**1.287.385.500**	**1.151.646.000**	**89,46**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**7**	**7**	**keg.**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**80.627.950**	**80.627.950**	**100**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur**	**1**	**1**	**keg.**
4.	**Program peningkatan kapasitas**	**123.500.000**	**113.747.379**	**92,10**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada**	**1**	**1**	keg.

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	sumber daya aparatur					**program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**			
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**8.372.500**	**7.355.000**	**87,85**	**99,88**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**2**	**2**	keg.
6.	**Program pengembangan budidaya perikanan**	**4.245.780.050**	**3.013.544.013**	**70,98**	**95,22**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengembangan budidaya perikanan**	**3**	**3**	keg.
7.	**Program pengembangan perikanan tangkap**	**1.569.365.000**	**1.141.800.113**	**72,76**	**88,16**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengembangan perikanan tangkap**	**3**	**3**	keg.
8.	**Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	**885.505.500**	**820.136.028**	**92,62**	**99,98**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	**4**	**4**	keg.

Sumber : LKPJ, 2017

Pada tahun 2017, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran DAK sebesar Rp. 2.098.748.000,- (dua millar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan program pengembangan budidaya perikanan dan program pengembangan perikanan tangkap. Pelaksanaan program pengembangan budidaya perikanan diwujudkan melalui kegiatan:

1. Percontohan tambak budidaya intensif udang vaname untuk Pokdatan Ratik Jaya Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kumai;

2. Perencanaan percontohan tambak budidaya intensif udang vaname untuk Pokdatan Ratik Jaya Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai dan percontohan budidaya ikan nila di kolam;
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan.

Dan pelaksanaan program pengembangan perikanan tangkap diwujudkan melalui kegiatan :

1. Pembangunan kapal penangkap ikan ukuran < 3 GT lengkap alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
   - KUB Mina Berkah Desa Teluk Bogam
   - KUB Berkat Mupakat Desa Teluk Bogam
   - KUB Mina Bahari Desa Sebuai
   - KUB Mitra Mandiri Desa Teluk Pulai
   - KUB Kuda Laut Desa Teluk Bogam
2. Perencanaan kapal penangkap ikan ukuran < 3 GT
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.200 Realisasi Program dan Kegiatan DAK pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Real. Fisik	Outcome/Output	Ket.
		(Rp)	%	(%)		
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.319.248.000	186.225.000	14,12	40,67	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	
1) Percontohan tambak budidaya intensif udang vaname untuk Pokdatan Ratik Jaya Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai	1.076.548.000	-	-	-		Tidak terlaksana
2) Perencanaan Percontohan tambak budidaya intensif udang vaname untuk Pokdatan Ratik Jaya Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai	29.000000 187.200.000	- 186.225.000	- 99,48	- 100		
3) Percontohan budidaya ikan nila di kolam	26.500.000	-	-	22,00		
4) Monitoring evaluasi dan Pelaporan						
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	779.500.000	755.598.000	96,93	100		

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Real. Fisik	Outcome/Output	Ket.
		(Rp)	%	(%)		
1) Pembangunan kapal penangkap ikan ukuran < 3 GT lengkap alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan - KUB Mina Berkah Desa Teluk Bogam - KUB Berkat Mupakat Desa Teluk Bogam - KUB Mina Bahari Desa Sebuai - KUB Mitra Mandiri Desa Teluk Pulai - KUB Kuda Laut Desa Teluk Bogam	738.000.000 20.500.000	732.000.000 20.438.000	99,19 99,70	100 100	-	
2) Perencanaan kapal penangkap ikan ukuran < 3 GT	21.000.000	-	-	31,60		
3) Monitoring evaluasi dan pelaporan						

Sumber : LKPJ, 2017

Realisasi DAK tahun anggaran 2017 untuk fisik 62,70% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 938.663.000 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau 44,88% dari pagu DAK 2017 sebesar Rp. 2.098.748.000 (dua milar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Rendahnya realisasi di sebabkan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu:

1. Perencanaan percontohan tambak budidaya intensif udang vaname untuk Pokdatan Ratik Jaya Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kumai sebasar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan pembangunan tambak budidaya udang vaname insentif (plastik mulsa) untuk Pokdatan Cahaya Baru dan Pokdatan Ratik Jaya Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai sebesar Rp. 1.076.548.000 (satu miliar tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kendala dan hambatan setelah diverifikasi dinas ada satu kelompok yaitu cahaya baru yang kepengurusannya tidak di ketahui/bubar. Selanjutnya, dinas mengajukan revisi redaksional ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan merubah sasaran kelompok cahaya baru ke BBAP (Balai Benih Air Payau) dan masuk pada perubahan anggaran 2017. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena nilai

kontraktual harus masuk per 31 Agustus 2017. Sedangkan revisi kegiatan masuk pada perubahan anggaran 2017 pada bulan Oktober 2017;

2. Monitoring evaluasi dan pelaporan. Kendala dan hambatan terletak pada perbedaan aturan antara kementerian teknis dan aturan keuangan. Pada satu sisi, juknis DAK Kementerian Kelautan Dan Perikanan memperbolehkan menganggarkan kegiatan monitoring. Pada sisi lain, PMK 50 tahun 2017 tidak bisa merealisasikan kegiatan yang tidak kontraktual sehingga monitoring, evaluasi dan pelaporan tidak terealisasi sebesar Rp.47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Meski demikian, kegiatan fisik monitoring kegiatan tetap dilaksanakan.

2.5.2 Urusan Pertanian

1. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

a) Kondisi Umum

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain sebagai penyedia bahan pangan baik nabati maupun hewani, sektor ini berperan dalam rangka penyediaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan sumber pendapatan masyarakat di perdesaan, sekaligus pemenuhan input bagi sektor industri pengolahan. Kontribusi terhadap pembentukan PDRB terbesar jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Pembangunan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan sub-sektor pendukungnya menjadi tanggung jawab tiga pilar, yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pembangunan sektor ini diarahkan pada terwujudnya pertanian yang bersifat komersial dan efisien, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengetahuan dan teknologi tepat guna, yang berimplikasi pada peningkatan daya saing, pendapatan dan nilai tambah produk pertanian.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2017

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Alokasi anggaran Belanja Langsung urusan Pertanian sebesar Rp. 25.990.220.500 dan terealisasi sebesar

Rp.23.142.714.891 atau 89% yang terdiri dari alokasi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017 sebesar Rp. 16.154.140.500 dan terealisasi sebesar Rp. 14.134.134.980 atau 87,50%. Alokasi pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp. 113.800.000 dan terealisasi sebesar Rp. 95.091.471 atau 83,56%. Sedangkan alokasi Belanja Langsung pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2017 sebesar Rp. 9.722.280.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.913.488.440 atau 87,58%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.201 Program Urusan Pertanian
yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultra dan Perkebunan

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Keuangan							
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
Dinas TPHP		**16.154.140.500**	**14.134.134.980**	**87,50**	**96,60**				
a.	Belanja tidak langsung	5.036.765.000	4.868.221.944	96,65	100	Meningkatnya kesejahteraan aparatur			%
b.	Belanja langsung	11.117.375.500	9.265.913.036	83,35	93,19	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	10	10	%
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**1.319.116.436**	**1.154.675.979**	**87,53**	**96,46**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran**	**12**	**12**	**keg.**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**1.112.871.000**	**943.395.000**	**84,77**	**100**	**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**10**	**10**	**%**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**79.595.000**	**77.799.500**	**97,74**	**100**	**Tingkat kepatuhan aparatur**	**100**	**100**	**%**
4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**268.250.000**	**194.975.473**	**72,68**	**100**	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100**	**100**	**%**
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**9.964.500**	**2.859.500**	**28,78**	**100**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100**	**100**	**%**

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
6.	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	4.055.034.100	3.765.761.621	92,87	97,81	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	28,46	26,94	Kwintal / Ha
7.	Program peningkatan kesejahteraan petani	877.625.000	754.698.742	85,99	100	Meningkatnya SDM petani/pelaku agribisnis	70	70	%
8.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	163.975.000	137.190.575	83,67	100	Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan	10	10	%
9.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	1.823.376.800	1.170.762.069	64,21	73,05	Meningkanya penggunaan teknologi pertanian/perkebu an	10	10	%
10.	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1.953.786.250	877.437.977	44,91	73,53	Meningkatnya produktivitas pertanian/ perkebunan	10	10	%

Sumber : LKPJ, 2017

Tabel 2.202 Program Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan

No	Program/Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
DKP									
1.	Program peningkatan kesejahteraan petani	113.800.000	95.091.471	83,56	88,47	Tercapainya peningkatan kemampuan lembaga tani	100	100	%

Sumber : LKPJ, 2017

Tabel 2.203 Program Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan yang dilaksanakan oleh DPKH

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
DPKH		9.722.280.000	8.913.488.440	87,58	93,60				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.326.716.700	1.041.046.896	78,47	95,09	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	11	11	keg.
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.448.481.650	1.316.607.623	90,90	91,43	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur bagi pelayanan publik	7	7	Keg.
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	95.550.000	93.960.000	98,34	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.
d.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	132.000.000	96.343.705	72,99	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.110.000	2.727.750	29,94	100	Terlaksananya kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.
f.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	747.640.000	688.792.396	92,13	94,44	Terlaksananya kegiatan pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	2	2	keg.
g.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	2.144.477.650	1.931.112.564	90,05	97,16	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan produksi hasil peternakan	4	4	Keg

Sumber : LKPJ, 2017

Keberhasilan pembangunan pertanian di daerah salah satunya tercermin dari peningkatan produksi komoditas subsektoral (tanaman pangan, hortikultura

perkebunan dan peternakan), peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dari besaran nilai tukar petani yang meningkat dari tahun ketahun.

Capaian ini sejalan dengan terget capaian indikator kinerja pembangunan sektor pertanian dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yang meliputi peningkatan pengembangan aktivitas kelembagaan petani, nilai tukar petani, peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, serta perkembangan luas lahan produktif sehubungan dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan.

Terkait dengan Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.204 Potensi Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Peruntukan	Luas (Ha)	%
1.	Konsesi Kehutanan	565.028	52,54
2.	Konsesi Transmigrasi	28.164	2,62
3.	Kawasan Pengembangan	69.696,95	6,48
4.	Konsesi Budidaya Perkebunan	212.426,46	19,78
5.	Kawasan Non Perkebunan	191.309	17,79
6.	Danau dan Sungai	9.142	0,85
	Jumlah	**1.073.766,41**	**100**

Sumber : DTPHP 2017

Tabel 2.205 Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017		
			Target	Capaian	%
	Pelayanan Urusan Pilihan				
1.	**Pertanian Tanaman Pangan**				
1.1.	***Luas tanam tanaman pangan***				
1.1.1.	Padi sawah (Ha)	4.209	8.453	646	7,64
1.1.2.	Padi ladang (Ha)	746	3.881	166	4,28
1.1.3	Jagung (Ha)	2.438	1.678	601	35,82
1.2.	***Luas Panen Tanaman Pangan***				
1.2.1	Padi sawah (Ha)	4.731	8.030	3.934	48,99
1.2.2	Padi ladang (Ha)	1.296	3.687	732	19,85
1.2.3	Jagung (Ha)	1.171	1.399	2.025	144,75
1.3	***Produktivitas tanaman pangan***				
1.3.1	Padi sawah (Ton/Ha)	3,63	3,79	3,43	90,50
1.3.2	Padi ladang (Ton/Ha)	2,05	2,50	2.01	80,40
1.3.3	Jagung (Ton/Ha)	3,73	3,63	3,87	106,68
1.4	***Produksi tanaman pangan***				
1.4.1	Padi sawah (Ton)	17.174	30.435	13.482	44,30
1.4.2	Padi ladang (Ton)	2.657	7.816	1.472	18,83
1.4.3	Jagung (Ton)	4.368	5.078	7.842	154,43

Sumber: DTPHP 2017

Pada tahun 2017, capaian produksi tanaman pangan strategis yakni padi sawah dan padi ladang mengalami penurunan sebesar 3.692 ton jika dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan produksi padi ini dipengaruhi adanya luasan lahan yang puso atau rusak seluas 137,8 ha pada padi sawah pada tahun 2017. Penyebab lainnya, adanya larangan membakar lahan. Adapun produksi jagung pada tahun 2017 meningkat sangat menggembirakan, yaitu sebesar 7.842 ton pipilan kering (PK) atau naik 170% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 4.368 ton PK. Sedangkan untuk hasil komoditi tanaman pangan lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.206 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Komoditi	2016			2017			+/(-) Produktivitas
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	
1	Kedelai	127	169	1,34	88,3	135	1,39	0,05
2	Kacang Tanah	50	57	1,15	67,4	80	1,17	0,03
3	Kacang Hijau	0	0	0,00	3,1	0	1,00	1,00
4	Ubi Kayu	356,7	4.690	13,15	333,3	4.646	2,60	2,60
5	Ubi Jalar	88	820	9,37	94,4	899	9,40	0,03

Sumber: Dinas TPHP 2017

Produksi kedelai tahun 2017 sebesar 135 ton atau turun 0,05% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 169 ton. Namun, produktivitas kedelai ton per hektare mengalami peningkatan dari 1,34 pada tahun 2016 menjadi 1,39 pada tahun 2017. Kondisi peningkatan produksi tanaman ini disebabkan adanya stimulus yang berikan pemerintah berupa traktor (melalui mekanisasi pengolahan tanah). Selain itu, adanya motivasi petani untuk menanam kedelai dengan alasan harga yang lebih baik dan adanya pemasaran yang lebih jelas di tingkat lapangan. Dukungan dan bantuan pemerintah umumnya akan membuat petani lebih berminat menanam tanaman pangan.

Produksi ubi kayu dan ubi jalar pada tahun 2017 masing-masing sebesar 4.646 ton dan 899 ton. Angka produksi ubi kayu tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,60% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Sedangkan ubi jalar naik sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2016. Untuk komoditi lainnya, yakni kacang tanah, produksinya mengalami kenaikan sebesar 80 ton atau naik 0,03% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Kenaikan produksi

kacang tanah disebabkan banyaknya permintaan dari pasar lokal. Komoditi yang tidak terdapat penanaman adalah kacang hijau karena petani lebih memprioritaskan pada komoditi pangan lainnya seperti kedelai dan jagung.

Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat baru sebagian kecil yang berorientasi pasar karena hasil produksi umumnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan petani sendiri. Selain itu, lahan-lahan pertanian yang baru dikembangkan belum berfungsi secara optimal. Di sisi lain tingginya, laju alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke perkebunan sawit dan karet menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengetahui produksi dan produktivitas tanaman sayur sayuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.207 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman Sayur-Sayuran Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Komoditi	2016			2017			+/(-) Produktivitas (%)
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	
1	Bayam	89	164,8	1,85	74	180	2,43	76
2	Cabe Rawit	156	436,7	2,80	354	518	1,46	191
3	Cabe Besar	57	117,2	2,06	79	143	1,81	114
4	Kacang Panjang	222	555,8	2,50	303	632	2,09	120
5	Kangkung	105	194	1,85	112	418	3,73	50
6	Ketimun	101	454,3	4,50	102	459	4,50	100
7	Sawi	171	381,7	2,23	177	813	4,59	49
8	Terung	155	573,9	3,70	281	857	3,05	121
9	Tomat	87	165,5	1,90	131	581	4,44	43
10	Buncis	87	155,6	1,89	92	284	3,09	61
11	Bawang Daun	82	207,9	2,54	77	212	2,75	92

Sumber : Dinas TPHP 2017

Produktivitas dan produksi tanaman pangan perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah (penyediaan pangan bagi masyarakat di daerah secara mandiri), seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan pangan di dalam negeri. Pembangunan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pertanian. Hal ini akan dapat dicapai melalui perluasan/rehab/optimasi lahan pertanian dan pengamanan produksi pertanian sehingga produksi pertanian dapat ditingkatkan. Peningkatan

mutu dan kualitas produk perlu terus dilakukan dalam rangka perbaikan pengolahan pasca panen dan sistem pemasarannya.

Selain faktor fisik, faktor sumber daya petani dan kelembagaannya juga perlu terus dikembangkan agar petani mampu mengelola usaha taninya secara lebih optimal, mandiri dan lebih baik. Lembaga penyuluh pertanian juga perlu terus didorong fungsi dan perannya dalam rangka pendampingan peningkatan kesejahteraan petani.

Tabel 2. 208 Luas Areal Perkebunan Per Komoditi di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Komoditi	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)
1	Karet	17.907	18.082,50	14.560,30	12.470
2	Kelapa	1.069,52	776,75	738,75	938,75
3	Lada	268,95	297,74	318,64	312,90
4	Kelapa sawit	173.048,34	192.669,23	196.541,30	200.759,35
5	Nilam	-	-	-	-
6	Lain-lain	243,50	226,83	268,51	268,51
	Jumlah	**192.846,56**	**212.083,05**	**212.426,46**	**214.749,51**

Sumber: Dinas TPHP 2017

Tabel 2.209 Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Kategori Kepemilikan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kepemilikan Kebun	2015		2016		2017	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Perkebunan Rakyat	62.236,92	29,35	58.649,26	27,61	58.480	27,03
2	Perkebunan Besar Negara	2.220	1,05	2.220	1,05	2.220	1,02
3	Perkebunan Besar Swasta	147.626,13	69,61	151.557,20	27,61	155.620,25	71,95
Jumlah		**192.846,56**	**212.083,05**	**212.426,46**	**100**	**216.280,25**	**100**

Sumber: Dinas TPHP 2017

Tabel 2.210 Produksi Perkebunan Per Komoditi di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Komoditi	2015 (Ton)	2016 (Ton)	2017 (Ton)	Keterangan
1.	Karet	7.433,42	7.253,40	7.235,00	Karet Kering
2.	Kelapa	267,74	265,45	260,22	Kopra
3.	Lada	162,10	156,49	156,00	Biji Kering
4.	Kelapa sawit	1.096.178,33	2.878.287,21	2.731.511	TBS
5.	Nilam	--	-	-	Brangkasan
6.	Lain-lain	14,59	-	-	

Sumber: Dinas TPHP 2017

Tabel 2.211 Nama Perusahaan Perkebunan yang Beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Perusahaan	Komoditi	Pola Pengembangan	Lokasi Kecamatan
1	PT. Meta Epsi Agro	K. sawit	Plasma (KKPA)	Arsel, Kumai. P. Lada
2	PT. Primasentosa Pratama Putra	K. Sawit	Non PIR	P. Lada
3	PT.Persada Bina Nusantara Abadi	K. Sawit	Non PIR	Arut Utara
4	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	K. Sawit	Non PIR	Arut Utara
5	PT. Gunung Sejatera Ibu Pertiwi	K. Sawit	Non PIR	P.Lada-Arsel
6	PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur	K. Sawit	Non PIR	P.Banteng-Aruta
7	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	K. Sawit	Non PIR	P. Banteng
8	PT. Agro Menara Rahmat	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan
9	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	K. Sawit	Non PIR	P.Lada-Aruta
10	PT. Bumi Langgeng Perdana Trada	K. Sawit	Inti - Plasma	Kumai
11	PT. Bangun Jaya Alam Permai	K. Sawit	Non PIR	P. Banteng- Aruta
12	PT. Mitra Mendawai Sejati	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan, Aruta
13	PT. Satya Kisma Usaha	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan
14	PT. Kalimantan Sawit Abadi	K. Sawit	Non PIR	Arsel, Kolam
15	PT. Sawit Sumber Mas Sarana	K. Sawit	Non PIR	Arsel, Aruta, Kolam
16	PT. Surya Sawit Sejati	K. Sawit	Non PIR	P. Lada, Arsel
17	PT. PTPN XIII	Karet	PIR - SUS	P. Banteng
18	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	K. Sawit	Inti-Plasma	Kotawaringin. Lama
19	PT. Arut Sawit Mandiri	K. Sawit	Inti-Plasma	Aruta
20	PT. Andalan Sukses Makmur	K. Sawit	Inti-Plasma	Kumai

Sumber: Dinas TPHP 2017

Tabel 2.212 Pabrik CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Terpakai (Ton/Jam)
1	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Kec. P. Lada	60	60
2	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kec. P. Lada	60	60
3	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kec. P. Banteng	60	60
4	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	Kec. Arut Utara	45	45
5	PT. Sabut Mas Abadi	Kec. P. Lada	30	30
7	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Kec. Arut Utara	120	120
8	PT. Sawit Sumbermas Sarana-I	Kec. Arut Selatan	90	90
9	PT. Sawit Sumbermas Sarana-II	Kec. Arut Selatan	90	90
10	PT. Kalimantan Sawit Abadi	Kec. Arut Selatan	45	45
11	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	Kec. Kolam	90	60
12	PT. Bumi Langgeng	Kec. Kumai	45	45
13	PT. Surya Sawit Sejati	Kec. Kumai	60	60
14	PT. Mitra Mendawai Putra	Kec. Arsel	60	60

Sumber : Dinas TPHP 2017

Tabel 2.213 Pabrik PKO di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Terpakai (Ton/Jam)
1	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kec. P. Lada	7,5	7,5
2	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kec. P. Banteng	7,5	7,5
3	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Kec. Arut Utara	15,0	15,0
4	PT. Mitra Mendawai Sejati	Kec. Arsel	7,5	7,5

Sumber: Dinas TPHP 2017

Tabel 2.214 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat, Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit Tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Karet		Kelapa		Kelapa Sawit	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Arut Selatan	2.378,50	614,32	91,25	15,62	4293,81	7.121,00
2	Kotawaringin Lama	1.521,00	496,98	92,00	60,12	18.631,38	21.115,83
3	Kumai	2.020,00	465,80	280,00	67,37	6.031,11	9.747,35
4	Arut Utara	1.026,00	152,29	11,50	5,22	1349,00	1.200,00
5	Pangkalan Banteng	6.292,01	2.665,87	128,00	51,92	1431,00	2.732,10
6	Pangkalan Lada	1.890,99	1.116,05	136,00	55,20	13.247,78	26.515,56
Jumlah		**15.128,50**	**5.511,31**	**738,75**	**255,45**	**44.984,08**	**68.431,84**

Sumber: Dinas TPHP 2017

Tabel 2.215 Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Kopi		Lada	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Arut Selatan	23,00	1,4	-	-
2	Kotawaringin Lama	33,75	2,1	130,36	71,3
3	Kumai	22,00	1,0	16,00	6,7
4	Arut Utara	-	-	-	-
5	Pangkalan Banteng	38,00	4,0	86,24	40,7
6	Pangkalan Lada	36,00	1,9	80,30	30,4
Jumlah		**152,75**	**10,4**	**312,90**	**149.1**

Sumber: Dinas TPHP 2017

Tabel 2.216 Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Jambu Mente		Aren	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kotawaringin Lama	-	-	99	-
2	Arut Selatan	-	-	-	-
3	Kumai	14	0,4	-	-
4	Pangkalan Banteng	-	-	-	-
5	Pangkalan Lada	-	-	-	-
6	Arut Utara	-	-	-	-
Jumlah		**14**	**0,4**	**99**	**-**

Sumber: Dinas TPHP 2017

Luas areal dan produksi jambu mente Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing sebesar 14 ha dan 0,40 ton. Jambu mente hanya dibudidayakan di Kecamatan Kumai. Demikian juga dengan tanaman aren, tanaman Aren hanya terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas areal sebesar 99 ha dan produksi 1,90 ton, luasan dan produksi tidak seimbang hal ini dikarenakan pertambahan luas masih belum produksi.

Sebagai salah satu sub sektor andalan, perkebunan perlu lebih didorong dalam upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil. Mengingat produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih dibawah rata-rata produktivitas perkebunan nasional. Disamping itu perlu ada upaya untuk menarik investasi di sektor perkebunan. Investasi di sektor perkebunan memiliki potensi sangat luas, yakni dalam bidang pengembangan industri hilir pengolahan produk turunan dari kelapa sawit dan karet.

Saat ini industri pengolahan produk kelapa sawit baru sebatas *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel Oil (PKO).* Produk turunan sawit masih sangat banyak untuk dikembangkan, seperti *palm stearin, olein,* minyak goreng, *palmitat,* sabun, kosmetik dan bahan kimia lain. Secara umum perlu perhatian serius terhadap kondisi Kecamatan Arut Utara, di mana hampir seluruh *komoditi* pertanian memiliki luasan dan produktivitas yang paling rendah.

Tabel 2.217 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Perkebunan Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator	Capaian 2016	2017		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
A.	***Perkebunan***				
1	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	21,56 (2015)	25,25 (2016)	25,25 (2016)	100
2	Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)	43,05 (2015)	42,81 (2016)	42,81 (2016)	100
3	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US$)		28.920.764 (2016)	28.920.764 (2016)	100
4	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	55.160	55.160	55.160	100
5	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	14	14	14	100

No.	Indikator	Capaian 2016	2017		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
6	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	12.447.807.384	11.500.000.000	7.511.246.815	65,32
7	Kemitraan/Plasma	28.785,91	25.957,91	28.785,91	108,24
B.	***Pengembangan/perluasan areal perkebunan***	212.426,46			
1	Karet	14.560,30	12.470	12.470	100
2	Kelapa sawit	196.541,30	200.759,35	200.759,35	100
3	Kelapa	738,75	938,75	938,75	100
4	Lada	318,60	312,90	312,90	100
5	Lainnya	267,51	268,51	268,51	100
C.	***Produksi komoditi perkebunan***				
1	Karet (lump)	7.253,83	7.235,00	7.235,00	100
2	Kelapa (kopra)	265,45	260,22	260,22	100
3	Kelapa Sawit (Tbs)	2.974.134,28	2.731.511	2.731.511	100
4	Lada (putih/hitam)	156,49	156,00	156,00	100
5	Lainnya	13,63	13,63	13,63	100

Sumber : LKPJ, 2017

b. Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pertanian sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi pertanian tanaman pangan strategis terutama jagung tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016;
2. Meningkatnya produktivitas tanaman sayuran untuk mendorong peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya;
3. Meningkatnya produktivitas perkebunan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya;
4. Terdorongnya perkembangan sentra-sentra produksi yang berskala ekonomi dan berbasis agribisnis melalui kegiatan:
   - Pembangunan 2 buah embung di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan dan Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada;
   - Penyediaan peralatan pasca panen karet seluas 41 Ha, pada Poktan Mekar Bhakti Desa Pangkalan Tiga dan Gapoktan Harapan Makmur di Desa Sidomulyo Kec. Pangkalan Banteng;
   - Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi sebanyak 11 lokasi di desa. (1). Poktan Kruing Jaya Kelurahan Baru Arsel, (2). Poktan Tani Bersatu Kel. Baru (Arsel), (3). Poktan Marsudi Tani Desa P. Dewa (4). Poktan Ngudi Karyo DesaP.Tiga, (5) Poktan Margo Rejo Desa Pangkalan Tiga (6). Poktan Karya Usaha RT. 18 DesaLada Mandala Jaya, (7). Poktan

Berkah Tani Mandiri Desa Amin Jaya, (8). Poktan Cakra Utama Desa Arga Mulya, (9). Poktan Sumber Jaya Desa Amin Jaya, (10). Poktan Gotong Royong Desa Kedipi Atas, (11). Poktan Meranti Utama Desa Purbasari;

- Pemagaran Balai Benih Tanaman pangan sepanjang 1000 meter;
- Pembangunan kebun sawit rakyat dan bantuan herbisida seluas 30 Ha di Poktan Purwo Utomo Desa Bumi Harjo Kec. Kumai (15 Ha), dan Poktan Karya Tani Desa Sungai Pulau (15 Ha);

5. Meningkatnya pengetahuan dan SDM Petani dengan mengikuti kegiatan PENAS XIV KTNA yang pada tahun 2017 diselenggarakan di Aceh;
6. Terpantaunya harga bahan pangan pokok di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui petugas enumerator sehingga dapat mengetahui distribusi pangan dan menjaga kestabilan harga pangan pokok;
7. Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging ternak dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya;
8. Terdorongnya perkembangan sentra-sentra produksi yang berskala ekonomi dan berbasis agribisnis melalui kegiatan:
   - Sentra Produksi Peternakan
     - Peningkatan kelahiran ternak melalui IB 587 ekor;
     - Pembinaan dan pelayanan di sentra IB (18 ULIB);
     - Pengamanan kesehatan ternak 1 tahun.
9. Meningkatnya sikap pengetahuan dan ketrampilan peternak, petugas lapangan dan berkembangnya kelembagaan, melalui:
   a. Peningkatan kapasitas petugas teknis peternakan, manteri tani melalui: optimalisasi RPH, pelayanan IB, pelayanan keswan, dan unit-unit pelayanan lainnya;
   b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak melalui pelatihan pengolahan hasil peternakan, serta pelatihan peternak penggaduh;
10. Terlaksananya pengobatan ternak sehingga kualitas kesehatan ternak dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Pengobatan ternak meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak untuk mendiagnosa penyakit secara klinis, patologis maupun epidemiologis. Kegiatan pengobatan ternak dilakukan secara massal dengan berkoordinasi dengan PPL/petugas teknis di lapangan melalui kegiatan Posyandunak.
    a. Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan rabies sehingga dapat mencegah dan menekan penyakit menular hewan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan pemberian vaksinas anti rabies terhadap anjing

berpemilik dan eliminasi/pemusnahan terhadap anjing liar. Selain itu, kegiatan ini dibarengi juga dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit rabies pada anjing, potensi penularan rabies dari anjing kepada manusia, tindakan pencegahan serta tindakan penanganan apabila terjadi kasus gigitan. Dalam kegiatan vaksinasi anti rabies, jumlah anjing yang divaksin sebanyak 6.689 ekor anjing dengan eliminasi anjing liar sebanyak 53 ekor;

b. Pengambilan otak anjing sebanyak 2 sampel untuk pemeriksaan laboratorium (2 ekor anjing positif rabies). Terlaksananya pengambilan sampel darah sapi sebanyak 243 sampel untuk pemeriksaan BVD, IBR Jembrang dan Bakteriologi 243 Sampel Ulas darah sapi untuk pengujian penyakit parasit darah. Kegiatan pengambilan sampel dan pengujiannya dilakukan untuk dapat mencegah dan menekan kasus penyakit menular ternak;

c. Terlaksananya surveilans penyakit ternak dan pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan sehingga dapat diketahui jenis-jenis penyakit dan sebaran penyakit. Surveilans merupakan kegiatan pengamatan terhadap pola penyakit ternak dengan mengambil sampel serum kemudian dilakukan pemeriksaan/pengujian di laboratorium rujukan. Pada tahun 2017 dilaksanakan pengambilan 243 Sampel serum darah untuk identifikasi penyakit *brucellosis* dan 108 sampel faeses untuk identifikasi parasit sel cerna ternak sapi. Sedangkan untuk unggas dilakukan pengambilan sampel serum ayam sebanyak 101 sampel untuk pengujian terhadap penyakit flu burung. Berdasarkan hasil uji laboratorium pada sampel ternak ruminansia tidak terdapat penyakit ternak yang bersifat *zoonosis*.

d. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah dilaksanakan meliputi pengawasan lalu lintas ternak oleh 4 orang petugas di 2 (dua) lokasi cek point ternak (Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng dan Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai) sehingga termonitor ternak yang keluar/masuk Kabupaten Kotawaringin Barat, pengendalian pemasukan dan pemotongan ternak, pengawasan produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan, pengawasan ternak kurban dan pengawasan perdagangan dan pemotongan ternak unggas. Berdasarkan laporan dari Pos Pemeriksaan Ternak selama tahun 2017 terdapat data pemasukan ternak dan produk asal ternak sebagai berikut:

- Telur Ayam Ras : 3.474 ton
- Sapi : 4.789 ekor
- Kambing : 3.997 ekor
- DOC ayam ras : 62.341 box
- Ayam broiler : 382.926 ekor
- DOD : 880 ekor
- Kuda : 6 ekor

e. Pemotongan ternak sapi yang tercatat di RPH Pangkalan Bun pada tahun 2017 sebanyak 1.979 ekor dan pada Hari Raya Idul Qurban dilaksanakan pemeriksaan hewan kurban dengan jumlah ternak kurban seluruhnya 1.174 ekor terdiri dari sapi 757 ekor dan kambing 417 ekor;

f. Selama kurun waktu 2017 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ikut memberikan kontribusi dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.218 Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat

Kode Rekening	Uraian	Target 2017	Realisasi	
			Rp.	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	320.000.000	167.397.000	52,31
4.1.2	Retribusi Daerah	320.000.000	167.397.000	52,31
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	320.000.000	167.397.000	52,31
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	160.000.000	98.950.000	61,84
	Retribusi Tempat Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging	160.000.000	98.950.000	61,84
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :	125.000.000	248.759.000	90,46
	Penjualan Hasil Breeding Farm	25.000.000	18.347.000	73,39
	Keuntungan Bagi Hasil Penjualan Sapi Turunan (Pedet)	100.000.000	14.500.000	14,50
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	35.000.000	35.600.000	101,71
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	35.000.000	35.600.000	101,71
4.3.6.02	Sumbangan dari kelompok masyarakat/perorangan	35.000.000	35.600.000	101,71
4.3.6.02.01	Sumbangan dari Kelompok Masyarakat	35.000.000	35.600.000	101,71
Jumlah		**320.000.000**	**167.397.000**	**52,31**

Sumber: Dinas PKH 2017

2.5.3 Daya Mineral

a) Kondisi Umum

Secara umum sektor energi di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan perkembangan yang positif jika dilihat dari beberapa indikator

seperti produksi listrik dan distribusi listrik. Sebagai sumber penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital.

Sub sektor ketenagalistrikan diprogramkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya, antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan produksi listrik di Kotawaringin Barat cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi produksi maupun dari jumlah pelanggan. Peningkatan ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terjadinya perkembangan pada pusat-pusat pertumbuhan sehingga kebutuhan listrik sebagai sumber penerangan maupun energi juga semakin meningkat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang diwujudkan melalui pengalokasian dana pembangunan/peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan tiap tahunnya untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur tenaga listrik. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan tiang, lampu dan line Penerangan Jalan Umum (PJU);
b. Pengadaan dan pemasangan travo;
c. Pengadaan dan pemasangan instalasi dan jaringan listrik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017, dari 94 kelurahan/desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, masih terdapat 9 (sembilan) desa yang belum tersentuh oleh listrik PLN ataupun mendapatkan bantuan penerangan dari pemerintah sehingga masih menggunakan listrik non PLN yang diperoleh dari PLTS, mesin generator set, petromak dan pelita. Atau dapat disimpulkan bahwa

sejumlah 89,36% kelurahan/desa di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berlistrik dan 9, 64% masih belum menggunakan listrik. Desa-desa tersebut yaitu:

Tabel 2.219 Daftar Nama Desa yang Belum Menggunakan Listrik

No.	Kecamatan	Nama Desa
1.	Arut Selatan	Desa Rangda dan Desa Tanjung Putri
2.	Arut Utara	Desa Sukarami
3.	Kumai	Desa Sungai Cabang dan Desa Sungai Bedaun
4	Kotawaringin Lama	Desa Lalang, Desa Sumbermukti, Desa Ipuh Bangun Jaya dan Desa Palih Baru

Sumber: Dinas ESDM 2017

Dari data tersebut, didapati bahwa rasio elektrifikasi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 76,71% dengan rasio rumah tangga yang belum menggunakan listrik sebesar 23,29%.

Pada perdagangan ekspor, sektor ini telah menyumbangkan komoditas *zircon sand* (pasir zirkon) dengan nilai ekspor tahun 2015 mencapai Rp. 2.779.600.000. Tahun 2016 turun menjadi Rp. 2.489.200.000 dan tahun 2017 kembali meningkat sebesar Rp. 2.808.600.000. Dengan demikian, total ekspor bahan galian zircon dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 8.077.400.000 dengan volume ekspor 40.487 ton seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.220 Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan

Uraian	Produksi (Ton)			Volume Ekspor (MT)			Nilai Ekspor (dalam Ribuan Rp)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
) Zircon Sand	13.998	12.446	14.043	13.998	12.446	14.043	2.779.600	2.489.200	2.808.600
) Lump Ore	-	-		-	-		-	-	
) Zink	-	-	-	-	-	-	-	-	-
) Iron Ore									
) Ilmenite									
Jumlah	**13.998**	**12.446**	**14.043**	**13.998**	**12.446**	**14.043**	**2.779.600**	**2.489.200**	**2.808.600**

Sumber: Setda 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000 dan realisasi Rp. 40.738.500 atau 81,84%. Untuk realisasi program dan kegiatan urusan perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.221 Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	CapaianKinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Keuangan							
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
SEKRETARIAT DAERAH		**50.000.000**	**40.738.500**	**81,48**	**97,92**				
1.	**Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan**	**30.000.000,-**	**19.129..470,-**	**63,76**	**71,17**	**Terbinanya pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan**	**100**	**71,17**	**%**
2.	**Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan**	**1.155.000.000**	**1.136.512.532**	**98,44**	**99,17**	**Adanya penerangan jalan dan tersedianya fasilitas listrik di pedesaan.**	**100**	**99,17**	**%**

Sumber : LKPJ, 2017

2.5.4 Urusan Pariwisata

a) Kondisi Umum

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Dalam rangka pembangunan daerah, sektor pariwisata memegang peranan yang menentukan dan dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan kontribusi dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utama. Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang. Oleh karena itu, harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan pengeluaran belanja baik konsumsi dan akomodasi maupun souvenir, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (Tourism Final Demand) pasar barang dan jasa.

Selanjutnya Final Demand wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (Investment Derived Demand) untuk berproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut.

Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain. Sehingga sektor pariwisata memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu dengan melibatkan rakyat miskin dalam berbagai kegiatan integratif dengan bisnis pariwisata.

Secara umum Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar, jenis wisata yang ditawarkan terbagi atas beberapa, yaitu:

1. Wisata alam, antara lain Taman Nasional Tanjung Puting, Air Terjun Patih Mambang, Arung Jeram, Danau Gatal dan Danau Masorayan;
2. Wisata sejarah/budaya/religi, antara lain Istana Kuning, Astana Al-Nursari, Istana Mangkubumi, Palagan Sambi, Masjid Kyai Gede, Makam Kyai Gede, Makam Kuta Tanah, Batu Petahan dan Tiang Pantar;
3. Wisata bahari antara lain Pantai Kubu, Tanjung Keluang, Pantai Teluk Bogam, dan Tanjung Penghujan;

Obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting Pangkalan Bun adalah salah satu obyek wisata Taman Nasional yang sudah menjadi ikon dunia, dimana jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun meningkat. Untuk tahun 2017, kunjungan wisatawan mengalami kenaikan dimana untuk kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2016 sebanyak 8.942 orang dan tahun 2017 naik menjadi 14.933 orang. Sedangkan untuk wisatawan nusantara tahun 2016 sebanyak 6.164 orang dan tahun 2017 naik menjadi 9.760 orang. Adapun untuk lama kunjungan wisatawan bertambah dari 1 hari menjadi 2 - 3 hari.

Obyek wisata sejarah, budaya dan religi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Istana Kuning, Istana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-raja Kutaringin yang terletak di tengah

Kota Pangkalan Bun. Sedangkan Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Obyek wisata alam dan pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di tepi pantai yaitu di obyek wisata Bugamraya yang terdiri dari Taman Wisata Alam Tanjung Penghujan, Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Gosong Senggora dan Air Terjun Patih Mambang dengan alamnya yang asli. Kunjungan wisatawan ke obyek wisata Bugamraya pada tahun 2016 sebanyak 72.754 orang dan pada tahun 2017 naik menjadi 78.578 orang.

Tabel 2.222 Potensi Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Objek Yang Dinikmati	Ciri Khas Yang Ditonjolkan
1	Taman Nasional Tanjung Puting	Kec. Kumai	Alam	Keindahan alam, serta pusat rehabilitasi orang utan dan satwa langka lainnya
2	Bukit Topan	Kec. Aruta	Alam	Keindahan alam
3	Bukit Kalede	Kec. Aruta	Alam	Keindahan alam
4	Bukit Marundau	Kec. Aruta	Alam	Keindahan alam
5	Bukit Talawih	Kec. Aruta	Alam	Keindahan alam
6	Air Terjun Runtu	Kec. Arut Selatan	Alam	Keindahan alam
7	Bukit Kaminting	Kec. Aruta	Alam	Keindahan alam
8	Pantai Kubu	Kec. Kumai	Tirta	Keindahan alam
9	Tanjung Keluang	Kec. Kumai	Tirta	Keindahan alam
10	Tanjung Penghujan	Kec. Kumai	Tirta	Keindahan alam
11	Pantai Sei Umbang	Kec. Kumai	Tirta	Keindahan alam
12	Pantai Keraya	Kec. Kumai	Tirta	Keindahan alam
13	Air Terjun Patih Mambang	Kec. Kumai	Tirta	Keindahan alam
14	Danau Kura Kura	Kec. Pangkalan Lada	Tirta	Keindahan alam
15	Danau Gatal	Kec. Kotawaringin Lama	Tirta	Keindahan alam
16	Danau Masorayan	Kec. Kotawaringin Lama	Tirta	Keindahan alam
17	Air Terjun Suayap	Kec. Arut Selatan	Tirta	Keindahan alam
18	Istana Kuning	Kec. Arut Selatan	Sejarah	Nilai sejarah
19	Rumah Mangkubumi	Kec. Arut Selatan	Sejarah	Nilai sejarah
20	Makam Gubah Raja	Kec. Arut Selatan	Sejarah	Nilai sejarah
21	Astana Al Noorsari	Kec. Kotawaringin Lama	Sejarah	Nilai sejarah
22	Makam Kuta Tanah	Kec. Kotawaringin Lama	Sejarah	Nilai sejarah
23	Masjid Kyai Gede	Kec. Kotawaringin Lama	Religi dan Sejarah	Nilai religi dan sejarah
24	Palagan Sambi	Kec. Arut Selatan	Sejarah	Nilai sejarah
25	Monumen Penerjunan Pertama Palagan Sambi	Kec. Arut Utara	Sejarah	Nilai sejarah
26	Rumah Adat Dayak Pasir Panjang	Kec. Arut Selatan	Budaya	Nilai budaya
27	Pantai Sabuai	Kec. Kumai	Alam	Keindahan alam
28	Makam Kyai Gede	Kec. Kotawaringin Lama	Religi	Nilai religi
29	Suaka Margasatwa Lamandau	Kab. Kobar dan Kab. Sukamara	Alam	Keindahan alam dan tempat satwa
30	Gosong Senggora	Kec. Kumai	Tirta	Keindahan alam
31	Gosong Beras Basah	Kec. Kumai	Tirta	Keindahan alam
32	Gosong Sepagar	Kec. Kumai	Tirta	Keindahan alam

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Objek Yang Dinikmati	Ciri Khas Yang Ditonjolkan
33	Upacara Menyanggar Laut	Kec. Kumai	Budaya	Nilai budaya
34	Tewah	Kec. Arut Utara	Budaya	Nilai budaya
35	Desa Wisata	Kec. Arut Selatan, Kec. Kumai	Budaya	Nilai budaya dan nilai adat
36	Pagelaran Seni dan Tari Daerah	Zona Kreatif	Budaya	Nilai Budaya
37	Water Boom	Kec. Arut Selatan, Kec. Kumai, Kec. Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng	Buatan	Nilai atraksi bagi masyarakat
38	Arena Outbond	Kec. Arut Utara	Buatan	Nilai atraksi
39	Kolam Pemancingan	Kec. Arut Selatan	Buatan	Nilai rekreasi
40	Program Integrasi Sawit – Sapi (Pangkalan Lima, Sulung Ranch)	Kec. Arut Selatan, Kec. Pangkalan Lada	Buatan	Nilai edukasi dan ekonomi

Sumber : Dispar 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 7.776.969.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.308.982.343,00 atau 93,98%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pariwisata selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.223 Program Urusan Pariwisata

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
Dispar		**7.776.969.000**	**7.308.982.343**	**93,98**	**98,28**				
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**773.077.916**	**651.927.982**	**77,61**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**11**	**11**	**keg.**
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**190.535.584**	**149.144.782**	**78,27**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**4**	**4**	**keg.**
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**42.460.000**	**40.120.000**	**94,48**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur**	**78**	**78**	**stel**

4.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**80.800.000**	**67.255.710**	**83,23**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada prog. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**1**	**1**	**keg**
5.	**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	**1.469.763.000**	**1.444.492.029**	**98,28**	**80**	**Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan pemasaran pariwisata**	**4**	**4**	**keg.**
6.	**Program pengembangan destinasi pariwisata**	**5.167.782.500**	**4.913.164.840**	**95,07**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan destinasi pariwisata**	**3**	**3**	**keg**
7.	**Program pengembangan kemitraan**	**52.550.000**	**42.877.000**	**81,59**	**100**	**Terlaksananya kegiatan pada prog. pengembangan kemitraan**	**1**	**1**	**Keg**

Sumber : LKPJ, 2017

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pariwisata yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Pada Tahun 2017, jumlah wisatawan 24.693 orang (terdiri atas 14.933 wisatawan mancanegara dan 9.760 wisatawan nusantara) atau naik sebesar 2,35% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 11.739 orang (terdiri atas 8942 wisman dan 6.164 wisnus). Selain itu, terdapat pula kunjungan dari kapal pesiar *Yacht Rally Sail* Indonesia pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 September sebanyak 43 kapal dan ± 235 orang. Berikut kami sampaikan tabel capaian indikator untuk urusan pariwisata yang meliputi jumlah kunjungan wisata (orang), jumlah destinasi wisata (obyek), dan jumlah event tahunan wisata daerah (kegiatan):

Tabel 2.224 Capaian Indikator Untuk Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kunjungan wisman dan wisnu	20%	20,04%	100,02%

Sumber: Dispar 2017

Tabel 2.225 Jumlah Destinasi Wisata (Obyek)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase destinasi wisata	70%	70%	100%

Sumber: Dispar 2017

Tabel 2.226 Jumlah Event Tahunan Wisata Daerah (Kegiatan)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase jumlah even tahunan	5%	12%	240%

Sumber: Dispar 2017

Hal – hal lain yang perlu dilaporkan :

1. Agenda kegiatan penyambutan peserta *Yacht Rally* Tahun 2017 terdiri dari beberapa agenda kegiatan yaitu melihat atraksi budaya dan kelompok sadar wisata Desa Pasir Panjang, wisata susur Sungai Arut, singgah pada pembuat kapal, makan siang bersama dengan pertunjukan seni dan budaya Kotawaringin Barat, serta city tour, mengunjungi Istana Kuning, Rumah Mangkubumi, Yayasan Orang Hutan (Yayorin), Pasar Tradisional dan Toko Souvenir dan penyambutan resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta tarian penyambutan tamu, atraksi atraksi budaya, dimana seluruh kegiatan melibatkan seluruh peserta Sail Indonesia, dinas instansi/lembaga di Kabupaten Kotawaringin Barat dan *stakeholders* pariwisata;
2. Penyelenggaraan Festival Batang Arut mengangkat wisata sungai sebagai data tarik wisata dan pengembangan seni budaya, kesenian lokal sebagai bagian promosi pariwisata. Festival kreasi Kotawaringin Barat dilaksanakan sebagai bagian dari acara HUT Kotawaringin Barat untuk promosi Pariwisata dengan menampilkan perlombaan kreasi budaya, kesenian, dan pemilihan Aba dan Ambo Kotawaringin Barat.
3. Jasa transportasi udara untuk tahun 2017 sebanyak 4 (empat) armada dengan rute Pangkalan Bun – Jakarta – Semarang – Surabaya – Ketapang Pontianak, Palangka Raya, Sampit dan Banjarmasin;
4. Penginapan yang ada di Kotawaringin Barat sebanyak 33 hotel dengan rincian klasifikasi antara lain :
    1) Bintang 3 sebanyak 2 hotel;
    2) Bintang 1 sebanyak 1 hotel;
    3) Melati 1 sebanyak 12 hotel;
    4) Melati 2 sebanyak 8 hotel;
    5) Melati 3 sebanyak 10 hotel;

Biro perjalanan maupun agen perjalanan dalam kurun waktu tahun 2017 sangat maju pesat perkembangannya dimana untuk biro sebanyak 47 biro dan agen sebanyak 35 agen.

2.5.5 Urusan Industri

a) Kondisi Umum

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus mendukung pengembangan industri kecil terutama industri khas daerah agar mampu bertahan dan mengenalkan nama daerah. Selama ini, banyak industri kecil yang bermunculan di Kotawaringin Barat. Selain makanan, juga tumbuh industri kecil furniture yang harus didukung pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat. Industri kecil dan menengah saat ini mengalami peningkatan nilai tambah produk primer daerah, menumbuhkan populasi IKM berdasarkan kompetensi inti industri daerah, memanfaatkan sumber daya termasuk SDA daerah secara optimal, menyebarkan industri ke berbagai daerah, meningkatkan daya saing daerah berlandaskan keunggulan daerah, meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi unggulan daerah, membangun keunikan yang dimiliki daerah, melakukan kerjasama antar daerah, serta membangun kerjasama yang harmonis antar daerah. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan masa akhir periode dan masa transisi renstra sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.227 Nilai Investasi, Produksi, Bahan Baku dan Nilai Tambah Menurut Kelompok Industri

No.	Industri Pengolahan	2016			
		Nilai Investasi (Rp. 000)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Nilai Bahan Baku (Rp. 000)	Nilai Tambah (Rp. 000)
1	Pangan	27.715.956	44.113.001	24.303.247	19.809.754
2	Sandang	2.224.000	3.695.800	1.887.640	1.818.160
3	Kimia Dan Bahan Bangunan	43.152.078	61.518.941	35.344.226	26.174.715
4	Logam, Mesin Dan Elektronik	1.143.500	2.099.117	942.162	1.156.955
5	Kerajinan	355.576	692.290	278.335	413.555
TOTAL		**74.591.109**	**112.119.149**	**62.745.610**	**49.373.539**

Sumber: Disperindagkop UKM 2017

Tabel 2.228 Nilai Investasi, Produksi, Bahan Baku dan Nilai Tambah Menurut Kelompok Industri

No	Industri Pengolahan	2017			
		Nilai Investasi (Rp. 000)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Nilai Bahan Baku (Rp. 000)	Nilai Tambah (Rp. 000)
1	Pangan	29.322.356	27.005.583	15.013.879	11.991.704
2	Sandang	2.234.000	551.650	279.975	271.675
3	Kimia Dan Bahan Bangunan	43.517.700	37.910.706	20.029.729	17.880.977
4	Logam, Mesin Dan Elektronik	1.143.500	2.099.117	942.162	1.156.955
5	Kerajinan	355.575	692.290	278.335	413.955
TOTAL		**75.429.631**	**68.259.346**	**36.544.080**	**31.715.266**

Sumber : Disperindagkop UKM 2017

Sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih di dominasi oleh usaha kecil dan menengah, dimana jenis usaha seperti ini sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah unit usaha pada tahun 2016 sebanyak 536 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.643 orang. Pada tahun 2017 bertambah menjadi 578 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.846 orang. Lebih lengkapnya tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.229 Perbandingan Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja IKM Menurut Jenis Industri

No.	Industri Pengolahan	2016		2017	
		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Pangan	252	728	262	763
2	Sandang	17	49	18	51
3	Kimia Dan Bahan Bangunan	212	779	215	796
4	Logam, Mesin Dan Elektronik	6	23	6	23
5	Kerajinan	49	64	49	64
TOTAL		**536**	**1.643**	**578**	**1846**

Sumber: Disperindagkop UKM 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Industri pada Dinas Perindagkop UKM dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 459.746.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 326.347.600,00 atau 70,98%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.230 Program Urusan Industri

No	Program/Kegiatan	Input			Rea Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp.)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
1	**Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi**	**199.563.000**	**157.468.100**	**78,91**	**100**	**Meningkatnya pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah IKM**	**100**	**100**	**%**
2.	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**116.258.000**	**108.254.050**	**93,12**	**100**	**Meningkatnya pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah IKM**	**100**	**100**	**%**

No	Program/Kegiatan	Input			Rea Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp.)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
3.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	24.275.000	20.250.000	83,42	100	Meningkatnya pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah IKM	100	100	%
4	Program pembinaan lingkungan sosial lingkup industri kecil	119.650.000	40.375.450	33,74	60	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha IKM	100	60	%

Sumber : LKPJ, 2017

2.5.6 Urusan Perdagangan

a) Kondisi Umum

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi Kabupaten Kotawaringin Barat. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar ketiga pada pembentukan PDRB (2016) setelah sektor pertanian dan industri. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya. Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Salah satu perwujudan misi kepala daerah dalam mendukung penguatan kemandirian ekonomi adalah stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting serta mendorong kemandirian pelayanan kemetrologian daerah sebagai wujud perlindungan konsumen dan masyarakat serta meningkatkan nilai ekspor komoditas perdagangan melalui peningkatan promosi komoditas daerah, pengembangan daya saing komoditas daerah, dan pengembangan sumber daya pelaku usaha.

Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, mengamanatkan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting (KPBP) merupakan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan menjadi fokus kerja bidang perdagangan yang pada akhirnya dapat mendukung pengendalian inflasi daerah. Adapun fluktuasi harga rata-rata sepanjang tahun 2017 terhadap harga rata-rata sepanjang tahun 2016 dapat di tampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.231 Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Kotawaringin Barat

NO.	Komoditi	Satuan	Harga Rata-rata		Fluktuasi (+/(-))
			Th 2016	Th 2017	
A	**Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:**				
1	Beras Medium	kg	12.000,00	11.654,76	(0,03)
2	Kacang Kedelai	kg	10.062,50	9.972,22	(0,01)
3	Cabe Merah Keriting	kg	52.469,41	43.506,94	(0,17)
4	Bawang Merah	kg	40.337,63	32.278,44	(0,20)
B	**Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:**				
5	Gula Pasir	kg	14.715,28	13.205,03	(0,10)
6	Minyak Goreng Kemasan (Bimoli)	5 ltr	64.402,78	73.560,19	0,14
7	Tepung Terigu Segitiga Biru	kg	12.178,24	9.516,22	(0,22)
C	**Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;**				
8	Daging Sapi	kg	128.148,15	127.427,25	(0,01)
9	Daging Ayam Ras	kg	35.929,40	34.864,25	(0,03)
10	Telur Ayam Ras	Butir	1.725,45	1.509,39	(0,13)
11	ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.	kg	n/a	n/a	n/a
D	**Jenis Barang Penting :**				
12	Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;	pkt	n/a	n/a	n/a
13	Pupuk;	kg	7.800,00	7.800,00	-
14	Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;	tabung	18.000,00	18.000,00	-
15	Plywood 3 mm	lembar	60.000,00	60.000,00	-
16	Semen Gresik 50 Kg	zak	57.666,67	54.993,06	(0,05)
17	Besi Baja Konstruksi	batang	47.000,00	50.250,00	0,07
18	Baja Ringan	batang	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perindagkop UKM 2017

Dari tabel di atas fluktuasi harga rata-rata KPBP tahun 2017 mengalami fluktuasi negatif 0,73% terhadap harga rata-rata KPBP tahun 2016. Di mana secara nasional, Kemendag menetapkan fluktuasi harga KPBP tidak lebih 9% (YoY).

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan program konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg Tahun 2015. Program Konversi Minyak tanah (Mitan) ke LPG 3 Kg adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, dengan tujuan:

1. Mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri;

2. Mengurangi ketergantungan penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi salah satunya dengan mengalihkan ke energi lainnya;
3. Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan minyak bumi menjadi kurang dari 20% dan peranan gas bumi menjadi lebih dari 30% terhadap konsumsi energi nasional.

Secara umum sektor perdagangan khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas (LPG) di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari infrastruktur bahan bakar minyak maupun bahan bakar gas antara lain seperti:

1. Depot PT. Pertamina (Persero) sebanyak 1 buah perusahaan;
2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sebanyak 1 buah perusahaan;
3. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU sebanyak 7 buah perusahaan;
4. Agen Premium Minyak Solar (APMS) 1 buah perusahaan;
5. Agen LPG 3 Kilogram (Bersubsidi) sebanyak 3 buah perusahaan;
6. Agen LPG Non Subsidi sebanyak 2 buah perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Kotawaringin Baratbeserta Tim Pembinaan dan pengawasan Terpadu Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan BBM dan LPG 3 Kg khususnya yang bersubsidi bagi masyarakat agar tepat sasaran sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Pembinaan dan Pengawasan BBM dan LPG 3 Kg khususnya yang bersubsidi yang dilaksanakan di Kelurahan, Desa dan Pangkalan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kemudian Sebagaimana arah kebijakan nasional bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Perdagangan khususnya Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk peningkatan ekspor, adapun realisasi ekspor daerah sepanjang tahun 2017 dapat di tampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.232 Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai (US$)	215.253.097,17	183.735.699,94	186.428.669,99	120.298.709,60	269.470.000,00
Volume (m^3)	147.413,3316	157.437,0798	517.458,6212	-	-
Volume (MT)	851.858,935	622.696,302	554.615,120	-	1.020.155.170,

Sumber: BPS 2017

Realisasi nilai ekspor pada tahun 2017 sebesar 269.470.000 US$. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai ekspor pada tahun 2016 sebesar 120.298.709 US$ mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar 149.170.000 US$ (124%). Meningkatnya realisasi ekspor daerah pada tahun 2017 lebih dipengaruhi oleh membaiknya kondisi ekonomi global sehingga volume permintaan produk komoditas ekspor ikut mengalami kenaikan.

Komoditas yang diekspor mencakup 3 jenis komoditi utama terdiri dari (1)*Kayu, barang dari kayu*, (2)Lemak & minyak hewan/nabati dan (3)Bijih, kerak, dan abu logam dengan tujuan ekspor antara lain ke negara ASEAN, Eropa, Timur Tengah, Cina, Jepang dan India.

Untuk meningkatkan dinamika perdagangan telah dilakukan perlindungan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat transaksi masyarakat, melalui peningkatan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, dan pembinaan sumber daya pelaku pasar.

Pada dasarnya, minat konsumen untuk berbelanja ke pasar tradisional masih sangat tinggi. Hal ini karena pasar tradisional menawarkan mekanisme transaksi yang tidak dimiliki oleh ritel modern yaitu berbelanja dengan sistem tawar menawar. Akan tetapi hanya segelintir pasar tradisional yang dapat menawarkan kebersihan dan kenyamanan berbelanja yang merupakan faktor penting dalam menentukan preferensi konsumen. Pasar mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di daerah khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pasar menjadi tempat berinteraksi antara produsen dan konsumen; pemasaran hasil pertanian, industri rumah tangga; menampung pedagang, tenaga kerja lokal; perputaran uang, barang, dan jasa; serta tempat paling mudah bagi masyarakat untuk berbaur. Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para

petani, nelayan, pengrajin, dan industri rumah tangga. Jumlah mereka puluhan juta dan mereka sangat menyandarkan hidupnya pada pasar tradisional.

Selama ini, pasar tradisional selalu menjadi indikator dalam kaitannya dengan pergerakan tingkat kestabilan harga atau inflasi. Dalam menghitung inflasi, harga kebutuhan pokok penduduk yang dijual di pasar tradisional seperti beras, gula, dan sembilan kebutuhan pokok lainnya menjadi objek monitoring para ahli statistik setiap bulannya. Namun, dengan berkembangnya pasar modern (hipermarket, supermarket, minimarket) telah berdampak pada keberadaan pasar tradisional yang lambat laun semakin terpinggirkan. Untuk itu, pengelolaan pasar tradisional perlu dibenahi baik secara fisik maupun non-fisik sehingga peran pasar tradisional tetap dapat dipertahankan dan bersinergi dengan pasar modern.

Untuk saat ini, yang perlu menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana agar pasar tradisional bisa dibuat menjadi lebih layak sebagai tempat transaksi tanpa harus secara drastis mengubah citranya sebagai pasar tradisional. Jika pasar tradisional bisa dikelola dan diberdayakan dengan baik dan menarik, maka tidak perlu ada pertentangan antara pasar modern dan pasar tradisional. Keduanya berkembang dengan nuansa serta daya tariknya sendiri-sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa golongan yang berpendapatan tinggi dan menengah atas akan juga tertarik untuk sesekali mengunjungi pasar tradisional untuk menikmati berbagai hal yang tidak tersedia di pasar modern.

Dari kondisi dan analisa di atas, Dinas Perindagkop UKM menggandeng dan mengajak para pihak yang berkompeten untuk lebih memperhatikan pasar tradisional baik dari sisi kebijakan, regulasi, dan alokasi anggaran.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop) serta Sekretariat Daerah. Total alokasi belanja langsung urusan perdagangan berjumlah Rp. 27.836.521.800 dan terealisasi sebesar Rp. 27.376.664.861 atau 98,34%. Pada Dinas Perindagkop UKM dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 27.736.521.800 dan terealisasi sebesar Rp. 27.295.187.861 atau 98,41%. Sedangkan di Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.

50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 40.738.500 atau 81,48%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.233 Program Urusan Perdagangan

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp.)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Perindagkop UKM	**27.736.521.800**	**27.295.187.861**	**98,41**					
1.	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	**576.251.800**	**424.439.200**	**73,66**	**87,59**	**Meningkatnya barang dan jasa beredar sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan**	**100**	**100**	**%**
2.	**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**	**178.600.000**	**164.802.000**	**92,27**	**100**	**Informasi peluang perdagangan luar negeri**	**100**	**100**	**%**
3.	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	**26.501.418.500**	**26.275.850.911**	**99,14**	**100**	**Terwujudnya pengembangan pasar dan distribusi barang / produk**	**100**	**100**	**%**
4.	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**	**289.101.500**	**276.499.500**	**95,64**	**100**	**Terwujudnya kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan**	**100**	**100**	**%**
5.	**Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai**	**127.375.000**	**107.541.250**	**84,43**	**100**	**Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ketentuan bidang cukai**	**100**	**100**	**%**
6.	**Program pemberantasan barang kena cukai ilegal**	**63.775.000**	**46.055.000**	**2,21**	**100**	**Tercapainya program pemberantasan barang kena cukai ilegal**	**100**	**100**	**%**

Sumber : LKPJ, 2017

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	CapaianKinerja Program/KegiatanKinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
SEKRETARIAT DAERAH		**50.000.000**	**40.738.500**	**81,48**	**97,92**				
1.	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	**50.000.000**	**40.738.500**	**81,48**	**97,92**	**Harga BBM sesuai HET yang ditetapkan pemerintah dan penyaluran BBM tepat sasaran**	**100**	**97,92**	**%**

Sumber : LKPJ, 2017

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi ekspor daerah tahun 2017 senilai 269 juta US$ atau 124% jika dibandingkan dengan ekspor tahun 2016, naik cukup signifikan setelah sejak tahun 2013 terus mengalami penurunan, meskipun kenaikannya lebih dipengaruhi faktor eksternal namun pemerintah daerah harus menjaga momentum untuk terus meningkatkan promosi. Pelayanan prima kepada para eksportir dan kemudahan perizinan perdagangan terutama komoditas ekspor daerah;
2. Meminimalkan peredaran barang yang tidak sesuai standar dan parameter yang ditentukan, dengan melaksanakan pengawasan barang beredar dan/atau jasa dan pengawasan pita cukai rokok pada tahun 2017 di 6 (enam) kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan rincian sebagai berikut:
   - Pengawasan label dan kedaluwarsa pada makanan/minuman di Kecamatan Arut Selatan;
   - Pengawasan menjelang hari raya keagamaan di Kecamatan Arut Selatan;
   - Pengawasan dengan instansi terkait yaitu dari kepolisian dan tim terpadu ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Arut Selatan;
   - Pengawasan pita cukai rokok di 6 kecamatan. Kecamatan Arut Selatan, Arut Utara, Kumai, Pangkalan Lada, dan Pangkalan Banteng harus terus ditingkatkan.

3. Terwujudnya tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dengan dilaksanakannya kegiatan pendataan UTTP di 6 kecamatan (Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Arut Utara) dan dilaksanakan pendampingan *sidang tera* ulang terhadap alat UTTP di 4 kecamatan (Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng) bekerjasama dengan Balai Kemetrologian Banjarmasin Kalimantan Tengah serta terbentuknya pasar tertib ukur;
4. Usaha perdagangan di pasar-pasar tradisional juga menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dari sektor informal karena banyak pihak yang terlibat langsung mulai dari pemasok barang, kuli angkut/panggul hingga penyedia jasa transportasi seperti tukang ojek;
5. Kondisi pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat yang relative bersih, tertata dan rapi turut memberikan andil dalam diraihnya piala adi kencana.

2.5.7 Urusan Ketransmigrasian

a) Kondisi Umum

Transmigrasi merupakan salah satu cara atau metode untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah. Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, telah diamanatkan kepada semua penyelenggara pembangunan untuk merubah tata cara pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan transmigrasi agar lebih mengedepankan peran daerah untuk lebih berdayaguna dalam setiap kegiatannya.

Untuk itu, penyelenggaraan program transmigrasi saat ini dalam pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, berkaitan dengan peran pemerintah daerah sebagai pelaksana *(rowing)* sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan *(steering),* maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi

dilakukan dengan pendekatan *demand side.* Artinya, pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah propinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai daerah penerima calon transmigran, telah bekerjasama dengan daerah pengirim dalam penyelenggaraan transmigrasi. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Secara teknis pelaksanaan urusan ketransmigrasian selama ini dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya transmigran yang menolak atau pulang kembali ke daerah asal pasca penempatan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah, daerah asal dan lokasi penempatan dalam lima tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.234 Data Transmigran dan Penempatannya

No.	Daerah Asal	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Waktu Penempatan	Lokasi Penempatan
I	**Transmigrasi Penduduk Asal**				
1.	Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat	10	49	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
2.	Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat	10	37	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
3.	Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat	5	28	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
4.	Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah	10	38	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
5.	Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah	15	58	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
6.	Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung	25	103	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
7.	Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah	25	74	02-12-2009	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
8.	Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung	15	60	03-12-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
9.	Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah	10	34	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
10.	Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah	15	54	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
II	**Transmigrasi Penduduk Setempat**				
1.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	75	322	16-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
2.	Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah	25	100	09-12-2009	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai

3.	Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah	35	138	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
Jumlah		**275**	**1.095**		

Sumber : Disnakertrans 2017

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 89.750.000 dengan realisasi sebesar Rp. 65.142.320 atau 72,58%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketransmigarasian seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.235 Program Urusan Transmigrasi

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	**Program pengembangan wilayah transmigrasi**	**89.750.000**	**65.142.320**	**72,58**	**100**	**Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengembangan wilayah transmigrasi**	**1**	**1**	**keg.**

Sumber : LKPJ, 2017

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai tabel Prioritas Tingkat Nasional dan Provinsi serta Kabupaten pada tahun 2019. Dalam tabel tersebut akan dipaparkan mengenai keterkaitan antara prioritas sasaran yang dilakukan pemerintah ditingkat nasional dan provinsi yang menjadi acuan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menentukan prioritas pembangunan di tahun 2019.

Tabel 2.236 Prioritas Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2019

Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehataan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayh melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Pemerataan infrastruktur wilayah	Mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan sarana prasarana infrastruktur
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif	Peningkataan kualitas perencanaan tata ruang	Meningkatkan perekonomian masyarakat berorientasi potensi unggulan daerah Lingkungan hidup
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	
	Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai	
	Stabilitas Ekonomi daerah	
	Peningkatan pendapatan msyarakat	
	Pengelolaan industri pariwisata	
	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	
6. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	Peningkataan kualitas reformasi birokrasi	Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penguasaan IPTEK

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.237 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
	Urusan Wajib Dasar		
1.	) APM (%)) APK (%)) APS (%)) Angka Kelulusan) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah) Rasio guru/murid per kelas rata-rata) Angka Melek Huruf (%)) Angka rata-rata lama sekolah) Pendidikan Anak Usia Dini) Angka Melanjutkan	Pendidikan	1. Belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, pendidikan dasar (SD dan SMP), tenaga pendidik dan kependidikan, pendidikan non formal dan manajemen pelayanan pendidikan 2. Belum optimalnya koordinasi pengawas dan penilik yang ada di kecamatan dengan SKPD 3. Masih belum optimalnya upaya pengembangan dan perlindungan kebudayaan daerah.
2.	) Rasio posyandu per satuan balita) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000penduduk) Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk) Rasio dokter per satuan penduduk	Kesehatan	1. Kualitas tenaga kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. 2. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ada di

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
	) Rasio tenaga kefarmasian per 100.000penduduk) Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk) Jumlah Rumah Sakit) Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling) Jumlah Tenaga Medis) Rasio tenaga medis per 1000 penduduk) Rasio tenaga keperawatan per 100.000 Penduduk) Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan) Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin) Cakupan kunjungan bayi		puskesmas ditandai dengan masih ada beberapa puskesmas yang masih kekurangan tenaga perawat dan bidan. 3. Belum tersedianya dokter spesialis lainnya seperti dokter spesialis gizi klinik, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis patologi anatomi, dan spesialis bedah anak; 4. Meningkatnya jumlah pasien RSUD Sultan Imanuddin yang belum disertai dengan peningkatan alokasi biaya operasional rumah sakit, sehingga biaya untuk obat-obatan, alat/bahan habis pakai setiap tahunnya tidak pernah mencukupi; 5. Terbatasnya alokasi biaya untuk meningkatkan kualitas dokter dan paramedis melalui bimbingan teknis

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
	) Cakupan puskesmas) Cakupan pembantu puskesmas) Prevelensi HIV/AIDS dari total populasi (%)		maupun pelatihan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 6. Belum terpenuhinya sarana prasarana RSUD Sultan Imanuddin sesuai dengan Master Plan RS Kelas B Pendidikan.
3.	) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik) Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk) Rasio Jaringan Irigasi) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk) Persentase rumah tinggal bersanitasi) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk) Rasio rumah layak huni) Rasio permukiman layak huni) Panjang jalan dilalui Roda 4) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Perlunya pemerataan pembangunan saluran irigasi yang banyak mengalami kerusakan 2. Lemahnya inventarisasi data terkait dengan urusan pekerjaan umum, baik mengenai ruas jalan kondisi rusak, ruas jalan yang bersaluran drainase, rumah tinggal bersanitasi dan layak huni 3. Terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM teknis, 4. Banyak saluran irigasi yang masih menggunakan sistem irigasi non teknis

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
	) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik) Lingkungan Pemukiman) Pembangunan embung dan cek dam) Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai) Rumah tangga pengguna air bersih) Rumah tangga ber-Sanitasi) Penduduk berakses air minum) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB) Luas RTH publik sebesar 20% dari luas kawasan kota/kawasan perkotaan) Ketaatan terhadap RTRW		5. Minimnya alokasi anggaran yang diperuntukkan pembangunan jalan menuju obyek wisata serta perbaikan ruas jalan 6. Kurang memadainya peralatan pembangunan jalan serta terbatasnya pembebasan lahan untuk pelebaran jalan 7. Terbatasnya luas wilayah yang bisa dibebaskan lahannya untuk RTH.
4.	) Rasio Rumah layak huni) Rasio permukiman layak huni	Perumaham Rakyat dan Kawasan	1. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
	) Cakupan ketersediaan rumah layak huni) Lingkungan pemukiman kumuh (%)) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Permukiman	penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan; 2. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, yang mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung; 3. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5.	) Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Terbatasnya kemampuan dan jumlah SDM personil Satpol PP dan DAMKAR; 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di wilayah

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
	) Penegakan PERDA) Cakupan patroli petugas Satpol PP) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP) Kegiatan pembinaan politik daerah		Kabupaten Kotawaringin Barat; 3. Masyarakat masih belum sadar dan peka akan pencegahan bahaya kebakaran; 4. Masih kurangnya pos jaga pantau kebakaran di setiap wilayah (kecamatan, kelurahan hingga desa). 5. Pembinaan dan pengawasan perda masih belum optimal 6. Tidak adanya satuan kerja di tingkat kecamatan/desa/kelurahan yang menangani khusus tugas/fungsi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga pelaksanaannya belum memadai; 7. Terbatasnya kemampuan SDM yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat;

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			8. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga dalam pelaksanaan tugas belum maksimal; 9. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan; 10. Kurangnya intensitas komunikasi dan koordinasi instansi terkait penyelenggara pemilu; 11. Keterbatasan akses dan informasi dalam penyiapan data.
6.	) Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi) PMKS yg memperoleh bantuan sosial) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Sosial	1. Masih perlunya pemutakhiran data PMKS dan masih belum terdapat database PMKS terpadu yang terintegrasi 2. Masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mempunyai NIK, 3. Masih perlunya meningkatkan

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			dukungan lintas sektoral dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 4. Keterbatasan SDM dalam penanganan PMKS terutama dari aspek perlindungan dan jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia tidak potensial terlantar.
Urusan Wajib Non Dasar			
1.	) Angka partisipasi angkatan kerja) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun) Tingkat partisipasi angkatan kerja) Pencari kerja yang ditempatkan) Tingkat pengangguran terbuka (%)) Keselamatan dan perlindungan) Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah	Tenaga Kerja	1. Sarana dan prasarana BLK masih belum memadai dari segi keamanan dan kenyamanan tempat belajar dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi pencari kerja; 2. Peralatan pendidikan dan pelatihan masih belum memadai seperti peralatan pelatihan yang bersifat evaluatif (komputer, roda 2 dan mobil bensin) dan yang bersifat produk

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			(mesin jahit dan salon). 3. Jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang cukup signifikan tidak mampu diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia; 4. Kewajiban pemberi kerja untuk melaporkan kebutuhannya akan tenaga kerja atau adanya lowongan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat belum dilakukan oleh instnsi pemerintah maupun swasta sebagai pemberi kerja; 5. Kurangnya kesadaran pencari kerja untuk mendaftarkan dirinya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat; 6. Kurangnya peserta TTG dikarenakan

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			lokasi pelaksanaan yang cukup jauh; 7. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk menjalankan aturan-aturan ketenagakerjaan sehingga masih ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
2.	) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah) Partisipasi perempuan di lembaga swasta) Rasio KDRT) Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)) Penyelesaian pengaduan perlindungan) perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Masih bervariasinya pemahaman tentang gender; 2. Masih kurangnya pemahaman aparatur di SKPD tentang anggaran yang responsif gender; 3. Belum optimalnya kelembagaan PUG; 4. Belum tersedianya Data Terpilah Gender di setiap SKPD; 5. Belum adanya Peraturan Daerah dalam penyusunan PPRG di daerah; 6. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif;

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			7. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih tinggi; 8. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 9. Masih banyak korban yang belum melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan; 10. Kurangnya tenaga pendamping untuk mendampingi korban dalam proses hukum; 11. Masih belum seluruhnya masyarakat Kotawaringin Barat mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Anak terutama masyarakat yang ada di pedesaan/pedalaman; 12. Masih adanya orang tua kandung

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			yang melakukan kekerasan pada anak karena pengaruh narkoba dan Ibu tiri dari korban. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan orang tua tentang pola asuh anak; 13. Masih adanya kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung, oleh ayah tiri, kakek-kakek dan anak juga bisa sebagai pelaku kekerasan; 14. Masih banyak masyarakat yang enggan melapor atau mengadu ke lembaga P2TP2A; 15. Untuk pemenuhan hak-hak anak khususnya yang berhubungan dengan program KLA, masih ada instansi daerah yang masih belum sepenuhnya memahami arti pentingnya KLA. Hal ini terbukti ketika ada undangan pertemuan Gugus Tugas KLA, pimpinan instansi

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			terkait tidak hadir dan mewakilkan kepada bawahan/staf yang tidak membidangi KLA (tidak menguasai materi KLA) sehingga pembahasan menjadi tidak optimal.
3.	) Ketersediaan pangan utama	Pangan	1. Berkurangnya luas lahan untuk pengembangan pangan akibat alih fungsi lahan; 2. Pertumbuhan produksi pangan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk menjadi tidak sebanding sehingga mengakibatkan sulit tercapainya swasembada pangan; 3. Keterbatasan SDM yang menangani bidang Ketahanan Pangan karena kekurangan staf terutama sarjana ahli gizi; 4. Masih sulitnya mengubah kebiasaan pola tanam dan ketergantungan pola konsumsi pangan yang bertumpu

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			pada pangan beras saja; 5. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat masih sangat tergantung dari luar; 6. Distribusi Rastra di Kabupaten Kotawaringin Barat berjalan lancar sebagaimana mestinya dan hanya sebagian kecil desa pada musim hujan agak terlambat pendistribusian akibat jalan yang sulit dilewati; 7. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan karena setiap tahun data selalu berubah; 8. Kualitas Rastra di beberapa desa masih kurang baik.
4.	) Lahan bersertifikat) Penyelesaian kasus tanah Negara) Penyelesaian izin lokasi	Pertanahan	1. Masih belum tersusunnya data pertanahan terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			Kotawaringin Barat dan masih banyak sengketa pertanahan yang terjadi di kawasan perumahan dan permukiman.
5.	) Persentase penanganan sampah) Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R) Cakupan area pelayanan sampah) Persentase Luas pemukiman yang tertata) Pencemaran status mutu air) akupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk) Penegakan hukum lingkungan) Pengukuran indeks kualitas air) Pengukuran indeks kualitas udara) Pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	Lingkungan Hidup	1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk; 2. Masih minimnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan; 3. Terbatasnya kemampuan SDM dibidang lingkungan; 4. Masih terjadi tingkat pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup. 5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat umum dalam menjaga dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di lingkungan

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			kota; 6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat umum dalam menjaga lingkungan tempat tinggal khususnya dalam hal pengelolaan sampah.
6.	) Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk) Rasio bayi berakte kelahiran) Rasio pasangan berakte nikah) Kepemilikan KTP (%)) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk) Ketersediaan database kependudukan) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Terbatasnya jumlah SDM yang terampil dalam Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki; 3. Masih terdapat masyarakat yang enggan mengurus KTP, KK dan akta pencatatan sipil terutama akta kelahiran 4. Belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			tertib administrasi kependudukan; 5. Kelengkapan sarana dan prasarana untuk perangkat KTP-el kurang optimal 6. Belum tersedianya petugas registrasi untuk administrasi kependudukan (akta capil) pada seluruh desa.
7.	) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK) Jumlah LSM) LPM Berprestasi) PKK aktif) Posyandu aktif) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat) Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Belum meratanya kualitas sumber daya aparatur desa dalam bidang pemerintahan desa; 2. Belum meratanya kualitas sumber daya aparatur desa dalam bidang keuangan desa; 3. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia di desa dalam bidang kelembagaan desa; 4. Masih rendahnya pemahaman dan inovasi masyarakat dalam bidang teknologi tepat guna; 5. Masih rendahnya pemahaman

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			masyarakat tentang pengelolaan potensi ekonomi desa; 6. Akses jalan dan transportasi antar desa yang masih belum sepenuhnya terbuka; 7. Kondisi geografis desa-desa di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terpisah agak jauh menyebabkan kesulitan koordinasi; 8. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti tenaga, komunikasi dll; 9. Belum tersedianya data bank desa yang bisa dijadikan dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa yang komperhensif; 10. Belum meratanya kualitas perencanaan pembangunan desa; 11. Belum meratanya kualitas peraturan-

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			peraturan yang dibuat oleh desa; 12. Dana Desa dan ADD dengan anggaran yang besar berpotensi untuk disalahgunakan dan atau tidak optimal pemanfaatannya; 13. Belum tercapainya pemenuhan target desa mandiri.
8.	) Laju pertumbuhan penduduk) Rata-rata jumlah anak per keluarga) Rasio akseptor KB) Cakupan peserta KB aktif) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Selama kurang lebih 1,5 tahun ini Kecamatan Arut Utara tidak ada penyuluh program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) sehingga untuk pelayanan KB keliling menjadi terhambat; 2. Penggunaan/pemakaian alat kontrasepsi khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang terbukti dan masih dominan pemakaian alat kontrasepsi jangka pendek (pil dan suntik);

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			3. Pemahaman tentang KB pria khususnya vasektomi dan kondom masih kurang.
9.	) Jumlah arus penumpang angkutan umum) Rasio ijin trayek) Jumlah uji kir angkutan umum) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis) Angkutan darat) Kepemilikan KIR angkutan umum) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum) Pemasangan Rambu-rambu	Perhubungan	1. Belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) sebagai dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang; 2. Terbatasnya infrastruktur pelayanan umum sektor perhubungan; 3. Studi kelayakan percepatan pembangunan bandara baru terus dilaksanakan dengan studi rencana induk pada tahun 2015.
10.	) Jumlah jaringan komunikasi) Jumlah surat kabar nasional/lokal) Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Komunikasi dan Informatika	1. Belum optimalnya pelayanan yang berbasis teknologi informasi; 2. Masih rendahnya cakupan fasilitas

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
	) Jumlah penyiaran TV lokal) Web site milik pemerintah daerah		teknologi informasi dan informasi.
11.	) Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM) Jumlah BPR/LKM) Usaha Mikro dan Kecil	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Banyak terdapat alamat koperasi yang tidak valid sehingga menyulitkan tim untuk melakukan monitoring ke tiap koperasi; 2. Masih terdapat banyak koperasi yang belum melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan); 3. Pergantian kepengurusan yang lama dan yang baru tidak melibatkan pembina koperasi; 4. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses permodalan dan pangsa pasar; 5. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses kemitraan dan pengembangan usaha; 6. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan penguasaan dan

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.
12.	) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)) Rasio daya serap tenaga kerja) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Penanaman Modal	1. Sistem informasi promosi dan sistem informasi pelayanan yang belum berjalan secara maksimal; 2. Rendahnya perencanaan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi seperti belum tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), belum adanya data potensi unggulan daerah serta belum maksimalnya pengawasan, pembinaan dan pengembangan BUMD; 3. Belum maksimalnya pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal sehingga pengelolaan LKPM dan pengelolaan data belum bisa berjalan secara optimal;

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			4. Kurangnya jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja bidang Penanaman Modal dan PTSP.
13.	) Jumlah klub olahraga) Jumlah gedung olahraga) Prosentase peningkatan peraihan prestasi pemuda) Prosentase organisasi pemuda yang aktif) Cakupan pembinaan olahraga) Jumlah atlet berprestasi	Kepemudaan dan Olahraga	1. Kurangnya pembinaan generasi muda terhadap bahaya narkoba dan kenakalan remaja/pemuda; 2. Kurangnya pembinaan secara kontinyu serta terbatasnya sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan kepemudaan dan kemajuan olahraga; 3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga; 4. Terbatasnya sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan; 5. Terbatasnya ketersediaan sarana latihan para atlet yang memadai; 6. Belum optimalnya peran dan fungsi

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			organisasi kepemudaan dan keolahragaan.
14.	) Buku Kabupaten Dalam Angka) Buku PDRB	Statistik	1. Dalam urusan statistik, data statistik diperoleh dari berbagai penyedia data, seperti BPS, SKPD serta lembaga terkait lainnya sehingga dalam rangka pertanggungjawaban produk data sering terjadi perbedaan angka atau data; 2. Sifat data statistik yang dinamis, berakibat pada sulitnya penentuan data akhir secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan yang diharapkan; 3. Dalam hal ketersediaan data statistik untuk kebutuhan bahan perencanaan daerah, khususnya untuk penyediaan data statistik dasar terjadi leg satu tahun dimana data yang tersedia merupakan data kondisi tahun

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			sebelumnya sehingga data-data yang diperlukan masih merupakan data proyeksi yang mana dari tingkat keakuratannya masih diragukan karena dimungkinkan masih terjadi bias data; 4. Beberapa data statistik dalam pengadaannya sangat komprehensif, sehingga dalam rangka pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan angka akhir dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini, berakibat pada beberapa data penting belum dapat diwujudkan; 5. Tuntutan pemenuhan kebutuhan data dari peraturan perundang-undangan, pusat (K/L/D/I), dan kebutuhan data untuk perencanaan intern instansi sangat beragam sehingga berakibat munculnya ragam

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			data yang sangat banyak. Hal ini, seringkali menyulitkan dinas, instansi, lembaga penanggung jawab data dalam penyediaannya.
15.	) Penyelenggaraan festival seni dan budaya) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Kebudayaan	1. Masih belum dimilikinya Museum Budaya Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Terbatasnya kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan urusan kebudayaan; 3. Pengelolaan kekayaan budaya yang berupa fisik (sarana) belum optimal.
16.	) Jumlah perpustakaan) Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah	Perpustakaan	1. Layanan perpustakaan belum sepenuhnya ditunjang sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai; 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan layanan perpustakaan; 3. Terbatasnya jenis layanan

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			perpustakaan; 4. Koleksi bahan pustaka masih terbatas, baik dari segi jumlah koleksi maupun klasifikasi bukunya, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat; 5. Jumlah dan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan belum memadai; 6. Layanan perpustakaan keliling belum dapat menjangkau ke seluruh pelosok desa; 7. Lambannya pertumbuhan perpustakaan.
17.	) Pengelolaan arsip secara baku) Peningkatan SDM pengelola kearsipan) Tersimpannya arsip inaktip dan statis	Kearsipan	1. Belum terbentuknya unit pengolah dan unit kearsipan pada semua SKPD; 2. Kompetensi petugas kearsipan belum memadai; 3. Pembinaan kearsipan belum

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			menjangkau seluruh stakeholders; 4. Arsiparis masih dipandang sebagai profesi yang kurang menarik; 5. Kurangnya sarana prasarana kearsipan yang menyebabkan terbatasnya tenaga kearsipan dalam menata arsip.
Urusan Pilihan			
1.	) Kunjungan wisata Domestik) Kunjungan wisata Mancanegara) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB) Lama kunjungan wisata	Pariwisata	1. Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang kepariwisataan dalam hal infrastruktur, sarana transportasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keramahtamahan dalam hal mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata; 2. Belum optimalnya peran dan komitmen seluruh stakeholders untuk mewujudkan Kabupaten

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata; 3. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan pengelola kepariwisataan; 4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya objek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat; 5. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.
2.	) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB) Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB) Cakupan bina kelompok petani	Pertanian	1. Bidang Tanaman Pangan : a. Produktivitas tanaman pangan belum optimal dalam mendorong peningkatan produksi padi dan palawija; b. Beberapa wilayah sentra tanaman pangan masih rawan terhadap serangan Organisme Penganggu Tanaman (OPT);

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			c. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani akibat biaya produksi yang tinggi, harga jual belum kompetitif; 2. Bidang Hortikultura : a. Masih tingginya ketergantuan pasokan hortikultura dari luar daerah; b. Masih tingginya serangan OPT terhadap tanaman hortikultura; 3. Bidang Perkebunan : a. Stabilnya harga komoditas karet di dunia berimbas kepada petani karet di Kotawaringin Barat; b. Perkebunan rakyat (petani) sering tidak menggunakan benih/bibit tanam yang bermutu (misalnya kelapa sawit, karet dan lada); c. Tidak mengikuti kultur teknis yang

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			memadai sehingga produktivitasnya masih rendah; d. Masyarakat (petani) belum memahami pola usaha tani yang benar; e. Kelembagaan petani masih lemah, sehingga pola usahanya masih individualistis tidak terorganisir sehingga posisi tawar *(bargaining power)* masih rendah; f. Luas areal perkebunan rakyat kurang dari 30% dari luas perkebunan yang dikembangkan oleh perkebunan besar. Perbandingan 30 : 70% semacam ini kurang baik untuk stabilitas ekonomi dan sosial daerah; g. Masih banyak sengketa lahan antara perkebunan besar dengan masyarakat baik dengan

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			penduduk lokal maupun dengan warga transmigrasi di sekitarnya; h. Usaha perkebunan rakyat yang dapat disentuh langsung oleh proyek pembangunan perkebunan dengan biaya pemerintah. Baik dari dana APBN, APBD (propinsi dan kabupaten) dan sumber dana lainnya masih kurang dari 20%. sehingga sisanya berkembang dengan dana masyarakat (swadaya); i. Masih sulitnya akses permodalan (pengucuran kredit usaha perkebunan) untuk pengembangan perkebunan rakyat dari pihak perbankan; j. Fenomena alam (iklim) yang tidak dapat diprediksi menyebabkan persiapan dan pelaksanaan

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			kegiatan fisik di lapangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. 4. Bidang Peternakan : a. Populasi dan produksi ternak khususnya sapi potong belum mampu memenuhi kebutuhan daerah; b. Kebutuhan ternak untuk konsumsi masyarakat masih tergantung dari luar daerah terutama Kalimantan Selatan dan pulau jawa; c. Tingkat kelahiran/produktivitas ternak masih rendah dengan skala usaha ditingkat peternak masih belum memenuhi skala ekonomis.
3.	) Rumah tangga pengguna listrik) Rasio ketersediaan daya listrik) Persentase pertambangan tanpa ijin	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Masih terdapat 9 (sembilan) desa yang belum berlistrik, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum berkembang terutama minimnya akses jalan darat sehingga

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			pembangunan distribusi jaringan listrik terhambat dan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut memerlukan investasi yang cukup besar.
4.	1. Ekspor bersih perdagangan 2. Cakupan bina kelompok pedagang	Perdagangan	1. Peningkatan nilai ekspor daerah masih sangat bergantung dengan faktor-faktor eksternal sehingga sulit ditentukan target realisasi nilai ekspor; 2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha perdagangan untuk melengkapi diri dengan perizinan usaha maupun legalitas lainnya; 3. Adanya persaingan yang tidak seimbang antara peretail besar/modern dengan pelaku pasar tradisional karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut di atas;

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			4. Rendahnya kemampuan berpromosi bagi UKM untuk memperluas jaringan pasar; 5. Rendahnya pemahaman terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha perdagangan maupun konsumen sendiri atas hak dan kewajibannya.
5.	) Cakupan bina kelompok pengrajin	Perindustrian	1. Masih rendahnya kesadaran pelaku IKM untuk memenuhi sertifikasi halal (produk halal); 2. Masih minimnya peralatan/mesin yang memadai untuk dapat menghasilkan produk IKM yang berkualitas; 3. Masih minimnya pengembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku IKM untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan; 4. Masih rendahnya pengetahuan dan

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			kreatifitas pelaku IKM tentang desain kemasan dan merek/branding produk IKM; 5. Masih minimnya pengetahuan dan kemampuan para pelaku IKM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran produk IKM yang berdaya saing.
6.	) Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)	Transmigrasi	1. Rendahnya kemampuan kualitas SDM warga transmigrasi khususnya pengetahuan dalam hal managerial usaha; 2. Tidak tersedianya lahan/pencadangan areal untuk pembangunan ketransmigrasian pada penempatan yang baru.
7.	) Produksi perikanan) Konsumsi ikan) Cakupan bina kelompok nelayan	Kelautan dan Perikanan	1. Sumberdaya manusia dan kelembagaan nelayan pembudidaya ikan serta pengolahan hasil

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
	) Produksi perikanan kelompok nelayan		perikanan masih rendah; 2. Sarana dan teknologi penangkapan ikan yang di miliki nelayan masih belum memadai; 3. Sarana, prasarana dan teknologi dalam budidaya ikan masih sederhana; 4. Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih terbatas; 5. Akses terhadap informasi teknologi, permodalan dan permasaran masih terbatas; 6. Sarana produksi perikanan sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah; 7. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya laut dan perikanan masih kurang;

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			8. Penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang (illegal fishing) oleh masyarakat masih cukup tinggi; 9. Pencemaran dan penurunan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan akibat aktifitas manusia yang tidak bertangggung jawab dan faktor alam.
Penunjang Urusan			
1.	) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Perencanaan Pembangunan	1. Masih terbatasnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 2. Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah; 3. Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan.
2.	) Opini BPK terhadap laporan keuangan) Penetapan APBD) Perbandingan antara belanja langsung dan tidak	Keuangan	1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi-

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
	langsung		fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan dan aset daerah; 2. Masih belum terintegrasinya semua sistem komputerisasi data yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3.	) Jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal) Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	1. Adanya penjadwalan kegiatan yang terkait dengan instansi lain (misalnya seleksi CPNS, Diklat Prajabatan, seleksi terbuka lelang jabatan) yang berdampak tertunda/tidak terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan; 2. Masih terlambatnya proses penyelesaian kenaikan pangkat khususnya tenaga fungsional tertentu karena kesalahan perhitungan angka kredit.

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
4.	) Presentase implementasi rencana kelitbangan) Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan) Penerapan SIDa	Penelitian dan pengembangan	1. Masih rendahnya kemampuan SDM perencanaan dan penelitian dalam analisis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; 2. Masih rendahnya pemanfaatan hasil kajian dokumen perencanaan dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah.
5.	) Persentase tindak lanjut temuan) Presentase pelanggaran pegawai	Pengawasan	1. Masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti diklat/bimtek pengawasan yang telah memiliki sertifikasi auditor khususnya auditor ahli; 2. Kemampuan dan ketrampilan aparatur pengawasan masih kurang dan dan belum merata; 3. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat; 4. Kurangnya komitmen entitas

No	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
			terperiksa melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 5. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada entitas terperiksa.
6.	) Tersediannya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Sekretariat Dewan	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi dibidangnya jumlahnya terbatas.

Tabel. 2.238 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Dari Kebijakan Nasional/Provinsi Dan Lingkungan Eksternal Lainnya

ISU PENTING DAN MASALAH MENDESAK		
Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten
1. Masih tingginya angka kemiskinan	1. Rendahnya daya saing SDM	1. Rendahnya kualitas hidup masyarakat
2. Kesenjangan antar wilayah	2. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai	2. Kesenjangan antar wilayah
3. Rendanya Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif	3. Masih rendahnya Kapasitas Ekonomi Daerah	3. Belum optimalnya Perekonomian masyarakat pada sektor unggulan
4. Belum Optimalnya pemanfaatan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan	4. Degradasi kualitas lingkungan hidup	4. Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Keamanan nasional Dan Kesuksesan Pemilu	5. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik	5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Evaluasi Kinerja Ekonomi Daerah Tahun 2016

a. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pergerakan ekonomi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2016 secara statistik tercermin pada angka pertumbuhan masing-masing sektor atau lapangan usaha, yang dirangkum dalam PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat atas dasar harga konstan tahun 2016. Secara total, perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2016 tumbuh sebesar 5,81%. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan tahun 2015 sebesar 7,32%, atau mengalami penurunan sebesar 1,51%.

Berdasarkan data angka PDRB Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan (AHK) Tahun Dasar 2010, dengan menggunakan pendekatan *trend* total pertumbuhan persektor, angka pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2017 dan 2018 diprediksikan tumbuh secara positif di kisaran 6,81% sampai 6,83%. Demikian juga angka pertumbuhan ekonomi pada 2019, diperkirakan tumbuh stabil sebesar 6,84%. Sementara itu, dengan menggunakan pendekatan rata-rata selisih pertumbuhan persektor pertahun, angka pertumbuhan ekonomi daerah pada 2018 dan 2019 mengalami perlambatan menjadi 6,58% dan 6,34%. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD tahun 2019 sebesar 7,53%.

Tabel 3.1 Target Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kotawaringin Barat 2015-2019 Berdasarkan RPJMD Kab.Kotawaringin Barat 2017-2022

Tahun	2015	2016	2017*	2018**	2019**
Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMD	7.2	7.3	7,04	7,48 %	7,53 %

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, diolah, 2018.
** RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018*
*** RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022*

Target RPJMD 2017-2022 diperoleh berdasarkan data realisasi pertumbuhan ekonomi periode 2011-2015. Mencermati realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2016 yang mengalami perlambatan secara signifikan, capaian tersebut mempengaruhi angka perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ke depan, maka perlu dilakukan penghitungan ulang sebagai penyesuaian terhadap target pertumbuhan ekonomi pada RPJMD 2017-

2022. Penyesuaian ini juga mempertimbangkan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok stabil pada angka 5,4% pada 2018 dan 5,4-5,8% pada 2019, dimana laju pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3.2 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kotawaringin Barat 2015-2016 dan Proyeksi 2017-2019

Tahun	2015	2016	2017*	2018*	2019*
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	7,32 %	5,81 %	6,81%	6,58% - 6,83%	6,34% - 6,84%

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, diolah dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022.

Mencermati pertumbuhan ekonomi secara sektoral pada 2016 berdasarkan PDRB Tahun 2012-2016 AHK Tahun Dasar 2010, meskipun seluruh sektor memiliki angka pertumbuhan yang positif, hampir seluruh sektor mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Perlambatan terbesar dialami oleh sektor **Listrik, Gas dan Air Minum** yang turun dari 17,97% menjadi 3,65% dan sektor **Jasa Keuangan dan Asuransi** yang turun dari 10,29% menjadi 6,23%. Hanya terdapat 2 sektor yang berhasil tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni sektor **Informasi dan Komunikasi** naik dari 7,68% menjadi 7,77% dan sektor **Pertambangan dan Penggalian** naik dari 0,70% menjadi 5,90%.

b. Pertumbuhan sektoral

Kinerja sektoral pada 2016, terjadi pergeseran pertumbuhan yang dialami hampir seluruh sektor. Terdapat 3 sektor yang mencatat angka pertumbuhan tertinggi, meliputi sektor **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** sebesar 8,88%, **Informasi dan Komunikasi** sebesar 7,77% dan **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** sebesar 7,08%. Pertumbuhan di sektor **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** diharapkan memberikan dampak positif, dimana sektor tersebut juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) Tahun 2016. Pertumbuhan di sektor **Informasi dan Komunikasi** mengindikasikan penggunaan teknologi informasi mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa kondisi ini menjadi awal yang positif dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di segala bidang, sebagaimana tertuang dalam misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Sedangkan pertumbuhan di sektor **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** menunjukkan peningkatan aktivitas dan demand pada usaha perhotelan/penginapan dan rumah makan/restoran. Sementara itu, 3 sektor yang mengalami pertumbuhan

terendah adalah sektor **Listrik, Gas dan Air Minum** sebesar 3,65%, sektor **Jasa Pendidikan** sebesar 4,06% dan **Jasa Perusahaan** sebesar 4,15%. Meskipun demikian, hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan, karena ketiga sektor tersebut memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) Tahun 2016.

c. Struktur Ekonomi dan Distribusi Persentase Sektoral terhadap PDRB

Komposisi struktur ekonomi menggambarkan kondisi ekonomi pada setiap tingkatan kegiatan ekonomi. Distrukturkan berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (AHB) 2012-2016 dan proyeksi tahun 2017-2020, terjadi kecenderungan pergeseran proporsi. Pola struktur ekonomi didominasi oleh sektor tersier, diikuti sektor primer dan sekunder. Baik pada data realisasi tahun 2012-2016 maupun proyeksi tahun 2017-2020, dinamika struktur ekonomi bergeser dari sektor primer ke sektor tersier, sementara sektor sekunder cenderung stabil. Sektor primer memiliki kecenderungan menurun, sementara sektor tersier cenderung mengalami peningkatan. Ini mengindikasikan bahwa pergeseran aktivitas sektoral di Kabupaten Kotawaringin Barat melompat dari aktivitas primer ke tersier, namun belum didukung pergerakan aktivitas sekunder. Kinerja sektor sekunder perlu diperbaiki dengan penguatan aktivitas hilir pada sektor primer, utamanya dengan membenahi sektor industri pengolahan. Pengembangan hilirisasi produk sektor primer diharapkan dapat memberikan spread-effect bagi sektor-sektor lain, yakni meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk sektor primer, meningkatkan kinerja sektor sekunder itu sendiri, serta secara otomatis juga akan mendorong kinerja sektor tersier menjadi lebih baik. Grafik pola dan rincian sektor per struktur dapat dilihat pada grafik dan keterangan di bawah ini.

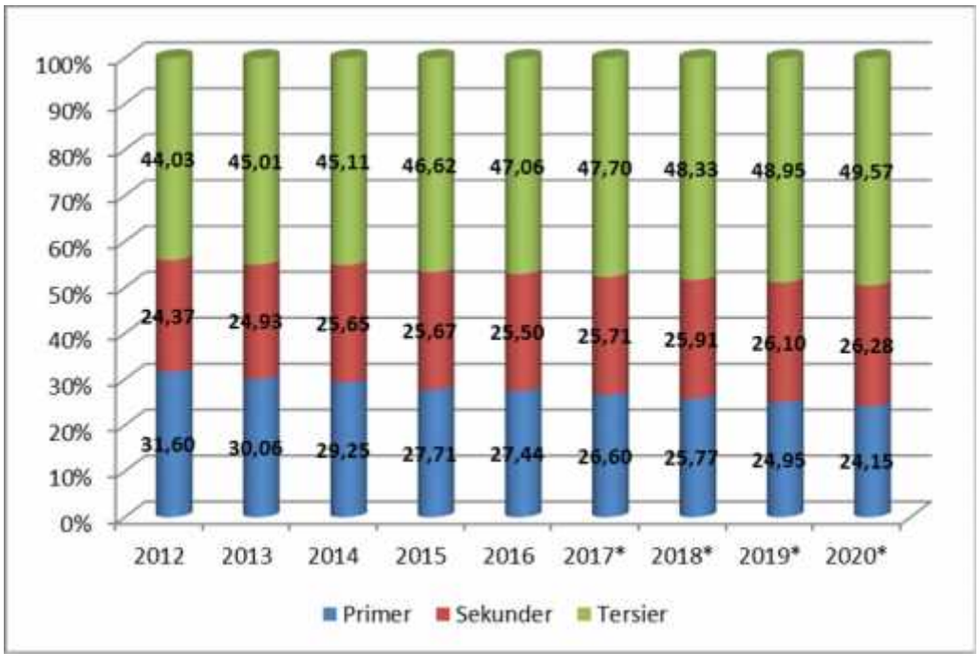

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, diolah, 2018
*angka proyeksi

Gambar 3.1
Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2020

Keterangan sektor per struktur:

Sektor Primer	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
	Pertambangan dan Penggalian
Sektor Sekunder	Industri Pengolahan
	Pengadaan Listrik dan Gas
	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
Sektor Tersier	Konstruksi
	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor
	Transportasi dan pergudangan
	Penyediaan akomodasi dan makan minum
	Informasi dan Komunikasi
	Jasa keuangan dan asuransi
	Real estate
	Jasa perusahaan
	Administrasi pemerintahan, Petahanan dan Jaminan sosial wajib
	Jasa pendidikan
	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
	Jasa lainnya

Sektor dominan dalam struktur

Peranan sektoral dalam membentuk perekonomian daerah, tercermin dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB AHB tahun 2016. Kontribusi tertinggi, sebagaimana komposisi tahun sebelumnya, masih disumbangkan oleh 3 (tiga) sektor yang masing-masing sektor mewakili setiap struktur ekonomi, yakni: **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** (sektor primer) sebesar 26,11%; **Industri Pengolahan** (sektor sekunder) sebesar 25,32%; dan **Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** (sektor tersier) sebesar 12,67%. Dapat dikatakan ketiga

sektor tersebut merupakan lokomotif di tiap struktur ekonomi. Berkebalikan dari kondisi tersebut, beberapa sektor tercatat memberikan kontribusi yang relatif sangat kecil. Terdapat 5 (lima) sektor yang memiliki angka kontribusi kurang dari 1%; 4 (empat) sektor yang memiliki angka kontribusi lebih dari 1% namun kurang dari 2%, dan 1 (satu) sektor yang memiliki kontribusi lebih dari 2% namun kurang dari 3%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa lebih separuh (10 dari 17) sektor ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kinerja dan peranannya.

Tabel 3.3 Kontribusi Terkecil Sektoral dalam PDRB Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016

No	Sektor	Kontribusi <1%	Kontribusi 1%<n>2%	Kontribusi 2%<n>3%
1	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05		
2	Jasa Perusahaan	0,05		
3	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,09		
4	Informasi dan Komunikasi	0,97		
5	Jasa Lainnya	0,97		
6	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial		1,15	
7	Pertambangan dan Penggalian		1,38	
8	Penyediaan akomodasi dan makan minum		1,38	
9	Real Estate		1,88	
10	Jasa Pendidikan			2,59

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, diolah, 2018.

d. Gambaran kondisi ekonomi berdasarkan analisis Tipologi *Klassen, LQ* dan *Shift Share*

Dengan menggunakan data PDRB AHK 2012-2016, analisis tipologi klassen menunjukkan terdapat 4 (empat) sektor yang masuk kategori sektor prima atau maju, 5 (lima) sektor kategori berkembang, 3 (tiga) sektor kategori tertekan dan 5 (lima) sektor kategori tertinggal. Komposisi ini mengalami perubahan dari komposisi tahun sebelumnya, dimana beberapa sektor bergeser dari kategori awalnya. Secara lengkap pergeseran tipologi sektor dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 3.4 Pergeseran Tipologi Sektoral Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016

Tipologi Sektor	Periode 2010-2014	Periode 2012-2016
Maju	⎩Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ⎩Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang ⎩Konstruksi ⎩Transportasi dan pergudangan ⎩Jasa keuangan dan asuransi ⎩Jasa perusahaan	⎩Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang ⎩Transportasi dan pergudangan ⎩Jasa keuangan dan asuransi ⎩Jasa perusahaan
Berkembang	⎩Real estate	⎩Penyediaan akomodasi dan makan minum ⎩Informasi dan Komunikasi ⎩Real estate
Tertekan	⎩Industri Pengolahan ⎩Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	⎩Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ⎩Industri Pengolahan ⎩Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor ⎩Jasa pendidikan ⎩Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
Tertinggal	⎩Pertambangan dan Penggalian ⎩Pengadaan Listrik dan Gas ⎩Penyediaan akomodasi dan makan minum ⎩Informasi dan Komunikasi ⎩Administrasi pemerintahan, Petahanan dan Jaminan sosial wajib ⎩Jasa pendidikan ⎩Jasa kesehatan dan kegiatan sosial ⎩Jasa lainnya	⎩Pertambangan dan Penggalian ⎩Pengadaan Listrik dan Gas ⎩Konstruksi ⎩Administrasi pemerintahan, Petahanan dan Jaminan sosial wajib ⎩Jasa lainnya

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, diolah, 2018.

Keterangan:

Tipologi Maju : sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB.
Tipologi Berkembang : sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi namun memberikan kontribusi yang rendah terhadap PDRB.
Tipologi Tertekan : sektor yang mengalami pertumbuhan rendah namun memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB.
Tipologi Tertinggal : sektor yang mengalami pertumbuhan rendah dan memberikan kontribusi yang kecil terhadap PDRB.

Pergeseran tipologi sebagaimana diuraikan pada tabel di atas menggambarkan bahwa pada level praktis di lapangan, **sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** dan **sektor Konstruksi** mengalami penurunan produktivitas. Sementara sektor **Penyediaan akomodasi dan makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa pendidikan; dan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial** mengalami peningkatan performa. Salah satu faktor yang diperkirakan memberikan pengaruh terhadap performa sektor ekonomi adalah nilai inflasi yang terbentuk pada periode tahun 2015 dan 2016 yang bergerak tidak stabil. Di sisi lain, terjadi peningkatan performa secara positif pada 3 (tiga) sektor, sehingga bergeser meningkat dari kategori tertinggal ke kategori berkembang dan tertekan.

Perhatian yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebaiknya dapat difokuskan pada sektor yang masuk pada tipologi berkembang dan tertekan. **Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan;** serta **Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**, yang masuk dalam tipologi tertekan merupakan sektor dengan kontribusi tinggi terhadap PDRB. Dalam hal ini, ketiga sektor tersebut perlu didorong pertumbuhannya agar dapat meningkat menjadi tipologi sektor maju. Sedangkan terhadap sektor-sektor yang berada dalam tipologi berkembang, dapat difasilitasi agar dapat meningkatkan kontribusinya. Fasilitasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui intervensi kebijakan untuk meningkatkan produkstivitas sektor, sehingga secara otomatis kontribusi sektor turut meningkat.

Berdasarkan analisis *location quotient* (LQ) dengan menggunakan data PDRB AHK Tahun 2012-2016, posisi sektor basis masih belum bergeser dari hasil analisis periode sebelumnya (2012-2014), yakni sebanyak 6 (enam) sektor basis, sementara sektor lainnya merupakan sektor lokal atau non basis. Sektor basis merupakan sektor yang produksinya telah mampu mencukupi untuk kebutuhan lokal dan dapat didistribusikan untuk menyuplai kebutuhan di lokasi lain, sedangkan sektor lokal adalah sektor yang produksinya masih diusahakan untuk memenuhi kebutuhan di tingkat lokal.

Enam sektor yang menjadi basis perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi sektor **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**; Sektor **Industri Pengolahan**; Sektor **Jasa Keuangan dan Asuransi**; Sektor **Transportasi dan Pergudangan;** Sektor **Jasa Perusahaan**; serta sektor **Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.** Hal ini menginformasikan bahwa 6 sektor tersebut merupakan sektor dengan performa yang baik pada periode 2012-2016, dengan kontribusi, produksi dan produktivitas yang tinggi. Kinerja keenam sektor tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan, sementara terhadap 11 sektor lainnya yang merupakan sektor lokal atau non basis, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi dalam bentuk serangkaian kebijakan dan program untuk dapat memperbaiki kinerja sektor dimaksud.

Sementara berdasarkan analisis *shift share*, pada periode 2012-2016 diketahui terdapat 5 sektor yang memiliki keunggulan kompetitif terhadap ekonomi regional, yakni sektor **jasa keuangan dan asuransi; pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, real estate; penyediaan akomodasi dan makan minum. dan pergudangan.** Kelima sektor tersebut dapatdikatakan memiliki daya saing yang baik dalam perkembangannya, dan dapat menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah (sektor propulsif).

Berdasarkan *Overlay* hasil analisis ketiga metode diatas, diketahui bahwa sektor

yang memiliki kinerja positif dan menjadi penggerak bagi sektor lain saat ini adalah sektor **Jasa Keuangan dan Asuransi** serta **Jasa Perusahaan**. Sementara sektor yang potensial berkembang saat ini adalah Sektor **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**; Sektor **Transportasi dan Pergudangan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Moto**r; serta sektor **Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**. Sedangkan sektor lainnya perlu mendapat perhatian untuk membenahi kinerjanya.

e. Dukungan Investasi untuk Mencapai Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang selalu ditetapkan dalam suatu periode perencanaan sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan. Pada 2019, angka pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2027-2022 ditargetkan tumbuh sebesar 7,53%. Untuk mencapai target/perkiraan yang ditetapkan tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai aspek untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi secara riil.

Faktor-faktor produksi yang berdampak pada PDRB terdiri atas 4 komponen yaitu : Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Modal dan Kewirausahaan. Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan salah satu dari faktor produksi, yakni meningkatkan modal atau investasi. Berdasarkan perbandingan nilai ICOR *(Incremental Capital Output Ratio*) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, Kabupaten Kotawaringin Barat cukup kondusif untuk berinvestasi, ditunjukkan dengan angka ICOR sebesar 0,48. Angka tersebut diperoleh melalui membandingkan angka investasi dalam LKPM Tahun 2017 (bersumber dari DPMPTSP Kobar 2017) terhadap nilai proyeksi PDRB ADHK berdasarkan rata-rata pertumbuhan 2012-2016. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa berinvetasi di Kotawaringin Barat sangatlah menguntungkan, dimana untuk menghasilkan 1 output hanya memerlukan modal atau input sebesar 0,48 dari nilai output.

Dengan menggunakan angka ICOR 2017 dan nilai PDRB AHK, dapat diketahui besarnya investasi yang dibutuhkan untuk mencapai skenario pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai angka proyeksi pertumbuhan ekonomi kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 6,74% pada 2019, diperlukan tambahan investasi sebesar Rp. 6.303.844.385.814,01. Sedangkan jika menggunakan angka target pertumbuhan ekonomi berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022 sebesar 7,53% pada 2019, maka investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 6.412.498.734.011,20. Investasi tersebut dapat diarahkan pada sektor-sektor dengan kinerja yang kuat dan kontribusi yang tinggi, seperti **Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Industri Pengolahan;**

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan.

f. Laju Inflasi

Indikator selanjutnya untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah laju inflasi. Inflasi menunjukkan tingkat kestabilan harga komoditi di suatu wilayah. Pada 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan tingkat inflasi dibandingkan 2016, dari 4,08% menjadi 3,61%. Tingkat inflasi ini merupakan angka paling rendah sepanjang 5 tahun terakhir. Apabila dibandingkan dengan kota SBH di Provinsi Kalimantan Tengah, inflasi Kotawaringin Barat pada 2017 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kota Sampit (3,29%) dan Palangka Raya (3,11%). Sementara jika dibandingkan dengan wilayah diatasnya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, inflasi di Kotawaringin Barat masih lebih tinggi dari inflasi provinsi Kalteng (3,18%) namun sama dengan tingkat inflasi nasional (3,61%). Kecenderungan penurunan angka inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat mengindikasikan menurunnya daya beli masyarakat, yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini senada dengan perkembangan inflasi di level nasional yang diperkirakan turun hingga 3,5% pada 2018 dan 2,5-4,5% pada 2019.

Komoditas pemicu inflasi pada 2017 didominasi oleh kelompok bahan makanan, meliputi cabe rawit, kacang panjang, wortel, tarif dasar listrik, besi beton, cabe hijau, bawang putih, seng, perhaisan emas, daging ayam ras, bawang merah, transportasi antar kota, pasir, tomat sayur, bayam, bahan bakar rumah tangga, ikan tongkol, telur ayam ras, angkutan udara, garam, buku tulis, cabe merah, jeruk, petai, terong, ayam ras, kayu balokan dan beras. Inflasi yang terjadi di Kotawaringin Barat lebih dominan disebabkan oleh faktor *volatile food* yaitu inflasi yang diakibatkan oleh naiknya harga komoditi pangan yang disebabkan oleh terganggunya distribusi bahan pangan tersebut dari wilayah sentra ke Kabupaten Kotawaringin Barat. Salah satu penyebabnya adalah belum mampunya Kotawaringin Barat untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sehingga harus dipenuhi dengan mendatangkan komoditi dari luar Kotawaringin Barat.

Tabel 3.5 Nilai Inflasi Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi	6,29 %	7,97 %	4,06 %	4,08 %	3,61 %

Sumber : BPS, 2018.

Tabel 3.6 Nilai dan Persentase Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2018 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat (juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2014		2015		2016		2017*		2018*		2019*	
		Rp	%	Rp		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,597,566.2	6.89	2,749,876.5	5.86	2,907,562.4	5.73	3,062,746.61	5.34	3,226,213.41	5.34	3,398,404.86	5.34
B	Pertambangan dan Penggalian	134,436.5	(11.04)	135,371.6	0.70	143,353.1	5.90	145,778.54	1.69	148,245.03	1.69	150,753.24	1.69
C	Industri Pengolahan	2,393,769.8	7.92	2,556,754.5	6.81	2,690,480.4	5.23	2,872,290.59	6.76	3,066,386.66	6.76	3,273,598.85	6.76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,703.0	10.94	5,547.9	17.97	5,750.2	3.65	6,337.60	10.22	6,985.00	10.22	7,698.54	10.22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,221.6	9.54	8,896.0	8.20	9,343.1	5.03	10,020.79	7.25	10,747.64	7.25	11,527.21	7.25
F	Konstruksi	815,094.6	6.73	85,898.2	8.69	934,460.2	5.48	1,006,053.51	7.66	1,083,131.92	7.66	1,166,115.66	7.66
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,133,837.9	4.90	1,232,135.6	8.67	1,319,377.5	7.08	1,415,221.90	7.26	1,518,028.78	7.26	1,628,303.93	7.26
H	Transportasi dan Pergudangan	775,715.3	5.16	36,753.3	7.87	884,708.5	5.73	957,541.56	8.23	1,036,370.57	8.23	1,121,689.11	8.23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117,608.0	8.96	28,405.8	9.18	139,756.1	8.84	151,825.03	8.64	164,936.21	8.64	179,179.62	8.64
J	Informasi dan Komunikasi	102,192.5	8.20	110,037.5	7.68	118,590.0	7.77	128,109.82	8.03	138,393.83	8.03	149,503.40	8.03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	457,537.7	13.16	504,621.9	10.29	536,083.9	6.23	589,598.66	9.98	648,455.56	9.98	713,187.86	9.98
L	Real Estate	170,990.5	9.14	186,011.3	8.78	198,148.9	6.53	215,412.33	8.71	234,179.82	8.71	254,582.40	8.71
M,N	Jasa Perusahaan	4,357.3	7.95	4,666.2	7.09	4,859.7	4.15	5,234.56	7.71	5,638.34	7.71	6,073.26	7.71
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	285,129.9	9.70	312,953.4	9.76	331,239.2	5.84	357,447.09	7.91	385,728.57	7.91	416,247.71	7.91
P	Jasa Pendidikan	234,713.2	7.17	253,615.9	8.05	263,906.9	4.06	278,743.64	5.62	294,414.49	5.62	310,966.35	5.62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,746.6	7.42	110,859.1	6.86	115,724.4	4.39	123,118.29	6.39	130,984.60	6.39	39,353.50	6.39
RSTU	Jasa Lainnya	83,579.1	5.83	90,308.9	8.05	96,593.3	6.96	103,032.64	6.67	109,901.26	6.67	117,227.76	6.67
JUMLAH TOTAL		**9,423,199.7**	**6.90**	**10.112.713,6**	**7,32**	**10.699.937,8**	**5,81**	**11.428.513,18**	**6,81**	**12,208,741.68**	**6,83**	**13.044.413,26**	**6,84**

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2018
*Keterangan : *) angka proyeksi*

Tabel 3.7 Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2014 - 2019
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat (juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2014		2015		2016		2017*		2018*		2019*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	Rp	%	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,275,175.0	27.80	3,453,449.6	26.35	3,775,183.9	26.06	4,113,825.82	25.28	4,482,844.63	24.51	4,884,965.21	23.75
B	Pertambangan dan Penggalian	170,779.9	1.45	178,541.2	1.36	199,976.1	1.38	214,565.66	1.32	230,219.63	1.26	247,015.66	1.20
C	Industri Pengolahan	3,007,665.6	25.53	3,345,999.4	25.53	3,674,222.6	25.36	4,161,506.54	25.57	4,713,415.22	25.77	5,338,519.30	25.96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,230.7	0.04	6,437.0	0.05	6,854.6	0.05	8,014.14	0.05	9,369.83	0.05	10,954.85	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,009.4	0.08	11,492.4	0.09	12,468.1	0.09	14,112.90	0.09	15,974.69	0.09	18,082.08	0.09
F	Konstruksi	971,321.7	8.24	1,103,333.4	8.42	1,228,807.5	8.48	1,388,231.64	8.53	1,568,339.28	8.57	1,771,813.90	8.62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,414,215.0	12.00	1,644,760.6	12.55	1,835,617.6	12.67	2,079,622.90	12.78	2,356,063.38	12.88	2,669,250.59	12.98
H	Transportasi dan Pergudangan	937,672.8	7.96	1,092,337.1	8.33	1,217,972.1	8.41	1,397,452.93	8.59	1,603,382.11	8.77	1,839,657.10	8.94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	151,088.9	1.28	171,901.2	1.31	200,246.8	1.38	229,997.11	1.41	264,167.36	1.44	303,414.23	1.48
J	Informasi dan Komunikasi	116,329.3	0.99	128,076.0	0.98	139,983.4	0.97	156,110.93	0.96	174,096.52	0.95	194,154.23	0.94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	603,160.7	5.12	693,110.0	5.29	761,271.0	5.26	887,968.59	5.46	1,035,752.35	5.66	1,208,131.61	5.87
L	Real Estate	203,163.3	1.72	240,223.9	1.83	272,923.3	1.88	310,705.04	1.91	353,717.03	1.93	402,683.33	1.96
M,N	Jasa Perusahaan	5,732.5	0.05	6,432.2	0.05	6,939.1	0.05	7,945.59	0.05	9,098.07	0.05	10,417.72	0.05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	375,914.0	3.19	419,649.9	3.20	470,965.6	3.25	536,751.59	3.30	611,726.77	3.34	697,174.74	3.39
P	Jasa Pendidikan	298,535.6	2.53	339,955.8	2.59	375,290.8	2.59	418,225.50	2.57	466,072.09	2.55	519,392.51	2.53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130,909.9	1.11	148,270.3	1.13	166,715.1	1.15	188,624.66	1.16	213,413.56	1.17	241,460.19	1.17
RSTU	Jasa Lainnya	106.819,2	0.91	122.369,4	0.93	140.483,2	0.97	160.462,95	0.99	183.284,25	1.00	209.351,23	1.02
JUMLAH TOTAL		**11,782,723.5**	**100**	**13,106,339.4**	**100**	**14,485,920.8**	**100**	**16.274.124,48**	**100**	**18.226.049,54**	**100**	**20.443.995,02**	**100**

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2018
*Keterangan : *) angka proyeksi*

Tabel 3.8 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2019
Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Harga Konstan (AHK)
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Sektor	2014		2015		2016		2017*		2018*		2019*	
		AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27.80	27.57	26.35	27.19	26.06	27.17	25.28	26.80	24.51	26.43	23.75	26.05
B	Pertambangan dan Penggalian	1.45	1.43	1.36	1.34	1.38	1.34	1.32	1.28	1.26	1.21	1.20	1.16
C	Industri Pengolahan	25.53	25.40	25.53	25.28	25.36	25.14	25.57	25.13	25.77	25.12	25.96	25.10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
F	Konstruksi	8.24	8.65	8.42	8.76	8.48	8.73	8.53	8.80	8.57	8.87	8.62	8.94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.00	12.03	12.55	12.18	12.67	12.33	12.78	12.38	12.88	12.43	12.98	12.48
H	Transportasi dan Pergudangan	7.96	8.23	8.33	8.27	8.41	8.27	8.59	8.38	8.77	8.49	8.94	8.60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.28	1.25	1.31	1.27	1.38	1.31	1.41	1.33	1.44	1.35	1.48	1.37
J	Informasi dan Komunikasi	0.99	1.08	0.98	1.09	0.97	1.11	0.96	1.12	0.95	1.13	0.94	1.15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.12	4.86	5.29	4.99	5.26	5.01	5.46	5.16	5.66	5.31	5.87	5.47
L	Real Estate	1.72	1.81	1.83	1.84	1.88	1.85	1.91	1.88	1.93	1.92	1.96	1.95
M,N	Jasa Perusahaan	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.19	3.03	3.20	3.09	3.25	3.10	3.30	3.13	3.34	3.16	3.39	3.19
P	Jasa Pendidikan	2.53	2.49	2.59	2.51	2.59	2.47	2.57	2.44	2.55	2.41	2.53	2.38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.11	1.10	1.13	1.10	1.15	1.08	1.16	1.08	1.17	1.07	1.17	1.07
RSTU	Jasa Lainnya	0.91	0.89	0.93	0.89	0.97	0.90	0.99	0.90	1.00	0.90	1.02	0.90
	JUMLAH TOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2018
*Keterangan : *) angka proyeksi*

Tabel 3.9 Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (AHK) Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Sektor	Rata-rata Pertumbuhan		Rata-rata Kontribusi	
		AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.97	5.34	27,83	27.62
B	Pertambangan dan Penggalian	7.30	1.69	1,29	1.51
C	Industri Pengolahan	13.26	6.76	25,12	25.20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16.92	10.22	0,03	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.19	7.25	0,09	0.09
F	Konstruksi	12.97	7.66	8,29	8.66
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.29	7.26	11,60	12.21
H	Transportasi dan Pergudangan	14.74	8.23	8,19	8.20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.86	8.64	1,24	1.25
J	Informasi dan Komunikasi	11.52	8.03	0,97	1.09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.64	9.98	6,23	4.78
L	Real Estate	13.84	8.71	1,74	1.80
M,N	Jasa Perusahaan	14.50	7.71	0,05	0.05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.97	7.91	3,29	3.02
P	Jasa Pendidikan	11.44	5.62	2,05	2.49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.14	6.39	1,11	1.10
RSTU	Jasa Lainnya	14.22	6.67	0,89	0.90
	JUMLAH TOTAL	**12.17**	**6.74**	**100**	**100.00**

Sumber : BPS, diolah, 2018

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2019

No.	Indikator Makro Ekonomi	Satuan	Realisasi		Bertambah/	Proyeksi		
			2015	2016	Berkurang	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	8	9	9
1.	PDRB Harga Berlaku (dalam juta)	Rp	13.106.339,4	14.485.920,8	1.379.581,40	16.274.124,48*	18.290.936,77*	20.566.438,47*
2.	PDRB Harga Konstan (dalam juta)	Rp	10.112.713,6	10.699.937,8	587.224,20	11.428.513,18*	12.208.741,68*	13.044.413,26*
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu	%	11,23	10,53	-0,70	12,34*	12,39*	12,44*
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu	%	7,23	5,81	-1,42	6,81*	6,83*	6,84
5.	Tingkat Inflasi	%	4,06	4,08	0,02	3,61	n/a	n/a
6.	Angka Kemiskinan	%	5,04	4,92	-0,12	n/a	4,96**	4,72**
7.	Tingkat Pengangguran	%	2,66	3,25	0,59	3,04**	2,93**	2,82**
8.	PDRB perkapita (AHB) (juta)	Rp	47,12	50,52	3,40	54,91*	59,68*	64,87*

Sumber : BPS, diolah, 2018

Catatan:

* Angka PDRB AHK dan AHB, Pertumbuhan Ekonomi AHK dan AHB, serta PDRB perkapita AHB 2017, 2018, 2019 adalah angka proyeksi

** Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran 2017, 2018, 2019 diambil dari Target RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022

g. Ekspor dan Impor Kabupaten Kotawaringin Barat

Dalam aktivitas perdagangan, dikenal kegiatan ekspor dan impor. Ekspor merupakan arus perpindahan keluar barang dari negara penghasil ke negara penerima barang, dalam hal ini ekspor berarti perpindahan barang keluar Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan kegiatan impor merupakan arus perpindahan barang masuk ke dalam negeri yang berasal dari luar negeri, dalam hal ini impor berarti arus barang yang masuk ke Kabupaten Kotawaringin Barat dari luar Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan nilai ekspor dan impor pada tahun 2016, neraca Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami surplus sebesar $ 93.291.679 di mana jumlah nilai ekspor jauh lebih besar dibandingkan nilai impor yakni sebesar $ 120.298.710, sementara nilai impor sebesar $ 27.007.031 (BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2018). Dibandingkan tahun 2015, angka ekspor Kotawaringin Barat mengalami penurunan, yakni turun dari $186.428.669,99 menjadi $120.298.710. Sementara jika dibandingkan tahun 2017, angka ekspor Kotawaringin Barat mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni meningkat dari $120.298.710 menjadi $269.470.000,00. Meningkatnya realisasi ekspor daerah pada tahun 2017 lebih dipengaruhi oleh membaiknya kondisi ekonomi global sehingga volume permintaan produk komoditas ekspor ikut mengalami kenaikan. Komoditas yang diekspor mencakup 3 jenis komoditi utama terdiri dari Kelompok Kayu dan barang dari kayu; Kelompok Lemak & minyak hewan/nabati; serta Kelompok Bijih, kerak, dan abu logam.

Dilihat dari negara tujuan ekspornya, pada 2016, Jepang menjadi negara terbesar penerima ekspor dari Kotawaringin Barat dengan nilai $ 55.643.060 sedangkan yang terkecil adalah ke negara Taiwan dengan nilai ekspor $ 11.109. Sementara Impor ke Kabupaten Kotawaringin Barat terbesar berasal dari negara Malaysia $ 16.745.825 dan yang terkecil berasal dari negara Korea Selatan dengan nilai $ 900. Berikut disajikan rincian angka ekspor dan impor Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dan 2016.

Tabel 3.11 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dan 2016

No	Negara Tujuan Ekspor & Asal Impor	Nilai ($)				Perkembangan Ekspor ($)	Perkembangan Impor ($)
		Ekspor		Impor			
		2015	2016	2015	2016		
1	Jepang	38.938.549	55.643.060		519.069	∧16.704.511	∧519.069
2	Australia		51.363		2.815.595	∧51.363	∧2.815.595
3	Arab Saudi	24.152.032	3.399.231			∨20.752.801	
4	Tiongkok	13.272.578	12.298.028		1.247.598	∨974.550	∧1.247.598
5	Uni Emirat Arab	7.072.351	8.142.379			∧1.070.028	
6	Oman	6.989.926	6.187.429			∨802.497	
7	Malaysia	6.889.099	6.887.382	30.581.597	16.745.825	∨1.717	∨13.835.772
8	Qatar	4.502.096	2.417.966			∨2.084.130	
9	Belgia	2.881.770	2.334.715		17.400	∨547.055	∧17.400
10	Korea	878.915	283.425		900	∨595.490	∧900
11	Kuwait	661.752	118.945			∨542.807	
12	Polandia	47.048	25.255			∨21.793	
13	Jerman	40.773	134.651		1.398.141	∧93.878	∧1.398.141
14	Belanda	27.400	78.594		472.000	∧51.194	∧472.000
15	Singapura	32.431.478		8.373.647	2.408.145	∨32.431.478	∨5.965.502
16	Inggris	26.118	118.261		42.500	∧92.143	∧42.500
17	Hongkong	25.995		4.869.820	672.154	∨25.995	∨4.197.666
18	Amerika Serikat	24.993	115.779		9.000	∧90.786	∧9.000
19	Perancis	12.823	17.755			∧4.932	
20	Taiwan		11.109	303.004	5.350	∧11.109	∨297.654

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka 2016 dan 2017.

3.1.2. Gambaran Kinerja Ekonomi Daerah Tahun 2019

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Barat pada 2019 secara global cenderung mengalami perlambatan, disesuaikan dengan kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami perlambatan dan realisasinya di bawah ekspektasi sejak 2014. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan sektoral periode 2012-2016, pada 2019, hampir seluruh sektor akan tumbuh lebih tinggi dari angka pertumbuhan tahun 2016, kecuali sektor **Pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian**; serta **jasa lainnya** yang tumbuh di bawah rata-rata.

Memperhatikan rata-rata peranan sektor pertanian pada PDRB atas dasar harga berlaku (AHB) 2011-2013 terdapat kecenderungan bahwa proporsi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya sejak 2010. Pada 2019 diperkirakan proporsinya akan turun menjadi 23,75%. Penurunan nilai

tersebut bukan semata-mata menunjukkan bahwa sektor pertanian mengalami penurunan, namun hanyalah pergeseran persentase/komposisi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor ekonomi lainnya juga mengalami pertumbuhan sehingga menyebabkan peningkatan persentase/proporsi di sektor lainnya, inilah yang menyebabkan proporsi atau persentase sektor pertanian menjadi bergeser, sebab persentase akhir PDRB secara total adalah tetap 100%. Sementara secara nominal, nilai sumbangan/kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB dalam rupiah selalu mengalami peningkatan (pada tahun 2014 sebesar Rp.3.373.465.700.000 diproyeksikan menjadi Rp.4.723.141.910.000 pada tahun 2017). Sektor **Industri Pengolahan** berada di posisi kedua dengan proporsi sebesar 25,96%, sektor **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** menempati urutan proporsi tiga terbesar dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 12,98%. Sektor **Transportasi dan Pergudangan** menempati urutan ke empat dengan menyumbang sebesar 8,94%. Kelima Sektor Konstruksi menyumbang sebesar 8,62%. serta diikuti Sektor **Jasa Keuangan dan Asuransi** menempat urutan ke enam sebesar 5,87%. Keenam sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang diperkirakan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2019. Sedangkan sektor lainnya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB.

Memperhatikan rata-rata peranan sektor pertanian pada PDRB atas dasar harga berlaku (AHB) 2011-2013 terdapat kecenderungan bahwa proporsi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya sejak 2010. Pada 2019 diperkirakan proporsinya akan turun menjadi 23,75%. Penurunan nilai tersebut bukan semata-mata menunjukkan bahwa sektor pertanian mengalami penurunan, namun hanyalah pergeseran persentase/komposisi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor ekonomi lainnya juga mengalami pertumbuhan sehingga menyebabkan peningkatan persentase/proporsi di sektor lainnya, inilah yang menyebabkan proporsi atau persentase sektor pertanian menjadi bergeser, sebab persentase akhir PDRB secara total adalah tetap 100%. Sementara secara nominal, nilai sumbangan/kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB dalam rupiah selalu mengalami peningkatan (pada tahun 2014 sebesar Rp.3.373.465.700.000 diproyeksikan menjadi Rp.4.723.141.910.000 pada tahun 2017). Sektor **Industri Pengolahan** berada di posisi kedua dengan proporsi sebesar 25,96%, sektor **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** menempati urutan proporsi tiga terbesar dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 12,98%. Sektor **Transportasi dan**

Pergudangan menempati urutan ke empat dengan menyumbang sebesar 8,94%. Kelima Sektor Konstruksi menyumbang sebesar 8,62%. serta diikuti Sektor **Jasa Keuangan dan Asuransi** menempat urutan ke enam sebesar 5,87%. Keenam sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang diperkirakan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2019. Sedangkan sektor lainnya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB.

Memperhatikan hasil analisis di atas, dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rumusan arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, meliputi faktor internal dan eksternal, sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan *(Strength)*:

- Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kawasan agropolitan dan minapolitan.
- Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki perda No.1 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
- Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki Perda No.1 Tahun 2018 tentang RTRW.
- Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki Perda No.2 Tahun 2018 tentang RPJMD.

2. Kelemahan:

- Pemasaran produk yang masih kurang efektif.
- Infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian daerah belum merata dan memadai, khususnya infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata.
- Produk potensial di sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata, pengelolaannya masih bersifat konvensional, sehingga memiliki kualitas, nilai tambah dan daya saing yang belum maksimal.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang:

- Terdapat 63 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik swasta nasional maupun swasta asing.
- Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak produk unggulan potensial, meliputi produk barang dan jasa, utamanya sektor pertanian dalam arti luas, industri dan UKM, serta pariwisata.
- Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sejumlah destinasi pariwisata yang potensial untuk dikembangkan.

- Sektor pertanian dalam arti luas memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Perlakuan dan Target:

- Terwujudnya peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian dalam arti luas dan kepariwisataan.
- Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sentra produksi pertanian dalam arti luas.

C. Rumusan Kebijakan Berdasarkan Analisis SWOT:

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal di atas, dapat dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Analisis SWOT

MATRIKS IFAS-FAKTOR INTERNAL / MATRIKS EFAS-FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kawasan agropolitan dan minapolitan. 2. Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki perda No.1 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). 3. Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki Perda No.1 Tahun 2018 tentang RTRW. 4. Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki Perda No.2 Tahun 2018 tentang RPJMD.	1. Pemasaran produk yang masih kurang efektif. 2. Infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian daerah belum merata dan memadai, khususnya infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata. 3. Produk potensial di sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata, pengelolaannya masih bersifat konvensional, sehingga memiliki kualitas, nilai tambah dan daya saing yang belum maksimal.

PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Terdapat 63 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik swasta nasional maupun swasta asing. 2. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak produk unggulan potensial, meliputi produk barang dan jasa, utamanya sektor pertanian dalam arti luas, industri dan UKM, serta pariwisata. 3. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sejumlah destinasi pariwisata yang potensial untuk dikembangkan. 4. Sektor pertanian dalam arti luas memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.	***SO (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang) :*** 1. Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan daerah (S2,O1).	***WO (memanfaatkan peluang untuk menanggulangi kelemahan:*** 1. Meningkatkan investasi daerah dan Memperluas akses pemasaran produk-produk lokal daerah (W1, O2). 2. Meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian daerah berbasis produk unggulan daerah (pariwisata dan pertanian dalam arti luas) (W2, O3, O4);

PERLAKUAN-TARGET (Treatments-Targets)	***ST (menggunakan kekuatan untuk mencapai target) :***	***WT (mengatasi kelemahan dengan menggunakan perlakuan mengacu pada target) :***
1. Terwujudnya peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian dalam arti luas dan kepariwisataan. 2. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sentra produksi pertanian dalam arti luas.	1. Mengembangkan kawasan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif (S1, T2).	1. Peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian dalam arti luas dan kepariwisataan (W2, W3, T1).

Sumber: Hasil Analisis, 2018.

Dengan mengacu pada arah kebijakan nasional dalam rencana kerja pemerintah tahun 2018, ***yakni Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif,*** maka kebijakan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait langsung dengan pengembangan sektor ekonomi adalah :

1. Melaksanakan Program terpadu bidang pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak;
2. Mempersiapkan pengembangan sektor industri pengolahan (aspek hilir produk pertanian) dan perdagangan sebagai lokomotif ekonomi baru selain pertanian dalam arti luas;
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Mempersiapkan pengembangan kawasan berdasarkan sektor unggulan dan potensi masing-masing (kompetensi inti kawasan)
6. Peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah daerah di atas memerlukan dukungan mutlak berupa komitmen Perangkat Daerah (PD) teknis dalam pelaksanaan di lapangan. PD teknis diwajibkan mengawal kebijakan yang telah digariskan, yang dituangkan dalam program/kegiatan. Untuk itu PD teknis wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan daerah.

Selaras dengan kebijakan ekonomi tahun 2018, maka kebijakan ekonomi tahun 2019 diarahkan antara lain untuk:

1. Meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian daerah berbasis produk unggulan daerah (pariwisata dan pertanian dalam arti luas);
2. Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan daerah.
3. Mengembangkan kawasan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif ;
4. Meningkatkan investasi daerah dan Memperluas akses pemasaran produk-produk lokal daerah.

Untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan, selaras dengan kebijaan ekonomi daerah tahun 2019, maka kebijakan ekonomi daerah tahun 2020 diarahkan kepada:

1. Meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian daerah berbasis produk unggulan daerah (pariwisata dan pertanian dalam arti luas) dengan memperhatikan kearifan lokal dan green economy:
2. Mengoptimalkan pembangunan pertanian dalam arti luas dan pariwisata melalui kerjasama antar daerah, kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) serta peningkatan partisipasi masyarakat desa.
3. Mengembangkan kawasan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif;
4. Meningkatkan investasi daerah dan Memperluas akses pemasaran produk-produk lokal daerah.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 3) pendapatan daerah yang sah, meliputi: pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang

ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM;; Potensi yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 diarahkan pada optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1) Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2) Melakukan upaya penegakan perda pajak daerah dan retribusi daerah melalui Tim Yustisi dengan bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
3) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah
4) Diversifikasi sumber pendapatan daerah;
5) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber -sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
6) Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil;
7) Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
8) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
9) Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
10) Meningkatkan pendataan terkait sumber daya alam sebagai salah satu

komponen perhitungan dana perimbangan daerah;

11) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah.
12) Penguatan Local Taxing Power dengan strategi Memperluas Basis Pungutan Dan Diskresi Penetapan Tarif.
13) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam hal menunaikan kewajibannya selaku wajib pajak.
14) Dalam Bidang Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2016 dan 2017 dan target pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada kurun waktu Tahun 2018 serta asumsi pendapatan Tahun 2019, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2016-2019

No. Urut	Uraian	Realisasi		TARGET APBD	PROYEKSI	PRAKIRAAN MAJU
		2016	2017	2018	2019	2020
4	**PENDAPATAN DAERAH**					
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**143.330.741.728,12**	**176.855.124.641,39**	**185.457.434.000,00**	**212.902.300.000,00**	**241.782.894.000,00**
4.1.1	Pajak Daerah	33.359.659.422,17	48.280.750.268,53	57.180.000.000,00	63.622.600.000,00	71.418.999.500,00
4.1.2	Retribusi Daerah	14.203.971.989,00	12.424.399.638,00	18.452.318.000,00	20.127.220.400,00	24.096.619.300,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.050.925.491,34	8.110.575.146,38	9.309.174.000,00	10.816.684.000,00	11.260.750.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	88.716.184.825,61	108.039.399.588,48	100.515.942.000,00	118.335.795.600,00	135.006.525.200,00
4.2	**Dana Perimbangan**	**999.504.184.473,00**	**938.379.875.488,00**	**898.156.928.000,00**	**1.106.043.591.000,00**	**1.477.567.000.000,00**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	75.757.165.453,00	56.433.629.483,00	68.981.515.000,00	78.981.515.000,00	105.519.880.100,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	662.249.343.000,00	652.906.913.000,00	652.906.913.000,00	721.631.044.170,00	1.026.486.463.450,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	261.497.676.020,00	229.039.333.005,00	176.268.500.000,00	305.431.031.830,00	345.560.656.450,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**143.410.842.815,31**	**202.027.615.367,28**	**206.030.042.000,00**	**278.960.773.000,00**	**313.912.553.000,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.983.000.000,00	3.588.000.000,00	38.179.800.000,00	40.110.000.000,00	4.650.000.000,00
4.3.3	DBH Pajak dari Provinsi	64.476.297.693,31	68.899.707.882,28	70.725.351.000,00	89.670.221.180,00	99.751.709.700,00
4.3.4	Dana Penyesuaian	58.634.768.000,00	120.744.072.600,00	83.595.758.000,00	130.267.701.820,00	188.113.093.300,00
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	15.316.777.122,00	8.795.834.885,00	13.529.133.000,00	18.912.850.000,00	21.397.750.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.286.245.769.016,43**	**1.317.262.615.496,67**	**1.289.644.404.000,00**	**1.597.906.664.000,00**	**2.033.262.447.000,00**

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 menggunakan prinsip money follow programme, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan (ADD), tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah).

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan, sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Rencana Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat serta dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja

daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari urusan wajib Dasar, Urusan Wajib Non Dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dengan mengupayakan 20% anggaran pendidikan sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yaitu 10% anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif dan Perpres nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
3. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang melalui Program terpadu dan holistik melalui program-program pro rakyat yang menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan serta peningkatan alokasi dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
4. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;

Aspek Pelayanan Publik

1. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan kedaulatan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan *prospektif* dan mendukung percepatan kawasan/ *cluster* industri berbasis pertanian.

II. Aspek Daya Saing

1. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/ *interisolasi*, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan ro-ro, pelabuhan laut dalam dan bandara bertaraf internasional;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi sumberdaya hayati dan kearifan budaya lokal serta teknologi informasi.
4. Mempercepat reformasi regulasi dan birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang *capable* dan *responsible*, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check* and *balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparan dan akuntabel menuju *good governance*.
5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kedaulatan pangan, integrasi kelapa sawit dan ternak sapi serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
6. Membuat kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang bersifat selektif dan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat-alat pertanian dan lain-lain, serta

penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan.

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana ADD dan Dana Desa dalam upaya pelaksanaan kegiatan secara optimal dan tepat sasaran.
8. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan/ Hibah harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif bagi kelompok berbadan hukum.
9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan terhadap Belanja Tidak Langsung pada RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai diarahkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimun 2,5% dari jumlah pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Serta pengalokasian anggaran untuk tambahan penghasilan PNS.

2) Belanja Hibah

Kebijakan pemberian hibah dilakukan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, semi pemerintah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan atas usulan.

3) Belanja Sosial

Kebijakan pemberian belanja bantuan sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

4) Belanja Bagi Hasil

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daserah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 10% kepada Pemerintah Desa.

5) Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan diluar DAK bersifat umum yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tiga (3) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2019 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi /Target Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 - 2020

NO	Uraian	Realisasi		APBD	Proyeksi	Perkiraan Maju
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5		6
5	**BELANJA DAERAH**					
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**614.924.788.000,00**	**571.736.983.219,00**	**630.151.041.000,00**	**709.406.664.000,00**	**862.758.733.700,00**
5.1.1	Belanja pegawai	429.310.474.848,00	402.416.578.934,00	470.584.816.200,00	519.487.089.000,00	562.666.056.000,00
5.1.2	Belanja bunga	858.680.569,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
5.1.3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.1.4	Belanja hibah	19.840.520.000,00	22.678.514.612,00	7.898.680.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
5.1.5	Belanja bantuan sosial	354.550.000,00	1.517.250.000,00	2.448.000.000,00	3.448.000.000,00	3.500.000.000,00
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa	1.980.543.000,00	6.859.967.500,00	7.563.231.800,00	8.374.982.000,00	9.381.562.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	125.252.605.309,00	138.256.386.658,00	139.156.313.000,00	156.596.593.000,00	267.211.115.700,00
5.1.8	Belanja tidak terduga	117.613.913,00	8.285.515,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.2	**Belanja Langsung**	**667.486.100.068,64**	**719.644.220.971,40**	**697.369.805.000,00**	**858.000.000.000,00**	**988.000.000.000,00**
2.2.1	Belanja Pegawai	81.474.081.069,00	59.160.266.682,00	123.534.865.894,80	128.700.000.000,00	98.800.000.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	207.296.797.293,56	257.162.837.710,85	261.239.352.188,20	274.560.000.000,00	266.760.000.000,00
2.2.3	Belanja Modal	378.715.221.706,08	403.321.116.578,55	312.595.586.917,00	454.740.000.000,00	622.440.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**1.245.201.087.707,64**	**1.291.381.204.190,40**	**1.327.520.846.000,00**	**1.567.406.664.000,00**	**1.850.758.733.700,00**

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kebijakan penerimaan pembiayaan Nihil, hal ini memperhatikan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan 2018.

Kebijakan atas pengeluaran pembiayaan digunakan untuk :

a. Penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, PDAM Tirta Arut dan Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera dengan total alokasi untuk penyertaan modal / investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.500.000.000,00;
b. Pembayaran Pokok Pinjaman Tahun 2018 sebesar Rp. 20.000.000.000,00.

No.	Uraian	2017	
		Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA		
2.	Pelampauan penerimaan PAD		
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan		
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah		
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya		
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum erselesaikan		
7.	Kegiatan lanjutan		

BAB IV
SASARAN DANPRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan tahun 2019 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pada bagian ini dirumuskan:

1. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
    a. Korelasi terhadap Program Prioritas Nasional (Nawacita) yang pada tahun 2019 memprioritaskan pada 5 (lima) program nasional yaitu: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan dasar (2) Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
    b. Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
    c. Korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
    d. Korelasi terhadap isu strategis daerah.

2. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.
3. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, PD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.
4. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.
5. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.
6. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

4.1. Visi dan Misi Pembangunan

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dantantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

”GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata IKHLAS yaitu :

I : IPTEK DAN INFRASTRUKTUR

K : KETAKWAAN

H : HARMONIS

L : LANGGENG

A : AMAN

S : SEJAHTERA

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI,yaitu :

N : NASIONALIS

U : UNGGUL

R : RELIGIUS

A : AMANAH

N : NYATA

I : INSPIRATIF

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Gerakan Membangun	Terwujudnya partisipasi dan kesadaran tinggi bagi masyarakat dan pemerintah untuk berupaya bersama-sama, bersinergi harmonis membangun kabupaten kotawaringin barat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui gerakan membangun Kabupaten Kotawaringin Barat
Kejayaan	Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan, menuju masyarakat kabupaten yang nasionalis, religius, aman dan sejahtera, melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan inpiratif, dan dilaksanakan secara nyata dan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten.
Kerja nyata	Terwujudnya etos kerja pemerintah dalam membangun daerah secara nyata, inspiratif, dalam mewujudkan amanah masyarakat, menghasilkan pembangunan yang inspiratif dan berdampak nyata pada kemajuan daerah.

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Iptek dan Infrastruktur	Terwujudnya pengembangan IPTEK dan Infrastruktur yang maju melalui peningkatan sistem akses internet, buku, akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, serta peningkatan sistem transportasi umum dan peningkatan sistem infrastruktur antar wilayah guna membuka peluang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih maju dan jaya
Ketakwaan	Terciptanya Ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari moral yang baik dengan cara memiliki tindakan untuk menciptakan suasana yang agamis, tentram dan damai
Harmonis	Tercipta keberagaman masyarakat yang Harmonis melalui kesetaraan sosial, tidak menyebar fitnah dan isu SARA, tidak menimbulkan kekacauan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bermasyarakat
Langgeng	Terwujudnya interaksi dan pergaulan yang Langgeng melalui saling menghargai dan menghormati, berempati, dan tidak bersikap egois guna menciptakan ketentraman dan kedamaian demi terwujudnya kejayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Aman	Terciptanya keberadaan hidup yang Aman dengan membudayakan anti kekerasan, mengenali kerentanan Kabupaten Kotawaringin Barat, dan meningkatkan peran perangkat perlindungan masyarakat
Sejahtera	Terwujudnya kehidupan masyarakat Sejahtera, melalui penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup guna mencukupi pangan, sandang dan papan

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yaitu **"**GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS". Adapun misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:.

Misi 1 Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Misi 2 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

Misi 3 Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup.

Misi 4 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat

Misi 5 Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Misi 6 Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat
5. Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan
6. Peningkatan Pariwisata Daerah

4.2.2. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 tertuang dalam indikator kinerja yang mengacu pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan.

2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.
5. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.
8. Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi.
9. Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama.
10. Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa.
11. Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layak anak.
12. Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis.
13. Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi.
14. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.
15. Meningkatnya Niali Kearifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata.

4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

4.3.1. Tema dan Isu Stategis

1. Tema

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, maka tema pembangunan daerah tahun 2019 adalah "**Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah"**

2. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki daya ungkit besar dalam memberikan dampak pada pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Rendahnya Kualitas dan Kuantitas ASN dalam akuntabilitas keuangan dan Kinerja**

   Kualitas dan kuantitas ASN dalam akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mash rendah ditunjukkan dengan nilai akuntabilitas kinerja yang masih rendah. hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan daerah serta masih terbatasnya kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. **Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Secara Elektronik.**

   Penguasaan ASN dalam penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan secara Elektronik masih terbatas.Hal ersebut ditunjukkan dengan masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan e-government serta belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah.

3. **Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**

   Tata kelola pemerintahan desa merupakan hal yang harus menjadi konsentrasi pemerintah dikarenakan posisi desa yang sekarang ini menjadi konsentrasi pembangunan nasional. Untuk membantu memajukan pembangunan melalui desa, maka pemerintah wajib untuk memberikan pendampingan dalam hal tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam penggunaan anggaran desa yang bersumber dari ADD diakrenakan jumlahnya yang cukup besar, sehingga nantinya ADD dapat dimanfaatan secara efektif dan efisien.

4. **Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan**

   Pendidikan merupakan pintu yang digunakan untuk menngkatkan kualitas sumber daya manusia.Namun jika dilihat dari angka APK PAUD dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat, nilainya masih cukup rendah. Hal itu didukung dengan fakta bahwa nilai APK PAUD yang masih diangka 30,03% dan masih terdapat anak usia sekolah yang terpaksa berhenti sekolah karena berbagai permasalahan. Hal tersebut menunjukkan belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan..

5. **Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan**

   Selain akses terhadap pendidikan, sarana-prasarana penunjang pelayanan pendidikan juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan kelayakannya. Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan minat dan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa. Sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan di Indonesia seharusnya disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan

dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).Namun jika mengacu pada SNP masih terdapat sarana-prasarana pendidikan yang masih belum sesuai dengan SNP.

6. **Kurangnya dukungan akomodasi/Insentif terhadap tenaga pengajar**

   Tenaga pengajar merupakan aktor yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan terhadap siswa didiknya. Oleh karena itu Kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajar. Memperhatikan hal tersebut maka sudah selayaknya kualitas tenaga pengajar harus diperhatikan baik dari segi kapasitas keilmuan dan kebutuhan hidupnya. Namun jika melihat kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat, masih terdapat sekolah yang tidak dilengkapi dengan rumah dinas, serta masih elum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas pelayanan pendidikan pada masyarakat.

7. **Kurangnya minat baca masyarakat**

   Membaca merupakan salah satu cara untuk belajar dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tingginya minat baca juga digunakan sebagai salah satu acuan dalam menilai kualitas sumberdaya manusia.Jika dilihat dari kondisi empiris di Kabupaten Kotawaringin Barat, kondisi minat baca masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup rendah.

8. **Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar**

   Selain akses terhadap layanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Melihat kondisi kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat beberapa fasilitas layanan kesehatan yang belum optimal seperti belum semuanya puskesmas yang ada mendapat akreditasi, belum terpenuhinya kebuthan obat-obatan sesuai standar, serta masih belum sesuainya RSUD dengan kualifikasi standar rumah sakit rujukan regional.

9. **Kurangnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan**

   Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat.Secara umum untuk mengukur tingkat kesehatan dapat dilihat dari nilai angka harapan hidup termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat.AHH di Kabupaten Kotawaringin Barat masih perlu ditingkatkan lagi, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya balita gizi buruk, masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir.Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai.Akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat tidak mampu sangatlah

penting untuk diupayakan, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

10. **Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi pemuda**

    Pemuda sebagai penerus bangsa merupakan asset yang sangat berharga.Keaktifan pemuda dalam mengikuti atau melakukan hal-hal positif merupakan salah satu kontribusi yang daik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas social ekonomi di masyarakat.Oleh karena hal tersebut sangat penting untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi pemuda sehingga organisasi tersebut dapat menjadi wadah bagi pengembangan potensi-potensi dan bakat yang dimiliki oleh pemuda di kabupaten Kotawaringin Barat.Namun kondisi yang ada sekarang, pembinaan terhadap organisasi kepemudaan masih belum berjalan optimal.

11. **Belum optimalnya pengelolaan sarana-prasarana olahraga**

    Salah satu pengembangan terhadap bakat-bakat pemuda adalah melalui berbagai cabang olahraga.Untuk menunjang hal tersebut maka diperlukan sarana-prasarana yang layak pakai.Namun jika dilihat kondisi yang ada saat ini, pengelolaan sarana-prasarana olah raga masih belum dilakukan secara optimal.

12. **Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri**

    Infrastruktur sebagai pengungkit pembangunan di berbagai sektor menjadikan permasalahan dalam bidang ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan.Kondisi dukungan infrastruktur di sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih rendah.Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya Rencana Induk pembangunan industry kabupaten.Hal tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan sektor industry khususnyasektor industri kecil/rumah tangga maupun perkembangan di sektor industry hilir.

13. **Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya Penunjangnya pengembangan Pertaninan, Perikanan dan Peternakan**

    Kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan masih rendah.Hal tersebut terlihat dari tingkat produktifitas komoditas di berbagai sektor (pertanian, perikanan, dan peternakan) masih tergolong rendah. Selain itu pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan ketiga sektor tersebut juga masih cukup rendah.

14. **Rendahnya Daya Dukung Dalam Pengembangan Usaha masyarakat, Koperasi dan UMKM (Rendahnya Minat Kewirausahaan Masyarakat)**

    Minat masyarakat untuk berwirausaha masih tergolong rendah, hal itu ditunjukkan dengan belum optimalnya produktifitas Koperasi dan UMKM, selain

itu kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha juga ikut mempengaruhi perkembangan usaha UMKM

15. **Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan PAD**

    Sistem pengelolaan PAD masih belum optimal, sehigga mengakibatkan target PAD selama 4 tahun tidak tercapai.Kurang optimalnya pengelolaan PAD dapat dikarenakan belum adanya tata kelola pembinaan dan pengawasan BUMD serta pengelolaan yang masih belum berbasis teknologi informasi.Selain itu penggalian PAD yang ada selama ini masih belum didasarkan pada data potensi daerah.

16. **Rendahnya Kualitas danKuantitas Infrastruktur dan Transportasi Penunjang Publik maupun Ekonomi**

    Dalam kondisi baik selain itu untuk daerah perkotaan masih memiliki masalah terkait drainase yang masih belum optimal. Dari segi akses, belum semua desa terhubung dengan akses jalan darat. Dari sisi sanitasi hidup masyarakat juga masih tergolong rendah.Masih terdapatnya kawasan kumuh di perkotaan. Dari segi Transportasi, masih belum adanya angkutan dalam kota dan masih terbatasnya angkutan udara. Angkutan kota yang menghubungkan antar ibukota kecamatan juga masih belum terkelola dengan baik.

17. **Lemahnya Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ideologi Bangsa Dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama**

    Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ideologi Bangsa Dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama masih belum optimal.Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya ketahanan ideology berbangsa serta kewaspadaan masyarakat yang masih lemah.

18. **Masih Rendahnya Profesionalitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan ADD, DD, Dan Intervensi Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir**

    Masih rendahnya profesionalitas Aparatur Desa khususnya dalam hal pengelolaan ADD, DD, dan Intervensi Dalam Pengawasan pengelolaan dana Bergulir yang tercermin dari belum terkelolanya dana bergulir serta pengelolaan keuangan lainnya dengan baik. Selain itu pengelolaan pembangunan secara partisipatif juga masih belum belum optimal.

19. **Masih tingginya tingkat kekerasan Terhadap perempuan dan anak**

    Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Barat juga masih menjadi perhatian serius dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kasus KDRT pada anak meningkat hingga (0,3%) dan masih adanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu

pemenuhan akan hak-hak bagi perempuan dalam bidang pembangunan terutama di struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal.

20. **Masih Lemahnya Tingkat Keamanan Dan Tingginya Pelanggaran Perda Dikarenakan Kurang Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.**

    Keterlibatan masyarakat mutlak dilakukan supaya pembangunan dapat dilaksanakan secara partisipatif.Selain itu tingkat perselisihan antara perusahaan dengan tenaga kerja juga masih tinggi.

21. **Belum Optimalnya Pemenuhan Aspek *Attraction, Accessibility, Ammenity,* dan *Ancillary Service* Destinasi Wisata**

    Untuk mendukung dan mempercepat pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, seharusnya 4 aspek pembangunan pariwisata dipenuhi. 4 aspek tersebut adalah *Aspek Attraction, Accessibility*, *Ammenity*, dan *Ancillary Service* Destinasi Wisata. Namun kondisi saat ini 4 aspek tersebut masih belum tercukupi. Selain itu pengelolaan pariwisata yang ada sekarang masih belum optimal.Dari segi kesadaran masyarakat sekitar obyek pariwisata juga masih rendah. Sedangkan dari segi perkembangan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai dampak lain dari pembangunan sektor pariwisata juga masih belum signifikan.

22. **Lemahnya *Branding* Wisata Kotawaringin Barat**

    Untuk meningkatkan popularitas pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan melalui pembuatan branding sebagai salah satu identitas pariwisata. Namun, saat ini branding yang dibuat masih belum optimal. Selain itu promosi wisata sebagai ujung tombak dalam pemasaran pariwisata di Kabupaten Kotawaringin barat juga masih belum optimal. Selain itu hingga saat ini masih belum ada system yang terintegrasi dalam promosi pariwisata, perdagangan dan investasi.

4.3.2. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan daerah dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah tersebut terdiri dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat beberapa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penguasaan IPTEK.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar.
3. Mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan sarana prasarana infrastruktur.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat berorientasi potensi unggulan daerah.

Berdasarkan tema, pembangunan daerah tahun 2019 adalah "**Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah.** Dari tema tersebut yang menjadi penekanan sasaran prioritas dan program prioritas pembangunan tahun 2019 sebagai berikut :

Isu Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Prioritas Program
1. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas ASN dalam akuntabilitas keuangan dan Kinerja	**1. Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penguasaan IPTEK**	1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan.	1. Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan 2. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 3. Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat 4. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 5. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah 6. Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangaan Daerah
		1. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.	7. Program Penataan Administrasi Kependudukan 8. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah 9. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 10. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan 11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pada Wilayah I, II, III, IV 12. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 13. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 14. Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah

			15. Program Pengembangan Karier 16. Program Pembinaan Aparatur
2. Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Secara Elektronik		3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.	17. Program Pendataan dan Informasi Kependudukan 18. Program Pengembangan Data /Informasi Statistik Daerah 19. Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah 20. Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika 21. Program Implementasi dan Pengembangan E-Government 22. Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan
3. Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa		4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.	23. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		5. Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa.	24. Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal 25. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4. Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan 5. Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan 6. Kurangnya dukungan akomodasi/Insentif terhadap tenaga pengajar	**2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar**	6. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	26. Program Pendidikan Anak Usia Dini 27. Program Pendidikan Sekolah Dasar 28. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 29. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 30. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 31. Program Pendidikan Non Formal
7. Kurangnya minat baca masyarakat			32. Program Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan

			33. Program Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
8. Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar 9. Kurangnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan		7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	34. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 35. Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan 36. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 37. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 38. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 39. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
10. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi pemuda 11. Belum optimalnya pengelolaan sarana-prasarana olahraga		8. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	40. Program Peran Serta Kepemudaan 41. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 42. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
12. Lemahnya Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ideologi Bangsa Dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama		9. Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	43. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 44. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan 45. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan
13. Masih tingginya tingkat kekerasan Terhadap perempuan dan anak		10. Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layak anak.	46. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan 47. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 48. Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak 49. Program Peningkatan Perlindungan Anak

14. Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri unggulan daerah	**3. Mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan sarana prasarana infrastruktur**	11. Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi.	50. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 51. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 52. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 53. Program Peningkatan Infrastruktur, Pengendalian Energi dan Sumber Daya Alam
15. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya Penunjangnya pengembangan Pertaninan, Perikanan dan Peternakan			54. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 55. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 56. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 57. Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 58. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 59. Program Pengembangan Perikanan 60. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 61. Program Peningkatan Produksi Hortikultura 62. Program Peningkatan Produksi Perkebunan 63. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan 64. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 65. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
16. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Transportasi Penunjang Publik			66. Program Pengembangan Moda dan Keselamatan / Rekayasa LLA 67. Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
17. Rendahnya Daya Dukung Dalam Pengembangan Usaha masyarakat, Koperasi dan UMKM		12. Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses	68. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 69. Program Pembinaan AnakTerlantar

	4. Meningkatkan perekonomian masyarakat berorientasi potensi unggulan daerah lingkungan hidup	sektor-sektor strategis.	70. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 71. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnnya
		13. Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi.	72. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 73. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah 74. Program Pengembangan Usaha Koperasi 75. Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri 76. Program Penumbuhan Wirausaha Baru 77. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro 78. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 79. Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar 80. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 81. Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan 82. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 83. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
18. Masih Lemahnya Tingkat Keamanan Dan Tingginya Pelanggaran Perda Dikarenakan Kurang Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan		14. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.	84. Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan 85. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 86. Program Penegakan Perda dan Perkada 87. Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 88. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegehan Tindak Kriminal
19. Rendahnya pengelolaan dan pemasaran pariwisata		15. Meningkatnya Niali Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata.	89. Program Pengembangan Nilai Budaya 90. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 91. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 92. Program Pengembangan Kemitraan

Sedangkan program penunjang pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Pengembangan Nilai Budaya
8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
10. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan
12. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
13. Program Pembinaan Konstruksi
14. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman
15. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan
16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
17. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
19. Program Pengendalian Banjir
20. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
21. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
22. Program Pengembangan Perumahan
23. Program Perencanaan, Penataan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman
24. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
25. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
26. Program Tanggap Darurat
27. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
28. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
29. Program Pendidikan Politik Masyarakat
30. Program Pelayanandan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
31. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
32. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
33. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

34. Program Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
35. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
36. Program Penguatan Kelembagaan PUG
37. Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak
38. Program Keluarga Berencana
39. Program Pelayanan Kontrasepsi
40. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
41. Program Pengendalian Penduduk
42. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
43. Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
44. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
45. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
46. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
47. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
48. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
49. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
50. Program Pengawasan Penaatan Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup
51. Program Peningkatan Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
52. Program Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
53. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
54. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
55. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
56. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan
57. Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
58. Program Pengamanan Informasi Daerah
59. Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
60. Program Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri
61. Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan
62. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
63. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
64. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
65. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
66. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
67. Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
68. Program Pengelolaan dan Layanaan Arsip

69. Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
70. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
71. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
72. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
73. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
74. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum
75. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
76. Program Penyelenggaraan Keprotokolan dan Komunikasi Publik
77. Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
78. Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah
79. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
80. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
81. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
82. Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
83. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
84. Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan
85. Program Ekstensifikasi Pajak Daerah
86. Program Intensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah
87. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
88. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
89. Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
90. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur.

4.3.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2019

Pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pememrintah Kabupaten. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Sinkronisasi prioritas pembangunan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Sinkronisasi Tema Dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Dan Daerah Tahun 2019

Nasional	Daerah	Provinsi
Tema : Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas	Tema : Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah	Tema : Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah Melalui Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Antar Wilayah
Prioritas Pembangunan:		
Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penguasaan IPTEK	Peningkataan kualitas reformasi birokrasi
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehataan yang berkualitas
Pengurangan kesenjangan antar wilayh melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan sarana prasarana infrastruktur	Pemerataan infrastruktur wilayah
Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif	Meningkatkan perekonomian masyarakat berorientasi potensi unggulan daerah Lingkungan hidup	Peningkataan kualitas perencanaan tata ruang
Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air		Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan

		Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai
		Stabilitas Ekonomi daerah
		Peningkatan pendapatan msyarakat
		Pengelolaan industri pariwisata
		Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Berdasarkan prioritas pembangunan yang dijabarkan pada 33 urusan yang terdiri atas :

a). 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar, yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

b). 18 (delapan belas) urusana wajib non pelayanan dasar, yaitu:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi Usaha Kecil Menengah
12. Penanaman Modal Daerah
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

c). 8 (delapan) Urusan pemerintah pilihan, yaitu :

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;

3. Pertanian;
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumberdaya Mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian
8. Transmigrasian.

d). 5 (lima) fungsi penunjang urusan, yaitu :

1. Perencana
2. Keuangan
3. Kepegawaian serta Diklat
4. Litbang

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019. Rincian Program dan Rincian Rencana Kerja setiap PD tahun anggaran 2019 terlampir.

Tabel. 5.1.
Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung PD Tahun 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)	KET
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90.312.913.836	
2.	Dinas Kesehatan	96.652.709.000	
3.	RSUD Sultan Imanuddin	173.950.214.768	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	269.121.205.309	
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.156.821.000	
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.965.601.097	
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.878.645.739	
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.632.000.000	
9.	Dinas Sosial	2.321.675.789	
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.970.805.818	
11.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	5.215.905.000	
12.	Dinas Ketahanan Pangan	2.145.853.000	

No.	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)	KET
13.	Dinas Lingkungan Hidup	14.794.545.836	
14.	Dinas Kependudukan dan Capil	2.383.479.813	
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.605.030.423	
16.	Dinas Perhubungan	10.168.228.277	
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7.378.378.000	
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.647.762.387	
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.863.006.088	
20.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.000.000.000	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.072.168.330	
22.	Dinas Perikanan	10.106.953.499	
23.	Dinas Pariwisata	10.214.528.680	
24.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	14.607.864.030	
25.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.634.116.272	
26.	Sekretariat Daerah	41.314.227.201	
27.	Sekretariat DPRD	9.109.865.167	
28.	Inspektorat	3.863.783.290	
29.	Kecamatan Arut Selatan	3.150.708.000	
30.	Kecamatan Arut Utara	1.041.880.000	
31.	Kecamatan Kumai	1.777.641.000	
32.	Kecamatan Kotawaringin Lama	1.924.795.166	
33.	Kecamatan Pangkalan Lada	1.012.736.711	
34.	Kecamatan Pangkalan Banteng	1.184.751.461	
35.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.061.816.998	
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.843.075.051	
37.	Badan Pendapatan Daerah	5.319.807.214	
38.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	5.094.500.750	
	JUMLAH	**858.000.000.000**	

BAB VI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indicator kinerja daerah bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah , yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indicator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) maupun indicator sasaran *(impact).* Suatu indicator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indicator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Kotawaringin Barat diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya. Dengan demikian, indicator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indicator kinerja daerah dalam bentu penetapan indicator kinerja program Pembangunan daerah sebagai indicator kinerja utama (*key performance indicator*).

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana table berikut:

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022

	Indikator	Satuan	Target tahunke					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	*Indeks Good Governance*	Skala	NA	6,04	6,14	6,2	6,24	6,28
2	Indeks Pembangunan Manusia	%	71.58	72,03	72,48	72,93	73,38	73,83
3	PertumbuhanEkonomi	%	NA	7,48	7,53	7,58	7.63	7,68
4	IndeksKualitasLingkunganHidup	skala	NA	57,33	60,00	62,67	65,33	68,00
5	Indeks Pembangunan Masyarakat	skala	NA	6,12	6,2	6,4	6,8	7,1
6	AngkaKemiskinan	%	NA	4,50	4,30	4,10	3,90	3,50
7	*Tourism Intencity Index*	NA	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat

6.2 Indikator Sasaran

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan KabupatenKotawaringin BaratTahun 2017 – 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	***Indeks Good Governance***									
1	Opini atas audit BPK	Skor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten	Skor	C	CC	B	A	A	A	A	A
3	Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	Skor	NA	85	87	90	95	96	99	99
4	Maturitas SPIP	Level	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	IndeksProfesionalitas ASN	NA	NA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
6	Persentase Desa yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang benar dan tepat waktu	%	NA	65	70	80	85	90	90	90
7	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E Goverment	%	NA	40	50	60	75	80	85	85

	Indeks Pembangunan Manusia									
1	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,05	8,24	8,43	8,63	8,82	9,01	9,20	9,20
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,21	70,40	70,59	70,79	70,98	71,17	71,36	71,36
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,61	12,80	13,00	13,19	13,38	13,57	13,57
4	Prosentase lembaga layanan kesehatan yang terakreditasi	%	NA	NA	50	60	70	80	90	90
5	Persentase Peningkatan Peraihan Prestasi Pemuda	%	NA	20	25	30	30	40	60	60
6	Indeks Minat Baca	Indeks	NA	NA	10%	20%	30%	40%	60%	60%
	Pertumbuhan Ekonomi									
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	-2,22	N/A	5	10	15	20	25	25
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	18,33	N/A	5	8	11	14	20	20
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-23,30	N/A	10	12	13	15	15	15
4	Indeks Williamson	Indeks	N/A	N/A	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5	Skor Pola Pangan Harapan	%	84,95	N/A	92,9	93,1	93,4	93,8	94,2	94,2
6	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	N/A	N/A	5,5	6,5	7,5	9,5	10	10
7	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	N/A	N/A	13,00	34,00	56,00	78,00	100	100

8	Persentase Peretumbuhan nilai PMA dan PMDN	%	N/A	N/A	8	12	16	20	24	24
9	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	Rasio	N/A	14,21	11,81	11,86	11,91	11,96	12	12
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	N/A	50%	53%	56%	59%	62%	65%	65%
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	N/A	N/A	60%	63%	66%	69%	72%	72%
3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Indeks	N/A	56,83%	59%	61%	63%	65%	67%	67%
4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	N/A	115	108	101	94	87	80	80
	Indeks Pembangunan Masyarakat									
1	Indeks Toleransi (Kohesi Sosial)	%	N/A	0,65	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,76
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	NA	92,69	94,01	95,33	96,65	97,98	99,30	99,30
3	Kategori Kabupaten Layak Anak		NA	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya
4	Persentase Desa Mandiri	%	NA	NA	5	5	6	6	12	12
	Angka Kemiskinan									
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Terhadap tahun Sebelumnya	%	NA	10	10	15	18	20	23	23

2	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	%	20	18,50	17,00	15,50	14,00	12,50	10,00	10,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.15	3,04	2,93	2,82	2,71	2,61	2,50	2,50
	Tourism Intencity Index									
1	Persentase Destinasi Wisata Khas lokal	%	NA	70	75	78	80	83	85	85
2	Persentase Jenis Produk kepariwisataan Khas Lokal	%	NA	20	20	20	20	20	20	20
3	Persentase Kunjungan Wisman dan Wisnus	%	20,11	20	20	25	30	35	40	40
4	Presentase kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	%	NA	10	15	15	20	25	30	30

BAB VII
PENUTUP

RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Subtansi RKPD ini merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan stakeholder, baik ditingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi dan Nasional dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang faktual dihadapi.

Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini, dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar :

1. Komitemen seluruh SKPD untuk memanfaatkan Sisrenbangda yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, guna menunjang akuntabilitas perencanaan daerah.
2. Melaksanakan program terpadu antar sektor dan pelaksanaan kegiatan secara disiplin untuk menghasilkan sasaran yang direncanakan.
3. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya ditingkat SKPD untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja serta kemanfaatannya bagi masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, sehingga program dan kegiatan konsisten secara vertikal dan horizontal.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

KOTAWARINGIN BARAT
MARUNTING BATU AJI